



NALAR KERUKUNAN

Merawat Keragaman Bangsa
Mengawal NKRI



**TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag.
Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.**

NALAR KERUKUNAN
Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI
Edisi Pertama
Copyright © 2018

ISBN 978-602-422-332-8
15 x 23 cm
xviii, 272 hlm
Cetakan ke-1, September 2018

Kencana. 2018.0968

Penulis

TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag.
Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag
Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

NALAR KERUKUNAN

MERAWAT KERAGAMAN BANGSA MENGAWAL NKRI

Penerbit :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan Pencipta alam semesta beserta isinya, atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga pelaksanaan revisi buku yang berjudul “*Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*” yang semula berjudul ‘*Agama Dialogis; Misi Profetik Mencegah Konflik*’ dapat terlaksana dengan baik. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada pimpinan umat sejagat Nabi Muhammad Saw. *rahmatan lil ‘alamin* yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa agama sebagai sebuah jalan menuju Tuhan ternyata bukan saja menyediakan ruang *privacy* bagi teraktualisasikannya potensi spiritual manusia, namun ia juga ditantang untuk berdialog dengan kecerdasan dari hati ke hati melestarikan kerukunan. Watak dialogis profetik melestarikan kerukunan itulah yang kemudian disebut sebagai *Nalar Kerukunan*, salah satu hal yang kelak mengilhami manusia untuk membangun budaya damai dalam kemajemukan.

Untuk kepentingan buku ini, penulis melakukan sedikit modifikasi penyesuaian dengan persoalan keagamaan terkini dan menambahkan sub bahasan dari setiap bab yang dianggap relevan. Hemat penulis, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa STAIN, IAIN dan UIN Se-Indonesia, khususnya jurusan atau prodi Studi Agama-Agama, serta para cendekiawan lintas agama menambah khazanah mengembangkan wawasan keagamaan dalam upaya membangun solidaritas antarumat beragama. Penulis menyadari bahwa buku yang berada di tangan pembaca belumlah sempurna, di dalamnya ada kelemahan, di samping mungkin juga ada segi-segi kekuatannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih dijumpai kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaannya. Semoga buku ini memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membangun masa depan kerukunan umat beragama yang lebih kondusif, kreatif dan produktif . Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Āmīn yâ Rabb al-‘Alamīn.

Medan, Pebruari 2018
Saidurrahman
Arifinsyah

SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Kerukunan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja “*taken for granted*” namun harus melalui usaha dan perjuangan yang panjang secara kontiniu untuk memelihara dan memantapkannya. Di sinilah pentingnya *dialog profetik* dan *Nalar Kerukunan* yang menyerukan kepada semua umat manusia untuk hidup harmoni dan penuh rasa kemanusiaan, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan manusia (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, dan kebudayaan. Karena umat manusia tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Karena itu diperlukan dialogis dari hati ke hati yang tidak hanya semata percakapan atau pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, tetapi suatu kesadaran yang menggaris bawahi pentingnya umat beragama untuk tidak larut dalam pengalaman keagamaan yang sifatnya personal dan hilang dalam kefanaan, namun pengalaman mistik perjumpaan dengan Tuhan itu diteruskan ke bumi untuk melakukan perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi dan intelektual umat manusia menuju perdamaian dan kemakmuran bersama.

Dalam buku ini, menekankan bahwa misi profetik adalah membangun Nalar kerukunan, persatuan, kemanusiaan dan perdamaian sebagai upaya mencegah konflik. Sejak awal, menurutnya Islam telah mendeklarasikan konsep persaudaraan manusia, membawa misi *rahmatan lil ‘alamin*, membatalkan segala bentuk diskriminasi. Artinya, Islam mendeklarasikan kesatuan jenis dan nasab manusia, bahwa semua manusia berasal dari Adam, dan semua manusia berasal dari tanah. Islam mengajarkan bahwa Allah swt menciptakan manusia secara berbeda bukan untuk saling berselisih, tetapi untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain (QS. Al-Hujarat: 13). Islam tidak mengenal diskriminasi jenis kelamin, suku, ras dan bangsa, karena kelebihan manusia atas manusia lainnya hanya dilihat dari kualitas ketaatan kepada Sang Pencipta dan tingkat kemanfaatan terhadap orang lain.

Dari aspek risalah profetik, Penulis mengungkap pesan suci agama-agama sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dan menghindari konflik dengan cara mewajibkan setiap umat beragama mengamalkan perintah Nabi sebagai pembawa ajaran yang humanis, dan menghargai risalah para Nabi terdahulu. Islam misalnya, melegalkan hubungan muamalat antarumat beragama bila hubungan tersebut didasari kemaslahatan dan kebaikan umat manusia (QS. Al-Mumtahanah: 8-9), dan mengajarkan urgensi dialog antarumat beragama dengan cara baik dan beretika untuk tujuan kemajuan masa depan bersama. (Q.S. Al-Ankabut :46).

Buku ini sangat cocok dibaca oleh komunitas beragama di Indonesia yang memang bersifat majemuk, khususnya mahasiswa Program Studi Agama-Agama di

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam se Indonesia. Ia juga bisa dijadikan sebagai model studi kerukunan agama di puncak etika global di Indonesia. Jika studi semacam ini bisa dikembangkan, bukan tidak mungkin ini merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama, sehingga toleransi yang ada bukan sekadar artifisial dan basa basi, tetapi lebih hakiki dan substansi menyentuh nilai-nilai dasar ajaran agama mencegah konflik.

Kami sebagai menteri agama, mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memperkaya khazanah keilmuan Perbandingan Agama dan Studi Keagamaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas kerukunan dan mengembangkan mutu akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa dan sebagai amal *jariyah* bagi penulisnya.
Wassalam

Medan, 20 Mei 2018

Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama RI

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan waw	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ـَـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Sambutan Rektor UIN Sumut.....

Pedoman Transliterasi.....

Daftar Isi.....

Daftar Singkatan.....

BAB I : PENDAHULUAN,.....

BAB II : AGAMA DAN NALAR KERUKUNAN

- A. Makna Agama Bagi Manusia,.....
- B. Pengertian dan Batasan Kerukunan....
- C. Merawat Keragaman melestarikan Kerukunan.....
- D. Potensi Kerukunan Antarumat Beragama....
- E. Muatan Pendukung Kerukunan....
- F. Hambatan Melestarikan Kerukunan.....
- G. Historisitas Regulasi Perlindungan Umat Beragama,

BAB III : NALAR KERUKUNAN PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA

- A. Nalar Kerukunan *Misi Profetik*.....
- B. Dialog Nalar Kerukunan Beragama...
- C. Hindu dan Nalar Kerukunan Tanpa kekerasan.....
- D. Buddha dan Nalar Kerukunan Humanis....
- E. Islam dan Nalar *Rahmatan lil 'alamin*.....
- F. Kristen-Katolik dan Nalar Penyelamatan....
- G. Konghucu dan Nalar Spiritual.....

BAB IV : NALAR KERUKUNAN MENCEGAH KONFLIK

- A. *Wasathiyah* dan Nalar Kerukunan
- B. Urgensi Dialog Moderasi....
- C. Solidarity dan Nalar Kerukunan,.....
- D. Keragaman; Anugerah Bukan Bencana,
- E. Qurban dan Nalar Abrahamic Religions.....
- F. Potensi Konflik Berbasis Rumah Ibadah...
- G. Pilar Kerukunan dan Resolusi Konflik,

BAB V : AGAMA DIALOGIS MEMBANGUN NALAR KERUKUNAN

- A. Dialog dan Polemik Pluralisme Agama,
- B. Sinkritisme Agama Dalam Sorotan,

- C. Respon Agama Terhadap Modernitas,.....
- D. Stigma Mayoritas dan Minoritas....
- E. Nalar Kerukunan di Puncak Etika Global.....

BAB VI : MERAWAT KERAGAMAN MENGAWAL NKRI

- A. Nalar Profetik dan *Ahlul Kitab*,.....
- B. Nalar Kerukunan Nabi Saw dengan Non Muslim
- C. Pancasila Pemersatu Multireligions,....
- D. Konflik Agraria Perlu Moderasi, ...
- E. Deradikalisasi dan Nalar Kerukunan,
- F. Nalar Kerukunan Perspektif Sufi.....
- G. Nalar Kerukunan dan Ekonomi Agama-Agama,....
- H. Relasi Agama dan Politik.....
- I. Arah Baru Nalar Kerukunan Mengawal NKRI.....

Lampiran

Glossarium,....

DAFTAR KEPUSTAKAAN,....

DAFTAR SINGKATAN

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Dewan Gereja Indonesia (DGI)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Festival Internasional Pemuda dan Olah Raga Bahari (FIPOB)
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA)
Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)
Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA)
Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
Hadis Riwayat (HR)
Qur'an Surah (QS)
Huria Kristen Batak Protestan Angkola (HKBPA)
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Keluarga Muslim Karo (KAMKA)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Konferensi Wali-Wali Gereja Indonesia (KWI)
Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB)
Lembaga Perempuan Peduli Kerukunan Umat Beragama (LPPKUB)
Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (KAWI)

Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Marsipature Hutana Be (MHB)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Peraturan Bersama Menteri (PBM)
Perjanjian Baru (PB)
Perjanjian Lama (PL)
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI)
Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI)
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Sekolah Tinggi Theologia Huria Kristen Batak Protestan (STT-HKBP)
Suku, Agama, Ras dan Atargolongan (SARA)
Surat Keputusan Bersama (SKB)
Taman Wisata Iman (TWI)
Undang-Undang Dasar (UUD)

BAB I

PENDAHULUAN

Di era global saat ini, manusia sebagai makhluk beragama berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seakan "*homo homini lupus*" (manusia srigala bagi manusia lain). Belakangan ini secara transparan dipertontankan di hadapan kita, disana sini terjadi anarkisme, pembakaran rumah ibadah, mengusir dan membunuh orang yang beribadah, teroris dan peledakan bom yang menewaskan banyak orang, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, rasisme, penembakan imam dan pemuka agama, pelarangan berhijab, pelarangan berpuasa dan lain sebagainya, sehingga manusia beragama haus dan dahaga terhadap perdamaian dunia. Mereka sudah cukup lama membosani hubungan persengketaan dalam beragama.

Padahal tidak ada suatu tatanan dunia yang sukses jika tidak dilengkapi dengan dialog etika global. Etika global yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak lain adalah kemanusiaan universal, dalam istilah Islam disebut dengan *rahmatan lil alamin*. Artinya tidak ada perdamaian antarnegara tanpa adanya kerukunan antaragama, sudah barang tentu kerukunan yang bernapaskan nilai-nilai misi profetik. Sebab, harkat dan martabat manusia kontemporer sejatinya bukan diukur dan dinilai dari keberhasilan rampas merampas kebebasan dan saling berebut dominasi satu sama lain, melainkan terletak pada dan ditentukan oleh kemampuan umat beragama, bersama-sama secara jujur membina hubungan harmonis lintas keyakinan, membangun budaya damai dalam keragaman.

Sepanjang sejarah umat manusia, agama memiliki dua kutub menyangkut perdamaian dan kebrutalan. Di satu sisi, agama menjadi kontributor utama perang, pertumpahan darah, kebencian dan intoleransi. Tapi, di sisi lain, ia juga mengembangkan hukum dan gagasan yang telah menyediakan peradaban dengan komitmen kultural pada nilai-nilai kedamaian yang agung, meliputi empati, keterbukaan, dan kecintaan, pemihakan pada kaum tertindas, dan keadilan sosial. Paradigma humanis itu muncul apabila manusia menyadari bahwa dunia ini adalah rumah besar seluruh umat beragama untuk dijaga keseimbangannya dan memanfaatkan isinya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan masa depan bersama melalui dialog produktif.

Dialog antarumat beragama telah menjadi salah satu isu sentral di tengah masyarakat modern. Sebab saat ini semakin sedikit ditemukan komunitas yang homogen. Pada umumnya masyarakat bersifat heterogen. Jika dahulu masih dimungkinkan di pedesaan ditemukan masyarakat yang monokultural, maka sekarang urbanisasi telah mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah yang majemuk. Persoalan-persoalan yang ada saat ini, muncul dan berkembang dalam bentuk yang tak

pernah terjadi sebelumnya.¹ Untuk itu, upaya pencarian solusi melalui dialog merupakan suatu kemestian yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Karena jalan panjang sejarah kebudayaan manusia, senantiasa menyimpan bibit konflik yang satu saat akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.²

Sejarah mencatat, bahwa pada pertengahan abad ke-20 M, tepatnya pasca kemerdekaan Indonesia, dialog antarumat beragama mulai menjadi salah satu pokok perhatian yang penting bagi para tokoh agama di tanah air. Sebelumnya memang sudah ada, mungkin baru bersifat *dialogue of life* atau dialog hidup bersama. Melihat perkembangannya, dapat dikatakan sampai akhir abad 20 M, umat beragama di Indonesia masih menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, intoleransi dan bahkan bermusuhan. Artinya, sampai sekarang antarumat beragama di mana-mana masih menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, baik yang disebabkan oleh agama-agama itu sendiri maupun yang terjadi karena faktor di luar agama, seperti faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi salah satu agenda kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan proses dan tidak sedikit hambatan, salah satunya adalah melalui pembinaan kerukunan antarumat beragama, terutama di era globalisasi.³ Persoalan ini semakin krusial karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun hidup bersama antarumat. Demikian pula kebanggaan terhadap kerukunan dirasakan selama bertahun-tahun mengalami *degradasi*, bahkan menimbulkan kecemasan terhadap terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk itu diperlukan dialog yang diharapkan mampu menciptakan keharmonisan hidup beragama, sebagai modal dasar membangun peradaban yang berbasis etika agama.

¹ Dialog dilakukan sebagai upaya diagnosa dan sekaligus terapi terhadap problem sosial, dan merupakan sebuah langkah membina umat beragama untuk mampu menghargai pendapat yang berbeda, melakukan mediasi dan kompromi menyelesaikan masalah kemanusiaan. Dialog merupakan komitmen kerjasama dalam menata kehidupan bersama. Kerjasama itu tidak didasarkan atas tujuan politis, dan taktis, akan tetapi merupakan kerjasama fundamental dan praksis, menuju cita-cita keharmonisan dan perdamaian di masa depan. Baca; Moch. Qasim Mathar, (ed), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2005), h. 264-265.

² Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 22-28. Baca; Ismail Raji al-Faruqi, *Triologue of The Abrahamic Faith* (Maryland USA : Amana Publications Beltsville, 1995), h. ix-xi.

³ Di era ini semua kelompok keagamaan dan peradaban saling bersentuhan secara intens dalam sebuah desa global. Baca; John Naisbitt dan Aburdene, *The New Direction for 1990's; Megatrend 2000*, (Megatrend Ltd, 1990), bab IX. M. Wahyuni Nafis (Ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 45-47.

Selama ini, dialog antarumat beragama telah diselenggarakan di berbagai tingkat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sesuai dengan bentuk persoalan yang dihadapi. Dialog tersebut juga dilakukan di semua bidang; politik, ekonomi, sosial, keagamaan dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dialog telah menjadi sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan antarumat beragama dan menciptakan kerukunan. Kerukunan antarumat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anatomi problematika dunia kontemporer. Bahkan dalam banyak kesempatan, persoalan keagamaan dianggap sebagai persoalan paling krusial di antara persoalan-persoalan yang ada.

Atas dasar itu, sejumlah dialog dengan berbagai tema terus digagas dan dikembangkan. Umat beragama pun dilibatkan secara aktif untuk memberikan solusi. Misalnya pada tahun 1993 diadakan *World Parliament of Religions* di Chicago Amerika Serikat dengan tujuan mempersatukan umat beragama dalam rangka melawan kehidupan yang ateistis. Kemudian secara bersama-sama melakukan kebajikan bagi perbaikan hidup umat manusia,⁴ serta melawan kekerasan yang terus menerus menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu.

Kegiatan-kegiatan dialog di atas menunjukkan bahwa saat ini semakin dirasakan betapa dialog antarumat beragama termasuk bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bersama antarumat. Para penulis pun relatif sepakat bahwa agama merupakan elemen paling penting dalam pembentukan setiap peradaban, terutama jika dibanding dengan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Karena itu, agaknya mustahil untuk memisahkan wacana dialog antarumat beragama dari bentuk-bentuk dialog yang lain. Karena kenyataannya, kesatuan dan kedamaian umat menjadi sendi penting dari kemajuan masyarakat. Sesungguhnya realisasi perdamaian di dunia bergantung pada terwujudnya perdamaian antarumat beragama. Perdamaian antarumat beragama tidak akan pernah terwujud kecuali dengan menyelenggarakan dialog antara agama-agama tersebut.⁵

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam dialog adalah keterbukaan dan kejujuran dari masing-masing pihak yang terlibat. Dengan kata lain, harus ada kebersamaan yang sebenar-benarnya antara kedua pihak dalam membahas setiap aspek yang berkaitan dengan dialog tersebut. Selain itu, sebuah dialog juga membutuhkan

⁴ Konferensi tersebut mencari landasan bersama yang di atasnya semua budaya dunia saling bertemu dan saling menghormati, serta dapat hidup dalam keanekaan agama secara global tanpa kehilangan identitas mereka masing-masing. Lihat, Syahrin Harahap, *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), h. 281. Baca; Victor I.Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial, Diskursus Teologi Tentang Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1998), h. 27.

⁵ Hans Kung, *Eternal Life, Life After Death as a Medical, Philosophical, and Theological Problem* (New York: t.p. 1984), h. 229. Baca; Hasan Hanafi, *Religious Dialogue and Revolution* (Kairo: Anglo Egyptian Bookshop, 1987), h. 27.

pembatasan tema, sehingga dialog yang diselenggarakan terfokus pada inti masalah. Selanjutnya, disepakati pula tujuan dialog agar bisa dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak, sehingga dialog tersebut terarah dan mencapai sesuatu yang berarti.

Rasulullah saw. pernah mengadakan dialog dengan utusan Bani Najran yang beragama Kristen di masjid Nabawi Madinah. Rombongan ini dipimpin oleh Uskup Abu Haris bin Alqamah. Mereka masuk masjid di mana Nabi Saw berada, dan pada waktu itu Nabi Saw bersama sahabat hendak menjalankan Shalat Ashar. Karenanya, mereka lalu bermaksud melakukan kebaktian di masjid dengan menghadap ke arah timur. Melihat kejadian itu para Sahabat bermaksud melarangnya, namun Nabi Saw justru minta agar mereka dibiarkan melakukan kebaktian. Setelah rombongan Nasrani menyelesaikan kebaktiannya, kemudian mereka berdiskusi dengan Nabi Saw tentang masalah-masalah keimanan. Selanjutnya mereka pulang ke Najran, dan tidak ada satu pun dari mereka yang masuk Islam.⁶ Seperti apa yang dikatakan oleh M. Amin Abdullah;

Masyarakat yang bersifat pluralistik, sebenarnya tidak hanya ciri khas masyarakat industri modern. Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagamaan Islam era kenabian Muhammad Saw, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk dan sudah pula menjadi kesadaran umum pada saat itu. Keadaan demikian, sudah sewajarnya lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah terlebih dahulu didahului oleh berkembangnya agama Hindu, Budha, Kristen Katolik, Majusi, Zoroaster, Mesir Kuno maupun agama-agama lain. Untuk itu, dialog antar iman termasuk tema sentral yang mewarnai Alquran.⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam konteks dialog antarumat beragama Islam memiliki satu kelebihan, yaitu pengakuan Islam akan kebenaran agama-agama samawi yang telah diturunkan sebelumnya. Pengakuan semacam ini, secara eksplisit, membuat Islam terbebas dari sentimen dan subjektifitas yang acapkali terbukti menodai kemurnian sebuah dialog.

Di sinilah Marcel A. Boisard⁸ memandang dialog antarumat beragama, merupakan prinsip dialog global yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu segi metafisika, agama, sosiologi dan politik.⁹ Artinya, secara garis besar dialog antarumat beragama yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berkenaan dengan misi para nabi (dialog profetis), yaitu misi kemanusiaan. Kehadiran Islam sebagai agama rahmat bagi

⁶ Ali Mustafa Yakub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Fridaus, 1999), hl. 36-37.

⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 72.

⁸ Ia pernah tinggal selama 12 tahun di negara-negara Arab sebagai wakil Komite Internasional Palang Merah di Aljazair, Yaman, Saudi Arabia, Syiria, dan Mesir. Ia pernah menjadi wakil Direktur program pendidikan para diplomat pada Institute de Hautes Etude Internationales di Genewa, dan Sekretaris Jenderal perhimpunan Kebudayaan Internasional "Islam and the West". Lihat, M. Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), bagian sampul belakang.

⁹ *Ibid.*, h. 183.

semua alam, memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan, tolong menolong, menciptakan perdamaian, kebebasan beragama tanpa paksaan. Sebagaimana firman Allah Swt :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:256).

Menurut Abdullah Yusuf Ali, bahwa pemaksaan bertentangan dengan agama, sebab agama tergantung kepada iman dan kemauan, dan semua ini takkan ada artinya bila didesak dengan jalan kekerasan. Orang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tak beriman. Terutama sekali dari semua itu harus menahan diri dari godaan melakukan kekerasan. Seseorang tidak boleh memaksakan imannya kepada orang lain dengan paksaan fisik, atau dengan paksaan lain, seperti tekanan sosial, membujuk dengan harta dan kedudukan, atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukanlah iman. Mereka harus berkebebasan memilih keyakinannya sendiri dan biarlah Tuhan yang menentukan kehendaknya.¹⁰

Selain agama Islam, Kristen juga mengajak manusia untuk melepaskan diri dari beban ketakutan, terutama terhadap kematian, beban rasa bersalah, dan beban kungkungan egoisme. Dari pembebasan ini manusia diharapkan menuju suatu hidup yang sama sekali baru. Dalam agama Kristen, satu-satunya kekuatan yang dapat membebaskan manusia dan mampu menimbulkan perubahan kehidupan sebagaimana yang diingatkan adalah cinta.¹¹ Dengan demikian, menyebarkan kasih dan nilai-nilai sejenis menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai penganut Kristen.

Pesan yang dapat dipahami dari paparan tersebut terletak pada sikap dan ajaran kedua agama besar ini yang sangat positif tentang kehidupan sebagai proses pembebasan manusia dari kesengsaraan dan sejenisnya. Pada prinsipnya, hal semacam itu merupakan ajaran hampir semua agama yang hidup dan berkembang di dunia. Konkritnya, semua agama mengajarkan tentang kebajikan, keadilan, dan pertanggungjawaban semua amal perbuatan manusia di hadapan Sang Pencipta.

Kehidupan sejahtera dan damai dalam keragaman belum dapat diwujudkan secara nyata di tengah kehidupan umat beragama. Pada awal millenium ketiga sekarang ini, kekerasan tetap mewarnai kehidupan umat manusia, dan sampai derajat tertentu menunjukkan tingkat eskalasi yang mengerikan. Dalam skala internasional,

¹⁰ Lihat; Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran : Text, Translation and Commentary* (USA: Amana Corporation, 1989), h. 106, komentar 300. Baca, *Ibid.*, h. 510, komentar 1480.

¹¹ Baca; Huston Smith, *The Religions of Man*, (New York : Harper-Publishers, 1989), h. 428-429.

terorisme menjadi monster yang mengintai mangsanya setiap saat. Pada tingkat nasional, kerusuhan dan kekerasan dalam bentuk yang beragam terus mewarnai kehidupan bangsa.¹² Demikian juga di berbagai daerah di tanah air, dan tidak menutup kemungkinan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi barometer nasional tentang kerukunan dan masyarakatnya yang cukup kondusif akan terusik.

Suatu kenyataan di Indonesia, sungguhpun terdapat perbedaan dalam angka nominasi jumlah penganut agama,¹³ namun keragaman agama dan perbedaan etnis itu tidaklah menjadi permasalahan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, apabila dilihat dari pendekatan sosiologis, bahwa unsur perbedaan dalam relasi sosial itu seperti agama, suku, budaya berkembang menurut jati dirinya menuju pada suatu titik yang sama yaitu kesatuan rasa kebersamaan dan kedamaian.

Heterogenitas masyarakat Indonesia membawa berbagai implikasi terhadap harmonitas dan kerukunan antarumat beragama. Di satu sisi kemajemukan itu menjadi perekat dan membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain akan menimbulkan kesenjangan dan sumber pemicu ketegangan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik. Di daerah ini keragaman agama dan etnis cukup variatif, semua agama yang ada di Indonesia terdapat di Sumatera Utara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu serta kepercayaan lokal.¹⁴ Demikian juga dari aspek etnis suku bangsa, di Sumatera Utara ada etnis Pakpak, Melayu, Batak Angkola dan Mandailing, Batak Toba, Simalungun, Nias, Karo, dan Etnis Pesisir. Masing-masing etnis tersebut mempunyai nilai kekerabatan tersendiri. Dalam masyarakat Batak terdapat satu sistem kekerabatan yang disebut dengan istilah

¹² Kerusuhan dan kekerasan tersebut antara lain; tragedi Ambon, konflik di Poso, ledakan bom pada malam Natal di Sukabumi, Mojokerto, Bandung, Batam dan Lombok pada tahun 2000. Kemudian kerusuhan juga terjadi di Sampit Kalimantan Tengah tahun 2001, yaitu konflik antara suku Dayak dan Melayu versus Madura. Selain itu, peristiwa 11 September 2001, yang kemudian disebut 'Selasa Hitam', suatu peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia, yang mana Gedung WTC dan Pantagon di Amerika Serikat runtuh setelah ditabrak oleh dua pesawat komersial, membawa dampak terhadap hubungan umat beragama di Indonesia. Kemudian peristiwa bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dan tanggal 15 Juli 2009 terjadi lagi bom meledak di Hotel JW. Marriot dan Rizs Calton Mega Kuningan Jakarta yang menelan korban tewas 9 orang dan puluhan luka-luka.

¹³ Komposisi umat beragama berdasarkan asumsi rata-rata 1,5 % per tahun, Propinsi Sumatera Utara tahun 2008, maka umat beragama Islam 65,45 %, Kristen 26,62 %, Katolik 4,78 %, Budha 2,82 %, Hindu 0,18 %, dan lain-lain 0,14 %. Sumber data; Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009.

¹⁴ Manusia semuanya dari satu Bapak yaitu Adam dan lahir dari satu rahim ibu yaitu Hawa. Dari rahim itulah kita semua dan tidak ada bedanya, apapun suku dan agamanya. Jadi, pada prinsipnya di antara kita ini tidak ada perbedaan, walaupun keyakinan kita berbeda, sesuai keinginan batinnya masing-masing. Tujuan kita mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Disampaikan oleh Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Abdullahsyah, MA dalam acara *Silaturrehmi Kodam I/BB dengan Tokoh-Tokoh Agama dan FKUB Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan*, tanggal 24 Nopember 2009 di Balai Prajurit Kodam I./BB Medan.

Dalihan Natolu,¹⁵ dan dalam masyarakat Karo disebut dengan istilah *Delihen Sitelu*,¹⁶ dan sebagainya.

Jika umat beragama mengambil makna positif dari kekuatan kreatif (*creative power*) keragaman budaya dan agama tersebut untuk mengurangi potensi kekuatan destruktif, maka hal itu menjadi konstruktif. Artinya, Umat beragama harus bersatu tanpa memandang iman, ideologi atau kebudayaan dalam menghadapi ancaman hidup masa depan bersama, yaitu ketidakadilan, kekuasaan semena-mena, kemiskinan dan kerusakan ekosistem global. Dengan partisipasi aktif dalam dialog antara penganut berbagai keimanan dapat saling belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Melalui dialog, umat beragama dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan simpatik dalam kerjasama kreatif di antara berbagai agama, sambil mengakui dan menerima perbedaan sebagai realitas kesejarahan anak manusia.¹⁷

Mengawali abad ke-21 merupakan saat yang tepat untuk membangun kekuatan bersama melalui dialog, karena dialog dapat menyalurkan energi seseorang untuk memecahkan problem kemanusiaan bersama. Dialog perlu diperluas pada semua level di kalangan tradisi-tradisi budaya, etika dan agama serta kelompok-kelompok masyarakat untuk membawa umat manusia pada pemahaman yang lebih dalam dan kerjasama kreatif antariman. Melalui dialog, manusia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan menghargai keragaman tradisi-tradisi agama, dan bergerak lebih dekat pada perdamaian dan kesejahteraan.

Dalam perspektif Islam, sejak masa Rasulullah Saw. hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan di sana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam yang dianggap bersifat intoleran dan eksklusif. Namun, lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis, ekonomis, politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih

¹⁵ *Dalihan Natolu* yaitu tiga kaki tungku, melambangkan struktur sosial masyarakat Batak, yang terdiri dari kelompok *Dongan Sabutuha*, kelompok *Hula-hula*, dan kelompok *Boru*. Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial. Baca; Doangsa PL. Situmeang, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta: Kerabat Dian Utama, 2007), h. 205. Baca; M. Ridwan Lubis, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI, 2005), h. 3-8. Lihat, M. Ridwan Lubis. *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi* (Laporan Penelitian : IAIN Medan, 2001).

¹⁶ *Delihen Sitelu*, yaitu ikatan kekerabatan di Karo yang terdiri dari *kalimbubu* (pihak pemberi gadis), *sembuyak* (sama sepengambilan gadis), *anakberu* (pihak yang mengambil gadis). M. Ridwan Lubis, *Implementasi Kearifan Lokal Dalam Memberdayakan Kerukunan Umat Beragama* (makalah, tidak diterbitkan), yang disampaikan dalam Workshop di Medan, tanggal 18 Mei 2009.

¹⁷ Lihat; Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2003), h. 197-206. Baca; Silvester Kanisius L, *Allah dan Pluralisme Religius, Menelaah Gagasan Raimundo Panikkar*, (Jakarta: Obor, 2006), h. 97-99.

mewarnai ketidak-mesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika agamanya.¹⁸

Terlepas dari perbedaan mengenai bentuk-bentuk konkrit aplikasi nilai dan ajaran agama, nampaknya agama mempunyai misi yang sama, yaitu bertujuan untuk kebahagiaan manusia. Oleh karenanya, tiap-tiap agama meyakini bahwa tujuan substansial itu tidak mungkin berwujud secara utuh tanpa adanya kerukunan, dan kerjasama di antara semua umat manusia, terutama antarumat beragama di tengah kehidupan global. Dialog antarumat beragama dapat terjadi atas dasar saling percaya, kejujuran dan ketulusan dalam memberikan pendapat dan menerima pendapat. Dengan kata lain, dialog antarumat beragama yang permanen harus berangkat dari etos saling menghargai, pandangan humanis universal yang kemanusiaan, persamaan martabat, dan menghapuskan egoisme, serta kesepahaman untuk menerima kebenaran.¹⁹

Kendatipun demikian, di era modern pola keberagamaan masih menampilkan karakternya yang sarat nuansa formalisme dan kering dari nilai-nilai spiritual dan moralitas.²⁰ Artinya, nilai-nilai substansi agama yang bernuansa inklusif, moderat, toleran dan yang searti dengan nilai-nilai itu belum ditangkap dan diimplikasikan secara utuh. Sebaliknya, klaim kebenaran sepihak yang meniadakan keberadaan kelompok lain kian mengental pada sebagian kelompok. Sikap itu akan melahirkan penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain, maraknya kekerasan, menyebarnya kerusuhan, dan tindakan-tindakan lain yang biadab dan dehumanistik.²¹ Pada sisi lain, dialog yang terjadi di Sumatera Utara masih berjalan pada dataran retorik, serta menitikberatkan pada pola relasi subyek-obyek yang terkesan apologetik. Pola ini akan mempengaruhi relasi antar manusia dan tidak kondusif bagi penciptaan kehidupan yang sejuk.

Dalam dialog antarumat beragama, masing-masing pihak harus mencari kesamaan-kesamaan prinsip yang terdapat dalam setiap agama, dan menjauhi persoalan-persoalan yang menjebak, khususnya dalam hal akidah. Pada tahap awal, sebuah dialog tidak pernah menjamin hasil yang baik. Oleh karena itu, ia harus dikonsentrasikan pada kesepahaman dalam berbagai dimensinya.²² Pada dasarnya agama-agama samawi, mempunyai kesamaan dalam mempercayai adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, meyakini adanya kehidupan setelah berakhirnya hidup sekarang, dan mengajarkan bahwa setiap individu memperoleh ganjaran dari perbuatannya. Jika

¹⁸ Umat Islam menyambut tradisi dialog untuk menggantikan budaya konflik, baik yang dilakukan antar peradaban atau antaragama. Baca, Abdullah, *Etika dan Dialog*, h. 73.

¹⁹ Zakiyuddin Bhaidawy, *Dialog Global dan Masa Depan Agama* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2001), h. 35-37.

²⁰ Bhaidawy, *Dialog Global*, h. 39.

²¹ *Ibid.*, h. 166.

²² Smith, *The Religions*, h. 476-477.

beramal baik ia akan memperoleh ganjaran yang baik, dan jika beramal buruk ia akan memperoleh ganjaran yang buruk pula. Tidak seorang umat pun yang terlepas dari ganjaran atas perilakunya di dunia ini, baik yang sifatnya individual maupun tanggungjawab sosial membangun masa depan bersama yang lebih baik dan kondusif.

Di era global²³ umat beragama dan antar peradaban saling bersentuhan secara intens dalam sebuah desa global, persoalan keadilan dan perdamaian menjadi pengejawantahan terpenting. Lewat pemahaman agama yang benar akan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat beragama untuk menata masa depan bersama yang lebih produktif. Kesadaran global (*global consciousness*) yang dilahirkan pada tingkat horizontal tersebut telah terwujud melalui pertemuan dan dialog antarumat beragama di Sumatera Utara, walaupun belum maksimal dan memerlukan kajian mendalam dan strategis.

Dialog sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan kerukunan sudah banyak dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu. Dialog itu diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti dialog antar Pemuka Agama, Tokoh Pers, Pemuda, Cendikiawan, Pendidik, dan Dialog antara beberapa unsur terkait. Sejak program kerukunan diimplementasikan pelaksanaan dialog di atas belum dilakukan evaluasi dan studi terhadapnya. Padahal, kegiatan secara manajerial berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut. Dengan demikian dapat diperoleh masukan untuk perbaikan ke depan. Kajian ini menjadi penting diteliti sekaligus evaluasi terhadap dialog yang dilaksanakan, termasuk tema, format, dan pelakunya untuk memelihara kerukunan dan harmonitas antarumat beragama. Oleh karenanya, diperlukan pengkajian yang mendalam dan serius secara ilmiah terhadap pelaksanaan dialog antarumat, apakah dialog yang dilakukan bercorak modersi mencegah konflik atau hanya *life service*.

Dialog antarumat beragama bisa terjadi secara formal dan informal, yaitu bertukar pikiran mengenai persoalan bersama antara dua orang atau lebih yang mendasar tentang hubungan sosial antarumat beragama. Dialog formal merupakan dialog yang telah dipersiapkan oleh pelaksana, baik nara sumber, peserta, tempat maupun waktunya. Sedangkan dialog informal, adalah dialog yang terjadi secara alamiah di tengah masyarakat yang dilakukan oleh antarumat beragama. Tujuan utamanya adalah agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga ia dapat berubah dan tumbuh. Peserta dialog akan dapat mengubah prasangka, stereotip dan celaan yang selama ini disandarkan pada partner dialognya. Artinya, akan semakin

²³ Globalisasi bukan sekedar istilah baru mengenai hegemoni Barat, kendati tidak dapat dipungkiri Barat memiliki posisi yang istimewa. Era global, dunia seakan-akan menjadi semakin sempit dan menyatu, atau dunia menjadi '*global village*' (desa buwana). Sirry, *Membendung Militansi Agama*, h. 56-58. Baca; M. Wahyuni Nafis (ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 45-47.

tumbuh kesadaran kolektif, karena dialog mengantarkan setiap partisipan untuk memperoleh informasi, klarifikasi dari sumber primer dan ia dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus.

Nalar Kerukunan yang dimaksudkan oleh buku ini bukanlah untuk menghilangkan perbedaan, malahan mengajarkan dan menyadarkan pembaca akan adanya realitas perbedaan itu. Melalui Nalar Kerukunan secara dialogis dari hati ke hati diharapkan pembaca belajar dan mengerti bahwa ada perbedaan, belajar untuk memahami tradisi yang berbeda, belajar menghormati adanya perbedaan, belajar hidup dalam perbedaan, dan pada akhirnya belajar untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan demi kemajuan bersama.

Nalar Kerukunan bukan untuk membangun sebuah harmoni palsu, tetapi untuk membangun suatu kebersamaan yang dinamis dan dapat mencegah konflik. Karena itu dialog dari hati ke hati pasti bukanlah kepentingan sesaat, juga bukan untuk kepentingan sekelompok atau golongan orang. Sasaran akhir Nalar Kerukunan selalu untuk kepentingan bersama dan lebih berjangka panjang. Itulah sebabnya dialog dari hati ke hati merupakan proses yang tidak selalu mudah dan sering melelahkan. Karena memang, dialog yang diharapkan dari pertemuan antarumat beragama adalah membangun kondusifitas yang kreatif dan konstruktif demi masa depan bersama.

BAB II

AGAMA DAN NALAR KERUKUNAN

A. Makna Agama Bagi Manusia

Agama diyakini sebagai wahyu Tuhan yang menjadi pedoman manusia menjalani kehidupannya, dan suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Sedangkan tindakan manusia meyakini agama dalam bentuk apa pun merupakan realitas sejarah yang tidak dapat diragukan lagi. Oleh sebab itu, dari masa ke masa, manusia manapun tidak akan dapat melepaskan diri dari agama. Orang melihat agama yang ada di dunia ini secara menyeluruh akan mendapatkan paham dalam bentuk yang sangat rumit. Sejak dahulu hingga sekarang, bentuk-bentuk implementasi keyakinan beragama terus berkembang. Keyakinan tersebut telah menghasilkan ritual-ritual dan praktik-praktik

yang tidak terhingga jumlahnya. Ritual-ritual itu merupakan bentuk usaha manusia untuk memberikan suatu makna bagi alam dan kehidupan disekitarnya.²⁴

Agama memiliki arti penting bagi manusia agar manusia tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan di dunia. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama sendiri memiliki banyak pengertian karena agama didasarkan pada bathin dan setiap orang memiliki pengertian sendiri terhadap agama. Dasar kata agama sendiri berbeda menurut berbagai bahasa. Dalam bahasa Sansekerta agama berarti "tradisi". Kata agama juga berasal dari kata Sanskrit. Kata itu tersusun dari dua kata, a=tidak dan gam=pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya.²⁵

Selanjutnya dalam bahasa Arab dikenal kata *din'* yang dalam bahasa semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini berarti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan dan kebiasaan.²⁶ Pengertian ini juga sejalan dengan pengertian agama yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi oleh penganut agama yang bersangkutan. Adapun kata religi berasal dari bahasa latin. Menurut satu pendapat, asal kata religi adalah *relegere* yang mengandung arti mengumpulkan atau membaca. Pengertian demikian ini juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdikan pada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.

Syamsul Arifin, dalam bukunya *Studi Agama Perspektif Sosiologis dan Isu-Isu Kontemporer* mengatakan bahwa pengertian agama dibagi secara dua pengertian yaitu *Eksklusif* dan *Inklusif*. Dalam pengertian yang *Inklusif*, agama tidak hanya mencakup sistem-sistem yang teistik yang menekankan pada kepercayaan pada hal-hal yang bersifat supranatural, tetapi juga berbagai sistem kepercayaan nonteistik seperti Komunisme, Nasionalisme atau Humanism. Sedangkan dalam pengertian *Eksklusif*, agama hanya dibatasi pada sistem-sistem teistik, yakni yang memiliki seperangkat kepercayaan dan ritual. Elemen ini terorganisasi secara sosial dan diberlakukan oleh anggota-anggota suatu masyarakat atau beberapa segmen suatu masyarakat. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran pribadi bukan merupakan agama sepanjang pemikiran itu bersifat pribadi dan tidak termasuk ke dalam sekumpulan

²⁴ Geoffrey Parrinder, *World Religions, From Ancient History to Present*, (New York : Fact on File, Publication, t.t.p), h. 508.

²⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Pen. Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, h. 5

²⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Darul Qalam, Qahirah, cetakan ketiga, 1966, h. 74.

doktrin dan ritual yang lebih besar. Pemikiran tersebut bisa saja bersifat religious, tetapi tidak merupakan agama.

Apakah agama (*religion*) itu?. John R. Hinnells dalam *Dictionary of Religions* mendefinisikan bahwa Religion; A general term used to designate all concepts concerning the belief in God and Goddess as well other spiritual beings or transcendental ultimate concerns. It is also the common denominator for the institutions/bodies representative of these concepts and/or concerned with their propaganda, including typical ways of human behavior as an experience or a consequence of this belief.²⁷ Makasudnya, bahwa agama adalah sebuah istilah umum yang digunakan untuk menunjuk semua konsep mengenai keyakinan pada Tuhan dan Dewi juga makhluk spiritual lainnya atau masalah utama transendental. Itu juga merupakan kesepakatan suatu lembaga atau badan perwakilan dari konsep-konsep dan atau berkaitan dengan propaganda penganut keyakinan tertentu, termasuk cara-cara khas perilaku manusia sebagai suatu pengalaman atau konsekuensi dari suatu keyakinan.

Posisi dan fungsi agama dalam kehidupan manusia secara sosiologis, setidaknya bisa dilihat dari perspektif fungsionalisme dan konflik. Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling asasi, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individual, sebagai suatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. Tetapi agama telah pula dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan mempertinggi fanatisme dan sikap tidak toleran, pengacuhan, pengabaian, takhyul dan kesia-siaan. Padahal agama itu juga berfungsi dan berperan bagi peneguhan consensus nilai solidaritas sosial. Tetapi, jika disalah artikan agama akan bisa menimbulkan pertentangan dan konflik dalam kehidupan manusia. Pada kenyataannya pula, hingga kini, orang kemudian bisa memiliki pengertian dan pandangan yang tidak sama mengenai agama dan tentang fungsi atau kedudukan agama dalam kehidupan manusia.

Manusia telah diberikan akal dan hati oleh Tuhan. Manusia diberi akal pikiran agar manusia mampu berpikir dan menyadari kekuasaan Tuhan. Namun pikiran manusia yang diberikan Tuhan sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan, oleh sebab itu manusia diberikan hati untuk dapat merasakan kekuasaan Tuhan secara bathiniah. Hati dan pikiran merupakan dua hal yang membuat manusia menjadi makhluk Tuhan yang paling sempurna yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Maka dari itu manusia dituntut untuk dapat menggunakan hati dan pikirannya untuk menalari kebesaran Tuhan dan keagungan agama-Nya. Sesuai dengan pengertian agama yaitu peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus

²⁷ John R. Hinnells (Ed), *Dictionary of Religions, Second Edition, Penguin Books, 1995, h. 414.*

dipatuhi oleh penganut agama yang bersangkutan, agama memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan kepadanya sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sejatinya, agama dalam kehidupan manusia berkaitan dengan pencarian makna hidup, atau bagaimana seharusnya manusia memaknai hidup. Pencarian makna hidup ini, setidaknya didorong oleh kesadaran eksistensial manusia. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana perjalanan di dunia ini. Jawabannya adalah dari Yang Maha Suci, untuk hidup sebagai manusia yang penuh kesucian, dan menuju ke puncak Yang Maha Suci. Intinya manusia adalah makhluk pencari makna hidup yang didasari oleh niat yang suci, berjuang dan mengabdikan untuk mencapai kedamaian abadi.

Agenda utama setiap agama adalah menegakkan harkat dan martabat manusia. Itulah yang menjadi hakikat agama dan sekaligus hakikat dari keberagaman. Dengan perkataan lain, ketika kemanusiaan menjadi agenda utama agama, maka inilah yang menjadi kekuatan spiritual dari agama sebagai pemelihara perdamaian. Agama, baru benar-benar menjadi agama yang benar dan yang mengemban amanah Tuhan kalau menjadikan kemanusiaan sebagai agenda utamanya. Itu juga lalu berarti, bahwa agama yang menghormati kemanusiaan adalah agama yang mengakui dan menghormati pluralitas agama. Tuhan tidak pernah dimulakan dimana kemanusiaan tidak dihormati, dan kemanusiaan tidak pernah dihormati dimana kebebasan orang untuk beragama dan berkeyakinan tidak diakui dan dihormati. Artinya, Tuhan menghendaki perbedaan, maka jika kita menghargai perbedaan itu, maka kita mengikuti keinginan Tuhan, orang yang mengikuti keinginan Tuhan, maka ia menjadi hamba Tuhan yang baik dan penyelamat bagi yang lain.

B. Pengertian dan Batasan Kerukunan

Secara etimologi kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu *rukun*, berarti tiang, dasar, sila. Jamak *rukun* adalah *arkaan*. Dari kata *arkaan* diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelaslah bahwa kata kerukunan hanya

dipergunakan dan berlaku dalam pergaulan. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat, apapun suku dan agamanya.

Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun dan kemauan untuk hidup berdampingan, bersama dengan damai. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih. Karenanya, nilai kerukunan hidup antarumat beragama di pandang dari aspek sosial-budaya menempati posisi yang sangat sentral, penting dan strategis bagi kesatuan bangsa Indonesia untuk menjadi perekat kesatuan bangsa yang sangat handal. Melalui ikatan semangat kerukunan hidup antarumat beragama akan mampu membangun atau memperkokoh persatuan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dan pulau menjadi sebuah komunitas negara kesatuan yang sangat solid (NKRI). Tanpa ikatan semangat kerukunan hidup antarumat beragama, masyarakat Indonesia akan sangat rentan, rapuh dan hidup dalam suasana yang tidak nyaman karena penuh dengan rasa kecurigaan, ketegangan, dan bahkan akan sering muncul konflik-konflik kekerasan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, solidaritas, kerjasama dan kerukunan hidup antarumat beragama diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman, dan bersatu dalam keragaman membangun masa depan bangsa dan Negara.

Dengan demikian, kerukunan berarti baik, damai, dan tidak berselisih. Kerukunan merupakan kata benda bentukan dari kata rukun. Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Persatuan hanya akan ada jika kerukunan tercipta. Kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan. Persatuan dan kerukunan harus diterapkan agar tercipta masyarakat yang tenteram dan damai. Jangan korbankan kerukunan atas nama agama, dan jangan korbankan agama atas nama kerukunan.

Disini perlu kami tegaskan bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti merelatifikir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas, atau menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari satu agama baru (*sinkritisme*). Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpeliharanya hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan keyakinan. Urgensi

kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggungjawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggungjawab atau menyelahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan Negara adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu kerukunan umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukanlah pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi oleh nilai-nilai universalitas dan misi kemanusiaan.

Di Indonesia tidak hanya satu agama yang diakui. Ada beberapa agama yang diakui keberadaannya di negeri tercinta ini. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, aliran kepercayaan pun juga diakui oleh negara. Demi kerukunan kita sebagai sesama bangsa Indonesia, perbedaan agama tidak boleh memecah kerukunan. Agama boleh berbeda, tetapi kerukunan di antara umat beragama harus tetap dipelihara demi ketenteraman dan kedamaian. *Kerukunan antarumat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antarumat beragama yang didalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.*

Pilihan untuk beriman mengandung konsekuensi bahwa ia harus siap menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Kita diperintahkan untuk bertoleransi terhadap pilihan tiap-tiap orang untuk beriman atau kafir. Meskipun demikian, tidak membenarkan mencampur pelaksanaan agama kita dengan pelaksanaan agama orang lain. Saat orang lain melaksanakan peribadatannya, misalnya sedang bersembahyang di pura, kita tidak boleh ikut berada di sana dengan alasan ikut bertoleransi kepada pemeluk agama lain (*Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku*). Bentuk toleransi lain adalah menghargai keyakinan mereka. Meskipun menganggap

keyakinan umat lain salah, kita tidak boleh menghina dan mencaci maki mereka bahkan mencaci maki Tuhan yang mereka sembah pun tidak diperbolehkan.

Dalam Islam diajarkan bagaimana membangun kebersamaan dengan penganut agama lain, yang disebut dengan istilah *Ukhuwah wathaniyah*, bermakna bahwa seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, misalnya bangsa Indonesia. Persaudaraan model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak lain yang harus dibangun adalah solidaritas sosial Islam dan praksisnya mendayagunakan semua sumber daya dan potensi nasional dalam upaya melawan kolonialisme dan mendirikan sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa komitmen nasional individu Islam tak diragukan lagi dalam makna yang sebenar-benarnya memperjuangkan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya menjalin hubungan kebangsaan ini Rasulullah bersabda “*Hubbul wathon minal iman*”, artinya: Cinta sesama saudara setanah air termasuk sebagian dari iman.

Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dan karenanya tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Artinya, seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat: 12)

Persaudaraan jenis ini berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang di ikat oleh jiwa kemanusiaan, maksudnya kita sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebajikannya bukan kejelekannya. Ukhuwah Baasyariah/Insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua orang umat manusia adalah makhluk Allah,

sekalipun Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya

Islam memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Toleransi antarumat beragama dalam batasan muamalah, yaitu batas-batas hubungan kemanusiaan dan tolong-menolong social kemasyarakatan. Adapun dalam hal akidah dan ibadah, Islam secara tegas melarang umatnya untuk bertoleransi. Sebagai contoh toleransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah hubungan jual beli, saling membantu membenahi rumah yang rusak, dan bersama-sama membuat jalan kampung. Allah swt. tidak melarang umat Islam bermuamalah dengan penganut agama lain.

C. Merawat Keragaman Melestarikan Kerukunan

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkembang pastilah memiliki keragaman yang tidak ada batasannya dari aspek apapun. Keragaman bangsa Indonesia merupakan harta yang paling penting dalam menyatukan bangsa baik dari segi apapun. Keragaman tersebut bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat perbedaan yang harus kita hargai dan hormati. Dengan adanya berbagai perbedaan dan keragaman maka dari itu kita harus mengacu pada semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* berarti "macam". Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Sehingga Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan [Indonesia](#). Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno atau dengan kata lain "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keragaman beragama merupakan kehendak Sang Pencipta yang tak bisa kitaingkari, sesuatu yang sifatnya pemberian-Nya. Kita diciptakan Tuhan bukan dalam keseragaman, tapi dalam keragaman dan perbedaan, baik berbeda dalam hal suku, bangsa, warna kulit, agama, keyakinan dan sebagainya. Dari perbedaan itu Tuhan memerintahkan agar kita saling mengenal dan mengasihi, bukan untuk saling

memushui. Sebagai halnya keragaman dalam bahasa, suka dan budaya. Hal ini diakui oleh Al- Quran secara jelas (QS. Al-Hujarat: 13). Untuk itu, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi keragaman beragama dalam wujud dua sikap yang jelas dan tegas. Yaitu sikap *eksklusif* dalam hal-hal yang bersifat aqidah dan 'ubudiah dan sikap *Inklusif* dalam ranah sosial interaktif. Dalam tataran aplikatif, ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan as-Sunnah telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. Piagam Madinah adalah diantara bukti sejarah bagaimana Islam sejak awal menginginkan terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur Al-Quran tersebut dapat dikembangkan dalam rangka mengakkan berbagai pilar yang perlu disepakati bersamadan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan antarumat beragama. Diantara pilar-pilar tersebut adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghormati dengan penuh sikap kedewasaan dalam beragama, meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, berbangsa dan bernegara tanpa harus saling mencurigai dan memperkokoh empat consensus nasional (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bineka Tunggal Ika).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa dengan berbagai keragaman yang unik. Keragaman tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti bahasa, agama, suku, adat-istiadat, ras, dan sebagainya. Keberagaman yang ada merupakan salah satu tonggak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keaneekaragaman ini yang membentuk kita sebagai pribadi yang bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga karena terlepas dari keanekaragaman dengan perbedaan kita mampu hidup berdampingan. Dan kita mampu hidup dalam harmoni tanpa memandang suku, bahasa, dan agama. Dalam mewujudkan nasionalisme kita harus mencintai bhineka tunggal ika sebagai semboyan bangsa dan menghargai, menghormati, dan mengakui adanya keberagaman dan perbedaan.

Bhineka Tunggal Ika bukanlah hanya sekedar semboyan, melainkan tersimpan makna yang tersirat didalamnya yang harus kita ketahui dan pahami. Pada prinsipnya semboyan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat penting yaitu toleransi dan kesatuan. Pertama, Toleransi inilah yang dapat mencairkan perbedaan menjadi

persatuan sehingga tidak ada perpecahan atau konflik. Kedua, Kesatuan merupakan hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dari berbagai macam ras, suku, dan agama.

Semboyan ini haruslah kita terapkan bukan hanya sekedar diketahui saja, Karena semboyan bangsa kita ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Disamping itu, wujud nasionalisme dapat terbentuk apabila kita sebagai masyarakat yang berjiwa nasionalisme telah melakukan hal yang berguna bagi bangsa. Sekecil apapun itu yang dapat merubah bangsa ini menjadi lebih baik.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Terciptanya kerukunan umat beragama mensyaratkan *pertama*, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. *Kedua*, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. *Ketiga*, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan, dan pola ibadah. Diantara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan. *Keempat*, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kemiskinan, kebodohan, narkoba, terorisme dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

Setiap agama dari segi esensialnya adalah menawarkan keselamatan kepada setiap umat manusia dengan jalan mengajarkan kedamaian, persatuan, persaudaraan antara sesama manusia. Dan sangat menentang bentuk-bentuk permusuhan, pertentangan, pertengakaran, kerusuhan di dalam masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala global.

Perdamaian dalam arti kata yang sebenarnya tidaklah hanya mencakup semata-mata keamanan fisik atau tidak adanya perang dan pertikaian diantara manusia di bumi kita ini . Kendatipun pengertian diatas mengandung arti yang sangat penting dan juga merupakan inti dari perdamaian sesungguhnya, tetapi keadaan perdamaian yang dilukiskan demikian itu hanyalah suatu segi pasif dan terbatas dari arti sesungguhnya, apalagi kalau kita hendak membandingkannya dengan pengertian perdamaian yang lebih luas lagi.

Kedamaian merupakan salah satu pesan inti dari misi profetik. Kedamaian merupakan cita-cita yang agung yang selalu diperjuangkan oleh semua agama yang ada di muka bumi ini. Bayangkanlah jika bumi tanpa kedamaian niscaya semua manusia serta sesuatu yang ada di alam ini akan mengalami kepunahan dan kehilangan peradaban yang telah mereka bangun sendiri. Kedamaian menciptakan keturunan. Kenteraman meniscayakan nyaman dan ketenanganyang pada akhirnya terciptakan keajaiban di hati untuk meraih kebahagiaan hidup.

Islam adalah agama kedamaian. Dalam sejarah kemuncullannya, ketika Nabi Muhammad saw menyampaikan ajarannya kepada umat manusia, tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam. *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut⁴ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*". (QS. Al-Baqarah: 256).

Bahkan, umat Islam mampu hidup berdampingan dengan umat lain dengan harmonis dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Adapun konflik dan peperangan yang telah terjadi pada masanya dikarenakan umat Islam pada masa itu selalu dipojokan dan ditindas oleh umat lain. Situasi inilah yang memaksa mereka untuk melakukan pembelaan terhadap diri sendiri sehingga terjadilah pertempuran yang sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan demikian, merupakan sebuah kesimpulan yang

keliru bahwa Islam adalah agama yang disebarkan melalaui pedang dan kekerasan.

Tak seorangpun akan dapat mempunyai hubungan damai dengan saudaranya, kalau ia sendiri tidak berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri dan tak seorang pun berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri, jika ia tidak mempunyai hubungan damai dengan Penciptanya. Masyarakat adalah perkalian dari orang-orang dan umat manusia adalah perkalian dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Jadi inti dan saripati dari masalah perdamaian adalah bahwa orang seorang harus berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri dan dengan umat manusia dan dengan sebagai akibat dari penempatan dirinya dalam hubungan damai dengan penciptanya.

D. Potensi Kerukunan Antarumat Beragama.

Kehadiran agama-agama besar yang diawali oleh agama Hindu dan Budha, kemudian Islam, Katolik dan Kristen Protestan, menjadikan perbedaan antar agama semakin kompleks, terutama karena agama-agama itu telah memainkan peran sangat menentukan dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat di Sumatera Utara. Bagi masyarakat Sumatera Utara, yang memiliki keanekaragaman agama dan budaya, kerukunan umat beragama merupakan suatu sarana yang penting diwujudkan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan nasional. Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktifitas sosialnya, sebagai potensi umat beragama untuk mewujudkan kerukunan dan kerjasama membangun budaya damai dalam keragaman.

Seluruh agama yang diakui secara nasional terdapat di Sumatera Utara. Agama yang pertama kali berkembang adalah Hindu dan Budha yang ditandai dengan adanya candi-candi khususnya di Tapanuli Selatan yang sampai sekarang masih kokoh berdiri. Namun penganut dua agama ini berangsur-angsur hilang dan kemudian masuklah agama Islam dari Sumatera Barat. Tema penyampaian ajaran agama lebih banyak yang berdimensi pendekatan normatif, maka pada masa yang lalu terdapat sedikit ketegangan antarumat

beragama. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang cukup intens penyebaran agama Islam maupun Kristen adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu di Kecamatan Sipirok. Oleh karenanya, masyarakat Sumatera Utara memandang daerah Sipirok sebagai simbol kerukunan antarumat beragama sejak abad ke-19 M.

Komitmen, emosi, dan pengalaman keagamaan merupakan elemen yang inheren dalam kehidupan beragama. Setiap orang memiliki keyakinan terhadap ajaran agama tertentu akan merasakan keterikatan emosional dengan sistem keyakinan tersebut. Akan tetapi emosi, perasaan dan pengalaman keagamaan ini lebih mudah dirasakan daripada digambarkan. Pembicaraan tentang hal ini akan lebih mudah ketika diarahkan kepada objek yang dapat menimbulkan emosi dan perasaan keagamaan seperti simbol-simbol yang bernilai sakral dalam pandangan penganut agama tertentu.

Islam mengakui eksistensi agama-agama yang ada dan menerima beberapa prinsip dasar ajarannya. Namun, ini tidak berarti bahwa semua agama adalah sama. Sebab, setiap agama memiliki kekhasan, keunikan, dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lain. Agama yang satu tak membatalkan agama yang lain, karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Walau begitu, semua agama, terutama yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik, mengarah pada tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tak perlu dirisaukan. Kesatuan tujuan ini pula yang menyebabkan Islam, di samping melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberi pengakuan teologis mengenai keselamatan para pengikut agama lain itu.

Alquran memerintah umat Islam agar memberikan perlindungan terhadap orang musyrik yang membutuhkan. Allah berfirman :

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar

firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.²⁸

Ayat di atas menunjukkan kebesaran jiwa Islam dalam menghadapi orang-orang musyrik. Sekiranya orang musyrik datang meminta perlindungan kepada umat Islam, maka tak ada pilihan kecuali bahwa perlindungan itu harus diberikan. Pada saat itu, umat Islam boleh memperdengarkan atau persisnya mengenalkan Islam. Jika dia mau menerima dan kemudian masuk Islam, maka itu baik. Namun, sekiranya dia tetap dengan pilihan keyakinannya, maka umat Islam diperintahkan mengembalikan orang musyrik tersebut ke suatu tempat yang aman bagi si Musyrik. Meskipun pada saat itu umat Islam mayoritas dan berkuasa, namun sikap perlindungan terhadap jiwa mereka menjadi komitmen keberagamaannya.

Di Sumatera Utara misalnya, agama Islam merupakan populasi terbesar penganutnya (\pm 65,45%), terdiri dari berbagai golongan dan mempunyai kecenderungan paham keagamaan yang bervariasi. Secara garis besar, umat Islam di daerah ini dapat dikelompokkan atas beberapa tipe, antara lain; tipe keberagaman yang tradisional, tipe keberagaman yang cenderung mengamalkan tradisi-tradisi beragama yang diajarkan oleh para ulama masa lalu.

Tipe keberagaman yang reformis atau pembaharu, yaitu tipe keberagaman yang dalam hal peribadatan ingin mengacu langsung kepada amalan Rasulullah Saw. sebagaimana tercantum dalam *Hadīs Ṣāḥih*. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah seyogiyanya dikerjakan oleh umatnya, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, seyogiyanya tidak dikerjakan. Kecenderungan ini tampak pada pengikut paham Muhammadiyah.

Di Sumatera Utara permasalahan *khilâfiyah* cenderung jauh berkurang, walaupun dalam wacana pemikiran masih ditemukan. Dalam diskusi atau buku-buku keagamaan dan media massa masih terdapat polemik pemikiran. Namun secara umum pihak-pihak yang berbeda paham tersebut telah

²⁸ Q.S. al-Taubah/9: 6.

cenderung “menerima” keberadaan saudara seagama yang berbeda pemahannya. Dengan kata lain, kerukunan intern umat Islam di Sumatera Utara mulai tumbuh dan berkembang. Bahkan gejala positif yang mulai muncul adalah saling kerjasama antar berbagai paham dalam suatu kegiatan keislaman. Semua ini menyatu kepada doktrin *ukhuwah Islâmiyah*.

Islam sangat komit terhadap silaturahmi, baik dengan sesama umat Islam maupun umat agama lain. Orang yang menghubungkan silaturahmi adalah orang yang mendapat keberuntungan, dan orang yang memutuskan silaturahmi adalah orang yang merugi. Karena itu, mari kita bangun silaturahmi ini sebagai hubungan kekeluargaan, kita semua dari satu Bapak yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa. Kita semua lahir dari satu rahim Hawa, dari rahim itulah kita semua dan tidak ada bedanya, apapun suku dan agamanya. Jadi, pada prinsipnya di antara kita ini tidak ada perbedaan, walaupun keyakinan kita berbeda, sesuai keinginan batinnya masing-masing. Tujuan kita mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan kerukunan dan toleransi, dimana umat Islam adalah bagian masyarakat yang tetap berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara.²⁹

Islam berkomitmen bahwa pada prinsipnya setiap agama mengakui, meyakini dan menerima kenyataan pluralitas religius karena hal tersebut merupakan pesan dari kitab suci, sebagaimana ditegaskan Alquran :

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus/10:99).

Menganalisis semangat ayat di atas, Abdul Karim Soroush³⁰ membuat sebuah ilustrasi. Bahwa sebagaimana seorang manusia menghadapi kematian secara sendirian, maka memeluk agamapun merupakan hal yang bersifat

²⁹ Abdullahsyah (Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara). Disampaikan dalam acara: *Silaturahmi Kodam I/BB dengan tokoh-tokoh agama dan FKUB Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan*, tanggal 24 Nopember 2009 di Balai Prajurit Kodam I/BB Medan.

³⁰ Abdul Karim Soroush adalah cendekiawan Muslim terkemuka di Iran. Lahir di Teheran pada tahun 1945. Dia menyelesaikan studinya di Universitas Teheran Iran, karyanya adalah *The Hermeneutical Expansion and Contraction of the Theory of Syariah*. Ia disegani bukan hanya di Iran, melainkan juga di negeri-negeri lain, karena pikiran-pikirannya yang berani. Jurnalis Amerika, Robin Wright, menjuluki Soroush sebagai Luther dari Islam.

individual. Setiap umat beragama memang melakukan aksi dan ritus komunal, tetapi bukan keimanan komunal. Jika ekspresi iman bersifat publik, maka esensi iman bersifat gaib dan privat. Bagi Soroush, wilayah iman itu seperti arena akhirat yang di dalamnya setiap orang dinilai satu-satu.³¹ Disebutkan, “tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat secara sendiri-sendiri.” (Q.S. Maryam/19 :95). Tidak banyak manfaatnya memaksa seseorang memeluk suatu agama kalau tidak diikuti kepercayaan dan keyakinan dari orang tersebut.

Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat. Kepada umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (ahl al-kitâb). Prinsip ini membawa akibat yang sangat logis, yaitu tidak boleh ada paksaan dalam agama. Komitmen ini perlu dikemukakan, karena sampai sekarang kesalahpahaman atau kurangpercayaan pihak lain terhadap prinsip Islam, sungguh tidak beralasan.

Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa umat Islam berkomitmen terhadap nilai universal ajaran agamanya. *Pertama*, para informan, tokoh organisasi keagamaan, belum bisa melepaskan subjektifnya ketika memberikan gambaran tentang gejala emosi keagamaan umatnya. Kemudian, ia bisa memberikan gambaran dengan refleksi dan penilaian personal tentang emosi keagamaan yang sedang dibicarakan. Pada umumnya perbedaan lebih jelas terlihat pada level *grassroot*, sementara pada level elit perbedaan tersebut lebih tersamar. *Kedua*, telah terjadi pergeseran pemahaman, pemaknaan dan perasaan keagamaan pada kalangan umat Islam di Sumatera Utara ke arah yang lebih universal dengan tidak terlalu mempersoalkan kekhasan dan karakteristik kelompok masing-masing.

Kontribusi institusional yang disumbangkan tentulah dengan menetapkan salah satu bagian pada MUI yaitu bidang Ukhuwah dan Kerukunan yang bertugas mendorong umat dan melakukan kegiatan di bidang

³¹ Abdulk Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 204.

pengembangan kerukunan umat beragama. Institusi ini terus berusaha untuk mensosialisasi komitmen Islam terhadap pentingnya dialog lintas agama. Kesadaran tentang keniscayaan ditegakkannya perdamaian atau kerukunan kiranya telah final di kalangan umat Islam dan institusi keislaman. Maka kini yang menjadi fokus gagasan dan kegiatan adalah dakwah esoterik dalam arti bersama agama lain menegakkan religiositas dan moralitas yang agamis.³²

Tidak ada alasan bagi seorang Muslim membenci orang lain karena ia bukan sekeyakinan. Membiarkan orang lain tetap memeluk agama non-Islam adalah bagian dari perintah Islam. Bahkan toleransi yang ditunjukkan Islam demikian kuat, sehingga umat Islam dilarang memaki sesembahan orang-orang Musyrik. Sebab jika umat Islam melakukannya, maka orang Musyrik akan melakukan hal yang sama pada Tuhan umat Islam. Islam berkomitmen bahwa kepercayaan seseorang terhadap suatu agama harus dilindungi, dan perbedaan ekspresi berkeyakinan atau berketuhanan tidak membenarkan seseorang mengganggu yang lain.

Dalam sejarahnya, Kristen Protestan sudah berusia enam abad dan pengikut Protestan jauh lebih banyak dibandingkan dengan Katolik. Suatu kenyataan bahwa agama ini mengalami perkembangan baik dari sudut jumlah pengikut, wilayah dan sekte atau aliran.

Menurut Pdt. Dr. Elim Simamora, doktrin pokok dan penting dalam Kristen Protestan adalah tentang Tritunggal atau Trinitas. Dari doktrin tersebut kemudian berkembang menjadi doktrin-doktrin lainnya, yang merupakan penjabaran dari doktrin itu, seperti doktrin kasih, baptis, katekisasi (sidi) dan kebaktian. Setiap orang Kristen mengimani tentang trinitas, yaitu pengakuan terhadap Allah Bapa, Yesus Kristus Anak Allah dan Roh Kudus.³³ Hal ini sekaligus sebagai potensi memelihara kerukunan.

Doktrin tersebut mengandung makna bahwa setiap orang Kristen berkomitmen untuk mengasihi sesama manusia dan semua makhluk Tuhan.

³² Disampaikan oleh Ketua Komisi Ukhuwah dan Kerukunan MUI Propinsi Sumatera Utara, dalam acara dialog FKUB dengan majelis-majelis agama se-Sumatera Utara tanggal 11 Juli 2009. Bertempat di Jalan Sutomo Ujung kantor MUI Sumut. Baca; Syahrin Harahap, *Media Kerukunan*, (Medan : FKUB Sumut, 2009), edisi V, h. 36.

³³ *Ibid.*,

Konsep kasih, tidak hanya untuk kalangan intern, melainkan terhadap non Kristen, bahkan terhadap musuh sekalipun harus dikasihi. Musuh dan orang yang berbuat jahat menurutnya, bukan untuk dibalas kejahatannya, melainkan mereka harus dido'akan. Kejahatan musuh tidak boleh dibalas, sebab pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Wujud dari doktrin kasih itu adalah dalam bentuk yang nyata, seperti memberi makan bagi yang lapar dalam bentuk yang nyata, dan memberi minum bagi yang haus serta mengobati terhadap mereka yang sakit. Menurut Elim, jika doktrin dan konsep kasih dipahami dan dilaksanakan maka kehidupan menjadi damai.

Komitmen umat Kristen terhadap dialog antarumat beragama adalah berdasarkan pada kasih dan berhati bersih, sebagaimana perintah Tuhan yang terdapat dalam Al-Kitab, berbunyi :

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. (Kitab Amsal 17; 17-20).³⁴

Setiap orang Kristen harus menjadi berkat bagi orang lain. Artinya harus bermanfaat bagi yang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain atau memusuhinya, dengan tidak memandang suku dan agama. Sebab Tuhan Yesus mengatakan : “Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri” (Matius.22:39). Sepanjang ia manusia, bahkan lingkungan, makhluk semuanya dan alam harus ditata sedemikian rupa. Menurut Elim, banjir misalnya, karena manusia tidak lagi bersahabat dengan alam, namun telah dijadikan sebagai objek, tidak dikelola sebagaimana mestinya.³⁵

Secara umum umat Kristen menerima dan memahami doktrin tersebut sebagai komitmen keagamaan sebagai landasan dialog. Tapi kadarnya berbeda-beda. Sebab hal itu merupakan sebuah proses yang panjang yaitu

³⁴ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), h. 697-698.

³⁵ Pdt. Elim Simamora, (Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Sumatera Utara), *Wawancara*, di Medan tanggal 12 Maret 2009.

proses untuk menjadi dewasa dalam iman. Doktrin-doktrin itu merupakan jalan hidupnya (*way of life*), karena doktrin tersebut merupakan hal pokok dan utama dalam agama. Orang Kristen yang tidak mematuhiya berarti ia belum menjadi Kristen yang sejati.

Dalam pelayanan langsung kepada jemaat, ada pemimpin jemaat, yaitu pendeta jemaat dan guru jemaat. Selanjutnya ada Pendeta Distrik, yaitu empat hingga sepuluh Jemaat menjadi satu distrik. Menurut Pdt. Elim, Pendeta umumnya harus mengikuti pendidikan formal seperti Sekolah Tinggi Theologia. Tapi tidak semua mereka jadi pendeta, sebab pendeta diusulkan dari jemaat, kemudian ditetapkan melalui surat keputusan. Syarat menjadi Pendeta, di samping memiliki pendidikan formal yang memadai, juga kesediaan menyerahkan diri untuk kepentingan agama. Pendeta tidak boleh ada aktivitas, selain sebagai pelayan.³⁶

Menurut ajaran Kristen, manusia adalah keluarga besar Allah. Bumi adalah panggung tempat mewujudkan kemuliaan Tuhan (Markus 16:15). Berdasarkan landasan ini, kehidupan yang harmonis bagi manusia seluruhnya dan makhluk lainnya sebenarnya refleksi dan menifestasi cinta kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, pengikutnya dan roh kudus. Berdasarkan Petrus 2:9-10 dan Yohanes 15:16 bahwa umat Kristen baik sebagai anggota gereja maupun individu tidak boleh mengklaim sebagai sumber dan pemilik kebenaran. Mereka hanya sebagai saksi seruan dan kebenaran Tuhan. Dengan demikian, hubungan dialogis adalah cara kesaksian terbaik, akan tetapi dalam dialog identitas Kristen tidak boleh menjadi kabur.³⁷

Komitmen keagamaan dapat dilihat dari pemahaman dan sikap umat suatu agama terhadap berbagai hal, seperti doktrin agama, simbol-simbol agama, pemimpin agama dan organisasi agama. Menurut Pdt. Wakari, di kalangan umat Pantekosta simbol-simbol keagamaan difahami secara lebih rasional. Misalnya Salib difahami hanya sebagai tanda umat Kristen dan tidak memiliki kekuatan tertentu. Karena itu, umat Pantekosta tidak menjadikan

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Pdt. Dr. Langsung Sitorus, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara, *Wawancara*, di Medan tanggal 07 September 2009.

Salib sebagai sesuatu yang keramat, yang dapat memberikan keselamatan bagi orang yang memakainya. Demikian pula dengan kitab suci, bagi umat Pantekosta tidak diperlakukan secara khusus, karena yang penting umat memiliki kitab suci dan membacanya setiap hari. Jadi yang penting dalam ajaran Pantekosta adalah substansi dari ajaran agama bukan simbol-simbol.³⁸

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa umat Kristen juga mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dialog yang konstruktif. Artinya, setiap kelompok agama harus terus menerus membangun sikap pengertian terhadap kelompok agama lain. Sejalan dengan itu, setiap kelompok agama harus mempertebal sikap saling menghormati dan tidak saling memaksakan ajaran dan perilaku agamisnya terhadap kelompok lain, dan tidak marah melihat kelompok lain beribadah menurut ajaran agamanya. Orang yang menghargai keyakinan lain dengannya, merupakan komitmen keberagamaannya sendiri.

Tidak berbeda dengan Kristen, Katolik juga mempunyai komitmen dalam membangun kerukunan di Sumatera Utara. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa komitmen keagamaan yang berbentuk persepsi, sikap dan tindakan akan ditemukan pada penganut sebuah agama. Ini dikarenakan emosi keagamaan lahir sebagai hasil suatu proses kolerasi dari sistem keyakinan dan kegiatan ritual sebuah agama. Seperti pada agama-agama lainnya, komitmen keagamaan umat Katolik dapat diamati dari keberadaan doktrin, simbol-simbol, pemimpin agama dan organisasi atau komunitas agama ini.

Simbol-simbol atau lambang-lambang religius bagi penganut Katolik bukan saja membangkitkan gambaran (*image*) dalam kesadaran keagamaan, dengan menghantarkan dan mendekatkan mereka dengan realitas yang dilambangkan, tetapi juga dengan lambang tersebut mengkomunikasikan realitas ilahi kepada mereka sebagai penganut agama secara pribadi. Ini sejalan dengan pernyataan Pastor Beno Ola Tage, Pr :

³⁸ Pdt. Paul F. Wakari, (Pengurus FKUB Propinsi Sumatera Utara, mewakili Kristen Pentakosta), *Wawancara*, di Medan tanggal 12 Maret 2009.

Saya duduk dan berdo'a di depan Patung Bunda Maria bukanlah menunjukkan bahwa saya sedang menyembah sebuah patung. Untuk apa saya menyembah patung hasil buatan manusia. Saya duduk di depannya adalah cara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berdo'a secara khusus di depan Patung Bunda Maria, diri dan jiwa saya berada di sebuah realitas yang jauh dari jangkauan manusia.³⁹

Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang melecehkan atau mempermainkan simbol-simbol keagamaan mereka maka pemeluk Katolik akan berreaksi spontan, marah dan merasa terhina. Walau dalam kenyataan simbol-simbol religius mereka memiliki tingkat kesakralan yang berbeda. Simbol yang paling tinggi dan dihormati oleh seluruh penganut Katolik adalah roti yang telah diberkati oleh Paulus atau Pastor dalam perjamuan ekaristi, umat Katolik menyebutnya *Sakramen Kudus*. Maka siapapun yang mengecilkan arti roti tersebut, jelas umat Katolik akan beraksi yang sangat hebat, dan mungkin saja terjadi perkelahian, pemukulan terhadap orang yang menghina simbol tersebut. Meski hal ini belum pernah terjadi di Medan.⁴⁰

Intensitas rasa kohesi persaudaraan dan kesetiaan umat Katolik bertambah dengan keberadaan Gereja mereka. Gereja bagi mereka adalah sebuah simbol atau lambang, dengan nama Tuhan berkarya menyelamatkan umat manusia sesuai dengan rencana yang dikehendakiNya. Fenomena Gereja bagi mereka bukanlah hanya suatu gedung atau badan besar dalam arti organisatoris, tetapi lebih dari itu. Gereja dipercaya sebagai "Sakramen Keselamatan Dunia", bahkan sebagai "Tubuh Mistik Kristus" sendiri. Oleh karena itu kesadaran umat Katolik akan persatuan antarumat beriman menuju kepada kualitas yang tinggi, dan mereka tidak menyerahkan diri kepada suatu kategori (organisasi) melainkan kepada Kristus yang dipercayai sebagai Juru Selamat mereka.

Lambang atau simbol kesatuan umat Katolik yang dinyatakan dalam diri seorang Paus di Roma membawakan suatu efek psikologis yang mendalam. Umat Katolik merasa satu dalam keragaman yang nyata seperti kesatuan

³⁹ Pator Beno Ola Tage, OFM, Cap (Pengurus FKUB Propinsi Sumatera Utara mewakili majelis keuskupan agung), *wawancara*, di Medan tanggal 19 Maret 2009.

⁴⁰ *Ibid.*,

organisatoris di dunia. Umat Kristen berkeyakinan bahwa Kristus adalah satu-satunya Imam yang tidak kelihatan, tetapi seorang Paus dipercayai sebagai wakil Kristus. Sebagai Imam yang kelihatan, kehadiran Paus menjadi lambang kesatuan, memainkan peranan penting dalam membentuk kesadaran akan umat Katolik. Bagi umat Katolik, perkataan, sikap dan tindakan Paus semuanya mulia, harus dihormati, dilaksanakan dan ditiru.⁴¹

Dalam masyarakat Katolik terdapat tingkatan pimpinan agama sebagai berikut : *Pertama*, Pimpinan pusat yang bertempat di Roma. Pimpinan tersebut dipegang oleh seorang Paus yang mempunyai kekuasaan atas Gereja Universal di seluruh dunia. Paus dibantu oleh “Curia Romana” yang terdiri dari Kongregasi-Kongregasi, semacam Departemen-Departemen dalam suatu negara. Dengan demikian kekuasaan Paus de facto pindah ke Kuria, karena dalam kenyataannya Kuria inilah yang mengeluarkan peraturan dan Paus harus tunduk kepada mekanisme kurial ini. *Kedua*, Pimpinan Gereja Nasional meliputi sejumlah keuskupan yang ada dalam satu negara. Untuk Gereja Indonesia Pimpinan Tingkat Nasional, berada pada kekuasaan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI).

Kekuasaan yang dimiliki Pimpinan Gereja Nasional itu relatif lemah, karena setiap keuskupan mempunyai otonomi sendiri dalam urusan intern. Hanya dalam hal-hal yang sifatnya umum pada tingkat nasional dan internasional setiap keuskupan wajib mengikuti pedoman yang telah dibuat bersama. *Ketiga*, Pimpinan Keuskupan (*diocesan*). Dalam keuskupannya seorang uskup adalah otonom, tidak tergantung dari paus. Ia adalah seorang “raja”, pembuat hukum, pelaksana dan hakim dalam wilayahnya. Suatu keuskupan dibagi dalam beberapa dekenat. Tiap-tiap dekenat terdiri dari beberapa paroki. *Keempat*, Pimpinan Paroki. Paroki ialah suatu wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor kepala yang diangkat oleh Uskup.⁴²

⁴¹ Pastor Beno Ola Tage, OFM, Cap. *Wawancara*, di Medan tanggal 19 Maret 2009.

⁴² Pastor Beno Ola Tage, OFM, Cap, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Medan (HAK-Kam), *Wawancara*, di Medan tanggal 07 Desember 2009.

Masyarakat Katolik mengakui, menghormati dan mematuhi semua pemimpin agamanya terutama untuk di lingkungan mereka. Seorang pastor memiliki hak-hak tertentu dalam menggembalakan mereka, dan pastor tersebut wajib mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Uskup. Kepercayaan dan penghormatan pengikut Katolik kepada pemimpin agama mereka dilatari oleh kepercayaan mereka, yaitu jabatan yang diperoleh pemimpin tersebut berasal dari Kristus sendiri.

Misi yang diemban oleh gereja berasaskan ajaran Yesus Kristus, Sang Nabi dan Tuhannya, agar gereja mengamalkan perintah-Nya. Landasan dasar yang menjamin persaudaraan sejati dengan semua orang adalah “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. (Matius 19:19). Sedangkan mengenai imperatif memelihara perdamaian dengan semua orang, dipesankan oleh Tuhannya: “Damai sejahtera Ku (*syalom*) Kuberikan kepadamu”. (Yohanes 14:27). Perintah melestarikan perdamaian mengacu kepada korban perdamaian yang dilakukan Yesus Kristus sampai wafat di tiang salib; “upayakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang.” (Filipi I, 2:8).⁴³

Corak komitmen umat Katolik mengenai peran manusia di muka bumi secara universal terungkap dalam Alkitab. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah adalah sebagai Khalik bagi langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan “menurut gambar dan rupa Allah”. Bagaimanakah manusia sebagaimana dikehendaki oleh Allah?. Manusia harus meniru Yesus Kristus sebagai suri teladan karena Kristus merupakan “gambar Allah” yang sebenarnya. Dengan melihat kepada Dia, akan diketahui juga siapa dan bagaimana manusia sebagaimana dimaksudkan oleh Allah.⁴⁴

Umat Katolik sangat komit terhadap hubungan antar agama melalui dialog. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya satu Komisi di Keuskupan Agung Medan yang menangani masalah hubungan antar agama dan Kepercayaan. Komisi ini adalah institusi resmi dalam gereja Katolik untuk

⁴³ Hal yang senada juga dapat dibaca Kitab Kejadian 18:19 “*Lakukanlah kebenaran dan keadilan kepada semua orang*”. Kebenaran dan keadilan, demi kesejahteraan bersama, menjadi penegasan misi Gereja pada Konsili Vatikan II. Lihat; MGR. Dr. A. Bangun Sinaga, “Pokok Pikiran Kerukunan Umat Beragama KWI Wilayah Medan”, dalam *Media Kerukunan FKUB Sumut*, (Medan : Edisi Perdana tahun 2008), h. 17.

⁴⁴ Baca ; Al-Kitab, *Kitab Kejadian*.

dialog antaragama dan kepercayaan di tingkat keuskupan, dan ada juga di tingkat kepausan di Roma, yaitu interfidei dialog. Secara institusi gereja Katolik terlihat pada amanat Konsili Vatikan II yang menyimpulkan bahwa gereja membangun dialog antar agama dan kepercayaan di manapun berada. Tidak hanya dialog formal, tapi juga dialog kehidupan dan dialog karya membangun peradaban dunia untuk perdamaian.⁴⁵

Selanjutnya adalah komitmen umat Hindu terhadap pelaksanaan dialog antarumat beragama yang telah berlangsung di Sumatera Utara. Seiring dengan perkembangan masyarakat, ternyata agama Hindu sebagai salah satu agama tertua di dunia mengalami pergeseran pemahaman, baik terhadap substansi maupun metoda penyajiannya. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dan jumlah pengikutnya, pandangan ini berasal dari kaum akademisi. Menurut mereka reinterpretasi terhadap ajaran Hindu adalah suatu keharusan, sebab persoalan manusia semakin kompleks. Jika tidak diikuti dengan perbaikan penafsiran terhadap ajaran dan disempurnakan cara penyajiannya, maka besar kemungkinan agama Hindu akan ditinggalkan penganutnya, karena agama tersebut dipandang tidak mampu menyelesaikan problema kehidupan penganutnya.

Penganut ajaran Hindu di Sumatera Utara ini terdiri dari berbagai etnis, akan tetapi jumlah yang terbanyak adalah etnis Karo. Masyarakat Karo menganut ajaran Hindu ini memandang bahwa seolah-olah agama Hindu adalah agama yang menyempurnakan kepercayaan mereka selama ini. Sebelum mereka menganut ajaran ini, pada umumnya mereka adalah animisme, tata cara ritualnyapun hampir sama, yang membedakannya adalah segi bahasa. Kini mereka sudah banyak sebagai pelayan umat Hindu baik di instansi pemerintah maupun di kalangan masyarakat Hindu.

Trimurti, sebagai salah satu dogma di dalam ajaran Hindu, tidak lagi dipahami secara *literal*, melainkan sudah diterjemahkan secara luas. Pada

⁴⁵ Konsili Vatikan II menyatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Selain itu, Konsili menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil. Baca; Pdt. Dr. Herman Togar Nainggolan, OFM, Cap, "Kebebasan Beragama Dalam Perpektif Gereja Katolik," (Makalah, tidak diterbitkan) disampaikan dalam *Dialog Kerukunan Umat Beragama*, Hotel Dharma Deli Medan, 2009, h. 3.

masyarakat biasa, Trimurti itu adalah tiga Tuhan yang berdiri sendiri. Padahal yang sebenarnya adalah Tuhan Esa dalam sifat maupun zatnya. Hanya saja Tuhan sendiri memvisualkan dirinya dalam tiga bentuk, yaitu sebagai pencipta (*Brahma*), pemelihara (*Wisnu*) dan perusak (*Siwa*). Dengan demikian agama Hindu tidak tepat jika dikelompokkan ke dalam politeisme, sebagai mana pemahaman kaum animisme dan dinamisme terhadap dewa dan kekuatan gaib lainnya.⁴⁶

Demikian juga halnya untuk mengenal diri-Nya, dipahamkan tidak lagi bersifat versial, melainkan memiliki suatu proses panjang dan memiliki makna yang lebih jauh, yaitu memiliki hirarki atau sistem. Biasanya apa yang dikenal dengan *Made*, *Vide*, *Guru* dan *Dewo* adalah tokoh yang harus dipatuhi dan dihormati. Akan tetapi dalam pemahaman modern itu merupakan salah satu rangkaian mata rantai untuk sampai kepada Tuhan Maha Pencipta. Seorang anak tidak akan dapat langsung mengenal Tuhan kecuali melalui ibu (*Made*) Bapa (*Vide*). Kemudian kewajiban ibu-bapa adalah mendidik anak-anaknya dengan baik. Jika tidak mampu mendidik anaknya, maka kewajiban tersebut sebagian dilimpahkan kepada guru (*Guru*) untuk mengajarnya sehingga sampai kepada pengenalan Tuhan (*Dewo*) sebagai pencipta dan tempat kembali.⁴⁷

Tentang dialog sebagai sarana membangun kerukunan, umat Hindu mempunyai komitmen tersendiri, sebagaimana yang dikenal dalam konsep *Tat Twam Asi*. Dalam *Tat Twam Asi* diajarkan bahwa cara memandang makhluk hidup di dunia haruslah sama, yakni dengan rasa kasih sayang, dengan perasaan sosial yang tiada batasnya. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, diciptakan *Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa), dan antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Bahkan ekstrimnya, saling ketergantungan dan tidak mampu hidup sendiri.⁴⁸

⁴⁶ I. Ketut Subagiasta, (Dekan Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar), dalam makalah; *Teologi Agama Hindu*, disampaikan dalam seminar tanggal 12 Nopember 2009 di Medan, h. 2-6.

⁴⁷ Baca; I. Ketut Subagiasta, *Ibid.*, dan hasil *Wawancara*, dengan Naran Sami (Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan Pengurus FKUB Propinsi Sumaera Utara, mewakili majelis PHDI), tanggal 28 Juli 2009.

⁴⁸ Dalam kitab *Saramuccaya*, sudah jelas termuat pedoman hidup untuk tidak saling membenci, tidak menimbulkan duka lara bagi yang lain. Yang harus kita lakukan dan perhatikan. Ada hal yang

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa bagi umat Hindu harus mengendalikan perbuatan, perkataan, dan pikiran agar tidak menimbulkan duka atau konflik. Dari pikiran yang baik menimbulkan perkataan yang baik dan dari perkataan yang baik menimbulkan perbuatan yang baik, demikian pula sebaliknya. Perbuatan baiklah yang dapat dijadikan pedoman untuk membina hubungan yang selaras atau mewujudkan kerukunan.

Dalam kitab Yajur Veda XVI ayat 18 dikatakan bahwa semua manusia memandang apa dan siapa saja sebagai sahabat, bunyi lengkapnya sebagai berikut : *Mitrasya ma caksusa sarwani bhutani samiksantam, Mitrasyaham caksusa savani bhutani samikse, Mitrasya caksusa samiksamahe*. Artinya, Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai sahabat. Semoga kami saling berpandangan penuh dengan persahabatan.⁴⁹

Komitmen dialog untuk kerukunan ini diibaratkan mereka sebuah taman bunga yang indah. Taman yang indah, justru terbentuk karena beranekaragam bunga yang tumbuh subur di dalamnya. Bayangkan kalau bunga yang tumbuh di situ hanya satu jenis atau satu warna saja, tentu kurang menarik perhatian. Bagi umat Hindu pondasi kerukunan antarumat beragama adalah berdialog dengan siapapun dengan sikap menghargai perbedaan pendapat, dan tidak boleh meremehkan atau merendahkan martabat orang lainnya.

Demikian juga halnya dengan komitmen umat Budha. Sebagai ajaran yang timbul dari tradisi kepertapaan India, ajaran Budha lebih sering ditafsirkan sebagai ajaran yang memalingkan dirinya dari dunia sini. Penegasannya bahwa dunia dan kehidupan ini sebagai penuh penderitaan atau *samsara*, memberikan citra yang pesimistis, sekalipun bahwa sesungguhnya hal itu merupakan suatu yang realistik.⁵⁰ Hal ini tentunya juga akan memberi

ditimbulkan dari perbuatan, perkataan, dan pikiran yang menyenangkan dirimu sendiri tetapi menimbulkan duka dan sakit hati bagi yang lain. Lihat, Naran Sami, "Kerukunan Menurut Agama Hindu", dalam *Media Kerukunan FKUB Sumut*, (Medan : Edisi Perdana, 2008), h. 15-16.

⁴⁹ Tattwamasi berarti saya adalah kamu dan sebaliknya kamu adalah saya. Saya dan kamu sama, yaitu sama-sama bersumber dari yang satu yaitu Tuhan. Lihat; I. Wayan Wirta, "Upaya-Upaya Pencegahan Pencederaan Kerukunan Menurut Hindu", dalam *Media Kerukunan FKUB Sumut*, (Medan :Edisi VI, Juli-September 2009), h. 20-22.

⁵⁰ Baca; Oka Diputhera, *Ajaran Sang Budha*, (Jakarta : Dainippon Gitakarya, 1979), h, 1-12. Lihat; Narada, *Sang Buddha dan Ajaran-Nya*, (tpp, 1992), h. 5-17.

pengaruh kepada etika atau sikap hidup penganutnya yang tidak terlalu menaruh penghargaan yang positif terhadap materialitas maupun kehidupan ramai manusia di dunia ini.

Budha berasal dari kata *Buddhi* yang berarti *sadar* atau *bangun*. Budha berarti *yang telah bangun, yang telah sadar*. Jadi agama Budha adalah filsafat atau ajaran tentang kesadaran. Ajaran ini bersumber dari pengalaman seorang manusia bernama Siddhata Gotama, dikenal sebagai Sang Budha, yang mencapai kesadaran dengan upaya sendiri pada usia 36 tahun. Beliau dilahirkan pada bulan purnama, Mei tahun 623 SM di Taman Lumbini, Kapilavatthu diperbatasan India yang sekarang merupakan wilayah Nepal.⁵¹

Umat Budha tidak menganggap Sang Budha sebagai Tuhan, maka umat Budha tidak percaya bahwa sepotong kayu atau logam sebagai Tuhan. Dalam agama Budha *Patung Budha* digunakan untuk melambangkan kesempurnaan manusia. Patung Budha juga mengingatkan umatnya pada dimensi manusia dalam ajaran Budha, bahwasanya ajaran Budha bersifat *humanosentris* (berpusat pada manusia), bukan bersifat *theosentris* (berpusat pada Tuhan). Oleh sebab itu hendaknya *melihat kedalam* untuk *mencapai kebijaksanaan* dan *kesempurnaan*. Jadi umat Budha tidak benar menyembah berhala. Patung Budha berfungsi untuk mengingatkan umatnya akan Sang Budha yang telah mencapai *Penerangan Sempurna* sehingga akan mendorong mereka untuk lebih berusaha sungguh-sungguh menjalani ajaran Sang Budha untuk mencapai kebahagiaan.⁵²

Setiap orang bisa mempertanyakan, bagaimana peran agama ini dalam kehidupan modern dewasa ini dengan ciri kebudayaan ilmu pengetahuan yang dibangun di atas landasan rasio dan penghargaan yang penuh terhadap eksistensi dunia dengan segala hukum-hukumnya. Etika kepertapaan atau idialisme asketis berperan di hadapan kehidupan modern-duniawi untuk membendung ajakan nafsu dan keserakahan. Dalam kondisi itu diperlukan dialog untuk mengenal tradisi orang-orang yang beragama lain, sehingga dapat

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

membina hubungan secara baik, hubungan baik yang membantu meningkatkan kerjasama mengatasi berbagai persoalan kehidupan.

Untuk membina kerukunan hidup beragama, umat Budha telah memiliki pedoman yang dapat dijadikan tuntunan kehidupan harmonis yang oleh Budha disebut enam faktor yang membawa keharmonisan (*Saraniya-dhamma*). *Pertama*, cinta kasih diwujudkan dalam perbuatan. *Kedua*, cinta kasih diwujudkan dalam tutur kata. *Ketiga*, cinta kasih diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran. *Keempat*, memberi kesempatan kepada sesama ikut menikmati apa yang diperoleh secara halal. *Kelima*, di depan umum atau pribadi dia menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang. *Keenam*, di depan umum atau pribadi memiliki pandangan yang sama yang bersifat membebaskan dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis tidak bertengkar karena perbedaan pandangan.⁵³

Budha telah menghembuskan semangat spritualitas baru yang menghantam otoritas tradisi Brahmana, kemapanan kehidupan yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kebebasan manusia dari tembok-tembok kehidupan yang tidak manusiawi. Spritualitas baru tersebut memberi kemungkinan bagi manusia dari kalangan kasta mana saja, termasuk kaum wanita untuk menyambut jubah pembebasan spiritual, sekaligus mengangkatnya dari kungkungan budaya yang selama itu membelenggunya.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa umat Budha memiliki komitmen yang dialogis dan komunikatif serta terbuka dengan siapapun dengan landasan cinta kasih, bermoral dan menjaga perasaan orang lain. Tujuan dialog adalah pemahaman, komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Bukan maksudnya mencampuri agama orang lain, atau untuk mengalahkan yang lain, menarik orang lain dari keyakinan yang dianut. Tapi masing-masing pihak berusaha menerangkan doktrin, paham dan pengalaman imannya sehingga pihak lain bisa memahami secara rasional dengan saling

⁵³Kendro Yahya, (Pengurus WALUBI Propinsi Sumatera Utara), “Kerukunan Dalam Keberagaman Tradisi Agama”, dalam *Media Kerukunan FKUB Sumut*, (Medan : Edisi Juli-September 2008), h. 59.

membuka diri, berbagai pandangan dan pengalaman. Jika keselamatan merupakan cita-cita agama tentunya tidak memberi tempat pada usaha yang merugikan keselamatan orang lain, dialog antar agama adalah sama dengan dialog mengenai komitmen tersebut.

Dengan berlandaskan pada sabda Suci, umat Konghucu memiliki komitmen yang kuat bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Nabi Konghucu berpesan agar “di rumah hendaknya berbakti, di luar rumah hendak rendah hati, hati-hati hingga dapat dipercaya, berperilaku cinta kasih kepada masyarakat dan berteman dengan orang yang berperilaku cinta kasih. Waktu luang digunakan untuk belajar kitab meluaskan pengetahuan.”⁵⁴

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa agama Konghucu mengajarkan umatnya agar menjalankan kewajiban masing-masing secara benar, penuh tanggungjawab, berlandaskan cinta kasih, susila, bijaksana, setia, tahu malu dan menjaga hubungan antara sesama adalah merupakan komitmen untuk menciptakan kerukunan sejati di tengah masyarakat.

Di dalam kehidupan keseharian yang tidak terlepas dari hubungan sosial antar anggota masyarakat yang selalu terdapat perbedaan berbagai kepentingan, kebiasaan, budaya, bahasa, agama, perlu dikembangkan dan dibina semangat saling menghargai dan menghormati. Mampu menerima kehadiran kelompok yang berbeda dengan apa adanya sebagai sebuah anugerah Tuhan yang harus ditata sedemikian rupa agar dapat memberi manfaat yang tak terhingga bagi kehidupan bersama. Bersedia mendengarkan pendapat orang lain, meskipun kita tidak sependapat, karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun sebuah komunitas untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar dan mulia.⁵⁵

Ditemukan bahwa semua umat beragama menyadari akan pentingnya kerukunan antarumat beragama yang konstruktif membangun masa depan bersama. Untuk itu intensivitas dialog akan memperkecil jurang pemisah dan

⁵⁴ Ws. Ir. Djohan Adjuan, “Hidup Berkerukunan Dalam masyarakat Menurut Persepsi Agama Khonghucu”, dalam *Media Kerukunan FKUB Sumut*, (Medan: Edisi Juli-September 2008), h. 22.

⁵⁵ Ws. Ir. Djohan Adjuan, “Kerukunan Hidup Umat Beragama,” (makalah, tidak diterbitkan), disampaikan dalam kegiatan; *Pelatihan Kader Kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama*, (Medan : Hotel Dharma Deli), tanggal 7 Mei 2010.

memperluas wawasan terhadap ajaran agama lain, sehingga memungkinkan untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dialog tersebut tidak hanya pada tataran formalitas, tetapi yang diharapkan adalah dialog misi kemanusiaan global dan dialog karya membangun peradaban masa depan bersama yang lebih baik.

D. Muatan Pendukung Kerukunan

Secara sosiologis, kemajemukan agama merupakan suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya keragaman agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Rasjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti.⁵⁶ Ia mengibaratkan agama bukan sebagai (seperti) rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat pisah darinya. Berdasarkan keyakinan inilah, menurut Rasjidi, umat beragama sulit berbicara objektif dalam soal keagamaan, karena manusia dalam keadaan terlibat. Sebagai seorang muslim misalnya, ia menyadari sepenuhnya bahwa ia terlibat dengan Islam. Namun, Rasjidi mengakui bahwa dalam kenyataan sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*, bermacam-macam agama. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya *religious pluralism* dalam masyarakat.⁵⁷

Memang, agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia-termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia-bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu

⁵⁶ M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 24-28.

⁵⁷ *Ibid.*,

sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.⁵⁸

Untuk itu, Alwi Shihab menunjukkan dua komitmen penting yang harus dipegang oleh dialog, yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme. Toleransi adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Adapun yang dimaksud dengan pluralisme adalah tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan. Paling tidak, seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.⁵⁹

Ada sikap terbuka, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, tetapi tetap komit terhadap agama masing-masing merupakan modal dasar dialog konstruktif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog yang mampu mengeliminir perbedaan-perbedaan. Walau bagaimanapun dialog antarumat beragama yang telah berjalan selama ini, khususnya di Sumatera Utara, tetap ada kelemahannya di samping kekuatan untuk melestarikan kerukunan.

Setelah melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap jalannya dialog antarumat beragama di Sumatera Utara, ada beberapa hal yang menjadi perekat kelestarian kerukunan dan keharmonisan hidup umat bergama, antara lain terjadi afinitas antara agama dan etnisitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya keragaman etnis dalam agama dan keragaman agama dalam etnis. Seorang yang beragama Islam, di

⁵⁸Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", dalam *Majalah Prisma* 5, Juni 1978, h. 16. Lihat juga Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama" dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), h. 54-58.

⁵⁹Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung : Mizan, 1999), cet. VII, h. 41-43.

dalam rumpun keluarganya terdapat berbagai etnis, demikian juga sebaliknya satu etnis Karo misalnya terdapat berbagai agama.

Diakui bahwa manusia sebagai makhluk pembentuk tradisi melahirkan beragam ekspresi dan selanjutnya mencirikan etnisitas tertentu. Keragaman itu merupakan karakteristik tradisi itu sendiri yang cenderung berbeda antara satu dan lainnya di samping ia juga relatif berubah. Namun ditemukan sesuatu yang menghubungkan di antara parsialitas-parsialitas tersebut, yaitu entitas kemanusiaan yang dikandungnya.

Di Sumatera Utara terdapat beragam tradisi, salah satu ekspresinya adalah adat istiadat dan budaya masyarakat. Hal ini merupakan satu instrumen sosial yang penting untuk ditelaah dalam kaitannya dengan efektifitas hubungan antarumat beragama. Adat istiadat di daerah ini merupakan khazanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat heterogen. Dengan kata lain, adat istiadat dan budaya tertentu bukanlah monopoli suatu masa lalu, tetapi juga tetap relevan bagi masyarakat modern. Bahkan, sebagian masyarakat Sumatera Utara tidak memandang adanya klasifikasi adat istiadat berdasarkan rentang waktu, kendatipun telah terjadi pergeseran secara relatif. Kelihatannya, di daerah ini adat istiadat telah dijadikan secara efektif menjadi alasan komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antar individu dan antar kelompok masyarakat.

Efektivitas tradisonal di Sumatera Utara, misalnya dalam masyarakat Batak, yang tetap intens dan aksentuatif menganggap penting marga sebagai identitas pribadi dan keluarga. Hubungan primordial berdasarkan marga tersebut menjadi warga marga di mana saja, pada lapisan sosial dan agama apapun, merasa adanya hubungan emosional dan ikatan persaudaraan yang erat. Persaudaraan marga menjadi masyarakat Batak tidak terpecah disebabkan oleh perbedaan agama yang dianut. Cermin budaya itu menggambarkan bahwa nilai-nilai tradisonal masyarakat dapat tetap aktual dan secara efektif menjadikan hubungan antar sesama manusia yang berbeda agama dan kepercayaan tetap saja harmonis dalam satu ikatan persaudaraan. Ikatan-ikatan primordial seperti ini merupakan realitas nilai-nilai tradisonal yang tetap aktual dan efektif menjadi benteng pertahanan kekuatan sosial.⁶⁰

⁶⁰ Lihat, Tim Peneliti Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Indonesia Perwakilan Medan, *Kearifan Tradisional Yang Mendukung Kerukunan di Sumatera Utara*, (Medan : Laporan Penelitian, 2002). Baca, M. Ridwan Lubis, *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi*, (Medan : Laporan Penelitian, 2003).

Keaneka entitas etnik baik dari segi agama, bahasa dan budaya merupakan asset yang berharga untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat Sumatera Utara, baik secara parsial maupun komunal. Keanekaragaman itu mengandung dinamika sosial yang disikapi secara arif akan menjadi kekuatan membangun budaya dialogis dan konstukritf. Kelihatannya, masyarakat Sumatera Utara telah sejak lama merasakan pentingnya membangun semangat kerukunan, mengingat heterogenitas masyarakatnya sangat kentara. Oleh karena itu maka kalangan pemuka agama, cendikiawan, birokrat hendaknya mengambil prakarya untuk melakukan intervensi dalam penyusunan peta konsep rekayasa penyelesaian konflik partisipatif membangun kerukunan masa depan.

Selain yang penulis sebutkan di atas, satu hal yang menjadi kekuatan dialog kerukunan di Sumatera Utara juga adanya sistem kekrabatan yang termodifikasi dalam hubungan perkawinan. Inti dari sistem kekerabatan masyarakat Mandailing misalnya, bertumpu pada konsep *dalihan natolu* yang menegaskan bahwa semua orang dalam satu kampung, yang disebut *huta*, berada dalam satu ikatan kekerabatan yang besar. Kendatipun konsep *dalihan natolu* itu seseorang tidaklah permanen berada pada satu posisi, tetapi akan sangat tergantung di lingkungan marga apa ia sedang berada. Hal ini dapat mendorong munculnya sikap egaliter dalam memandang stratifikasi sosial. Dalam lingkup yang lebih jauh hal ini akan membangun semangat toleransi dan saling menghargai sesama manusia sekalipun berbeda etnis maupun agama.

Sebagaimana yang penulis utarakan pada bagian terdahulu bahwa penggabungan (*afinitas*) nilai agama dan adat cukup signifikan memperkuat hamonitas antarumat beragama. Sekalipun masyarakat di Sumatera Utara memiliki perbedaan agama akan tetapi mereka masih memiliki titik temu lain yaitu adat dan budaya masyarakat. Adat ini sendiri pada dasarnya sudah lebih dahulu ada sebelum agama-agama dunia masuk ke daerah ini. Oleh karena itu, faktor kesamaan marga akan menimbulkan harmoni di dalam masyarakat Sumatera Utara. Dinamika kehidupan ini kemudian membawa pengaruh kepada masyarakat perkotaan di daerah ini, walaupun mereka berada pada suasana kemajemukan yang kentara, namun dinamika ini justru dapat menimbulkan sikap saling menjaga eksistensi yang lain dan menghormati keberagamaannya.

Dalam budaya terdapat norma-norma yang memiliki satu kekuatan mengikat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima masyarakat sebagai suatu aturan.

Anggota masyarakat yang melanggar norma tata kelakuan dipandang menyimpang dan cenderung dikucilkan. Dengan demikian adat istiadat tentang tata kelakuan yang telah membudaya sehingga menjadi suatu ketentuan yang benar-benar mengikat dan harus dipatuhi. Masyarakat yang melanggar norma-norma adat diberikan sanksi.⁶¹ Dari gambaran ini dapat diambil suatu pengertian bahwa norma adat, selain sebagai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi masyarakat, ia juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tanpa membedakan marga dan keyakinan agama. Karena itu dapat dinyatakan bahwa norma-norma budaya sangat berpeluang dan dapat berfungsi sebagai perekat memperkuat pemeliharaan kerukunan di Sumatera Utara.

Di samping itu, yang menjadi kekuatan dialog kerukunan di Sumatera Utara adalah solidaritas umat beragama dan adanya pergaulan yang akrab antara pemuka agama. Para ulama berkunjung dan berdialog dengan berbagai pemuka agama, demikian juga sebaliknya kalangan pemuka agama Kristen baik dari Pastor maupun Pendeta telah terbiasa mengunjungi pemuka Islam dalam hari besar keagamaan. Pemuka Islam ikut menyampaikan pidato pada perayaan ulang tahun organisasi keagamaan, dan sebagainya. Sehingga suasana toleransi antarumat beragama telah menjadi tradisi pada sebagian besar di daerah ini.

Kelihatannya ada suatu kesadaran baru di antara para tokoh agama di Sumatera Utara, yaitu semangat pluralitas membangun sikap toleransi dan saling menghargai pada setiap karakteristik dan realitas kebudayaan yang ada, merupakan nilai aksiologis yang sangat penting. Keunggulan hanya ada dalam diri Tuhan sebagai Khalik, Yang Menciptakan makhluk-Nya. Dalam dimensi apapun dualitas antara yang Tunggal dan yang majemuk pada satu sisi sebenarnya bisa dipisahkan dalam kapasitas fungsi dan bentuknya, namun pada dimensi yang lain antara keduanya bisa saling memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Tuhan menciptakan berbagai jenis manusia sebagai khalifah-Nya dalam bentuk, rupa dan potensi yang cukup berbeda dan beragam, baik dari segi bahasa, warna kulit, suku bangsa,⁶² status sosial, dan sebagainya. Kenyataan ini dijelaskan dalam Alquran

⁶¹ Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-Teori Sosial Budaya*, (Jakarta : Dirjen Dikti, 1994), h. 31-32.

⁶² Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi serta berbagai macam bahasa dan warna kulit di antara kalian...(QS. Al-Rum/30: 22). ...kamilah yang membagi-bagi (dan

bukan hanya sebagai cerminan bagi tanda-tanda kekuasaan Tuhan semata, tetapi juga sebagai media di antara mereka untuk saling mengenal, melengkapi, mengimbangi, dan bertoleransi dalam kaitannya sebagai makhluk yang lemah, di samping sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki cita rasa tinggi, dibanding makhluk lain yang ada di muka bumi.⁶³

Manakala umat beragama menyadari bahwa perbedaan adalah anugerah, karena setiap orang, suku, bangsa memiliki kelebihan masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka kerukunan hakiki akan terjalin. Semua potensi yang dianugerahkan Tuhan memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pluralitas adalah suatu kenyataan individual dan sosial yang merupakan keputusan Tuhan yang harus disyukuri dan diberdayakan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sumatera Utara ditemukan adanya keharmonisan di satu sisi. Tetapi pada sisi lain ada juga terjadi konflik atau pertentangan, seperti pendirian rumah ibadah, pindah agama, pemeliharaan hewan ternak. Namun demikian, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya memiliki mekanisme untuk meredam konflik. Salah satu mekanisme dimaksud adalah konsep *dalihan natolu* (tiga tungku). Demikian juga sistem kekerabatan dalam bentuk marga telah menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Beberapa mekanisme tersebut telah menjadi titik temu bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjalin hubungan harmonis sekalipun mereka berbeda agama. Faktor lain yang dapat merukunkan, di samping pengayoman pemerintah, juga kepemimpinan lembaga keagamaan yang cukup berperan, yaitu Majelis-Majelis Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah berkumpul dan berdialognya para pemuka agama, Forum Komunikasi Lintas Adat (FORKALA) yaitu wadah berkumpul dan berkomunikasi para ahli adat yang terdiri dari berbagai agama, dan Pos Pemuda Lintas Agama, yang ketiga-ketiganya ini disebut sebagai tiga pilar kerukunan di Sumatera Utara.

membentuk perbedaan) dalam kehidupan dunia ini, diangkatnya status sebagian dari sebagian yang lainnya dalam beberapa derajat agar di antara mereka saling memanfaatkan. (QS. Al-Sukhruf/43; 32).

⁶³ Melalui kemajemukan, masing-masing nama Tuhan bisa memanifestasikan sifat-sifat-Nya sendiri yang berbeda dari sifat-sifat berbagai nama lainnya. Lebih lanjut penjelasan tentang hal ini baca Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung : Mizan, 1999), h. 93-95.

Dari penjelasan tentang kekuatan dialog antarumat beragama di Sumatera Utara, sebagaimana disebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan perekat kerukunan di daerah ini adalah terjadinya afinitas agama dan etnisitas, keterbukaan terhadap budaya lain, solidaritas antarumat beragama yang cukup baik, dan kesadaran sebagian umat beragama terhadap pluralitas sebagai anugerah dari Tuhan.

E. Hambatan Pelestarian Kerukunan

Di samping adanya kekuatan yang menjadi perekat kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara, pembinaan kerukunan juga memiliki hambatan, antara lain adanya trauma penyebaran agama dan isu seputar Kristenisasi dan Islamisasi. Isu ini masih sering muncul di permukaan yang kemudian berkembang kepada implikasi pengertian mayoritas dan minoritas. Hal ini bermula dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian penganut Kristen yang begitu gencar melakukan kegiatan misionari itu. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh sebagian penceramah-penceramah muslim yang begitu gencar terkesan membuka ruang konflik dengan penganut agama lain. Semangat proselit, yaitu pindahnya seseorang dari iman yang lama kepada iman yang baru dirasakan sebagai faktor penghambat dalam merajut keharmonisan antarumat beragama di daerah ini, sekaligus sebagai kelemahan jalannya dialog lintas iman.

Meningkatnya ketegangan antara umat Islam dan umat Kristen yang dipicu oleh perpindahan agama secara massal ke agama Kristen pada awal Orde Baru bukan saja memaksa pemerintah Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Antaragama tahun 1967 dengan tujuan untuk meredam gejolak yang mungkin merisaukan itu, tetapi juga mengilhami Dewan Gereja se dunia untuk menyelenggarakan dialog antarumat beragama, yang dimulai tahun 1970.

Memang tidak dapat dihindari bahwa baik Islam maupun Kristen, keduanya sama-sama merupakan agama dakwah. Islam sebagai agama dakwah adalah konsekuensi logis atau perwujudan dari doktrin dasar bahwa agama itu membawa kebenaran, menghantarkan umat ke jalan yang diridhai Allah Swt, maka ia harus didakwahkan, dengan tujuan agar seseorang bisa terhindar dari hidup sesat, baik sesama masih di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi ciri agama mionaris ternyata

tidak hanya dimiliki oleh Islam. Kristen juga mempunyai ciri yang sama, yakni sebagai agama yang harus disebarkan kepada orang lain, dengan penyelamatan atau pembebasan dosa yang dilakukannya melalui Yesus, seperti tersebut dalam Injil Matius 28:19-20, yang memerintahkan murid-murid Yesus untuk mencari murid dari seluruh bangsa.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang terarah atau tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama juga menjadi faktor lemahnya dialog. Rapuhnya jaminan konstitusi kebebasan beragama tidak saja diakibatkan oleh kurang terimplementasinya undang-undang dimaksud, lebih dari itu kerapuhan tersebut disebabkan pula oleh penafsiran yang kerap kali dipersempit pada undang-undang turunannya. Pada gilirannya kondisi ini melahirkan hukum yang saling tumpang tindih, bahkan kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

Kebijakan pemerintah yang kurang terarah atau tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan kerukunan, antara lain; Undang-Undang no. 1/PNPS/1965 pasal 1 yang menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Peraturan itu tumpang tindih dan kontradiktif dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.012/95 tertanggal 18 Nopember 1978 yang menyatakan bahwa agama yang diakui pemerintah ada lima; Islam, Kristen, Katolik Hindu dan Budha. Walaupun kemudin pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid, dengan penjelasan Departemen Agama tentang status agama Khonghucu tertanggal 21 Juli 1999, dan Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2000 , bahwa agama Khonghucu diakui kembali sebagai agama yang dipeluk di Indonesia.⁶⁴

Saat ini pemerintah menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan ajarannya bagi tiap-tiap umat. Umat beragama beroleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kehidupan mereka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan merugikan umat beragama lain. Terganggunya

⁶⁴ Lihat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Edisi Kedelapan, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2006. Baca, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MATAKIN*, dan *Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Pelayanan Untuk Umat dan Kelembagaan Agama Khonghucu Indonesia*, (Jakarta : MATAIN, 2009), h. 39-42.

hubungan antara pemeluk berbagai agama akan membawa akibat yang menggoyahkan bangsa. Pemerintah mengambil kebijaksanaan tidak membenarkan bagi agama mana pun untuk menjadikan umat yang telah beragama menjadi sasaran penyebaran agama. Hal ini tertuang dalam PP No. 1 Tahun 1965 dan SKB 2 Menteri No. 70 Tahun 1978, dan SKB 2 Menteri No. 1 Tahun 1979. Namun sebagian umat beragama menganggap bahwa terbitnya peraturan itu menghambat lajunya pertumbuhan umat beragama. Dalam kenyataannya hal ini telah mengusik serta membelenggu kebebasan beragama dan hak asasi manusia, di samping tidak ada kejelasan sanksi apa yang diberikan kepada yang melanggar peraturan tersebut.

Di samping beberapa faktor di atas yang menyebabkan lemahnya dialog antarumat beragama di Sumatera Utara. Kurangnya perhatian dan dukungan dari Pemerintah daerah juga menjadi faktor lemahnya intensitas dan kualitas dialog dijalankan. Artinya, Pemerintah daerah terkesan setengah hati memberikan dukungan, baik moril maupun materil. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebagian FKUB di Indonesia belum mengalokasikan anggaran pembinaan kerukunan umat beragama secara permanen. Padahal kerukunan dan harmonitas merupakan modal dasar pembangunan di segala bidang, semestinya anggaran untuk pembinaan kerukunan baik secara substansial maupun institusional dialokasikan tersendiri dan permanen.

Kemudian peran Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Utara dalam mensosialisasikan dan membina kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat belum maksimal. Hal ini dibuktikan hampir seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, belum memiliki satu lembaga khususnya yang menangani masalah kerukunan dan hubungan antarumat beragama. Kalaupun ada, kegiatannya kurang kelihatan karena belum mendapat dukungan yang optimal dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Padahal perguruan tinggi sebagai lembaga akademis yang mencetak para sarjana sangat strategis dan kontributif dalam pembinaan kerukunan melalui dialog intensif.

Dari penjelasan tentang di atas, dapatlah dipahami bahwa ada beberapa faktor penghambat melestarikan kerukunan, yaitu kedangkalan pengetahuan dan pemahaman umat beragama terhadap ajaran agamanya sendiri. Minimnya kaderisasi kerukunan dan krisis kepercayaan kepada tokoh agama juga menjadi faktor, di mana mereka kehilangan kredibilitas dan hampir tidak ada lagi tokoh yang dipercayai, sehingga

nasehat dan petunjuknya tidak dipatuhi. Selain itu, adanya trauma penyebaran agama yang dilakukan secara agresif dan sporadis, dan kurang terarahnya perturan pemerintah atau masih terjadinya konsensus yang tumpang tindih, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang mengarah kepada konflik. Di samping itu juga disebabkan oleh setengah hatinya pemerintah dan kurangnya perhatian perguruan tinggi terhadap pembinaan kerukunan tersebut.

D. Historisitas Regulasi Perlindungan Umat Beragama.

Dari arena Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk kerukunan Bangsa yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8-11 Pebruari 2018, muncul kembali keinginan agar interaksi umat beragama di Indonesia diatur secara khusus. Artinya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Mewujudkan dan melestarikan Kerukunan ditingkatkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama secara profesional demorafis umat beragama,

Pada masa lampau, hubungan antarumat beragama didasarkan pada bingkai kultur atau nilai-nilai sosial dan teologis, di samping bingkai politis dalam bentuk empat pilar kebangsaa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Namun demikian, dengan perkembangan masyarakat yang cepat beserta aspirasi dan kepentingan masing-masing kelompok keagamaan yang semakin bervariasi, bingkai cultural, teologis dan politis ini tidak cukup untuk mewujudkan kerukunan dan mengatasi konflik.

Upaya dialog antarumat agama yang dilakukan oleh pemerintah, terutama masa Orde Baru, tidak dapat dijelaskan dari konteks politik pada masa tersebut. Sebagaimana indikasi yang ditunjukkan, pemerintah berupaya mengambil jalan yang tidak berpihak dalam konteks hubungan antarumat beragama, khususnya Muslim dan Kristiani. Dalam diskusi di bawah ini kita akan melihat secara kritis konteks munculnya dialog antarumat beragama yang di upayakan oleh pemerintah. Keterlibatan Negara dalam bentuk regulasi untuk mengurus kehidupan beragama merupakan suatu keniscayaan dalam hal yang bias menimbulkan konflik atau kekacauan, dan bukan dalam hal substansi ajaran agama.

Dalam sejarah Indonesia, kita mengetahui bahwa setelah perang kemerdekaan berakhir, pada 1950-an dan awal 1960-an, partai komunis Indonesia mendapat dukungan besar dari presiden Sukarno. Setelah peristiwa kudeta 1965, ketika masyarakat Indonesia harus memilih salah satu agama yang diakui pemerintah, gereja-

gereja dibanjiri oleh orang-orang yang baru saja memeluk Kristen. Hal itu menimbulkan paling tidak dua masalah bagi hubungan antarumat beragama, terutama muslim dan kristiani. Pertama, berkembangnya anggapan bahwa gereja memberikan tempat perlindungan bagi anggota PKI, dan kedua, meningkatkan jumlah Kristen dan gereja di Indonesia, terutama di pulau Jawa.

Dalam konteks isu penyebaran inilah musyawarah antar agama dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1967 atas prakasa pemerintah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh menteri agama, K.H.M. Dachlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 kaum Muslim, Protestan dan Katolik. Dalam pidatonya, Soeharto menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan respon atas ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Lebih jauh dia memperingatkan bahwa tidak ada satu kelompok umata beragama pun yang boleh mengajak umat beragama lain untuk mengikuti agama mereka. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat dihasilakan satu kesepakatan mengenai dakwah kepada penganut agama lain.

Sejak itulah pemerintah, melalui Kementerian agama, memperkenalkan peraturan tambahan mengenai hubungan antarumat beragama. Pada 1969, menteri agama dan menteri dalam negeri menandatangani surat keputusan bersama (NO.1/BER/MDN-MAG/1969) mengenai tugas *pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemilikny*a. Peraturan tersebut didasari, antara lain, pemikiran bahwa pemerintah perlu menjaga kebebasan setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Di antara peraturan yang penting adalah bahwa kepala daerah harus memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga tidak terjadi konflik.

Selain itu, kegiatan tersebut tidak boleh mengandung unsur intimidasi, penyuapan, pemaksaan, atau ancaman, dan tidak boleh mengganggu keamanan umum. SKB tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan rumah ibadah apapun harus mendapat izin dari gubernur propinsi atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut.

Nalar Kerukunan seperti diatas yang berdasar pada asumsi bahwa upaya hubungan antarumat beragama menjadi tanggungjawab para pemuka agama, dan bahwa upaya tersebut menekan pada penjagaan jumlah pemeluk agama, telah menempatkan dialog pada komunikasi yang tidak produktif. Sunardi menegaskan bahwa hal itu disebabkan karena isu agama direduksi menjadi isu *penyebaran agama* dari harmoni yang di promosikan oleh pemerintah dipahami sebagai tidak adanya konflik, bukan sebagai tanggung jawab bersama.

Konsep kerukunan yang dipahami dalam artian masing-masing pemeluk agama menahan diri dari *membujuk* penganut agama lain untuk masuk keagamanya sendiri

menjadi orientasi awal program dialog antarumat beragama zaman Orde Baru. Meski gagal di pertemuan awal, Menteri Agama K.H.M Dachlan dan penggantinya terus mengupayakan pertemuan tokoh-tokoh agama, konsultasi, dan upaya lainnya. Konsep tersebut menjadi jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Mukti Ali (1971-1978), yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Mukti Ali, yang menempuh pendidikan S2-nya di McGill University Montreal, Canada, dibawah bimbingan Wilfred Cantwell smith, memiliki perhatian khusus terhadap isu hubungan antarumat beragama. Bahkan sejak 60-an pun dia sudah mulai memperkenalkan ide dialog antaragama di Yogyakarta. Rintisan Mukti Ali tersebut sangat terikat dengan usaha Orde Baru dalam percepatan stabilitas sosial untuk pembangunan nasional. Dengan konsep tersebut, pemerintah (Depag) menginginkan masyarakat melupakan perbedaan dan lebih berfokus kepada kepentingan bersama yakni pembangunan.

Dalam berbagai upaya yang dia lakukan, terkait dialog antaragama dan antarumat beragama, Mukti Ali mendapat kritikan dari beberapa kalangan karena konsep yang ditawarkannya dianggap hanya menyentuh level politis masyarakat. Klaim itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Pada level wacana, Mukti Ali menawarkan konsep dialog *agree in disagreement* ini mungkin memang menawarkan konsep dialog antaragama yang hanya dipahami kalangan masyarakat tertentu, tetapi melalui berbagai aktivitas kerukunan hidup beragama selama masa pemerintahannya, dia menawarkan langkah praktis. Sebagai contoh pada 1977, Kementerian Agama mengadakan program kerjasama sosial kemasyarakatan (Camping) di Jakarta dan Medan. Sekitar 10 orang mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, dan 10 mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu keagamaan yang dilanjutkan dengan program sosial untuk membantu masyarakat sekitarnya. Selain itu, pada 1972-1977, kementerian agama telah menyelenggarakan 23 pertemuan dialog antar agama yang berlaku di 21 wilayah di Indonesia yang melibatkan berbagai pemuka agama, pemerintah, dan kepercayaan local, seratus mengadakan program latihan penelitian agama, yang menghadirkan orang dari berbagai latar belakang agama dalam 1 forum selama 3 bulan. Namun program – program tersebut tidak lepas dari kritikan, terutama menyangkut hasil akhir dan tindak lanjut.

Mukti Ali sendiri pun mengakui bahwa dialog antarumat beragama yang dijalankan oleh para pengajar secara pribadi lebih membuahkan hasil daripada yang dijalankan secara formal pada dataran pemerintahan

Pada masa Orde Baru, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara lebih mudah mengetahui secara resmi masyarakat agama tertentu melalui wadah-wadah perwakilan keagamaan yang ada, seperti MUI,

KWI, dan PGI. Para Digma Orde Baru adalah persatuan dan kesatuan. Kebijakan dengan menitikberatkan pada kerukunan dengan membatasi ekspresi perbedaan dan menorsatukan *persatuan* demi pembangunan tersebut dilanjutkan oleh menteri-menteri Orde Baru setelah Mukti Ali.

Alamsyah Prawiranegara (1978-1983), seorang militer menggantikan posisi Mukti Ali. Obsesi pemimpin Orde Baru untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri baru menuntut terwujudnya kondisi sosial yang sangat stabil, dan Alamsyah dianggap cocok menjadi tulang punggung presiden dalam mensosialisasikan kepentingan Orba tersebut dalam bidang agama. Untuk itu dia mengeluarkan surat keputusan (SK), yaitu SK NO. 70/1978 dan SK NO. 77/1978, yang diperkuat dengan SKB menteri agama dan menteri dalam negeri NO. 1/ 1979. SK 77/1978 membatasi bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. SK tersebut mengatur bahwa bantuan hanya boleh diberikan dengan persetujuan atau rekomendasi menteri agama. Selain itu, sejalan dengan arah pembangunan keagamaan di Indonesia, SK tersebut juga mengatur bahwa keterlibatan orang-orang asing dibatasi. Karena SK itu ditujukan kepada semua agama yang diakui oleh pemerintah, maka tidak hanya umat Kristen yang terkena dampaknya, Namun juga umat Islam yang menerima bantuan dari Timur Tengah.

Selain itu, dalam tugas menyukseskan program kerukunan umat beragama, Alamsyah Prawiranegara memperkenalkan konsep trilogi kerukunan (trikondial), yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama tertentu, (2) kerukunan eksternal antarumat beragama, (3) dan kerukunan berbagai antarumat beragama dengan pemerintah. Ketiga poin tersebut tidak terlepas dari konsep penyeragaman Orde Baru demi stabilitas nasional dimana perbedaan dianggap sebagai potensi konflik yang mengancam program pembangunan.

Tap MPR tahun 1983 tentang asas tunggal Pancasila bisa dianggap sebagai puncak usaha Orba dalam hal penyeragaman. Pada masa Alamsyah, dan diperkuat oleh Munayir Sazjali, setiap organisasi politik, dan bermasyarakat wajib mencatumkan Pancasila sebagai gerakannya. Alamsyah bergerak ke kantong-kantong Islam untuk meyakinkan masyarakat dan para pemimpin Islam bahwa ide asas tunggal itu tidak bertentangan dengan Islam. Alamsyah menjadi juru bicara pemerintah dalam menekankan pentingnya *common platform* sebagai satu kesatuan bangsa dan Negara. Alamsyah, misalnya, mengunjungi kiai-kiai karismatik untuk meyakinkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jika pada masa Mukti Ali dialog antaragama berorientasi pada intra dan antarumat beragama yang saling bertentangan, maka hal yang baru pada Alamsyah adalah upaya pemerintah untuk mengontrol agama lewat kerjasama dan kerukunan antar agama (terutama organisasi agama Islam) dengan pemerintah.

Selain itu pada masa Alamsyah juga, wadah musyawarah antar umat beragama, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1967, dibentuk pada 1980 melalui SK NO.35/1980. Wadah tersebut terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan (MUI, MAWI, DGI, WALUBI dan PHDI) yang kemudian menyetujui untuk menandatangani pedoman dasar bagi hubungan antar umat beragama. Keputusan yang dihasilkan oleh wadah tersebut memiliki nilai moral yang mengikat yang digunakan sebagai saran atau rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat luas. Wadah musyawarah antar umat beragama cukup aktif dalam merespon berbagai kejadian, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Namun, satu hal yang menjadi kritik atas upaya dialog yang dilakukan oleh Alamsyah adalah perbedaan penekanan yang dilakukannya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Mukti Ali. Johan Effendi mengatakan bahwa jika Mukti Ali percaya bahwa kerukunan antar umat beragama harus dilakukan melalui dialog, maka Alamsyah menekankan pada pentingnya dialog melalui penciptaan peraturan.

Munawir Sazjali menggantikan Alamsyah Prawiranegara pada 1982, namun kurang memberikan perhatian pada isu dialog antar umat beragama. Dia memang mengundang tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam wadah musyawarah antar umat beragama tahun 1983, namun dengan tujuan untuk membicarakan keinginan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada era keemasan Orde Baru, 1980-an, Munawir Sazjali tidak lagi bertugas secara khusus (meski meneruskan) untuk mendamaikan hubungan antar umat beragama dan dengan pemerintah, tapi dia lebih mengemban misi modernisasi umat Islam. Di masa perekonomian Indonesia sedang subur, umat Islam, sebagai masyarakat mayoritas, dianggap perlu digarap agar tidak menjadi penghalang, tetapi sebaliknya menjadi pendukung utama program pembangunan. Sehubungan dengan maraknya oposisi dari pemerintah dan pihak Islam karena stereotip yang beredar di kalangan pemerintah kelompok militer nasional, dan Kristen, diperlukan program yang bisa lebih memperdayakan umat Islam.

Proyek modernisasi Munawir tidak lain merupakan pengangkatan citra umat Islam ke pentas bernegara secara nasional. Beberapa strategi yang dia lakukan termasuk pengembangan sistem pendidikan Islam, program pembangunan madrasah-madrasah aliyah khusus, dan pengembangan kurikulum pendidikan di perguruan tinggi khususnya (IAIN) dengan, antar lain, mengirim dosen-dosen agama ke Eropa Amerika. Munawir, bagi banyak kalangan, bisa disebut sebagai menteri modernisasi Islam. Meski program Munawir sangat berarti positif bagi sebagian masyarakat Muslim, tetapi dalam kebijakan kerukunan umat beragama kita dapat melihat bahwa mengembangkan kebijakan Orde Baru sebagaimana diuraikan di atas.

Di akhir pemerintah Orba, dua menteri agama, Tarmizi Taher dan Quraish Shihab, merupakan suatu upaya meneruskan capaian Munawir. Tarmizi Taher, yang

menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 1933-1998 sangat aktif dalam mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Dia menerbitkan buku dalam bahasa Inggris berjudul *aspiring for the middle path: Religious Harmony in Indonesia*. Disamping mengundang tokoh-tokoh agama dunia ke Indonesia Tarmizi melakukan banyak lawatan ke luar negeri untuk memperkenalkan dan mempromosikan kedamaian dan kerukunan yang telah dibangun Orde Baru berdasarkan Pancasila. Tarmizi yakin bahwa apa yang dicapai di Indonesia bisa dijadikan contoh tentang kerukunan di dunia internasional. Namun, upaya-upaya tersebut dapat dianggap lebih sebagai respons atas berbagai insiden dan konflik yang terjadi di Indonesia pada awal 1990-an, ketimbang usahanya yang murni bagi keberlangsungan dialog antarumat beragama di Indonesia.

Pada masa Tarmizi Taher juga didirikan Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta. LPKUB didirikan pada 1993 untuk membangkitkan kembali aktivitas dialog yang dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Namun, LPKUB didirikan bukan sebagai lembaga fungsional yang mengurus hubungan lintas agama, melainkan sebagai lembaga penelitian mengenai hubungan antaragama yang tidak berhubungan langsung dengan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. LPKUB melakukan berbagai aktivitas dialog dan menerbitkan jurnal berbahasa Inggris *Religiosa*. Dipenghujung 1990-an LPKUB terlibat dalam beberapa konflik internal dan menghentikan aktivitasnya sejalan dengan berhentinya dana dari Kementerian Agama untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

Uraian di atas menegaskan bahwa pada masa Orde Baru, berbagai kebijakan bertujuan untuk dapat mengontrol kehidupan umat beragama agar tidak erlibat secara politis dan tidak terlibat konflik yang dapat mengancam kekuasaan Orde Baru, serta untuk mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Dengan demikian, pemerintah tampak kurang tertarik untuk mengupayakan suasana dialog antarumat beragama yang didasarkan pada penyebaran nilai-nilai keadilan secara serius dan berkesinambungan.

Selain itu, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama mengeluarkan peraturan Bersama nomor 9/2006 dan nomor 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk membatalkan surat Keputusan Bersama nomor: 01/BER/MDN/1969 yang telah dibahas sebelumnya karena, antara lain, masalah pendirian rumah ibadah dianggap menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antarumat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi bagian peraturan Bersama di atas merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat lokal dan fasilitas oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah

daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum tersebut bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat: menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat: serta melakukan sosialisasi pertauran perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu tugas FKUB tingkat kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Beberapa kebijakan di atas dapat dilihat sebagai perkembangan yang cukup signifikan karena orientasi hubungan antarumat diarahkan pada komunikasi dan kerjasama yang lebih jujur.

Selain itu, pada 2001 didirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), yang merupakan lembaga fungsional sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menangani secara langsung kerukunan antarumat beragama. Walaupun lembaga tersebut secara kebetulan berdiri bersamaan dengan berkembangnya berbagai gejolak konflik di Kupang, Sambas, dan Ambon, namun pendirian PKUB tidak didasari oleh konflik tersebut atau karena *euphoria* reformasi, tetapi lebih karena Depag membutuhkan sebuah struktur yang dapat menampung operasional fungsi Depag yang kurang efektif tentang persoalan kerukunan. Sebelum PKUB berdiri, sejak 1985 Depag sudah memiliki Staf Ahli Bidang Kerukunan, namun masukan-masukan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena Depag tidak memiliki lembaga fungsional sebagai pelaksana. Untuk menjembatannya persoalan tersebut, fungsi Staf Ahli Bidang Kerukunan dialihkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Depag) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Atho' Mudzhar dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan kehidupan keagamaan. Hasil-hasil riset dilakukan lembaga inilah yang kemudian dijadikan patokan kebijakan untuk merumuskan program dan gerak PKUB.

Selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam bidang dialog antarumat beragama, ada juga upaya lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Praktik dialog salah satu agenda kebijakan luar negeri Indonesia yang dikembangkan oleh Kemlu. Semenjak 2002 Deplu menjalankan Diplomasi Total yang dimaksud sebagai cara untuk memandang setiap isu secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Sejak awal 2002 Deplu melakukan *Foreign policy breakfast* dengan mengundang berbagai politisi, pemimpin media, tokoh-tokoh lintas agama, intelektual, dan ormas-ormas pemuda. Ada dua hal pokok yang mendasari upaya Deplu tersebut, yaitu maraknya perbincangan tentang terorisme (dan kaitannya dengan Indonesia) di level internasional, dan gambaran tentang Islam yang seringkali bersifat negatif. Untuk itu, sejak Maret 2002 Deplu membentuk masyarakat umum. Diplomasi publik itu diharapkan menjalankan kegiatan yang mempromosikan demokrasi, Islam yang moderat, kebijakan pembangunan ekonomi

yang progresif, peran aktif Indonesia dalam membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan sejahtera. Dalam upaya memberantas terorisme untuk jangka panjang, deplu menyadari perlunya memberdayakan kaum moderator (*empowering the moderates*), dan dalam konteks itulah dialog antaragama dan budaya menjadi niscaya.

Dialog antarumat beragama ditingkatkan nasional maupun internasional bermula di penghujung 1990-an. Pada 1967 bibit-bibit dialog di Indonesia sudah mulai muncul, meski sebenarnya saat itu lebih merupakan respon terhadap konflik. Dalam lingkup dunia internasional, baik komunitas Katolik maupun Kristen hampir secara bersamaan melakukan berbagai Dialog Antarumat Beragama upaya sistematis untuk mengembangkan dialog antarumat beragama, untuk alasan berbeda-beda, pada akhir 1990-an. Salah satu Kementerian yang dianggap sangat berperan dalam mengembangkan ide dan praktik dialog umat beragama adalah Kementerian Agama (dulu Departemen Negara [kemenag]).

Sejak masa Menteri Agama Mukti Ali, KUB menjadi salah satu isu yang banyak mendapat porsi dalam kegiatan-kegiatan kemenag. Kemenag lalu tugas khusus menjalankan program-program soal kerukunan. Badan-badan penting tersebut di antaranya setelah peristiwa Musyawarah Antarumat Beragama pada 1967, wadah Musyawarah antarumat beragama (WMAUB) pada 1980, lembaga pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPUKB) pada 1993, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada tahun 2001, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 2006.

Di dalam Orde Baru, ada dua lembaga kerukunan yang berdiri atas inisiasi pemerintah (kemenag) yaitu, Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB) dan lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB). WMAUB berdiri pada 1980 pada masa Menteri Alamsyah Prawiranegara, sedangkan LPKUB berdiri pada 1993 ketika Tarmizi Taher menjabat sebagai Menteri. Di bab sebelumnya sudah disebutkan sejarah pendirian WMAUB dan LPKUB yang sangat terkait dengan isu-isu ketegangan antaragama di berbagai daerah. Dalam bagian ini akan lebih difokuskan bagaimana WMAUB dan LPKUB bekerja dan menjalankan programnya. Meski keduanya mempunyai fungsi berbeda, tapi dua lembaga yang berdiri di masa yang berbeda cukup memberi gambaran agresivitas pemerintahan dalam mengenai program kerukunan beragama di masyarakat.

Secara resmi WMAUB berdiri pada 30 Juni 1980 di Jakarta, didahului serangkaian pertemuan-pertemuan pendahuluan yang diselenggarakan oleh kemenag. Pada hari pertemuan puncak yang melahirkan WMAUB, Alamsyah mengeluarkan Keputusan Menteri yang sekaligus mendeklarasikan berdirinya sebuah badan kerukunan yang dibentuk oleh majelis-majelis agama. Fungsi utama WMAUB adalah menjadi forum konsultasi dan komunikasi antar petinggi atau pemimpin agama. Bentuk kegiatan badan tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang digagas baik oleh

pemerintah maupun salah satu majelis utama, dengan kegiatan utama bermusyawarah membahas berbagai hal terkait tanggung jawab bersama dan kerjasama antar warga Negara yang menganut berbagai agama yang berbeda. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan beragam rekomendasi, pernyataan sikap, dan keputusan bersama yang berkaitan dengan isu-isu keragaman agama di Indonesia. Dalam bukunya, Sudjani mencatat terdapat sekitar 10 keputusan yang sudah dihasilkan WMAUB, mulai dari keputusan materi hingga rekomendasi dan seruan untuk umat tentang masalah-masalah keagamaan di Indonesia sebagai salah satu contoh adalah seruan WMAUB berkenaan dengan berbagai krisis yang melanda Indonesia pada 1998.

WMAUB menjadi wadah yang kurang mandiri. Hal itu disebabkan, antara lain, akibat fasilitas operasional yang disediakan kemenag, dan keberadaan wakil-wakil pemerintah (kemenag) dalam badan Panitia WMAUB yang disebut Badan Konsultasi Antarumat Beragama(BKAUB). Badan yang disebut terakhir di ketuai oleh sekretaris Jendral Kemenag (wakil Menteri) yang beranggota perwakilan dari majelis-majelis agama dan para sekretaris Ditjend Bimbingan Masyarakat dari masing-masing agama di Kemenang. Kondisi tersebut seringkali membuat program kerukunan umat beragama yang digagas oleh kemenag mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat sebagai program yang tidak membumi, karena hanya melibatkan elit agamawan.

Berbeda dengan WMAUB yang menjadi forum kegiatan elit pemimpin agama, LPKUB menjadi lembaga pertemuan kaum intelektual dari berbagai agama. Tujuannya bukan untuk menghasilkan keputusan praktis bagi pemerintah atau umat beragama seperti WAUB tapi untuk memperkuat basis pertimbangan akademik, terutama ilmu-ilmu sosial, dalam pemecahan masalah-masalah antar umat beragama.

LPKUB, yang sekarang sudah tidak aktif lagi, berdiri pada masa Tarmizi Taher, tepatnya pada kongres ke 1 agama-agama di Yogyakarta 11-12 Oktober 1993. Lembaga itu pertama kali dipimpin oleh Pof. Dr. Burhanuddin Daya, guru besar IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan LPKUB antara lain :*pertama*, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda dan *kedua* meyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan antar agama yang harmonis LPKUB membuat kajian-kajian yang membahas memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat Internaisonal. Sesuai dengan politik citra kerukunan Tarmizi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasioanl. Untuk tujuan tersebut, salah satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal internasional *religious* yang ditulis dalam bahasa Inggeris, Arab dan Prancis.

Jika WMAUB pada masa kepemimpinan Alamsyah Prawiranegara didirikan untuk kepentingan *menundukkan* majelis-majelis agamawan berumat banyak, LPKUB pada masa Tarmizi Taher dibuat agar kerukunan berdasarkan Pancasila bisa menjadi bahan kajian akademis dan popularitas bagi masyarakat Internasional. Berbagai seminar dan kajian tentang ketegangan-ketegangan antarumat beragama dilakukan pada masa tersebut.

Salah satu semangat reformasi yang paling kuat adalah kebebasan berpendapat bagi semua pihak. Perangkat-perangkat sosial politik dibuat sedemikian rupa untuk mengubah situasi totalitarian di masa Orde Baru ke kondisi yang lebih egaliter. Kesadaran akan perbedaan dan masyarakat yang multikultural bergaung dengan kuat. Contoh terbaik dalam bidang kerukunan agama yang dicapai pada masa ini adalah dicabutnya Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang bernuansa diskriminatif. Presiden Abdurrahman Wahid memotori gerakan ini dengan memasukkan kembali Konghucu sebagai salah satu agama yang dilayani di Indonesia. Selain itu, kemenag diposisikan kembali sebagai penjaga kerukunan umat Beragama ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Paradigma baru akan kerukunan umat beragama tercermin dari kebijakan tentang kerukunan umat beragama dan program-program yang dilakukan oleh kemenag.

Seiring dengan lahirnya periode Reformasi yang diwarnai konflik antar etnis dan umat beragama di beberapa wilayah Indonesia, ditambah kompleksitas permasalahan kerukunan, maka fokus yang dikembangkan oleh kemenag kemudian adalah *teologi* kerukunan multikultural. Hal itu mulai oleh Menteri Tolchah Hasan dan dilanjutkan oleh Menteri Said Agil Hussein Almunawar. Dalam konteks tersebut, kerjasama antar agama lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan antar pemeluk agama. Mulai periode tersebut hingga sekarang, di laksanakan kebijakan *pengembangan wawasan multikultural* dengan pendekatan *battomup* (bukan seperti masa Orde Baru yang *Topdown*).

Jika konsep *agree in disagreement* (yang direncanakan oleh Mukti Ali) lebih berorientasi pada pengakuan akar perbedaan (toleransi), maka periode pasca Reformasi idenya berorientasi pada komunikasi kerjasama yang tulus antar pemeluk agama, atau penganut tradisi yang berbeda-beda (melampaui toleransi). Di samping menghilangkan sikap curiga, tujuannya adalah menumbuhkan sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran setiap agama. Paradigma dialog multikultural yang terus dikembangkan hingga saat ini dipengaruhi oleh kesadaran akan semakin intensifnya komunikasi dan pergerakan masyarakat nasional dan global akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh teknologi informasi. Hubungan yang menglobal dan intensif menyadarkan akan pentingnya sebuah wawasan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam

dengan tidak saja bersikap toleran dalam perbedaan, tetapi juga bisa berbagi kesadaran yang tulus dan bekerjasama dalam suasana saling memperkuat iman masing-masing.

Mantan Menteri Agama Said Agil Hussen Almunawar dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat baik vertikal maupun horizontal pada satu sisi merupakan tantangan atas kesatuan bangsa. Namun di sisi lain, hal tersebut merupakan asset kekayaan yang dapat mempermudah kemajuan suatu bangsa. Apakah perbedaan itu akan menjadi asset terletak pada bagaimana cara kita mengelola perbedaan-perbedaan tersebut. Perhatian kemenag periode reformasi pada praktik dialog antarumat beragama lebih membumi dibandingkan dengan Masa Orde Baru ditunjukkan dalam upayanya menangani kerawanan konflik antarumat beragama dengan lebih melibatkan masyarakat. Sesuai dengan semangat otomoinasi pada masa kepemimpinan menteri Maftuh Basyuni tahun 2006, ditetapkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 masing-masing tentang pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan tentang Pembardayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Pedirian rumah Ibadat.

Hanya saja, pelaksanaan regulasi ini belum sepenuhnya efektif yang antara lain disebabkan karena terbatasnya pemahaman aparat Negara serta rendahnya kesadaran umat dan tokoh agama. Bahkan status hukum regulasi ini pun dipertanyakan oleh sebagian kelompok agama, karena keputusan atau peraturan menteri tidak disebutkan dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, sejak beberapa tahun lalu muncul berbagai tuntutan dari sebagian kelompok masyarakat untuk mengkaji kembali kebijakan-kebijakan masa lalu dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kelompok ini menginginkan keterlepasan negara sama sekali dalam kehidupan keagamaan, terutama dalam bentuk regulasi, dengan alasan bahwa agama merupakan persoalan individual, dan pengaturan ini dianggap membatasi hak kebebasan beragama.

Di antara ketentuan perundangan yang dipersoalkan adalah PNPS No. 1/1965 yang pada tahun 2010 lalu diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dan sudah diputuskan penolakannya, karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, undang-undang ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Sampai saat ini masih menjadi polemik mengenai kekuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Peraturan Bersama Menteri (PBM), karena tidak dikenal dalam

UU No 10 Tahun 2004 jo. UU UU 12 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Peraturan perundang-undangan. SKB dan PBM tidak cukup kuat mengatur kerukunan umat beragama. Sementara belum ada regulasi setingkat UU yang mencakup berbagai masalah kerukunan umat beragama yang kian kompleks seperti tersebut di atas. Karena itu, diperlukan UU yang secara khusus bisa menjadi pegangan untuk menangani berbagai permasalahan yang mengganggu kerukunan umat beragama. UU Kerukunan Umat Beragama merupakan upaya strategis, sebagai jawaban yuridis masalah kerukunan umat beragama.

Di satu sisi mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dianggap sangat mendesak terlebih bagi para aparat penegak hukum agar mempunyai pedoman dan acuan yang lebih kuat. UU KUB harus didasari dengan semangat kebersamaan dan saling mempercayai antar pemeluk, pemuka, dan majelis agama. Di pihak lain masih banyak yang justru mengkhawatirkan munculnya peraturan setingkat UU yang mengatur secara khusus mengenai kerukunan umat beragama (KUB), lebih khusus mereka menyoroti munculnya RUU KUB pada Agustus 2011 yang lalu. Padahal dengan UU KUB tersebut diharapkan mampu menjadi panduan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama yang lebih kondusif, rukun, dan damai.

BAB III

NALAR KERUKUNAN PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA

A. Nalar Kerukunan dan *Misi Profetik*

Secara etimologi kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu *rukun*, berarti tiang, dasar, sila. Jamak *rukun* adalah *arakan*. Dari kata *arakan* diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.⁶⁵ Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelaskan bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam pergaulan. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan

⁶⁵ Sahiri Naim, *Kerukunan Antarumat Beragama*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 52.

hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat, apapun suku dan agamanya.

Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun dan kemauan untuk hidup berdampingan, bersama dengan damai. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih. Karenanya, nilai kerukunan hidup antarumat beragama di pandang dari aspek sosial-budaya menempati posisi yang sangat sentral, penting dan strategis bagi kesatuan bangsa Indonesia untuk menjadi perekat kesatuan bangsa yang sangat handal. Melalui ikatan semangat kerukunan hidup antarumat beragama akan mampu membangun atau memperkuat persatuan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dan pulau menjadi sebuah komunitas negara kesatuan yang sangat solid (NKRI). Tanpa ikatan semangat kerukunan hidup antarumat beragama, masyarakat Indonesia akan sangat rentan, rapuh dan hidup dalam suasana yang tidak nyaman karena penuh dengan rasa kecurigaan, ketegangan, dan bahkan akan sering muncul konflik-konflik kekerasan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, solidaritas, kerjasama dan kerukunan hidup antarumat beragama diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman, dan bersatu dalam keragaman membangun masa depan bangsa dan Negara.

Dengan demikian, kerukunan berarti baik, damai, dan tidak berselisih. Kerukunan merupakan kata benda bentukan dari kata rukun. Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Persatuan hanya akan ada jika kerukunan tercipta. Kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan. Persatuan dan kerukunan harus diterapkan agar tercipta masyarakat yang tenteram dan damai. Jangan korbankan kerukunan atas nama agama, dan jangan korbankan agama atas nama kerukunan.

Disini perlu kami tegaskan bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas, atau menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari satu agama baru (*sinkritisme*). Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpeliharanya hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan keyakinan. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggungjawab bersama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggungjawab atau menyelahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan Negara adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu kerukunan umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukanlah pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi oleh nilai-nilai universalitas dan misi kemanusiaan.

Kita ambil contoh misi profetik dalam tradisi Islam klasik, masa Rasulullah Saw. dimana beliau sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala agama dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan tentram di Madinah, Ia mengadakan perjanjian persahabatan serta perdamaian dengan kaum Yahudi. Perjanjian persahabatan dan perdamaian itu kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu di tetapkan serta diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang. Salah satunya adalah kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal itu merupakan salah satu perjanjian politik yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Saw.

Dari rekaman sejarah tersebut nampaknya tidak pernah terjadi ketegangan dan konflik yang berbau agama antara kaum muslim dengan kaum non muslim, bahkan Rasulullah saw. benar-benar melindungi mereka. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya: "Dari Abdullah Ibn Amr, dari Rasulullah saw. berkata : *Barangsiapa membunuh seseorang yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin (kafir dzimmi) maka tidak akan dapat mencium bau surga, dan bau surga dapat ditemukan dari jarak tempuh perjalanan 40 (empat puluh) tahun* (H.R. Bukhari)

B. Dialog Nalar Kerukunan Beragama

1. Kerukunan Intern Umat Beragama

Kerukunan antarumat seagama merupakan bentuk kerukunan dalam hubungan internal umat yang memeluk satu agama. Misalnya antara seorang muslim dengan muslim lainnya, antara seorang penganut Kristen dengan penganut Kristen lainnya. Kerukunan seagama ini harus tercipta di antara kita, misalnya sebagai umat Islam yang selalu menjunjung tinggi kerukunan antarsesama. *Kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Misal dalam Islam ada ormas keagamaan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Alwashliyah, dan sebagainya. Dalam protestan ada GBI, Pantekosta dan sebagainya. Dalam katolik ada Roma dan ortodoks. Hendaknya dalam intern masing-masing agama tercipta suatu kerukunan dan kebersatuan dalam masing-masing faham.*

Islam misalnya, Rasulullah memberi perumpamaan yang sangat indah tentang persatuan dan kerukunan antarsesama muslim. Rasulullah saw. menggambarkan *ukhuwah* atau persaudaraan antarsesama muslim bagaikan satu tubuh. Bayangkan jika kakimu terantuk batu. Tanpa diminta mulut akan berkata "Aduh" dan mata pun turut merasakan sakit dengan mengeluarkan air mata. Demikianlah persaudaraan dan kerukunan antarsesama muslim. Jika ada saudara muslim yang mengalami kesulitan, tanpa diminta pun kita harus segera membantunya. Jika hal tersebut terwujud, kehidupan akan terasa indah dan persoalan yang menghadang terasa ringan.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh aqidah atau keimanan, tanpa membedakan golongan selama aqidahnya sama maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Alqur'an surat Al Hujarat : 10, yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, oleh karena itu peralatlah simpul persaudaraan diantara kamu, dan bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmatnya “*. Dari ayat ini jelas bahwa kita sesama umat Islam ini adalah saudara, dan wajib menjalin terus persaudaraan di antara sesama umat Islam dan marilah budayakan rasa kepedulian terhadap saudara kita seiman, saling menolong, mengangkat harkat martabatnya, dan janganlah saudara kita anggap sebagai musuh, hanya karena masalah masalah-masalah sepele yang tidak berarti, yang dapat mengancam integritas yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kerukunan dan keutuhan bangsa.

Berkasih sayang antara sesama dan mengasih sayangi semua makhluk Allah di bumi ini serta memelihara lingkungan hidup adalah sesuatu yang sangat penting dan diwajibkan dalam Islam. Salah satu sifat Allah SWT adalah Maha Pengasih dan Penyayang (*Ar Rahman* dan *Ar Rahim*) sifat ini diturunkannya kepada manusia dan bahkan nama kandungan (perut ibu) kita juga ada rahim ibu. Kita umat manusia seluruhnya adalah dari satu rahim ibu yaitu Siti Hawa, oleh karena itu berkasih sayang antara sesama manusia adalah merupakan keharusan bagi kita semua, dan menyanyangi seluruh makhluk di bumi ini adalah menjadi syarat bagi kasih sayang Allah kepada kita: *“Siapa yang tidak menyanyangi orang ada di bumi, tidak disayangi orang yang ada dilangit”*

Maka semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, yang harus disayangi dipelihara dengan baik agar kita mendapat kasih sayang Allah SWT. Orang yang disayang Allah tidak disiksa dan tidak diazabnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah yang berasal dari Nabi Adam As dan Siti Hawa, tidak pantas bermusuhan dan berpecah belah. Soal berbeda suku, agama, warna kulit, jabatan dan sebagainya, tidak boleh membuat keretakan antara sesama. Lebih-lebih lagi setelah masa Nabi Adam As, makhluk disatukan dalam bahtera Nabi Nuh As yang dalam bahtera itu ada kesepakatan tidak boleh saling mengganggu atau merusak, bahkan antara harimau dan kambing, dan antara kucing dengan tikuspun tidak boleh saling bermusuhan tapi harus saling menyanyangi. Jika ada yang melanggar kesepakatan itu bahtera akan rusak dan tenggelam, semua akan celaka. Oleh karena itu kita semua wajib mengasih sayangi dan hidup rukun, karena kita di dunia ini adalah semacam satu bahtera juga tidak boleh ada yang merusak.

Oleh karena itu masalah kerukunan umat seagama erat kaitannya dengan akidah yang kokoh yang meliputi ketahanan *ruhiyah* (mental) dan rasa kemanusiaan sejati, tanpa dibuat-buat ataupun mengandung unsur kepalsuan di dalamnya. Sesungguhnya yang

dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah bahwa setiap individu itu mampu memelihara saudaranya dengan rasa saling cinta dan kasih sayang, dan ia mampu melaksanakan hak-hak saudaranya dengan baik meskipun tidak mendapatkan imbalan materi dengan tindakannya itu. Hal ini terjadi karena ia bekerja karena Allah SWT dan mengembalikan semua kepada keimanannya dengan mengharap pahala dan balasan dari-Nya.

2. Kerukunan Antarumat Beragama

Di Indonesia tidak hanya satu agama yang diakui. Ada beberapa agama yang diakui keberadaannya di negeri tercinta ini. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, aliran kepercayaan pun juga diakui oleh negara. Demi kerukunan kita sebagai sesama bangsa Indonesia, perbedaan agama tidak boleh memecah kerukunan. Agama boleh berbeda, tetapi kerukunan di antara umat beragama harus tetap dipelihara demi ketenteraman dan kedamaian. *Kerukunan antarumat beragama adalah menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antarumat beragama yang didalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.*

Pilihan untuk beriman mengandung konsekuensi bahwa ia harus siap menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Kita diperintahkan untuk bertoleransi terhadap pilihan tiap-tiap orang untuk beriman atau kafir. Meskipun demikian, tidak membenarkan mencampur pelaksanaan agama kita dengan pelaksanaan agama orang lain. Saat orang lain melaksanakan peribadatnya, misalnya sedang bersembahyang di pura, kita tidak boleh ikut berada di sana dengan alasan ikut bertoleransi kepada pemeluk agama lain (*Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku*). Bentuk toleransi lain adalah menghargai keyakinan mereka. Meskipun menganggap keyakinan umat lain salah, kita tidak boleh menghina dan mencaci maki mereka bahkan mencaci maki Tuhan yang mereka sembah pun tidak diperbolehkan.

Dalam Islam diajarkan bagaimana membangun kebersamaan dengan penganut agama lain, yang disebut dengan istilah *Ukhuwah wathaniyah*, bermakna bahwa seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, misalnya bangsa Indonesia. Persaudaraan model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak lain yang harus dibangun adalah solidaritas sosial Islam dan praksisnya mendayagunakan semua sumber daya dan potensi nasional dalam upaya melawan kolonialisme dan

mendirikan sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa komitmen nasional individu Islam tak diragukan lagi dalam makna yang sebenar-benarnya memperjuangkan kepentingan nasional. Mengingat pentingnya menjalin hubungan kebangsaan ini Rasulullah bersabda "*Hubbul wathon minal iman*", artinya: Cinta sesama saudara setanah air termasuk sebagian dari iman.

Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dan karenanya tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Artinya, seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat: 12)

Persaudaraan jenis ini berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan, maksudnya kita sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebajikannya bukan kejelekannya. Ukhuwah Baasyariah/Insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua orang umat manusia adalah makhluk Allah, sekalipun Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya

Islam memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Toleransi antarumat beragama dalam batasan muamalah, yaitu batas-batas hubungan kemanusiaan dan tolong-menolong social kemasyarakatan. Adapun dalam hal akidah dan ibadah, Islam secara tegas melarang umatnya untuk bertoleransi. Sebagai contoh toleransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah hubungan jual beli, saling membantu membenahi rumah yang rusak, dan bersama-sama membuat jalan kampung. Allah swt. tidak melarang umat Islam bermuamalah dengan penganut agama lain.

3. Kerukunan Umat Beragama dan Pemerintah

Program-program pembangunan bangsa Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar, jika tidak didukung oleh seluruh komponen bangsa termasuk umat beragama. Kita tahu bahwa agama memiliki peran pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan penting kenegaraan diambil dengan sangat memerhatikan

kepentingan dan saran dari umat beragama. Pemerintah merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah negara. Bahkan, menjadi tiang pokok yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah bertugas mengayomi seluruh pemeluk agama yang ada di wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, agar terjalin hubungan yang harmonis di antara pemerintah dan umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah harus dijaga.

Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bahwasanya Indonesia itu bukan negara agama tetapi adalah negara bagi orang yang beragama.

Dalam kehidupan sehari-hari pemerintah bertindak sebagai lembaga yang menyerap, merumuskan, dan menetapkan kebijakan serta program kerja untuk masyarakat. Dengan banyak saluran, pemerintah menyerap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi umat beragama di Indonesia. Aspirasi yang berhasil diserap itu dirumuskan bersama DPR yang merupakan wakil-wakil rakyat. Dalam perumusan itu semua pihak dimintai masukan dan pendapatnya. Setelah melewati berbagai tahap, pemerintah memutuskan kebijakan dan program untuk dilaksanakan bersama. Inilah peran pemerintah. Peran tersebut tidak akan dapat berjalan efektif tanpa peran serta masyarakat.

Masyarakat berperan sebagai objek tempat kebijakan itu diterapkan sekaligus menjadi subjek yang melaksanakan kebijakan itu. Oleh karena itu, dukungan masyarakat mutlak diperlukan untuk suksesnya kebijakan dan program itu. Para tokoh masyarakat memegang peran dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan dan program. Tanpa peran masyarakat, program dan kebijakan yang telah disusun tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Masih ingatkah Anda dengan berbagai kerusuhan kelompok atau etnis yang kemudian meluas dengan mengatasnamakan demi kepentingan agama? Berapa banyak kerugian bangsa yang diakibatkan kerusuhan tersebut? Jika kerusuhan-kerusuhan yang oleh para pelakunya di atasnamakan agama itu terjadi, persatuan dan partisipasi mereka dalam pemerintahan akan hilang. Kejadian-kejadian tersebut memberi pelajaran betapa pentingnya kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dalam menjaga kedamaian. Mengapa demikian? Hal ini karena ketenangan dan kedamaian merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah.

C. Hindu dan Nalar Kerukunan Tanpa Kekerasan

Agama Hindu (Sanskerta: *Sanātana Dharma* "Kebenaran Abadi", dan *Vaidika-Dharma* ("Pengetahuan Kebenaran")) adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa setelah agama Kristen dan Islam.

Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata *Sindhu* (Bahasa Sanskerta). Dalam Reg Weda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai *Sapta Sindhu* (wilayah dengan tujuh sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama sungai Indus). Hal ini mendekati dengan kata *Hapta-Hendu* yang termuat dalam Zend Avesta (*Vendidad: Fargard* 1.18)-sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah sungai Sindhu. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi ketika beberapa kitab dari **Veda** (dibaca **Weda**) digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Buddha, agama Hindu sama sekali belum muncul semuanya masih mengenal sebagai ajaran *Weda*.

Penganut agama Hindu sebagian besar terdapat di anak benua India. Di sini terdapat sekitar 90% penganut agama ini. Agama ini pernah tersebar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15, lebih tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit. Mulai saat itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan juga Kristen. Pada masa sekarang, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali, selain itu juga yang tersebar di pulau Jawa, Lombok, Kalimantan (Suku Dayak Kaharingan), Sulawesi (Toraja dan Bugis - Sidrap).

Konsep kerukunan dalam agama Hindu merujuk dari kitab suci Veda, dimana mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membedakanya. Hal ini ditemukan dalam kitab suci Veda sebagai berikut :

Wahai manusia! Pikirkanlah bersama. Bermusyawarahlah bersama. Satukanlah hati dan pikiranmu dengan yang lain. Aku anugerahkan pikiran yang sama dan fasilitas yang sama pula untuk kerukunan hidupmu. (Rg.Veda X.191.3). Wahai umat manusia !. Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pengertian diantara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan. (Rg. Veda X.191.4). Wahai umat manusia. Aku memberimu sifat ketulus-ikhlasan, mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Begitu seharusnya kamu mencintai sesamamu. (Atharva Veda III.30.1). Hendaknya harmonis dengan penuh keintiman diantara kamu, demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. Semoga Dewa Asvina menganugerahkan rahmatNya untuk keharmonisan antar sesama (Atharva Veda VII.52.1).

Dalam ajaran kitab suci Veda, masalah kerukunan dijelaskan secara gamblang dalam ajaran : *Tattwam asi, karma phala, dan ahimsa*. Tattwam asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. *Saya adalah kamu, dan sebaliknya kamu adalah saya, dan segala makhluk adalah sama sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri* (Upadesa, 2002:42). Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakikat Atman yang menjadi hidup di antara saya dan kamu berasal dari satu sumber yaitu Tuhan. Ajaran tattwam asi mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Membuat orang lain senang dan bahagia, maka sesungguhnya dirinya sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga.

Tattwam asi merupakan kata kunci untuk dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar “*asah, asih, asuh*” di antara sesama makhluk hidup. “Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik kepada brahmana budiman yang rendah hati, maupun terhadap makhluk hidup lainnya, orang yang hina papa sekalipun, walaupun perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap dirimu, perbuatan seperti orang *sadhu* hendaknya sebagai balasanmu. Janganlah sekali-kali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri (Sarasamuscaya 317)

Ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup beragama. Ahimsa berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. “*Ahimsa parama dharma*” adalah sebuah kalimat, sederhana namun mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang utama atau dharma tertinggi. Hendaknya setiap perjuangan membela kebenaran tidak dengan perusakan, karena sifat merusak, menjarah, memaksakan, mengancam, menteror dan sebagainya sangat bertentangan dengan ahimsa karma, termasuk menyakiti hati umat lain dengan niat yang tidak baik, atau dengan kata-kata yang kasar.

D. Buddha dan Nalar Kerukunan Humanis

Agama Buddha lahir pada abad ke-6 SM di India dan didirikan oleh Siddharta Gautama. Ia adalah anak seorang raja yang bernama Suddhudana yang memerintah suku Syakia. Ibunya bernama Maya. Menurut para ahli, Siddharta dilahirkan pada tahun 563 SM dan wafat pada tahun 483 SM. Ia keluar dari istana dan melihat empat peristiwa; yaitu orang sakit, mengusung jenazah, bertemu kakek tua, dan bertemu dengan seorang pertapa. Lalu ia ikut bertapa di bawah pohon Ara Bodhi Gaya dan mendapat pencerahan dan ilmu kesempurnaan, yaitu kemudian disebut dengan Buddha. Kitab Suci adalah Tri Pitaka; **Sutta Pitaka**; himpunan khutbah Siddharta Gautama. **Vinaya Pitaka**; peraturan tata hidup setiap biara. **Abidhama Pitaka**; himpunan yang mempunyai nilai tinggi (prosa kesadaran). Ajaran inti dalam agama Buddha adalah **Triratna** : *Budham saranam*

gacchami; aku berlindung kepada budha. *Dhammam saranam gacchami*; aku berlindung kepada dharma. *Sangham saranam gacchami*; aku berlindung kepada sangha (biara/pendeta).

Ajaran Buddha adalah ajaran tentang keterbukaan pikiran dan hati yang simpati, yang menerangi dan menghangatkan segenap semesta dengan sinar ganda Kebijakan dan Welas Asih, memancarkan sinar keramahan pada setiap makhluk dalam perjuangan mengarungi samudera kelahiran dan kematian. Dalam pelayanan Buddha Gautama kepada manusia telah dilaksanakan dengan dasar: (1) **Tuhan Yang Maha Esa** tidak dapat ditembus oleh pikiran manusia, (2) **Metta**, welas asih terhadap semua makhluk sebagai kasih ibu terhadap putranya yang tunggal. (3) **Karunia**, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk selalu meringankan penderitaan makhluk lain (4) **Mudita**, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa benci, irihati, perasaan prihatin bila makhluk lain menderita. (5) **Karma**, tumibal lahir atau hukum umum yang kekal, karena ini ada hukum dari sebab akibat. Dan karma adalah jumlah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan baik dan tidak baik.

Rasa belas kasihan yang ada pada dirinya sendiri, bila dipergunakan untuk mencintai semua makhluk yang mengalami penderitaan untuk melakukan kasihan itu, setelah melaksanakan rasa kasih sayang sebagaimana halnya ia mencintai semua manusia, inilah yang disebut Satwalambana-karuna (Sangyang Kamahayanikan ayat 79). Dasar keyakinan agar terbentuknya suatu kerukunan umat beragama dalam agama Buddha, diikrarkan oleh raja Asoka Wardana yang merupakan salah satu raja yang berkeyakinan terhadap Buddha. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No XXII Raja Asoka yang memeluk agama Buddha pada abad ketiga sebelum masehi, yang berbunyi:

“Janganlah kita menghormati (mazhab) sendiri dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, disamping pula tidak merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain”.

Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa ”barang siapa menghina agama orang lain, dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri”.

E. Islam dan Nalar *Rahmatan lil ‘alamin*

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Lebih dari satu setengah miliar orang pengikutnya di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: الله, Allāh). Pengikut ajaran Islam dikenal

dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan" atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad Saw adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Wahyu tersebut terkumpul dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Qur'an.

Islam berasal dari kata Arab *Aslama-Yuslimu-Islaman* yang secara kebahasaan berarti 'Menyelamatkan'. Seperti teks '*Assalamu Alaikum*' yang berarti *Semoga Keselamatan menyertai kalian semuanya*. Kesemuanya berakar dari kata *Salam* yang berarti kedamaian. Kata *Islam* lebih spesifik lagi didapat dari bahasa Arab *aslama*, yang bermakna "untuk menerima, menyerah atau tunduk" kepada Allah SWT melalui wahyuNya.

Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya membina hubungan baik antara muslim dan non-muslim, pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai azas pemberlakuan konsep kerukunan dalam Islam, antara lain; Teks keagamaan Islam sangat toleran dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut dalam mendukung dan menjaga toleransi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi komitmen teologis umat Islam di sebuah negara yang plural seperti Indonesia.

Menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", agar tidak masuk dalam bagian sila pertama Pancasila. Bagi Umat Islam realitas keragaman adalah anugerah Allah yang harus dipandang sebagai potensi untuk melakukan kerjasama mewujudkan rahmat kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara. Umat Islam memegang teguh toleransi yang diisyaratkan oleh Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat, termasuk antar individu atau komunitas beragama. Praktik toleransi dilakukan oleh umat Islam. Kenyataan keragaman Indonesia telah disikapi dengan praktik kehidupan yang penuh toleransi dalam sistem sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Praktik kehidupan yang toleran juga tampak dalam politik non dominasi. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk, tetapi sangat banyak posisi strategis dalam pemerintahan diduduki oleh non muslim. Ini saya sebut sebagai *social and political sharing in tolerance religiosity*.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat mengenai penghormatan dan penghargaan terhadap komunitas lain, baik menghargai keyakinan lain maupun suku bangsa yang ada sebagai realitas kehidupan, antara lain :

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menjadikan kami terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bergolongan-golongan supaya kami saling mengenail (QS.Al-Hujarat /49:13)

Dan janganlah kamu maki sembahhan yang mereka seru selain dari Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An'am/6:108)

Demikian pula kami telah menjadikan kami umat (Islam) sebagai umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian (QS.Al-Baqarah/2:143).

Hai orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yg diolok-olok lebih baik dari mereka yg mengolok-olok (QS.Al-Hujarat/49:11)

Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan org lain.. (QS. Al-Hujarat/49:12)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. (QS.An-Nahl/ 16:90)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Mumtahanah :8-9)

Cintailah orang lain, sebagaimana kamu mencintai dirimu (hadis). Barangsiapa yg beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah ia berkata baik atau diam (HR. Bukhari). Piagam Madinah (47 pasal): Dari pasal 16 sampai pasal 35 mengatur soal multietnis dan multiagama. Bagi warga Najran, keamanan harta, agama, gereja dan segala sesuatu yang mereka miliki adalah jaminan Allah dan Rasulullah Saw. (Hadis).

Di antara keistimewaan agama Islam adalah namanya. Berbeda dengan agama lain, nama agama ini bukan berasal dari nama pendirinya atau nama tempat penyebarannya. Tapi, nama Islam menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah. Yang memberi nama Islam juga bukan seseorang, bukan pula suatu masyarakat, tapi Allah Ta'ala, Pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi, Islam sudah dikenal sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. dengan nama yang diberikan Allah.

Islam merupakan satu-satunya agama yang bersandar kepada wahyu Allah secara murni. Artinya, seluruh sumber nilai dari nilai agama ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para Rasul-Nya terdahulu. Dengan kata lain, setiap Nabi adalah muslim dan mengajak kepada ajaran Islam. Ada pun agama-agama yang lain, seperti Yahudi dan Nasrani, adalah penyimpangan dari ajaran wahyu yang dibawa oleh para nabi tersebut.

Perhatikan kesaksian Alquran berikut ini bahwa Nabi Ibrahim adalah muslim, bukan Yahudi atau pun Nasrani. Dan Ibrahim Telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-

anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Al-Baqarah: 132). Hubungan keimanan dengan pandangan hidup positif lebih lanjut dikemukakan Nurcholis Madjid sebagai berikut:

Iman kepada Allah, yang menumbuhkan rasa aman dan kesadaran mengemban amanat Ilahi itu, menyatakan diri keluar, dalam sikap-sikap terbuka, percaya kepada diri sendiri (karena bersandar), yakni (tawakkal) kepada Tuhan), dan karena ketentraman yang diperoleh dari orientasi hidup kepada-Nya. Korelasi pandangan hidup seperti itu ialah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik.⁶⁶

Kendatipun demikian, di dunia ini selain agama Islam yang ajaran dasarnya sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula agama lain. Dalam perjalanan sejarahnya, agama-agama tersebut terkadang memperlihatkan hubungan yang harmonis dan mesra, dan terkadang memperlihatkan pula hubungan yang tegang dan membawa malapetaka. Khususnya mengenai hubungan antara Islam-Kristen misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Alwi Shihab:

Agama Kristen telah berhubungan dengan agama Islam selama lebih dari empat belas abad. Rentang waktu yang begitu panjang dan terus menerus dalam hubungan itu telah menjadi saksi dari berbagai perubahan dan naik-turunnya batas-batas kebudayaan dan teritorial antara keduanya. Ia juga ditandai dengan periode panjang konfrontasi sekaligus kerja sama yang produktif. Tetapi bagaimanapun juga, pola hubungan yang paling dominan antara kedua tradisi keimanan ini adalah permusuhan, kebencian, dan kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami.⁶⁷

Demikian pula hubungan Islam dengan agama Hindu yang terjadi di India, hingga kini banyak diwarnai konflik dan permusuhan serta peperangan yang menelan korban jiwa. Keadaan ini pada gilirannya mendorong untuk mempertanyakan ajaran dasar masing-masing. Yaitu apakah sumber konflik itu berasal dari ajaran dasar masing-masing agama tersebut, atau sebab lain yang kemudian mengatasnamakan agama? Jika memang berdasar pada ajaran dasar agama masing-masing, maka peran dan fungsi agama sebagai pedoman yang dapat menciptakan keadaan yang aman dan tenang menjadi tidak relevan lagi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita untuk mengkaji lebih lanjut tentang

⁶⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 117.

⁶⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.95.

bagaimana sebenarnya ajaran Islam pada khususnya dan ajaran agama lainnya dalam menata hubungannya dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini.

Selanjutnya dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama ini, umat Islam harus melihat pula adanya persamaan-persamaan di antara umat beragama tersebut. Dari segi agama mungkin berbeda. Namun, sebagai manusia mereka memiliki persamaan. Mereka sama-sama keturunan Nabi Adam, diciptakan dari bahan dan struktur tubuh yang sama, hidup di bumi yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama, menghirup udara yang sama, dibatasi oleh kematian yang sama, memiliki potensi ruhaniah yang sama (yakni akal, hati, jiwa, dan perasaan), kecenderungan psikologis yang sama (merasa ingin bertuhan, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disayangi, dan seterusnya). Dengan adanya banyak unsur persamaan ini, maka tidaklah beralasan jika perbedaan agama membawa kepada perpecahan. Secara keyakinan berbeda tetapi secara manusiawi adalah sama. Untuk itu jika suatu ketika ada orang yang terkena musibah, maka harus segera dibantu, tanpa mempertanyakan agama yang dianutnya. Hal yang demikian dilakukan karena musibah yang terjadi, seperti kecelakaan adalah bukan persoalan agama, tetapi persoalan kemanusiaan.

Nabi-nabi lain pun mendakwahkan ajaran universal dan mendasar kepada manusia yaitu misi humanis dan keadilan. Mereka mengajarkan agama sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad saw. Hanya saja, dari segi syariat (hukum dan aturan) belum selengkap yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Tetapi, ajaran prinsip-prinsip keimanan dan akhlaknya sama. Nabi Muhammad saw. datang menyempurnakan ajaran para Rasul, menghapus syariat yang tidak sesuai dan menggantinya dengan syariat yang baru. Sebagaimana sifatnya yang bermakna selamat sejahtera, Islam menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

F. Kristen – Katolik dan Nalar Penyelamatan

Kristen berasal dari kata *Kristos*; penolong atau juru selamat yaitu beriman kepada Yesus. Dalam Kristen ada dua aliran besar yaitu Katolik dan Protestan. Kata **Katolik** berasal dari kata sifat bahasa Yunani, καθολικός (*katholikos*), artinya "universal". Dalam konteks eklesiologi Kristen, kata Katolik memiliki sejarah yang kaya sekaligus beberapa makna. Bagi sebagian pihak, istilah "Gereja Katolik" bermakna Gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma, terdiri atas Ritus Latin dan 22 Gereja Katolik Timur; makna inilah yang umum dipahami di banyak negara. Bagi umat Protestan, "**Gereja Katolik**" atau yang sering diterjemahkan menjadi "Gereja Am" bermakna segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa, tanpa memandang "denominasi". Sedangkan Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau demonisasi ini muncul setelah protes Martin

Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata protestan berarti *pro-testanum* yang berarti kembali ke injil (testanum). Kitab suci atau sumber-sumber hukumnya Al-Kitab atau Injil Al-Kitab.

Mengenai nilai - nilai kerukunan yang terdapat dalam umat Kristen yang perlu diingat yaitu terciptanya kesatuan pelayanan bersama yang berpusat pada kasih Kristus. Kesatuan pelayanan itu didasarkan atas ketaatan dan kesetiaan kepada misi yang dipercayakan sebagai umat yang satu dan yang menerima tugas yang satu dari Kristus. Inti kehidupan pengikut Kristus dalam hubungannya secara totalitas dengan Allah adalah hubungan kasih. Ini adalah hukum terutama dan yang pertama, dan dengan sesama manusia juga seperti mengasihi diri sendiri. Perdamaian sosial mungkin salah satu pengajaran yang serius dalam kehidupan masyarakat sipil. Perangkat untuk mencapai perdamaian bukanlah kekerasan. Tugas umat adalah untuk memberitakan Injil damai sejahtera. *Shalom* dalam bahasa Ibrani yang bermakna damai sejahtera yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama dan damai dengan lingkungan.

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah (Matius 5:9). Pengaruh kehidupan kristiani adalah membawa damai. "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan... (Matius 5:25). Tetapi Aku berkata; janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menapar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. (Matius 5:39). Dan kepada orang yang hendak mengadakan engkau karena mengingini bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. (matius 5:40-41).

Yesus secara nyata bergaul dan berkerabat, makan bersama dengan orang yang menurut agama justru dikucilkan dari umat Allah dan dari ibadah (Mrk. 2:15; Luk 7:34). Yesus berkerabat dengan orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur, mereka yang tidak ambil pusing tentang hukum agama dan hukum Allah, dilakukan atas dasar prinsip kasih (Mat 11:19; Lukas 5:30; 15:2; 19:1-2). Hukum kasih tersebut ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia (Mat. 22:37; Rum 13:10; Kor. 4; 13:4-7). Prinsip kasih yang dilakukan Yesus membentuk rasa empati dalam diri orang-orang terhadap Dia. Dia mau bersama-sama dengan mereka dan menjadi terang untuk menciptakan suasana damai di tengah-tengah realitas keberagaman.

G. Khonghucu dan Nalar Spiritual

Konfusianisme atau **Kong Hu Cu** (juga: *Kong Fu Tze* atau *Konfusius*) dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah **Rujiao**(儒教) yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Khonghucu memang bukanlah pencipta agama ini melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang beliau sabdakan: "Aku bukanlah pencipta

melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut". Meskipun orang kadang mengira bahwa Khonghucu adalah merupakan suatu pengajaran filsafat untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia. Sebenarnya kalau orang mau memahami secara benar dan utuh tentang **Ru Jiao** atau Agama Khonghucu, maka orang akan tahu bahwa dalam agama Khonghucu (Ru Jiao) juga terdapat Ritual yang harus dilakukan oleh para penganutnya. Agama Khonghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar sesama manusia atau disebut "Ren Dao" dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang disebut dengan istilah "Tian" atau "Shang Di".

Kitab sucinya ada 2 kelompok, *Pertama: Wu Jing* (Kitab Suci yang Lima) yang terdiri atas Kitab Sanjak Suci *Shi Jing*, Kitab Dokumen Sejarah *Shu Jing*, Kitab Wahyu Perubahan *Yi Jing*, Kitab Suci Kesusilaan *Li Jing*, Kitab Chun-qiu *Chunqiu Jing*. *Kedua: Si Shu* (Kitab Yang Empat) yang terdiri atas: Kitab Ajaran Besar - Da Xue, Kitab Tengah Sempurna - Zhong Yong, Kitab Sabda Suci - Lun Yu, Kitab Mengzi - Meng Zi. Selain itu masih ada satu kitab lagi: Xiao Jing (Kitab Bhakti).

Secara umum isi dari kitab suci tersebut adalah **Delapan Kebajikan (Ba De)** : (1). Xiao - Laku Bakti; yaitu berbakti kepada orangtua, leluhur, dan guru. (2). Ti - Rendah Hati; yaitu sikap kasih sayang antar saudara, yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda. (3). Zhong - Setia; yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara. (4). Xin - Dapat Dipercaya. (5). Li - Susila; yaitu sopan santun dan bersusila. (6). Yi - Bijaksana; yaitu berpegang teguh pada kebenaran. (7). Lian - Suci Hati; yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian, dan tidak menyeleweng/menyimpang. (8). Chi - Tahu Malu; yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti.

Khonghucu mengajarkan bahwa pemahaman dasar yang dapat membangun sebuah hidup berkerukunan adalah tidak membeda-bedakan, para anggota masyarakatnya diikat dalam pemahaman persaudaraan yang saling tenggang rasa, dan tidak membebani satu sama lain. Konsep demikian diujarkan Nabi Khonghucu sebagai; "Di empat penjuru samudra, kita semua manusia adalah bersaudara. Dan seorang yang berperilaku kasih itu ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Yang dimaksud saling tenggang rasa adalah apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan kepada orang lain. (Kitab Mengze bab II.B1/4). Maka dalam agama Khonghucu disebutkan bahwa Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan atau kerukunan itulah menempuh jalan suci di dunia. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. (Sabda Khongcu).

BAB IV

NALAR KERUKUNAN MENCEGAH KONFLIK

A. *Washatiyah* dan Nalar Kerukunan

Di Indonesia, dikenal istilah *wasit* yang memang berakar kata yang sama dengan *wasāṭan*, yang menghadapi dua pihak yang berseteru dituntut untuk bersikap *wasāṭan* dan berada pada posisi tengah agar berlaku adil. Seorang wasit hanya dapat berperan jika ia bersifat adil. Esensi pekerjaan seorang wasit adalah bertindak adil. Oleh karena itu, hanya dengan bersikap adil saja sesuatu umat dapat berperan sebagai saksi atas manusia. Sikap inilah yang diharapkan dari masing-masing pemuka agama dalam menyikapi dinamika dialog antarumat beragama.

Abdullah Yusuf Ali mengartikan *wasāṭan* sebagai *justly balanced*, yang kemudian diberi komentar bahwa esensi ajaran Islam adalah menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. Kata *wasāṭan* ternyata juga menunjuk pada geografis, yaitu letak geografi tanah Arab menurut Yusuf Ali berada di pertengahan bumi.⁶⁸

Hampir senada dengan pendapat di atas, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa pada mulanya kata *wasāṭan* berarti segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Ia mencontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Kedermawanan merupakan pertengahan sikap boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan karena dorongan hawa nafsu yang menggebu dengan ketidakmampuan melakukan hubungan seksual. Dari situ, kata *wasāṭan* berkembang maknanya menjadi tengah.⁶⁹

Sepanjang sejarah umat manusia, agama memiliki dua kutub menyangkut perdamaian dan kebrutalan. Di satu sisi, agama menjadi kontributor utama perang, pertumpahan darah, kebencian dan intoleransi. Tapi, di sisi lain, ia juga mengembangkan hukum dan gagasan yang telah menyediakan peradaban dengan komitmen kultural pada nilai-nilai kedamaian yang agung. Yang disebut terakhir,

⁶⁸ Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of The Holy Qur'an*, (New York : Amana Corporation, Maryland, 1992), h. 58.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 328.

meliputi empati, keterbukaan, dan kecintaan, pemihakan pada kaum tertindas, dan keadilan sosial.

Munas MUI di Surabaya baru-baru ini mengangkat tema “*Islam Wasathiyah untuk Indonesia dan dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban*”. Harapannya adalah MUI ke depan tidak hanya mengurus umat Islam di Indonesia. Namun juga mengurus umat Islam di dunia. Untuk itu, paham Islam wasathiyah yang mencerminkan budaya keindonesiaan harus terus didorong untuk ‘go internasional’. *Wasathiyah* dimaksudkan adalah umat pertengahan atau moderat, tidak terlalu ke sini dan tidak terlalu kesana. Berarti juga umat yang terbuka, toleran, menyongsong yang lain menjadi budaya *qabulul akhar* atau bisa juga disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*).

Indonesia dikenal dunia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar. Lebih besar dari penduduk muslim di dunia Arab ataupun timur tengah yang dianggap sebagai pusat dunia Islam itu. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia juga dikenal sebagai ‘Islam moderat’. Mengapa kemudian kehadiran Islam di Indonesia dapat diterima dengan ramah oleh berbagai komunitas agama, baik Hindu, Budha dan aliran kepercayaan. Hal itu tidak lain, karena Islam yang hadir adalah “*Islam Wasathiyah*” bercorak tasawuf dan spiritual yang terbuka, toleran, menghargai kultur arus utama yang berkembang saat itu. Dengan begitu, heterogenitas dan kamejemukan keyakinan tersebut dapat hidup berdampingan, rukun, serta bekerjasama membangun kekuatan mengusir penjajah sebagai musuh bersama dan meraih kemerdekaan.

Islam wasathiyah atau moderat bukanlah tanpa konsep dan landasan. Justru istilah itu muncul dengan dasar atau landasan teologis Qur’ani yang sangat kuat. Istilah Islam wasathiyah ialah bagian dari ajaran Islam yang universal, boleh dikatakan inti ajaran Islam. Istilah Islam Wasathiyah memiliki padanan dengan istilah Arab *ummatan wasathan* atau *al-din al-wasath* (QS. Al-Baqarah:143). *Ummatan wasathan* berarti golongan atau agama tengah, tidak ekstrim. Artinya umat yang adil, tengah-tengah, terbuka dengan siapapun dan siap bekerjasama dalam membangun kemaslahatan umat, dengan prinsip-prinsip :

- Toleransi; keterbukaan terhadap keanekaragaman, perbedaan sebuah keniscayaan.
- Pembebasan, agama sejatinya diturunkan ke bumi untuk mengatur dan menata kesejahteraan manusia (*limashalih al-ummat*).
- Kemanusiaan, (insaniyah). Dalam pandangan Islam wasathiyah, sejak awal kehadirannya memperlihatkan tekad yang besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Menghargai perbedaan (*ta’adudiyah*). Keragaman merupakan kehendak Tuhan, dan dibangun perdamaian di dalamnya.

- Persamaan (*al-musawa*). Islam wasathiyah menentang penindasan, peminggiran dan ketidakadilan. Keteladanan Rasulullah membangun kebersamaan tanpa diskriminasi.

Kita ambil contoh dalam tradisi Islam klasik, masa Rasulullah Saw. Untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram di Madinah, Nabi Muhammad saw. mengadakan perjanjian persahabatan serta perdamaian dengan kaum Yahudi. Perjanjian persahabatan dan perdamaian itu kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu di tetapkan serta diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang. Salah satunya adalah kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal itu merupakan salah satu perjanjian politik yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad saw.

Tindakan seperti itu belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Isi perjanjian persahabatan dan perdamaian yang disepakati nabi Muhammad saw. dengan kaum Yahudi madinah adalah sebagai berikut:

1. Kaum Yahudi dan Nasrani hidup damai bersama-sama dengan muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan syariat agama masing-masing.
2. Muslimin, kaum Yahudi dan Nasrani wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi muslimin ataupun kaum yahudi dan Nasrani.
3. Muslimin memikul tanggung jawab belanja sendiri dan kaum yang lain juga memikul belanja mereka sendiri.
4. Muslimin, kaum Yahudi dan Nasrani wajib nasihat-menasihati, tolong-menolong, sertamelaksanakan kewajiban dan keutamaan.
5. Kota Madinah merupakan kota suci yang wajib di hormati bersama yang terikat dengan perjanjian persahabatan dan perdamaian ini.
6. Jika terjadi perselisihan antara kaum Yahudi, Nasrani dan muslimin, urusannya diserahkan kepada Allah swt. dan Rasulullah saw.
7. Siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota madinah, wajib dilindungi keamanannya, kecuali orang yang berbuat zalim dan bersalah.

Agama Islam mengajarkan kerukunan, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Perjanjian persahabatan dan perdamaian antara nabi Muhammad saw. dan kaum Yahudi di madinah, mencerminkan sikap toleransi terhadap sesama pemeluk agama. Islam tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap seseorang atau kelompok untuk memeluk agama Islam. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'n Surah al-Baqarah Ayat 256. Dengan demikian Islam sangat menghargai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Hal itu juga dijelaskan dalam piagam Madinah. Bahkan kaum Yahudi harus dilindungi dari segala macam bentuk ancaman, rongrongan, serta gangguan dari mana saja dan dari siapa saja. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum muslimin.

Dari rekaman sejarah tersebut nampaknya tidak pernah terjadi ketegangan dan konflik yang berbau agama antara kaum muslim dengan kaum non muslim, bahkan Rasulullah saw. benar-benar melindungi mereka. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya: "Dari Abdullah Ibn Amr, dari Rasulullah saw. berkata : *Barangsiapa membunuh seseorang yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin (kafir dzimmi) maka tidak akan dapat mencium bau surga, dan bau surga dapat ditemukan dari jarak tempuh perjalanan 40 (empat puluh) tahun* (H.R. Bukhari)

Peran moderasi pemuka agama dan tokoh adat sangat signifikan dan penting diberdayakan. Mereka senantiasa terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Tanpa kehadiran mereka, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dipandang tidak lengkap dan bahkan dapat menjadi gagal. Karenanya masyarakat di daerah ini pada dasarnya sangat hormat kepada pemuka agama dan tokoh adat. Nasehat dan petuah mereka senantiasa didengar dan keputusan-keputusan mereka dituruti. Oleh karena itu pembinaan kaderisasi ketokohan dan keulamaan di tengah masyarakat plural menjadi bagian terpenting dari proses pembangunan manusia seutuhnya.

Peran moderasi atau *wasāṭan*, bermakna dasar pertengahan atau moderat yang memang menunjuk pada pengertian adil.⁷⁰ Selanjutnya istilah ini digunakan sebagai sesuatu yang berada di pertengahan yang kedua ujungnya pada posisi sama. Dengan demikian, peran moderasi berarti seseorang bersikap dan berbuat yang berada di pertengahan dan tidak memihak. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di manapun.

Di tengah umat beragama yang terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka secara spesifik sehingga memunculkan Kristen-sentris dan Islam-sentris, maka kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang agama orang lain adalah sangat penting. Dikembangkan kesadaran konstruktif mengenai agama-agama lain. Selain itu, diskusi dan sikap menerima terhadap masyarakat yang pluralistik menjadi sesuatu yang sangat menentukan pada masa-masa mendatang. Peran terbuka dan moderat inilah yang tepat ditampilkan oleh para pemuka agama dan tokoh adat sebagai pembimbing umat.

Walaupun pemuka agama memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai pemimpin kegiatan-kegiatan keagamaan dan pembina keagamaan masyarakat, namun mereka juga ikut dan terlibat dalam kegiatan acara-acara adat. Demikian pula para tokoh adat meskipun memiliki fungsi dan tugas pokok memimpin kegiatan upacara adat, namun

⁷⁰ Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 869. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut diartikan dengan suku bangsa, sanak saudara dan segolongan manusia. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), cet. ke-4, h. 454.

mereka juga ikut dan terlibat dalam kegiatan acara-acara keagamaan. Keikutsertaan dan keterlibatan tokoh adat dalam kegiatan keagamaan selain sebagai anggota masyarakat yang beragama, juga memberikan kata sambutan dan bimbingan kepada masyarakat. Dalam konteks itu terjadi afinitas nilai etika keagamaan dengan nilai-nilai adat istiadat sebagai perekat antarumat beragama.

Oleh karena itu ada beberapa solusi untuk penguatan kerukunan antarumat beragama mencegah konflik, antara lain;

- Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis).
- Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*) dalam hubungan antar-manusia.
- Penguatan kerukunan dan Ukhuwah juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa. Oleh karenanya, penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui “*gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa*”,⁷¹
- Untuk memperkuat kerukunan dan ukhuwah diperlukan upaya-upaya yang terus menerus, baik melalui pendekatan sosiologis (kultural), maupun revitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*).
- Mengefektifkan pelaksanaan regulasi melalui upaya peningkatan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda, pemuka agama dan masyarakat.
- Mengurangi ketimpangan ekonomi, politik dan sosial di antara kelompok-kelompok umat beragama. Mengintensifkan dialog humanis dan peningkatan kerjasama antarumat beragama, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

B. Urgensi Dialog Moderasi

⁷¹ Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak *berketuhanan* yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) watak *kebangsaan* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia (3) watak *kebersamaan* yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multicultural dan akomodatif terhadap kebenaran, (4) watak *keadaban* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab, (5) watak *kejuangan* yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan bermartabat.

Bila ditinjau dari kepentingan dialog itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka dialog moderasi dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut :

1. Memelihara Eksistensi Agama-agama

Penganutan suatu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan amal perbuatan. Amal dimanifestasikan dalam dua pola hubungan; hubungan vertikal yang rutin dengan Khaliknya, dan hubungan horizontal antara sesama makhluk Tuhan. Hubungan vertikal yang rutin untuk membentuk dan membina kepribadian tiap insan agar ia mampu melahirkan *akhlaq al-karimah* yang diperlukan sekali dalam membina hubungan horizontal. Memanifestasikan hubungan horizontal, selain dari hubungan intern suatu agama, juga untuk memelihara hubungan luar untuk penganut agama-agama lain. Dapat dikatakan, mewujudkan kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari usaha untuk mendorong setiap penganut konsekuen dengan agamanya itu, sehingga keberagamaannya bukan hanya dalam bentuk pengakuan atau anutan saja, tetapi dapat memberi nilai dan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia dalam segala segi kehidupan tidak mampu melepaskan diri dari keterkaitannya pada orang lain. Keterkaitan inilah yang menjadikan orang untuk berusaha memperkecil sikap radikal dengan mempertimbangkan pihak lain, serta mengutamakan keadilan. Pengertian keadilan disini ialah tiap golongan mempertimbangkan golongan atau pihak lain dengan memelihara kondisi yang telah ada. Setiap golongan memandang golongan lain sebagaimana memandang golongannya sendiri.

Bila setiap golongan agama di samping mengutamakan golongan sendiri, juga mempertimbangkan golongan agama-agama lain serta kondisi sosial yang ada, berarti setiap golongan umat beragama telah memelihara wibawa masing-masing. Kewajiban ini menjadikan antara golongan umat beragama saling menyegani, sehingga terbina saling menghargai dan saling menghormati. Apabila setiap golongan agama mampu memelihara wibawa masing-masing, berarti telah memelihara eksistensi dan kehidupan agama masing-masing. Harus disadari, walaupun agama itu milik Tuhan, tetapi telah diamanatkannya kepada manusia, maka kewajiban memelihara agama itu berada di tangan penganut agama itu sendiri.

2. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan

Dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa dengan segala totalitasnya, perlu dipikirkan terutama terhadap generasi penerus, agar keberagaman yang telah menyatu dengan alam dan kondisi Indonesia ini, dipahami dan diterima

oleh mereka. Dengan pengertian tidak menjadikan keberagaman ini sebagai topik permasalahan terutama yang sifatnya sensitif sekali, yaitu agama.

Bila kita membalik lembaran sejarah dunia, tidak sedikit diperoleh catatan tentang rusaknya persatuan dan rasa kebangsaan suatu negara yang diakibatkan oleh tidak harmonisnya hubungan atau pergaulan antara penganut agama yang berlainan. Dengan belajar kepada sejarah umat beragama di Indonesia mendapat masukan dalam berpikir secara harmonis dan menjadikan fakta sejarah itu sebagai bahan dalam memelihara dan membina persatuan.

Indonesia sebagai negara Pancasila, dalam penganutan agama menganut prinsip kebebasan; termasuk untuk menyiarkan agama itu sendiri. Negara dan pemerintah tidak menghalangi setiap golongan agama untuk menyiarkan dan menyebarkan agamanya. Namun demikian kebebasan di sini tidak dapat ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas dan harus didasarkan kepada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berorientasi kepada pemeliharaan persatuan dan rasa kebangsaan.

Berbicara tentang kebangsaan, bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mempunyai ciri yang mungkin langka dimiliki oleh bangsa-bangsa lain; yang secara geografis mendiami ribuan pulau-pulau besar dan kecil yang bertebaran pada lokasi yang berjauhan, namun dengan lokasi yang berjauhan itu bangsa Indonesia membina persatuan dan kebangsaannya. Walaupun demikian harus dipikirkan dan diperhitungkan, pada masa-masa yang akan datang tidak mustahil ada usaha-usaha untuk merusak persatuan dan rasa kebangsaan, bila tidak tumbuh dari dalam, tidak menolak kemungkinan datang dari luar.

Memelihara rasa kebangsaan tidak akan melemahkan ikatan atau solidaritas golongan dalam hal ini golongan agama. Rasa kebangsaan menghilangkan rasa asing dan sikap permusuhan antara golongan. Dengan terhapusnya sikap ini, memudahkan bagi umat beragama untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan. Jadi urgensi kerukunan di sini adalah tiap golongan umat beragama memandang rasa kebangsaan ini dengan pandangan yang sama serta diiringi dengan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankannya.

3. Manunjang dan Mensukseskan Pembangunan

Pembangunan merupakan tuntutan zaman dan setiap generasi. Tuntutan ini harus dipenuhi dan dilaksanakan. Pembangunan merupakan pertanda gerak dan sebagai respons dari tuntutan tersebut. Setiap generasi menghendaki perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan dilaksanakan dengan pembangunan. Dengan kata lain pembangunan sebagai alat dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan. Melaksanakan pembangunan mengandung usaha inovasi dan

emansipasi. Inovasi mengadakan pembaharuan dari segala keterbelakangan. Emansipasi membebaskan diri dari segala keterbelakangan, yang tradisional kepada kemajuan yang rasional, meninggalkan yang tidak diinginkan kepada yang diinginkan.

Hakekat dan tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan martabat manusia, dengan pengertian pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan. Karena itu, pembangunan harus dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan yang telah diprogramkan. Sebenarnya, berhasil atau tidaknya pembangunan sangat ditentukan pelaksanaannya. Berhasil atau suksesnya pembangunan apabila pelaksanaannya itu memiliki dan didorong oleh panggilan batin, yang dilengkapi dengan kesadaran moral.

Oleh karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai penganut agama, sudah barang tentu pandangan dan sikap penganut agama-agama itu ditentukan oleh agama mereka. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap ini dilahirkan dan diikat oleh kerukunan. Urgensi kerukunan di sini adalah untuk mengintegrasikan perbedaan pandangan dan sikap. Dengan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap segala hambatan atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dapat dihadapi dan diselesaikan secara bersama. Dengan demikian terwujud kesadaran kolektif di kalangan umat beragama; bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama.

4. *Mewujudkan Masyarakat Religius*

Berbicara tentang mewujudkan masyarakat religius, sebenarnya, bagi masyarakat Indonesia, masyarakat religius bukan merupakan masalah baru. Sejak bangsa Indonesia mulai menganut agama atau sejak zaman Hindu Budha, telah menjadikan agama sebagai pegangan dan tuntutan hidup. Mewujudkan masyarakat religius bukan berarti mewujudkan bentuk dan tatanan baru, tetapi mempertegas lagi dan mengembangkan bentuk dan tatanan yang telah ada itu.

Masyarakat religius dinilai dan diukur bukan berdasarkan kuantitas jumlah anggotanya, tetapi kepada landasan, sistem pengaturan dan ikatan antar anggotanya itu. Ikatan ini didorong oleh kesadaran anggota masyarakat itu sendiri. Dari sini tumbuh kehidupan sosial yang merupakan kenyataan religi. Tiap anggota dari tiap golongan bertindak secara bersama, bekerjasama yang didorong oleh hasrat dan keinginan kolektif.

Keindahan masyarakat religius tercermin pada persamaan, kebebasan, gotong royong. Persamaan menghilangkan egoistis dan individualistis, baik secara pribadi atau secara golongan. Persamaan adalah syarat utama dalam usaha memurnikan demokrasi. Kemurnian demokrasi terpelihara selama persamaan dapat terpelihara. Persamaan mengandung pengertian; persamaan hak dan kewajiban, persamaan antar

golongan dan persamaan terhadap perlindungan hukum. Persamaan hak dan kewajiban ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang, persamaan antara golongan dan persamaan terhadap perlindungan hukum.

Dalam masyarakat religius, setiap manusia mempunyai hak yang sama dan dipandang sebagai kenyataan baik secara pribadi ataupun secara bergolongan. Setiap golongan, mayoritas atau minoritas, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tiap golongan dipandang dan diperlukan sama, baik dalam pemerintahan atau dalam bidang-bidang lain. Dengan perkataan lain tidak ada golongan yang diprioritaskan dan tidak ada golongan yang dianaktirikan.

Kebebasan berpikir mengandung kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam masyarakat religius kebebasan mengeluarkan pendapat berdasarkan kepada landasan dan garis yang telah dikhitabkan oleh agamanya. Kebebasan tanpa landasan atau di luar garis dan saluran tertentu akan merusak citra masyarakat itu sendiri. Kebebasan mengeluarkan pendapat demi untuk kemaslahatan umum, baik secara lisan atau secara tulisan. Dan bila mengeluarkan pendapat itu menggunakan metoda kritik, maka kritik tersebut adalah kritik sehat dan membangun, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Jika terjadi perlainan pendapat yang mengarah kepada perselisihan, dikembalikan kepada landasan utama yaitu agama masing-masing.

Musyawarah merupakan sarana demokrasi yang terpenting. Pada hakekatnya musyawarah sebagai sarana untuk mengembangkan dan memelihara disiplin sosial yang berorientasi kepada tanggung jawab bersama. Keputusan yang diambil berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Demokrasi masyarakat religius adalah demokrasi yang berasaskan agama, sehingga tidak ada dikurangi haknya. Semua keputusan diterima dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Keindahan masyarakat religius tercermin dalam kerjasama yang harmonis antar golongan dalam masyarakat itu sendiri. Kerjasama merupakan konsekuensi logis dari hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat yang diidamkan mustahil dapat terwujud tanpa didukung dengan kerjasama. Tiap anggota masyarakat merasa terpanggil serta mempunyai rasa tanggung jawab atas keutuhan dan kemajuan masyarakat.

Kemampuan masyarakat memelihara kearifan lokal. Membangun toleransi dengan menggunakan pendekatan sistem budaya dalam kehidupan majemuk, akan mempererat persaudaraan suatu komunitas. Semakin kuat nilai-nilai umum itu berlaku bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka. Perekat yang kuat ini akan mempererat hubungan anggota-anggota dari berbagai kelompok, sehingga terjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis. Kondisi ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan integrasi sosial.

Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan Negara. Dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Kerukunan umat beragama di Sumatera Utara pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, namun beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun antar-umat beragama, secara laten hingga kini masih sering muncul. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang. Karena itu upaya memelihara kerukunan harus dilakukan secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti.

Tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan. Misi agama atau dakwah yang kini harus digalakkan adalah misi dengan tujuan meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat.

Masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Dialog berkejujuran antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar-umat beragama. Tema dialog antar-umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah teologis, ritus dan cara peribadatan setiap agama melainkan lebih ke masalah-masalah kemanusiaan. Dalam hal kebangsaan, sebaiknya dialog difokuskan ke moralitas, etika dan nilai spiritual. Yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif. Agenda agama-agama ke depan sebaiknya difokuskan untuk menjawab tiga persoalan besar yang selama ini menjadi pangkal masalah internal dan eksternal umat beragama yakni rasa saling percaya, kesejahteraan bersama dan penciptaan rasa aman bagi masyarakat.

C. Solidarity dan Nalar Kerukunan.

Pada dasarnya semua agama mempunyai misi *solidarity*, apalagi Islam. Islam adalah suatu agama besar dan terkemuka di dunia, baik dipandang dari segi jumlah penduduknya dan terutama sekali dari segi pengaruh yang dimiliki ajaran-ajarannya terhadap tingkah laku, sikap dan pemikiran orang-orang yang percaya kepadanya. Ia bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup berbagai segi dan aspek kehidupan manusia dan hubungan antara sesamanya. Islam muncul dan dapat dipertahankan karena membawa keselamatan umat sejangat dan menciptakan solidaritas tinggi terhadap komunitas lain. Di dalam Islam banyak dijumpai ajaran kasih sayang, toleransi, dan *solidarity* yang telah dibangun oleh peradaban profetik. Artinya, agama itu hadir menyalamatkan dan meninggikan martabat manusia. Jika terjadi diskriminatif, pembantaian, pemusnahan komunitas, genosid entitas atas nama agama, sesungguhnya orang tersebut tidak beragama.

Fungsi agama adalah kaidah-kaidah pembebasan manusia dari kekerasan dan menuju jalan Tuhan. Agama Islam sebagai agama universal membawa keselamatan dan kedamaian manusia lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat di bawah bendera tauhid yang penuh dengan kasih sayang (*marhamah*). Jika ada yang mengatakan bahwa terorisme, anarkisme, sapatisme, dan sekarang gerakan ISIS yang massif itu adalah ajaran Islam, tentu sangat keliru. Sebab Islam menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminatif. Oleh kerennanya, jangan anda gegabah memberikan *labeling* negative pada suatu agama atau melakukan kriminalisasi simbol-simbol suci agama, jika anda tidak ingin dikatakan sebagai *konflic maker*.

Memang aneh, agama yang seharusnya membawa kedamaian, keselamatan dan membawa misi suci kemanusiaan, justru umatnya kok jadi bringas, menakutkan dan membawa bencana bagi manusia. Mengapa itu terjadi ?. Dalam komunitas Islam misalnya, hal itu terjadi karena etika yang dipakai bukanlah etika Alqur'an yang universal dan *rahmatan lil 'almin* itu, tapi etika golongan, kelompok dan fanatisme mazhab tanpa alasan. Setiap golongan merasa bangga dengan dirinya. Disamping adanya konspirasi politisasi agama dan Islamophobia. Untuk menghindari hal semacam itu, kita buang etika golongan, dinasti atau etika ras, kita ganti dengan etika Qur'an. Etika Alqur'an sebenarnya; *Innamal mukminuna ikhwatun*. Artinya, orang beriman itu bersaudara, family dan satu keluarga yang saling membesarkan. Tidak hanya itu, Islam juga menghargai dan menghormati komunitas lain, asal tidak mengganggu dan mengancam eksistensinya. (QS. Yunus 99, Al-Mumtahanah: 8-9, al-Hujarat :13).

Di dunia global saat ini justru diperlihatkan keganasan dan kerakusan manusia terhadap sesama "*homo homini lupus*", menjadi pemandangan yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Satu kelompok membunuh kelompok yang lain

secara separatis tanpa prikemanusiaan. Jika kita berpikir agak lebih jauh lagi, penyebabnya karena manusia itu belum dewasa dalam beragama. Beragama belum sampai pada posisi *intellectual mutuality*. Menarik kalau dihubungkan dengan Islam, sepanjang sejarah orang Islam dikenal baik oleh kalangan Islam maupun non-Islam, toleransi sosialnya terhadap umat non-Islam begitu tinggi. Benar apa yang dikatakan **Bertrand Russel**, filosof Inggris terkenal, bahwa; penyebab pada seratus tahun pertama abad VII M. Islam berkembang dengan cepat adalah toleransi sosial “*solidarity*” nya terhadap umat yang beragama lain begitu tinggi yang tidak ada taranya dalam sejarah. Dalam seratus tahun saja kekuasaan Islam telah terbentang dari Spanyol sampai sungai Hindus.

Saat ini para ahli statistik dunia mencatat bahwa Islam berkembang pesat di dunia Eropa Barat, seperti di Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman mencapai ratusan persen dalam sepuluh tahun terakhir. Mengapa hal itu bisa terjadi, apakah Islam di sana berkuasa, lalu dengan kekuasaannya memaksa orang untuk memeluk Islam ?. Tentu tidak. Karena yang berkuasa justru sebaliknya. Lalu mengapa umat Islam disana dari tahun ke tahun bertambah secara signifikan ?. Jawabannya adalah karena Islam itu agama fitrah, sesuai dengan pencernaan akal sehat dan hati nurani, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai kegelisahan spiritual. Sehingga banyak diantara mereka yang memilih Islam dan meninggalkan agama lamanya, karena mereka cerdas mempelajari Alqur’an yang rasional dan penuntun hidup menuju kebahagiaan lahir bathin.

Lalu kemudian, ketika umat Islam berkuasa apakah memaksakan keyakinannya kepada komunitas lain ?. Hal itu juga tidak akan terjadi, karena Islam dikembangkan melalui *dakwah bil hikmah* dan kesadaran tanpa paksa (QS. Al-baqarah: 256 dan an-Nahl:125). Islam berkuasa selama 6 abad di Spanyol, tidak satupun umat lain dipaksa untuk memeluk Islam, malah diberikan perlindungan. Tapi sebaliknya, ketika Spanyol dikuasai oleh agama lain, umat Islam diusir dari rumahnya dan dibunuh tanpa sisa, dan dipaksa mengkonversi keyakinannya, sungguh tragis. Islam juga berkuasa lebih kurang 6 abad di India, Penguasa Mughal melindungi dan memberikan kebebasan berkeyakinan dan mengamalkan agamanya masing-masing, sehingga sampai hari ini India tetap mayoritas agama non muslim. Artinya, jika Penguasa Islam saat itu melakukan pemaksaan tentulah India hari ini akan dihuni oleh mayoritas Islam, hal ini satu bukti bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan dan pemaksaan.

Demikian juga di Indonesia, Islam masuk dengan dawah kesadaran dan perdagangan, tanpa menopleng dengan penjajah. Walaupun Islam mayoritas di Indonesia dan boleh dikatakan berkuasa, tapi tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, kerukunan antarumat beragama. Orang beriman diharuskan menghargai dan

menghormati semua nabi utusan Allah, diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain baik dalam tindakan, maupun perkataan, dan saling melindungi, menjaga keselamatan rumah ibadah setiap umat beragama, tidak menzaliminya, memelihara kehormatan semua umat beragama, hak hidupnya, memperbaiki masa depannya, hak hidup dan masa depan umat Islam sendiri. Dengan *solidarity* yang tinggi seperti ini akan menjadikan Islam sebagai agama pilihan masa depan.

Sejarah Peradaban agama-agama mencatat bahwa prasangka buruk dan tindakan diskriminatif terhadap Islam dan umat Islam, tak terpisahkan dari upaya umat lain untuk memisahkan Muslim dari akidahnya, melemahkan umat Islam, mengkompanyekan stigma yang merendahkan, dituduh intoleransi, lalu menguasai sumber ekonomi, dan bila perlu menggenosida Muslim dan mengusirnya dari tanah kelahirannya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. *Islamofobia* adalah istilah kontroversial yang merujuk pada [prasangka](#) dan [diskriminasi](#) pada [Islam](#) dan [Muslim](#). *Islamofobia* dapat juga didefinisikan sebagai "rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan Muslim," lalu kemudian mereka melakukan praktik [diskriminasi](#) terhadap Muslim. Padahal Islam itu agama damai, *rahmatan lil 'alamin*, toleran dengan berbagai keyakinan dan menghargai heterogenitas. Substansi Istilah itu sudah ada sejak lama, boleh dikatakan sejak pecahnya perang salib, dan menjadi lebih populer setelah peristiwa [serangan 11 September 2001](#).

Jika dicermati catatan histori dari Dr. Jerald F. Dirks dalam karyanya "*The Abrahamic Faiths*". Secara Historisitas membuktikan bahwa pada awal abad ke-11 M Paus Urbanus II secara resmi mendeklarasikan perang Suci melawan umat Islam di Timur Tengah, dan mengecap seluruh muslim sebagai ras terkutuk, sehingga menyulut fanatisme dan kebencian terhadap Muslim. Sepanjang abad ke-12 dan 13 terus digaungkan kebencian terhadap muslim dengan lahirnya sebuah karya dari penyair Normandia yang kemungkinan ditulis oleh Turolde "*La Chanson de Roland*" mempersonifikasikan muslim sebagai penjahat dan penyembah berhala. Yang kemudian menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kalangan jiwa-jiwa terkutuk yang menyebabkan stigma agama. Nabi Muhammad digambarkan terbelah dari kepala sampai pinggang dan mengoyak-ngoyak dadanya dengan tangannya sendiri.

Tidak hanya itu, pada abad 15 M di Spanyol ribuan umat Islam yang tertahan di pelabuhan hanya bisa terpana ketika tentara Salib juga membakari kapal-kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka keluar dari Spanyol. Kapal-kapal itu dengan cepat tenggelam. Ribuan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa karena sama sekali tidak bersenjata. Mereka juga kebanyakan terdiri dari para perempuan dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Sedang tentara Salib itu telah mengepung mereka dengan pedang terhunus. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara Salib itu

segera membantai dan menghabisi umat Islam Spanyol tanpa perasaan belas kasihan. Jerit tangis dan takbir membahana. Dengan buas tentara Salib terus membunuh warga sipil yang sama sekali tidak berdaya. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperingati oleh mayoritas masyarakat dunia setiap tanggal 1 April sebagai April Mop (*The Aprils Fool Day*).

Masih banyak peristiwa yang sama dalam perjalanan historisitas Islamofobia sampai di era modern dan saat ini. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana derita umat Islam di Bosnia dan Kosovo. Dunia menyaksikan pembantaian besar-besaran di Balkan, ketika musuh-musuh Allah Serbia melancarkan perang genosida terhadap umat Islam di Bosnia, sebagai pembersihan etnis, ratusan ribu dibunuh tanpa prikemanusiaan, dan jutaan orang diusir dari rumah-rumah mereka. Di awal mellenium ketiga ini juga masih terus terjadi Islamofobia. Di Amerika, Perancis dan di beberapa Negara Eropa lainnya melakukan penghinaan terhadap Islam, melarang umat Islam mengamalkan ajaran agamanya, dan mengadakan sayembara membuat karikatur Nabi Muhammad untuk menyudutkan Muslim. Di Myanmar, terjadi pembantaian dan pembunuhan etnis Rohingya yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Sepantasnya mendapat kecaman dari dunia, sebab perlakuan pemerintah Myanmar dan sekelompok tokoh agama yang membenci etnis Rohingya sudah melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dan yang terkini adalah sebuah Negara Angola di benua Afrika melarang agama Islam secara resmi. Muslim di Negara itu telah diminta untuk menutup masjidnya karena disahkan oleh pemerintahnya. Alasan pelarang itu adalah karena dianggap perilaku muslim dan Islam tidak sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Begitu mudah dan sederhananya alasan penguasa dominasi untuk menggenosed muslim. Kelihatannya mereka semua keliru memahami Islam, atau mereka takut kehilangan populeritas disebabkan kerasionalan ajaran Islam, atau mereka sudah gentar melihat perkembangan muslim di Eropa, atau boleh jadi juga karena ketidakrelaan mereka terhadap kejayaan Islam di dunia. “ *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.* (QS. Al-Baqarah : 130).

Penyerangan yang dilakukan oleh jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri 1436 H di Masjid Tolikara Papua, merupakan perbuatan yang sangat memilukan dan memalukan,

biadab, separatis, terkesan anti agama alias gerakan komunis, dan untuk tidak menyatakan sebagai teroris. Betapa tidak, umat Islam yang sedang shalat dan membaca *takbir*, *tahmid* dan *tasbih*, membesarkan, memuji dan mensucikan Allah SWT tiba-tiba diserang dan dikejar, lalu masjidnya dibakar bersama puluhan rumah milik umat Islam. Siapa yang bisa menerima kenyataan ini ? Apa salah mereka beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya di negeri Pancasila ini ? Mengapa umat Islam selalu tertuduh, dipojokkan dan terus korban, berdamai, korban lagi. Jangan sampai hilang kesabaran umat Islam.

Sesungguhnya Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, agamai damai, toleransi dan menghormati eksistensi kepercayaan dan agama lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. *Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.* (QS. Yunus:99). Apabila semua umat mengamalkan ajaran kasih sayang, toleransi, dan *solidarity* tentu akan terbangun peradaban agama. Artinya, agama itu hadir menyelamatkan dan meninggikan martabat manusia. Bukan diskriminatif, pembantaian, pemusnahan komunitas, genosid entitas atas nama agama. Jika terjadi malah sebaliknya, berarti komunitas itu anti agama alias tidak beragama. Apakah masih pantas berada di bumi Pancasila ini ? .

Selain itu, mengapa di suatu daerah di NKRI ini bisa lahir regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang diakui oleh Bupati Tolikara Papua bahwa benar ada Perda pelarangan pendirian rumah ibadah, kecuali rumah ibadah GIDI yang bebas berdiri. Tidak hanya itu, ada juga Perda yang melarang muslimat memakai penutup kepala atau jilbab. Bukankah Perda-Perda itu bertentangan dengan empat pilar nasional, sekaligus tidak menghargai hak asasi manusia untuk mengamalkan keyakinannya masing-masing. Bukankah perilaku ini merupakan radikal yang sesungguhnya. Jadi sekarang terbukti, siapa sebenarnya yang dimaksud teroris, yaitu penyerangan yang dilakukan terhadap orang yang sedang beribadah. Untuk itu pemerintah harus membuka mata dan waspada terhadap gerakan ini, karena gerakan semacam ini sangat berbahaya bagi integritas bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim.

Untuk itu umat Islam jangan mudah terprovokasi dan terpancing dengan isu-isu SARA yang memang menjadi target pihak tertentu untuk menggenosida umat Islam secara massif. Umat Islam harus sadar bahwa kendati umat Islam mayoritas di negeri ini, tapi menjadi minoritas dalam penguasaan tanah dan sumber daya alamnya. Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa tanah dan sumber daya alam Indonesia dominan dikuasai oleh asing, notabene adalah non Muslim. Ini artinya umat Islam Indonesia lemah, banyak yang tidak memiliki tempat tinggal, tergesur, dan akan musnah.

Padahal *land is power*, bahwa tanah adalah kekuasaan, jika tidak memiliki tanah maka tidak bisa berkuasa. Di atas tanahlah manusia menjalan misi humanis sesuai keinginan Tuhan, atau yang disebut dengan istilah teologi tanah.

Yang tak kalah pentingnya adalah konspirasi global telah berhasil melemahkan umat Islam, menerbar narkoba di kalangan generasi Islam, liberalisasi, proxy war, dan berbagai isu HAM serta mengadu domba internal Umat Islam yang berujung pada perang saudara. Mulai dari Iraq, Mesir, Libya, Syiria, Yaman, sampai Negeria di Afrika. Negara-Negara itu adalah berpenduduk mayoritas Muslim, sebagaimana Indonesia. Sementara kehidupan umat Islam sebagai minoritas di negeri lain terancam, yang menjalankan ibadah diburu, bila perlu ditembak. Baru-baru ini di China umat Islam dilarang melaksanakan ibadah puasa, tidak boleh pakai jilbab. Di Inggris muslimat yang memakai jilbab tidak dibenarkan menaiki transportasi umum, kalau mau naik harus membuka jilbabnya. Di Amerika ada kelompok anti Islam yang membuat sayembara karikatur Nabi Muhammad yang sangat menyinggung perasaan umat Islam se dunia. Belum kering dari ingatan kita, umat Islam Rohingya dibantai dan diusir dari tempat tinggalnya oleh rejim Myanmar. Perilaku ini sudah keterlaluan, sangat tidak manusiawi, dan melampaui batas untuk disikapi secara tegas.

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, (QS. Al-Haj :39-40).

Berdasarkan ayat di atas, jika kita diserang seharusnya umat Islam membela diri. Namun atas penyerangan GIDI tersebut, umat Islam masih menahan diri, mempercayakan kepada pemerintah, tapi bukan berarti diam. Kita mengutuk penyerangan itu dan meminta kepada pemerintah segera menindak tegas dan hukum berat pelakunya, serta memulihkan trauma kejiwaan umat Islam. Walaupun Islam mayoritas di Indonesia dan boleh dikatakan berkuasa, tapi tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, kerukunan antarumat beragama. Saling melindungi, menjaga keselamatan rumah ibadah setiap umat beragama, tidak menzaliminya, memelihara kehormatan semua umat beragama, hak hidupnya, memperbaiki masa depannya dengan *solidarity* yang tinggi. Inilah toleransi yang sesungguhnya, bukan *life service* lalu mengunting dalam lipatan. Jangan sakiti saudaramu, jika engkau tidak mau disakiti.

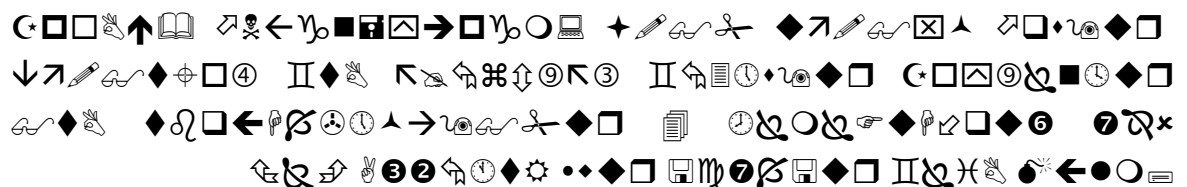
D. Keragaman; Anugerah Bukan Bencana

Indonesia adalah Negara terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan heterogenitas suku bangsanya. Indonesia juga merupakan Negara

kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Dari aspek wilayah, dari Barat ke Timur membentang sepanjang 5.110 km dan garis meridian membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 km. Panjang garis pantai 108.000 km. Luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km², dengan 1.904.569 km² luas daratan, dan 3.288.683 km² lautan yang dihuni oleh 240 juta jiwa, 1.128 suku bangsa dan 726 bahasa (BPS, 2010). Setidaknya 6 agama resmi dan ratusan keyakinan dan aliran kepercayaan, yang semua tidak mungkin diseragamkan. Heterogenitas dapat memunculkan perubahan struktur masyarakat, yang ke depan akan menjadi semakin rumit. Salah satunya disebabkan oleh faktor migrasi dan mobilitas sosial masyarakat yang sangat dinamis. Ke depan nyaris tidak mungkin ada tempat yang homogen. Demikian besar keragaman sekaligus perbedaan yang ---bila tidak ada pranata bernama toleransi—akan berimplikasi pada terbukanya konflik.

Ini satu bukti bahwa Indonesia sangat heterogen, baik agama, budaya, kepercayaan lokal dan tradisi lainnya. Artinya, Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Apakah mayoritas komunitas agama di satu daerah sebagai umat beragama yang senyum, elegan atau menjadi umat yang intoleran. Semestinya masyarakat religius betul-betul merayakan kemajemukan, dan damai dalam perbedaan. Perbedaan itu menjadi mozaik yang indah dan sebagai modal kekayaan anak bangsa membangun masa depan bersama. Kalaupun ada konflik, hal itu lebih disebabkan oleh konflik resources, sumber daya alam, batas tanah, gesekan politik, tidak taat asas terhadap regulasi yang ada, dan hampir tidak ada yang disebabkan oleh agama itu sendiri.

Masalah heterogenitas etnis dan suku selalu dibicarakan, selalu diamati dan dibuktikan dalam interaksi sosial adalah suatu keniscayaan. Artinya, kemajemukan bangsa ini pada hakikatnya adalah *iradah* dan anugerah Allah SWT yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Sebab, kemajemukan bisa melahirkan rahmat, tapi juga bisa menjadi bencana sebagaimana yang terjadi di Tolikara-Papua dan Singkil Aceh. Heterogenitas menjadi rahmat, apabila keragaman itu tersusun, tertata dengan baik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan masyarakat. Bisa jadi bencana, bila kita saling memaksakan kehendak dan mendeskreditkan, menghina dan membicarakan perbedaan, sehingga berubah menjadi permusuhan.



Kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya.

dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. (QS.42:8).



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. (QS. 49:13).

Selama ini intoleransi selalu dituduhkan pada Islam. Padahal intoleransi itu tumbuh dari setiap agama, dan bukan persoalan mayoritas dan minoritas. Kasus di Bali misalnya, ada anggota DPD Bali yang mengatakan bahwa Bali untuk orang Bali, yang lain tidak boleh lagi mengamalkan ajaran agamanya, dan di Bali ada desa dinas dan ada desa adat, artinya desa adat hanya untuk orang Bali. Persepsi parsial itu juga banyak terjadi di luar negeri, seperti di satu bagian Negara Afrika-Angola, bahwa Islam tidak dibenarkan ada di sana, hanya karena tidak sesuai dengan kultur dan budaya mayoritas setempat. Termasuk di Myanmar yang tidak mencantumkan etnis Rakhene-Rohingya dalam undang-undang kewarganegaraannya. Hal ini sangat memprihatinkan.

Tidak ada Negara seperti Indonesia yang menghargai segala entitas, peribadatan masing-masing agama, saling menghargai, menghormati dan tetapi rukun damai. Kita optimis bahwa kerukunan di Indonesia tetap terpelihara, soal disana sini ada kekurangan so pasti. Beruntunglah kita bangsa Indonesia mempunyai Pancasila, yang merupakan suatu pandangan filosofis kebangsaan bersama dan aturan-aturan praktis yang mampu mewedahi keanekaragaman, sekaligus melindungi keyakinan masing-masing dari intervensi dan kepentingan politik. Pancasila telah terbukti dan teruji dapat menyatukan suku, agama, ras dan antargolongan agar kita tetap bersama, mesti tidak sama.

Untuk mewujudkan persaudaraan yang sejati atau solidaritas sosial (*‘aṣabiyah*) dalam piranti integrasi umat beragama, paham pluralis harus disertai keterlibatan aktif dalam kehidupan kebersamaan. Pluralitas tidak cukup hanya dengan mengakui dan menghormati keberadaan orang lain yang berbeda etnis, warna kulit, bahasa, maupun agama, tetapi juga harus disertai kesadaran yang mendalam untuk bersama-sama

membangun suatu pergaulan yang dilandasi penghargaan dan penghayatan atas kemajemukan.⁷²

Semua agama hadir di tengah-tengah manusia dengan tawaran berbagai janji. Janji yang ditawarkan agama kepada manusia adalah untuk membangun masyarakat ideal, kehidupan yang lebih baik, beradab, aman, damai dan sejahtera. Konsekuensi dari janji-janji ini adalah semua agama harus siap diuji oleh mahkamah sejarah. Jika ternyata gagal memenuhi janji-janjinya, dapat dipastikan bahwa agama akan digugat dan ditinggalkan orang. Selain menawarkan janji-janji, agama juga bagaikan kaca mata yang dengan orang beriman akan memandang dan menafsirkan dunia sekitarnya serta mengonstruksi realitas dunia. Sekalipun secara fisik tidak kelihatan, keyakinan dan paham agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ataupun masyarakat. Untuk itulah sedianya para pemuka dan tokoh agama menampilkan ajaran agama yang moderat dan toleran terhadap keberbedaan.

Umat beragama diajak untuk memahami bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, ras atas ras yang lain, seorang tuan atas pembantunya. Atas dasar itulah, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau merendahkan orang lain.⁷³

Keragaman pada hakikatnya adalah penerimaan terhadap nilai-nilai bahkan institusi-institusi yang diyakini sebagai kebenaran. Kenyataannya manusia tidak lahir dalam ruang yang hampa budaya dan hampa agama, tapi sudah tercipta berbagai keyakinan dan agama dalam bingkai satu Tuhan. Hikmah hidup keberagaman haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan. Jika memang agama diwahyukan untuk manusia, dan bukan manusia untuk agama, maka salah satu ukuran baik-buruknya sikap hidup beragama adalah menggunakan standard dan kategori kemanusiaan, bukannya ideologi dan sentimen kelompok. Hanya dengan cara demikian misi agama dapat melahirkan integrasi dalam kehidupan manusia yang terus berubah dan berkembang bagi peningkatan martabatnya dan mengembangkan keteladan hidup keberagaman yang santun, meningkatkan kesolehan sosial.

E. Potensi Konflik Berbasis Rumah Ibadah

⁷² Shihab, *Islam Inklusif*, h. 41-43.

⁷³ Ali Nurdin, *Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Erlangga, 2006), h. 282-285.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri pada saat itu telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No.8/2006 (kemudiandisingkat menjadi PBM No. 9/2006 dan No.8/2006) yang didalamnya mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Tapi, dalam realitasnya, konflik rumah ibadah masih tetap saja terjadi dan jumlahnya semakin meningkat. Fakta ini dapat dilihat dari berbagai data yang dirilis oleh sejumlah lembaga.⁷⁴ Menurut catatan *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2008 setidaknya terdapat 12 kasus konflik di seputar rumah ibadah.⁷⁵ Sementara pada tahun 2009 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2010 terdapat 39 kasus.⁷⁶ Kelihatannya dinamika konflik kasus pendirian rumah ibadah dari tahun ke tahun bertambah, termasuk pada tahun 2017 perusakan rumah ibadah di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Rumah ibadah merupakan bagian yang *inheren* dalam suatu agama. Artinya, tidak dapat dikatakan sesuatu itu sebagai agama apabila tidak memiliki sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Demikian juga sebaliknya, tidaklah dapat dikatakan sesuatu itu rumah ibadah dan tidaklah bernilai pelaksanaan ibadah seseorang, jika tidak mengikuti aturan agama.

Rumah ibadah dalam Islam adalah bangunan yang dijadikan tempat ibadah disebut **Masjid** (*baitullah*) atau mushalla. Dalam bahasa sehari-hari, masjid sebagai rumah ibadah diartikan sebagai bangunan untuk ibadah shalat. Sebab, masjid berarti tempat sujud, yakni bangunan yang didirikan khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah Swt, khususnya shalat dan tempat pelaksanaan kegiatan ibadah lainnya. Dalam ajaran Islam, pada hakikatnya seluruh muka bumi ini adalah masjid (HR. Bukhari, Ahmad dan Baihaqi). Karena itu, bagi seorang muslim kewajiban menunaikan

⁷⁴Ada sejumlah lembaga yang setiap tahunnya membuat semacam laporan mengenai kondisi kehidupan beragama di Indonesia yang antarlainmerilis data-data tentang konflik pendirian rumah ibadah. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UniversitasGadjahMada, The Wahid Institute, Setara Institute, dan Moderate Muslim Society.

⁷⁵ZaenalAbidinBagir, dkk.,*LaporanTahunanKehidupanBeragama di Indonesia Tahun 2008* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2009), h. 17.

⁷⁶ZaenalAbidinBagir, dkk.,*LaporanTahunanKehidupanBeragama di Indonesia Tahun 2010* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), h. 34.

shalat sebenarnya dapat dilakukan dimana saja (tidak terikat oleh ruang) asal suci dari najis.

Sedangkan dalam agama Kristen rumah ibadahnya disebut **Gereja**, yang secara sederhana diartikan sebagai rumah tempat beribadah, rumah pertemuan antara Allah dengan umat-Nya. Gereja bukan sekedar tempat pertemuan, tapi dipahami sebagai rumah kediaman Allah yang bisa dikunjungi oleh umat, karena rumah Allah yang disurga tak dikunjungi selama kita hidup di dunia.

Kemudian dalam agama Hindu rumah ibadahnya disebut *Kuil* berarti tempat suci atau dikenal juga dengan istilah rumah Tuhan. Kuil juga disebut *Aalayam* yaitu **Aa** yang merupakan singkatan **Atma** berarti jiwa dan **Layam** berarti bersamadhi. Jadi berarti **Aalayam** adalah tempat dimana jiwa bersamadhi. Demikian juga dalam agama Budha rumah ibadahnya disebut vihara. **Vihara** (dibaca Wihara) berarti tempat tinggal yang sunyi, yaitu tempat tinggal bagi anggota sangha (komunitas para bikhu). Vihara merupakan rumah ibadah umat Buddha yang lebih besar dan memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan dengan **Cetiya**, ruangan yang ada di vihara adalah ruang kebaktian, ruang perpustakaan, ruang tempat tinggal Bikhu, dan ruangan meditasi, seta ruangan kantor tempat kerja pengurus vihara. Sedangkan dalam agama Konghucu rumah ibadahnya disebut **Kelenteng** (Miao/Bio), artinya bangunan untuk kebaktian bagi Nabi Khongcu, juga sebagai tempat sembahyang para leluhur. Rumah ibadah konghucu yang banyak di Indonesia adalah **Litang** yang berada dibawah naungan MAKIN (Majelis agama Konghucu Indonesia).

Sebagian besar problem di seputar rumah ibadah adalah konflik pendirian rumah ibadah di mana perijinan menjadi penyebab utamanya.⁷⁷ Terjadinya konflik pendirian rumah ibadah hampir semuanya dilatarbelakangi oleh penolakan kelompok agama tertentu atas keberadaan suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Di samping itu, konflik pendirian rumah ibadah juga dilatarbelakangi oleh

⁷⁷Dari 39 kasus konflik di seputar rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2010, masalah perijinan menempati posisi teratas dalam konflik pendirian rumah ibadah, yakni sebanyak 24 kasus (62%). Zaenal Abidin Bagir, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan*, h. 36.

argument bahwa bangunan atau rencana pembangunan tidak sesuai denganperuntukkan atau menyalahi konsep tata ruang.⁷⁸

Pesebaran wilayah konflik rumah ibadah dalam pemetaan berdasarkan tiga zona hijau, kuning dan merah dilakukan untuk melihat tingkat keragaman suatu wilayah sekaligus memetakan bagaimana dinamika rumah ibadah dalam priode waktu pasca reformasi. Penelitian Khoiri di atas tidak memetakan secara khusus konsepsi zona wilayah berdasarkan tingkat persoalan keagamaan, khususnya rumah ibadah.

Penentuan zona wilayah berdasarkan situasi dan tingkat konflik rumah ibadah yang pernah terjadi di suatu daerah, identifikasi ini setidaknya merujuk pada data-data yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara dan beberapa lembaga penelitian yang mengeluarkan laporan terkait masalah rumah ibadah. Dalam penentuannya, peneliti seoptimal mungkin mempertimbangkan tingkat eskalasi konflik, sehingga bisa dikategorikan sebagai wilayah dengan zona hijau, kuning dan merah dalam pengelolaan rumah ibadah.

Zona hijau sebagai kategori wilayah yang tingkat ketegangan umat beragama, khususnya konflik rumah ibadah tidak terdeteksi atau belum ditemukan adanya potensi konflik. Wilayah dengan kategori zona hijau meliputi wilayah yang secara demografi keagamaan ada yang mayoritas Islam dan mayoritas Kristen. Dibeberapa wilayah kehidupan beragama masyarakat terhindar dari isu-isu krusial yang berkaitan dengan masalah relasi maupun simbol-simbol keagamaan seperti rumah ibadah.

Zona kuning adalah wilayah yang menurut pemetaan FKUB Sumatera Utara dengan isu masalah sosial keagamaan masuk dalam kategori wilayah yang sudah terdeteksi memiliki beban konfliktual khususnya konflik rumah ibadah yang belum terselesaikan. Wilayah tersebut terjadi dibeberapa kabupaten kota, seperti kota Medan, menurut catatan FKUB kota Medan⁷⁹ terdapat setidaknya dua persoalan rumah ibadah. *Pertama*, persoalan rumah ibadah masjid dengan pengembang (developer) yakni Masjid Al Hidayah dan Masjid di Kawasan Plaza Hermes,⁸⁰ kedua masjid menghadapi persoalan pelik yang bertahun-tahun belum tuntas karena tidak ditemukannya kata

⁷⁸AkholFirdaus, dkk., *Negara Menyangkal: KondisiKebebasanBeragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Ismail Hasanidan Bonar TigorNaipospos (ed.), (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), h. 61.

⁷⁹FKUB Kota Medan

⁸⁰Liputan harian Umum Waspada

sapakat antara pihak pengembang (*developer*) dengan beberapa kelompok keagamaan yang menginginkan tidak adanya pemindahan atau perubahan masjid.⁸¹ *Kedua*, masalah regulasi pendirian rumah ibadah, diantaranya adalah berdirinya gereja baru di wilayah Kecamatan Helvetia yang diduga tidak sesuai dengan regulasi tentangpendirian Vihara di Medan Belawan juga diduga tidak memenuhi aturan pendirian⁸²

Kabupaten Batubara, sejumlah rumah ibadah gereja terkena pembuatan jalur rel kereta api yang menuju pelabuhan Kuala Tanjung, sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaian. Kota Tebing Tinggi, persoalan perubahan bangunan menjadi tempat ibadah. Kabupaten Deli Serdang, gereja di desa Laudendang yang berada pada pemukiman muslim, dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

Wilayah dengan kategori zona merah ditentukan oleh terjadinya konflik rumah ibadah yang sudah mengarah pada tindakan pengrusakan dan munculnya ketegangan yang lebih dari 10 tahun tidak terselesaikan. Ada tiga wilayah yang terdeteksi sebagai wilayah zona merah terkait konflik rumah ibadah, yakni kota Tanjungbalai, ada 11 rumah ibadah vihara dan klenteng yang di bakar massa pada pertengahan tahun 2016. Catatan lapangan FKUB Kota Tanjungbalai dan hasil investigasi FKUB Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa berlarutnya konflik simbolik antara Islam dan Budha pada kasus Patung Amithaba sejak tahun 2010 sampai 2016 menemukan puncaknya ketika seorang etnis Tionghoa dianggap melakukan penghinaan terhadap salah satu masjid.⁸³

Wilayah lain yang masuk dalam kategori merah menurut perspektif FKUB adalah wilayah Kota Binjai, khususnya Kecamatan Binjai Baru, di sana, selama 10 tahun lebih gereja belum bisa didirikan.⁸⁴ Hal ini dikarenakan muncul ketegangan antara penduduk sekitar dengan kehadiran gereja di wilayah tersebut. Di Kabupaten Deli Serdang, berbatasan dengan kota Medan tepatnya di Desa Laut Dendang, sebuah gereja harus dipindah karena ketika dilakukan pelebaran tidak berdasarkan aturan, masyarakat sekitar menuntut agar gereja tersebut di pindahkan. Konflik itu sudah

⁸¹Liputan Harian Umum Waspada

⁸²FKUB Kota Medan

⁸³Laporan Investigasi Tim FKUB Provinsi Sumatera Utara pada kasus Pembakaran Rumah Ibadah di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.

⁸⁴Laporan FKUB Kota Binjai

berjalan selama 10 tahun lebih.⁸⁵ Terbakarnya rumah ibadat dan rumah umat Kristiani di Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang dijadikan sebagai rumah ibadat. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendirian rumah ibadat dan secara cepat terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah ibadat dan 2 (dua) unit rumah warga umat Kristiani, karena tidak sesuai aturan. Demikian juga Masjid Munawarah Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2010 sampai sekarang belum bisa didirikan. Dengan berbagai alasan yang tidak rasional dan inkonstitusional, pemerintah setempat tetap tidak memberikan izin, terkesan dendam dan pembiaran, hal ini juga memicu konflik massal.

Bentrokan antar warga suku Nias di Dusun Adian Nagoti dengan warga Desa Tolang, Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terjadi pada Senin 23 Desember 2013. Sedikitnya 10 rumah dan satu tempat ibadah milik warga suku Nias dibakar. Warga Desa Tolang Jae diduga berang lantaran warga suku Nias melakukan penggarapan tanah dan pembangunan rumah di atas kawasan hutan register 6 Angkola. Mereka pun kecewa, hingga akhirnya, warga Desa Tolang melakukan penyerangan ke pemukiman suku Nias.

Berdirinya masjid al-Khairiyah dan masjid Raudhatul Islam jalan Yos Sudarso Kelurahan Silalas Medan Barat. Di areal tanah Negara itu, telah berdiri rumah elite. Tidak hanya menguasai asset negara, mafia tanah juga merubuhkan masjid. Pembangunan Gereja GKPS di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Adanya keresahan masyarakat di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena adanya kegiatan pembangunan Gereja GKPS yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Adanya keberatan warga atas pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Pembangunan Vihara Meitreya Jaya di Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Adanya surat penolakan dari MUI Kabupaten Asahan dikarenakan pendirian Vihara ini berdekatan dengan Mesjid Agung Kisaran. Kementerian agama Kabupaten Asahan masih belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat.

⁸⁵ Laporan FKUB Kota Medan

Rumah yang dijadikan rumah ibadat Gereja GBI Antiokhia di Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kelurahan Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi. Adanya keberatan warga masyarakat Komplek Perumahan tersebut terhadap kegiatan di Gereja GBI dimaksud. Balai pengobatan yang berfungsi sebagai Vihara di Kota Tanjung Balai. Adanya keberatan masyarakat dikarenakan izin pendirian bangunan sebagai balai pengobatan tetapi dijadikan rumah ibadat.

Pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Resort Binjai Baru Kota Binjai. Adanya keberatan warga Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai atas pendirian rumah ibadat Gereja HKBP. Pengurus FKUB Kota Binjai dan Dewan Penasehat FKUB Kota Binjai pada rapat tanggal 2 Juni 2008 sepakat bahwa penyelesaian permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah Kota Binjai, dan sampai sekarang masih menyimpan bara api, karena kedua belah pihak masih bersekukuh.

Pendirian rumah ibadat Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. Adanya warga yang keberatan atas pendirian Kuil tersebut. Pembangunan patung Amithaba di Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai. Masyarakat menuntut agar penempatannya dipindahkan. Sejak tahun 2010 itulah potensi konflik bagaikan api dalam sekam, dan pembakaran rumah ibadah pada bulan Juli 2016 yang lalu merupakan anti klimaks, karena terjadi pembiaran dan tidak tegasnya pemerintah.

Penyerangan yang dilakukan sekitar 300 orang terhadap umat Islam dan perusakan rumah ibadah di Kampung Melayu Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melempari Masjid al-Barokah, dan membakar lima unit rumah, serta merusak tanaman masyarakat. Pembakaran mesjid di Lumbanlobu Toba Samosir tanggal 27 Juli 2010. Terbakarnya dua buah Masjid di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, 30 Maret 2011.

Kehadiran sebuah rumah ibadat sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadat dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan, suatu kelompok agama. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada

komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006/No 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

Keragaman agama ternyata menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari. Mana diantara potensi tersebut yang dominan? Konflik bisa saja terjadi. Penyebab konflik terkadang disebabkan adanya *truth claim* (klaim kebenaran). Namun yang dominan, konflik lebih dipicu oleh unsur-unsur yang tak berkaitan dengan ajaran agama sama sekali. Konflik sesungguhnya dipicu oleh persoalan ekonomi, sosial dan politik, yang selanjutnya di *blow up* menjadi konflik (ajaran) agama.

Mencermati dinamika umat beragama di Sumatera Utara pasca reformasi, realitanya umat beragama dihadapkan pada sejumlah gangguan kerukunan dan potensi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil research FKUB Sumatera Utara lima tahun terakhir, konflik antarumat beragama di Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor penodaan dan pelecehan agama, konversi agama, pendirian rumah ibadah, keamanan, dinamika politik, perebutan sumber daya alam, perilaku diskriminasi para pengembang, dan yang tak kalah pentingnya disebabkan oleh konflik agraria. Dari sekian banyak akar konflik tersebut, yang dominan disebabkan oleh pendirian rumah ibadah, konflik perebutan sumber-sumber ekonomi dan konflik agraria, baru kemudian disebabkan oleh pembiaran atau ketidaktegasan pemerintah menegakkan regulasi.

Keunikan keragaman di suatu daerah seperti di Sumatera Utara, jika ditata dengan baik akan mampu membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain hal itu dapat menimbulkan sumber pemicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pola pembangunan di daerah ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati, karena apabila dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperhatikan keragaman sosial itu, tentunya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Suatu keniscayaan sejarah bahwa di Sumatera Utara menjadi wilayah pertemuan agama-agama, dan budaya yang

saling bersentuhan. Persentuhan tersebut dapat menimbulkan konflik yang dapat mencabik-cabik integritas bangsa. Karenanya, jika konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan membahayakan stabilitas nasional.

Peta keragaman umat beragama di Provinsi Sumatera Utara, khususnya terkait konflik rumah ibadah pasca reformasi, menjelaskan bahwa wilayah yang tingkat keragaman agamanya tinggi, tidak selalu menimbulkan ketegangan antarumat beragama. Munculnya konflik rumah ibadah disebabkan oleh dua faktor penting, yakni persoalan regulasi rumah ibadah yang kaku dan komunikasi antarbudaya yang tidak menemukan formulasi yang tepat dikarenakan laju perpindahan dan kedatangan masyarakat yang berbeda agama dan etnis di suatu wilayah cukup tinggi.

Gelombang urbanisasi di kota-kota di Provinsi Sumatera Utara turut serta menimbulkan persoalan baru, karena perpindahan penduduk juga mengikuti perpindahan infrastruktur kebudayaan sekaligus agama. Rumah ibadah adalah bagian dari kebutuhan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, perbaikan dan penataan regulasi rumah ibadah seharusnya ditinjau ulang agar pemenuhan hak kebebasan beragama dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Pendirian rumah ibadah berkaitan dengan penyiaran agama hendaknya tetap dalam semangat menghormati dan menghargai agama lain, serta menghindari berbagai cara yang dapat menimbulkan prasangka saling merebut agama lain dalam penyiaran agama. Dengan demikian penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan dan kehormatan antarumat beragama. Dalam hal pendirian rumah ibadah hendaknya tetap mengacu pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, karena hal ini merupakan kesepakatan tokoh-tokoh agama, bukan dimaksudkan untuk kepentingan salah satu agama atau menghambat agama lain, akan tetapi dimaksudkan untuk mengatur kehidupan beragama agar memberikan kepastian serta tidak menimbulkan multitafsir yang justru akan dapat mengakibatkan ketidakrukunan di antara umat beragama di akar rumput. Oleh karena itu di sinilah pentingnya penegakkan hukum dengan bijak, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Barangkali sudah saatnya PBM tersebut ditingkatkan menjadi UU Perlindungan Umat Beragama.

Pemetaan dengan pola klasifikasi wilayah berdasarkan zona hijau, kuning dan merah adalah upaya untuk mengidentifikasi persebaran konflik rumah ibadah yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini agar upaya pencegahan dan manajemen konflik dapat efektif dilakukan.

F. Qurban dan Nalar Abrahamic Religions

Di kalangan bangsa-bangsa primitif seluruh dunia, darah dan nyawa manusia hidup sering dikorbankan sebagai persembahan untuk menenteramkan kemarahan Dewa atau Roh yang berkuasa, atau sebagai pengganti diri manusia untuk menerima yang seharusnya menimpa karena dosanya. Bila kita perhatikan cerita-cerita kuno, akan kita dapati kisah-kisah tentang dara cantik atau perjaka tampan yang dipersembahkan kepada garuda, raksasa dan berbagai Dewa untuk mencegah kehancuran suatu negeri, untuk membujuk dewa-dewa itu demi keselamatan manusia banyak.

Dalam sejarah peradaban agama-agama dicatat bahwa kehadiran Nabi Ibrahim sebagai Bapak tiga agama besar meluruskan perilaku menyimpang tersebut. Mengapa Nabi Ibrahim dikatakan Bapak tiga agama besar ?. Karena dari Isterinya Siti Hajar lahir Nabi Ismail, yang berujung pada Nabi Muhammad Saw pembawa risalah Islam. Sedangkan dari isterinya Sarah lahir Nabi Ishaq yang membangun generasi profetik bani Israel sampai kepada Nabi Musa as. membawa risalah tauhid bagi bani Israel beragama Yahudi, dan dilanjutkan oleh Nabi Isa as. dengan risalah yang sama kepada bangsa Nazaret beragama Nasrani. Islam, Nasrani, dan Yahudi memiliki lebih banyak unsur titik temu. Sperti, ada banyak sekali kesamaan terkait dengan isi kitab suci maupun kisah tentang pelaksanaan penyembelihan hewan korban, walau pelaksanaannya berbeda.

Dalam kitab suci Yahudi, pada kitab Kejadian pasal 22 diceritakan bahwa Ibrahim mendapat perintah dari Tuhan menyembelih anaknya yang tunggal yaitu Ishaq, dan Ibrahim membawa anaknya itu ke suatu tempat. Sesudah itu Ibrahim mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Singkatnya, Ibrahim menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai bakaran pengganti anaknya. (Kejadian 21:12-13). Padahal informasi al-Kitab bahwa Hajar melahirkan seorang anak dari Ibrahim yang dinamakan Ismail (Kejadian 17:16). Enam belas tahun kemudian Sarah melahirkan seorang putra yang dinamakannya Ishak (Kejadian 21:5). Berarti bukan Ishak sebagai anak tunggal Ibrahim, melainkan Ismail.

Imamat Perjanjian Lama kita dapati upacara penghapusan dosa dengan sapi dan kambing korban; “*Dari umat Israel ia (Harun) harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya* (Imamat 16:5-6). Harun dan anak-anaknya meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan dan lembu yang hidup itu, yang mengandung arti menyalurkan dosa mereka pada binatang yang dikorbankan tersebut.

Sementara dalam ajaran Kristen bahwa karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Injil Yohanes 3:16). Yesus Kristus bukanlah Oknum kedua; Ia sebenarnya adalah Oknum yang pertama, “Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya (2 Korintus 5:19), dan bahwa dalam kematian penebusan dosa dari anak-Nya. Berarti, Yesus Kristus mengorbankan diri-Nya sekali untuk selamanya sebagai korban penebus dosa. Dosa dipikulkan pada Yesus lalu Yesus dibunuh, maka lenyaplah dosa manusia bersama matinya Yesus.

Berbeda dengan ajaran Islam. Sejarah pengorbanan dalam Islam berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan putra tunggalnya Ismail, yang dikatakan dalam al-Qur’an (QS. As-Shaffat:101-107). Ibrahim dan Ismail bersedia melaksanakan perintah itu. Namun, tepat pada saat Ibrahim hendak menyelesaikannya dengan menyembelih putra tunggal yang sangat dikasihinya, tibalah perintah Allah untuk menghentikan pelaksanaannya, dan memerintahkan supaya Ismail, sebagai korban itu, diganti dengan satu sembelihan yang besar, yaitu seekor kibasy. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap umat diperintahkan Allah untuk melakukan upacara ibadah korban sebagai bukti keimanan, keikhlasan berkorban demi kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penebusan dosa dengan darah, apalagi mengorbankan nyawa manusia.

Berarti hakikat korban adalah; *pertama*, tidak pantas mengorbankan nyawa sesama manusia. *Kedua*, korban yang diterima adalah yang terbaik dan yang paling kita cintai untuk meraih ridho Allah. *Ketiga*, kesediaan beramal untuk kepentingan sosial, juga untuk keridhaan Ilahi.

F. Pilar Kerukunan dan Resolusi Konflik.

Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, agama dapat menjadi faktor pemersatu bangsa, dan sekaligus pemicu konflik.⁸⁶ Konflik agama lebih sering merupakan manifestasi dari konflik sosial dengan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal banyak resolusi dan cara bagi umat beragama untuk hidup rukun, damai dan bertoleransi positif, serta dapat bekerjasama secara akrab dalam reformasi sosial, baik secara komunal maupun institusional.

Dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, peran pemuka agama dan lembaga keagamaan seperti FKUB sangat urgen, karena peran tersebut akan mampu melakukan perubahan sosial ataupun transformasi sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).⁸⁷ Hal ini tentunya memerlukan media atau pelaku untuk melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu *agent of the change*-nya yang cukup strategis dan bisa diandalkan adalah empat pilar kerukunan, yaitu tokoh agama (Toga), tokoh adat (Toda), tokoh pemuda (Tomu), dan Pemerintah setempat.

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia, Munawir Syadzali mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah nasional hendaknya semua umat dari berbagai agama dapat berfikir dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan sasaran yang tunggal, yaitu keberhasilan pembangunan. Masalahnya bukan apakah agama itu *deviding factor* atau *uniting factor* saja, karena sekarang sudah harus lebih maju lagi, yaitu harus mengamankan negara dan pembangunan dan faktor pemecah, termasuk perpecahan dalam agama.⁸⁸

Munawir Syadzali juga mengatakan bahwa perbedaan antara lapisan atas (Pemerintah), dan lapisan bawah (rakyat) yang tercermin dalam kebijakan dan proses pembaharuan di Indonesia, secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan persoalan juga di tingkat kerukunan hidup antarumat beragama. Paling tidak, konflik-konflik bernuansa agama.⁸⁹ Maka untuk mewujudkan dan mempersatukan hidup rukun dan damai yang didambakan anak bangsa di Indonesia ini pada akhirnya memerlukan

⁸⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa konflik adalah percekocokan, pertikaian dan pertentangan di dalam antara satu tokoh dengan yang lain, atau pertentangan dua tokoh konflik yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.II, 1989), hlm. 455.

⁸⁷ Istilah *civil society* juga ada yang mengartikannya identik dengan “masyarakat berbudaya” (*civilized society*). Lawannya, adalah masyarakat liar (*savage society*). Lihat Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.50. Eksistensi dari *civil society* sebagai sebuah abstraksi sosial diperhadapkan secara kontradiksi dengan masyarakat alami (*natural society*), lihat Arief Budiman “ Introduction From A Conference to a Book” dalam Arief Budiman (ed). *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton, Victoria: Center of South East Asean Studies Monash University, 1991),hlm. 3-4. juga Neece Chandoke, *State and Society: Exploration in Political Theory* (New Delhi: Sage Publication Indonesia Pvt, Ltd., 1995), hlm. 36.

⁸⁸ Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 18.

⁸⁹ *Ibid*.

upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, Intelektual, masyarakat maupun peran yang dilakukan oleh berbagai institusi yang mengatasnamakan agama.

Secara kronologis, isu utama yang melatarbelakangi konflik antar umat beragama di Indonesia, yaitu penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, termasuk adanya prasangka yang tidak baik terhadap kelompok tertentu, adanya diskriminasi, adanya kesenjangan ekonomi, dan adanya perbedaan ideologi.⁹⁰ Faktor-faktor di atas yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, akan tetapi kemudian masyarakat yang berkonflik antar umat beragama yang berbeda itu, memiliki strategi atau resolusi sendiri untuk membangun suasana perdamaian serta kerukunan, di antara strategi yang dibangun itu adalah dengan menggunakan pendekatan kultural, struktural, dialog, musyawarah antar umat beragama.

Namun perlu dipahami bahwa strategi dan resolusi di atas yang telah dirintis oleh pemerintah dan para pemuka agama untuk tegaknya sendi-sendi kehidupan bangsa dengan mengembangkan konsep kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia perlu ditinjau ulang, karena strategi yang dilakukan oleh pemerintah kelihatannya belum maksimal, oleh karena itu perlu di tindaklanjuti secara serius dan sungguh-sungguh. Sebab meski berbagai formulasi dialog yang dibangun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberi resolusi dan mengorganisir konflik-konflik sosial keagamaan dengan baik, oleh karena semangat membangun kerukunan selama ini dilihat sebagai tugas masyarakat.

Oleh karena itu perlu strategi atau resolusi yang tepat untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara dan ideologi yang final bagi antar umat beragama di Indonesia, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab keberlangsungan bangsa, dan agama di Indonesia sangat tergantung kepada empat hal di atas sebagai pemersatu antar umat beragama sebagaimana dilukiskan dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu bersatu dalam keragaman.

Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukan hanya dilahirkan oleh agama dan antar umat beragama, tetapi juga dilahirkan oleh konflik

⁹⁰ Agus Fathurrahman, “Pertentangan-Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat”, dalam Darmasyah, et.al, *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 238.

antar peradaban.⁹¹ Di Indonesia konflik-konflik yang dilahirkan oleh agama dan antar umat beragama, seperti kerusuhan di Situbondo pada bulan Oktober 1996, pada penghujung Desember 1996 muncul kerusuhan serupa di Tasikmalaya ini muncul sebelumnya (1990), dan lain-lain sebagainya.

Kasus yang cukup signifikan untuk dikemukakan di sini adalah ketika sensitivitas massa Islam terkoyak oleh Arswendo Atmowiloto mengadakan kuis di Tabloid Monitor yang merengking Nabi Muhammad Saw. yang hasilnya melecehkan umat Islam tahun 1996. Kemudian pada awal 1997 konflik serupa pecah di rengasdengklok, tahun 1998 pecah insiden Ketapang, yang kemudian berlanjut pada tragedi Kupang. Pada tahun yang sama, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri insiden Ambon pecah, sebagai kelanjutan dari konflik tersebut terjadi pertikaian antara agama di Helmahera dan Poso. Dalam demonstrasi mahasiswa terjadi pelecehan membuang najis di Mesjid, dan lain-lain sebagainya.

Terjadinya konflik antar umat beragama di atas, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, *Pertama*; Penyiaran agama masing-masing antar umat beragama di Indonesia turut mempengaruhi munculnya konflik, seperti pidatonya Paus Bedeniktus XVI yang terjadi pada bulan September 1996 yang lalu kembali terusik akidah umat Islam, dalam pidatonya berisikan melecehkan dan menghina Nabi Muhammad Saw, dengan menyebut bahwa Nabi Muhammad Saw tidak ada apapanya, tak ubahnya sebagai setan yang menyebarkan Islam dengan pedang dan kekerasan. Di Sumatera Utara ada kegiatan syiar agama Kristen yang dikenal dengan istilah “Pesparawi” (Paduan Suara Lagu-lagu Gerejawi)⁹², misalnya yang mendapatkan jemaatnya di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, mengundang kemarahan umat Islam di Sumatera Utara, dan lain-lain sebagainya.

Kedua; Pendirian rumah ibadah antar umat beragama juga menjadi salah satu faktor munculnya konflik di Indonesia, banyak kasus terjadi seperti di Sumatera Utara misalnya ada penyalahgunaan izin pendirian panglong kayu menjadi pendirian rumah ibadah umat Buddha (Pekong) di Marelan Medan Labuhan, yang menimbulkan konflik antara umat Islam dengan umat Buddha, dan banyak lagi contoh-contoh lain pendirian rumah ibadah menjadi faktor munculnya konflik di Indonesia. *Ketiga* ; faktor

⁹¹ Konflik antar peradaban, khususnya antara Islam Versus Barat, semakin banyak dibicarakan, dan banyak orang yang mengasosiasikannya dengan perwujudan dari “benturan antara peradaban” yang didengungkan oleh Samuel Huntington beberapa tahun yang lalu. Banyak orang cemas bahwa konflik atau benturan ini akan meledak dan meluas serta membawa kehancuran dan menjatuhkan manusia ke “jurang tanpa dasar”. Lihat, Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban Globalisasi, Radikalitas & Pluralitas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan II. 2002), hlm. Kulit luar.

⁹² *Pesparawi* yang dimaksudkan adalah mengumandangkan Lagu-lagu keagamaan atau lagu-lagu suci dalam Agama Kristen. Sama halnya dengan pelaksanaan syiar agama dalam Islam, seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an yang dilaksanakan umat Islam. Justru pelaksanaan syiar Pesparawi ini ditempatkan di Asrama haji Medan, sudah barang tentu dapat memicu terjadinya konflik antar umat beragama, khususnya umat Islam dan umat Kristiani.

diskriminasi. Selain penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah sebagai dua isu utama yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, diskriminasi antar umat bergama juga dapat melahirkan konflik. Diskriminasi berawal dari prasangka yang intens dan etnosentris⁹³ fanatis yang membawa kepada penetapan-penetapan *stereotype* kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik.

Keempat; Kesenjangan ekonomi, baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok tertentu, termasuk kesenjangan ekonomi antar umat beragama, juga turut menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik, hal ini disebabkan karena perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan (monopoli) pada seseorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompok lain semakin terpuruk dan miskin, dan *Kelima*; Faktor perbedaan ideologi,⁹⁴ terutama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik atau yang lebih benar. Sementara ideologi, paham atau agama orang lain atau kelompok lain salah, tidak benar, akibatnya dapat melahirkan sentimen yang dapat melatarbelakangi konflik antar umat beragama di Indonesia.

Faktor penyebab utama yang melatarbelakangi munculnya konflik antar umat beragama di Indonesia adalah faktor perbedaan ideologi dijadikan faktor dominan, dari sekian banyak faktor yang telah dinukilkan di atas, karena kajian ideologi ini selalu atau sering difokuskan pada konflik antar agama, yang sering dipicu oleh muatan dokmatis atau misi agama dengan tidak menafikan faktor-faktor lainnya.

Dalam kamus, "*An-English- Indonesian Dictionary*" Istilah resolusi "*resolution*" diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati.⁹⁵ Sedangkan dalam "*Kamus Ilmiah Populer*", resolusi diartikan keputusan, Pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh.⁹⁶ Jadi resolusi dipahami sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antar individu dengan individu yang menganut idealisme agama dan benturan antar umat beragama di Indonesia.

⁹³ *Etnosentris* yang dimaksudkan disini adalah suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya yang lebih baik daripada kelompok etnis yang lain, bahkan merasa yang paling terbaik. Lihat Fathurrahman, *Pertenatangan, Op.cit.*, hlm. 238.

⁹⁴ Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1796 di Prancis. Istilah ideologi menurut Ricoeur menyatakan bahwa ideologi itu merupakan istilah yang mengandung sifat dasar permulaan yang sangat mendua, ambigu; sisi positif dan negatif, konstruktif dan destruktif, dimensi konstruktif dan patologis. Selain itu, dinyatakan pula bahwa ideology selalu merupakan kosakata yang bersifat polemis. Lihat, Paul Ricoeur, *Lectures on Ideologi and Utopia*, (New York: Columbia University Press, 1986), hlm. 24.

⁹⁵ John M. Echols, "An English-Indonesian Dictionary" (Ithaca and London: Cornell University Press, (Terj) Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 481.

⁹⁶ Widodo, (et.al), *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Penerbit, Absolut, Cet.II, 2002, hlm.647.

Menurut Robert Jhohn Ackerman dalam bukunya “*Agama Sebagai Kritik*” menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, individu- individu berkonflik, dan konflik mereka diselesaikan.⁹⁷ Upaya penyelesaian dan pemecahan benturan-benturan antar individu-individu yang religiusitas yang dimaksudkan inilah yang dapat dipahami sebagai resolusi konflik. Secara kronologis ada beberapa strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau resolusi konflik di Indonesia yaitu :

1. Pendekatan Kultural.

Pendekatan kultural merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau penyelesaian konflik antar umat beragama di Indonesia, sebab dengan pendekatan ini dapat mempertemukan tradisi masyarakat yang plural dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal.⁹⁸ Kearifan Lokal sesungguhnya adalah nilai-nilai universal agama dan budaya yang dimanifestasikan dalam tradisi setempat. Jadi dengan menggunakan pendekatan kultural antar umat beragama dapat dipertemukan, dan masing-masing agama menjadi membudaya atau membumi ditengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, sehingga mereka antar pemeluk agama dapat berdamai, dan bekerjasama secara harmonis.

2. Pendekatan Struktural.

Pendekatan Struktural salah satu strategi membangun perdamaian. Pendekatan ini dimaksudkan adalah adanya lembaga-lembaga kerukunan,⁹⁹ baik yang dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kerukunan maupun gagasan dan lembaga baru yang diperkenalkan oleh pemerintah.¹⁰⁰ Melalui pendekatan struktural ini juga penganut antar umat bergama dapat dipertemuakan dalam bentuk kerukunan Umat beragama melalui berbagai institusi-institusi keagamaan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh misalnya FKUB dapat menjalin berbagai kemitraaan dan jejaring sosial, seperti teori-teori kerukunan yang yang dikembangkan FKUB sangat

⁹⁷ Robert John Ackermann, *Agama Sebagai Kritik, Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar*, (Jakarta: Penerbit, PT.BPK Gunung Mulia, 1997), hlm.151-152.

⁹⁸ Kearifan lokal dimaksudkan adalah kearifan untuk rukun. Kearifan ini tercipta bukan karena rekayasa, bukan karena pemerintah, bukan karena SKB atau peraturan undang-Undang, tetapi karena budaya masyarakat di dalamnya ada kerukunan. Misalnya, karena Pakciknya itu terjadi kedamaian dengan dia, karena itu moranya, karena itu anak borunya dia merasa aman, dan lain-lain sebagainya. Satu contoh ia harus hormat terhadapnya, itu dari sudut budaya lokal. Sedangkan dari sudut agama karena itu manusia yang muliakan oleh Tuhan harus dihormati dan dimuliakan pula. Keadaan seperti ini yang dapat dijadikan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia.

⁹⁹ Lembaga-lembaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia meliputi; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Forum Komunikasi Pemuka Agama (FKPA), Lembaga Kerukunan Umat Beragama (LFKUB), dan lain-lain sebagainya.

¹⁰⁰ Lihat, Ridwan Lubis, *Syilabus, op.cit.*, hlm. 9.

relevan dengan pilar kerukunan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian juga peran MUI dalam melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang membawa terganggunya kerukunan umat beragama, serta mengkaji setiap kasus konflik sosial dan agama sangat relevan dengan tugas PGI tentang kerukunan. Menurut mereka Kerukunan yang benar dan sejati adalah seseorang tidak merelatifkan perbedaan dan tidak juga mengabsolutkannya dalam hal yang mungkin biasa dihubungkan, berdialog dan bekerjasama.¹⁰¹ Demikian juga dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dapat menemukan strategi membangun perdamaian antar umat beragama di Indonesia.

3. Pendekatan Dialog Moderasi.

Salah satu cara mengungkapkan kerukunan dan sekaligus meneguhkannya adalah menggiatkan dialog,¹⁰² karena dengan pendekatan dialog¹⁰³ juga merupakan resolusi yang tepat dalam membangun perdamaian antar umat beragama, karena menurut Said Agil Husin Al-Munawar bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu hasil dari dialog.¹⁰⁴ Selaras dengan Bossona Tibi mengatakan bahwa dialog merupakan cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia. Namun wacana apa yang mesti digunakan di dalam dialog semacam ini ? maka harus ada suatu consensus bersama tentang bentuk wacana yang akan dapat disepakati oleh semua pihak.¹⁰⁵ Jadi dengan pendekatan dialog ini juga antar umat beragama di Indonesia dapat dipertemukan dalam menciptakan kedamaian. Dengan dialog ini segala masalah keagamaan dan sosial dapat diselesaikan dan disepakati antar pemeluk agama masing-masing. Wacana dialog ini merupakan suatu resolusi yang tepat, dan terus ditumbuhkembangkan pada saat ini, baik mengenai doktrin agama-agama, maupun mengenai kerjasamna dan hubungan sosial lainnya.

Selain menggunakan tiga pendekatan di atas, ada juga empat hal strategis mencegah konflik dan membangun perdamaian antarumat beragama, yakni;

¹⁰¹ Lihat, Djaka Soetapa, *Dialog Kristen - Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inivasi Pendidikan Duta Wacana, 1987), hlm. 7.

¹⁰² A.A. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, (Jakarta: Penerbit, PT. BPK Gunung Mulia, Cetakan ke-2,2002), hlm. 105.

¹⁰³ Zakiyah Drajat, membagi dialog kepada dua bagian yaitu; Dialog Formal (Verbal), dan dialog Karya. Dialog Formal adalah dialog mengenai suatu doktrin tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan Dialog Karya (informal) adalah mencakup segala bentuk pergaulan, kerjasama, hubungan sosial antar penganut yang berbeda – beda agama, Lihat, Zakiyah Drajat, (et.al) *Perbandingan Agama*, (Jakarta : Bumi Aksara, Depag RI, 1996), hlm. 144.

¹⁰⁴ Lihat, Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Diterbitkan oleh PT Ciputat Press, 1997), hlm. 144.

¹⁰⁵ Lihat Bossona Tibi, dalam Nurcholis Madjid, (et.al), *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta : Penerbit, Paramadina, 1996), hlm. xxii.

1. Pancasila

Salah satu upaya membangun strategi perdamaian antar umat beragama adalah Pancasila,¹⁰⁶ karena Pancasila dapat berfungsi sebagai bagian terpenting dari faktor-faktor pemersatu Indonesia.¹⁰⁷ Pancasila juga merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara, serta memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Pancasila bukan hanya berperan sebagai dasar Negara, melainkan juga *falsafah* dan ideologi bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minum keras,¹⁰⁸ karena itu sangatlah signifikan Pancasila dijadikan sebagai resolusi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Di samping itu Pancasila dapat dijadikan sebagai resolusi konflik di Indonesia, karena prinsip kelima dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diformulasikan oleh Soekarno karena pengakuannya terhadap realitas rakyat Indonesia yang religius, tidak peduli agama apa yang mereka anut. Prinsip ini tampaknya dimaksudkan Soekarno sebagai pengakuan terhadap semua agama yang ada. Tampaknya dia berpikir bahwa semua penganut agama dapat berkerjasama dan bertoleransi agama dapat dicapai, sehingga kesatuan dan integritas nasional akan tumbuh subur dalam atmosfer kemerdekaan Indonesia.¹⁰⁹ Gagasan Soekarno ini terbukti menjadi landasan bagi keberlangsungan persatuan bangsa, agama dan tanah air, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai resolusi konflik antar umat beragama di Indonesia

2. Undang–Undang Dasar 1945.

Undang–Undang Dasar 1945 juga menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena, karena UUD 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Bahkan pembukaan dari UUD 1945 merupakan

¹⁰⁶ Secara harfiah, Pancasila berarti lima prinsip (berasal dari bahasa Sanskerta; *Panca* artinya lima, dan *sila* artinya prinsip). Sesungguhnya, istilah Pancasila telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal, “*Nagarakertagama*”, dan Empu Tantular dalam bukunya, “*Sutasoma*”. Kedua penulis ini adalah pemikir dan pujangga ternama pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Hindu Majapahit. Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Prapanca, tt.), hlm. 439,445.

¹⁰⁷ Lihat, Azra, *Konflik, op.cit.*, hlm. 144.

¹⁰⁸ Lihat, Darji Darmodiharjo, *Pancasila; Suatu Orientasi Singkat*, edisi ke-12, (Jakarta: Aries Lima, 1984), hlm. 23.

¹⁰⁹ Lihat, B.R.O. Anderson, *Same Aspects of Indonesian Politics Under Japanese Occupation 1944 - 1945*, (Ithaca : Cornell University, 1991), hlm. 210.

sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.¹¹⁰ Oleh karena itu UUD 1945 ini dapat dijadikan sebagai resolusi konflik antar umat beragama, sebab UUD 1945 ini mengandung makna yang dalam, mempunyai nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, Ia mampu menampung dinamika masyarakat beragama, dan tetap menjadi landasan Integrasi bangsa selama bangsa Indonesia ini tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Bhinnika Tunggal Ika.

Dalam suasana kebhinnekaan bangsa Indonesia, sebenarnya Pancasila dapat menjadi “**Payung bersama**” dari semua aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, apapun suku, agama, dan politiknya, hal ini selaras dengan pandangan Bossona Tibi menyadari bahwa kebhinnikaan menjadi faktor yang niscaya ada dan terelakkan tidak hanya pada kebudayaan masyarakat Internasional, melainkan juga pada masyarakat yang lokal sekalipun.¹¹¹

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan, dan kekeluargaan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip dasar kekeluargaan adalah “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”.¹¹² Prinsip kesatuan dan kekeluargaan yang dikembangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itulah merupakan salah satu strategi membangun perdamaian serta keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena menurut M. Natsir bahwa bagi bangsa Indonesia yang terdiri beberapa suku dan adat – istiadat, serta menganut berbagai agama, dan ideologi, adalah Pancasila sebagai *falsafah* Negara dan pemersatu, sebagaimana dilukiskan dalam semboyan Negara, “Bhinneka Tunggal Ika”, yakni: bersatu sekalipun ada perbedaan ragam.¹¹³

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pokok-Pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah “Negara” begitu bunyinya “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹¹⁴ Berdasarkan pengertian inilah, maka Negara Kesatuan

¹¹⁰ Lihat, Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan Bangsa Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, BP- 7 Pusat, 1990, hlm. 46.

¹¹¹ Tibi dalam Madjid, *Agama, op.cit.*, hlm.xxii.

¹¹² Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit CV. Andi Offset, 2006), hlm. 72.

¹¹³ M. Natsir, *Agama Dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit, Media Da’wah, Cetakan I, 2001), hlm. 366.

¹¹⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

Republik Indonesia (NKRI) dapat dijadikan sebagai resolusi konflik di Indonesia, Sebab dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian bahwa *negara persatuan* adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatasi segala golongan, mengatasi segala permasalahan antar pemeluk agama, mengatasi segala paham perseorangan, termasuk negara harus dapat mengatasi berbagai isu konflik dan konflik yang terjadi antar umat beragama di Indonesia ini yang tidak boleh dilupakan. Bahkan pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang adalah Negara yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas *kerakyatan* dan *permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas *kedaulatan rakyat* dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan, hal ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang majmuk. Disinilah sebenarnya letak keberlangsungan bangsa dan kedamaian antar umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adanya agama-agama lokal dan mondial di Indonesia dapat menjadi potensi konflik. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama adalah di samping penyiaran agama, dan pendirian Ibadah, juga faktor diskriminasi, kesenjangan ekonomi dan perbedaan ideologi. Nemun perbedaan itu, kemudian masyarakat memiliki strategi sendiri untuk membangun resolusi dan suasana perdamaian dengan menggunakan **Pendekatan Kultural** dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal, dan **Pendekatan Struktural** dalam bentuk aktualisasi lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah, serta dengan **Pendekatan Dialog** antarumat beragama adalah cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian.

Di samping itu, keberlangsungan bangsa Indonesia akan sangat tergantung kepada empat hal yaitu, *Pertama*; Pancasila, karena Pancasila merupakan satu-satunya azas tunggal dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara. *Kedua*; Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. *Ketiga*; Bhinneka Tunggal Ika merupakan faktor yang niscaya ada dan tak terelakkan dalam mewujudkan perdamaian, kesatuan dan kekeluargaan dengan mengandung prinsip “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, atau bersatu sekalipun ada perbedaan ragam”. *Keempat*; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi apabila bangsa Indonesia membumikan beberapa pendekatan, serta menghayati dan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lihat, *Undang-Undang Dasar 1945, op.cit.*, hlm. 49.

mengamalkan empat hal di atas itulah resolusi yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya menemukan strategi perdamaian dan mencegah terjadinya konflik, baik antara umat beragama, maupun antar umat beragama di Indonesia.

Ini hanya bisa diwujudkan manakala setiap umat menghargai perbedaan sebagai kekayaan spiritual ataupun kultural. Sejak dini, perlu ditanamkan bahwa hidup berdampingan dalam keberbedaan adalah sebuah keniscayaan yang indah. Paradigma bahwa yang lain dan yang berbeda keyakinan atau beda agama bukanlah musuh yang mengancam harus menjadi acuan bagi setiap warga negara. Paradigma inilah yang akan melahirkan sikap inklusif yang konstruktif untuk membangun masa depan rumah bersama Indonesia, sebab perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan.

BAB V

AGAMA DIALOGIS MEMBANGUN NALAR KERUKUNAN

A. Dialog dan Polemik Pluralisme Agama.

Republik Indonesia adalah salah satu Negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Wilayahnya dari Barat ke Timur membentang sepanjang 5.110 km dan garis meridian membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1.888 km. Panjang garis pantai 108.000 km. Luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km², dengan 1.904.569 km² luas daratan, dan 3.288.683 km² lautan yang dihuni oleh 240 juta jiwa, 1.128 suku bangsa dan 726 bahasa (BPS, 2010), setidaknya 6 agama resmi dan ratusan aliran kepercayaan, yang semua tidak mungkin diseragamkan.

Kemajemukan juga memunculkan perubahan struktur masyarakat, yang ke depan akan menjadi semakin rumit. Salah satunya disebabkan oleh faktor migrasi dan mobilitas sosial masyarakat yang sangat dinamis. Ke depan nyaris tidak mungkin ada tempat yang homogen. Demikian besar keragaman sekaligus perbedaan yang ---bila tidak ada pranata bernama toleransi—akan berimplikasi pada terbukanya konflik. Beruntunglah kita bangsa Indonesia mempunyai Pancasila, yang merupakan suatu pandangan filosofis kebangsaan bersama dan aturan-aturan praktis yang mampu mewedahi keanekaragaman, sekaligus melindungi keyakinan masing-masing dari intervensi dan kepentingan politik.

Pancasila telah terbukti dan teruji dapat menyatukan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Indonesia. Artinya, jika kita mengacu pada Pancasila sebagai

common platform, sebenarnya Pancasila sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang menjadi dambaan bersama bagi tatanan Indonesia yang ideal. Indonesia dengan dasar Negara Pancasila, sudah memiliki semangat seluruh agama yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa; dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak ada satupun sila yang bertentangan dengan nilai-nilai semua agama di Indonesia.

Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia tidak dapat dihindari bahwa Indonesia adalah bagian dari globalisasi tersebut, dan berhadapan dengan berbagai ideologi yang dapat mereduksi nilai-nilai luhur Pancasila dan menganggap Pancasila tidak lagi mampu merajut kebersamaan dan gagal mencegah konflik. Anggapan tersebut berdasar pada satu tesis bahwa konflik itu terjadi karena belum disadarinya asas pluralisme, walaupun Republik Indonesia telah memiliki asas *Bhinneka Tunggal Ika*. Karenanya, *bhinneka tunggal ika* itu harus dibudayakan yang sekarang ini diwacanakan melalui pluralisme. Pertanyaannya adalah mengapa pluralisme dipermasalahkan dan apakah pluralisme membahayakan ?. Pluralisme agama adalah istilah khusus dalam kajian agama. Sebagai terminologi khusus, istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan, misalnya disamakan dengan makna istilah toleransi, saling menghormati, dan sebagainya.

Sebagai satu paham dan cara pandang terhadap agama-agama, pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, *way of life*, doktrin atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama autentik, valid, benar dan mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia menuju keselamatan. Pluralisme itu bukanlah relativisme, juga bukan gagasan yang menggerus iman. Pluralisme juga tidaklah menganjurkan perpindahan agama, apalagi memaksa orang lain berpindah agama. Pluralisme justru berangkat dari penghargaan atas keunikan individual dalam beragama. Pluralitas tidak pula dapat dipahami sebagai sesuatu yang ‘cerai berai’ dan ‘permusuhan’ tanpa mempunyai tali persaudaraan yang mengikat dan merangkum semua bagian atau pihak.¹¹⁵

Pluralisme agama didasarkan satu asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Sesungguhnya pluralisme telah menjadi kesadaran agama-agama sejak mula. Agama umumnya muncul dalam lingkungan pluralistik dan membentuk eksistensi diri dalam menanggapi pluralisme agama. Bahkan, dikatakan bahwa setiap agama lahir dari proses perjumpaan dengan kenyataan pluralisme tersebut. Ajaran agama yang ditegaskan dan diperkokoh dalam kodifikasi agama, tata cara ritual-peribadatan, dan hukum-hukum kanonik muncul melalui proses dialektik

¹¹⁵ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, terj. Gema Insani Press, 1997, h. 9.

dengan pluralisme pula. Dengan demikian, pluralitas agama adalah fakta sosial yang selalu ada dan telah menghidupi tradisi spiritualitas zaman berzaman.

Pluralisme ialah paham kemajemukan atau paham yang berorientasi kepada kemajemukan yang memiliki berbagai penerapan yang berbeda dalam filsafat agama, moral, hukum dan politik yang batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di depan ketunggalan. Misalnya, dalam filsafat, pandangan sebagian orang yang tidak mempercayai aspek kesatuan dalam makhluk-makhluk Tuhan disebut heterogenitas wujud dan maujud. Lawan dari pandangan ini ialah paham panteisme atau paham yang menolak segala heterogenitas, atau paham yang menerima adanya keanekaragaman sekaligus ketunggalan. Pembahasan tentang ini secara rinci ada dalam literatur filsafat.¹¹⁶

Secara sosiologis keragaman etnis dan agama merupakan anugerah yang diberikan Tuhan sepanjang secara manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai hamba-Nya. Semua agama menyimpan hakikat yang mutlak dan sangat agung. Menjalankan program masing-masing agama bisa menjadi sumber keselamatan. Pada gilirannya, permusuhan, konflik dan perdebatan menyangkut agama akan digantikan dengan keharmonisan dan solidaritas.

Namun ada yang berpendapat lain, yaitu pluralisme bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang titik temu secara teologis. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia, termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia, bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.¹¹⁷ Dengan bahasa lain, sebagaimana Djohan Effendi menolak absolutisme agama dan mengakui pluralisme agama.¹¹⁸ Ia mengemukakan:

Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Hal itu hanya ada dalam ilmu Tuhan. Dengan demikian apabila

¹¹⁶ Baca; Linda Smith dan Williem Raeper, *A Beginner's Guide to Ideas*, terj. Hardono Hadi, *Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 206-209.

¹¹⁷ Djohan Effendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan," dalam *Majalah Prisma* (5 Juni 1978), h. 16. Lihat juga Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama," dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta : Dian Interfedei, t.t.p), h. 54-58.

¹¹⁸ Nanang Tahqiq (ed), *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. I, h. 237.

seorang penganut mengatakan perkataan agama, yang ada dalam pikirannya bukan hanya agama sendiri, akan tetapi juga aliran yang dianutnya, bahkan pengertian dan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan apriori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.¹¹⁹

Pemikiran pluralisme tersebut berangkat dari suatu pemahaman bahwa dakwah adalah sesuatu yang penting, tapi ia kurang setuju jika keberagamaan seperti itu bertolak dari pandangan keagamaan yang bersifat mutlak dan statis menganggap bahwa kebenaran atau keselamatan menjadi klaim satu kelompok. Dari sinilah, menurut Djohan Effendy dialog merupakan sesuatu yang esensial untuk merangsang keberagamaan kita agar tidak mandeg dan statis.¹²⁰ Sekali lagi, Djohan Effendy tidak menyetujui absolutisme agama, sehingga paksaan atau kekerasan apapun tidak boleh mendapat tempat di dalam usaha-usaha dakwah. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah sikap moderat dan liberal terhadap iman lain berbasis teologi kerukunan.

Agama-agama, misalnya Islam, secara tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam memilih keyakinan. Alquran menyatakan bahwa *tak ada paksaan dalam agama*,¹²¹ dan merujuk dalam ayat yang lain menunjukkan bahwa Tuhan mempersilahkan siapa saja yang mau beriman atau kufur terhadap-Nya.¹²² Islam sama sekali tidak menafikan agama-agama yang ada. Islam mengakui eksistensi agama-agama tersebut dan tidak menolak nilai-nilai ajarannya. Kebebasan beragama dan respek terhadap kepercayaan orang lain adalah ajaran agama, di samping merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat majemuk. Dengan demikian, membela kebebasan beragama bagi siapa saja dan menghormati kepercayaan orang lain dianggap sebagai bagian dari kemusliman. Merupakan suatu keharusan bagi umat beragama membela kebebasan beragama yang disimbolkan dengan sikap tidak mengganggu rumah-rumah ibadah seperti biara, gereja, sinagog, dan masjid.¹²³

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nurcholis Madjid. Ia mengemukakan ketidaksetujuannya dengan absolutisme, karena absolutisme adalah pangkal dari segala permusuhan. Ia mengatakan:

Petunjuk konkrit lain untuk memelihara ukhuwah adalah tidak dibenarkannya sama sekali suatu kelompok dari kalangan orang-orang beriman untuk memandang rendah atau kurang menghargai kelompok lainnya, sebab siapa tahu mereka yang dipandang rendah itu lebih baik daripada mereka yang memandang rendah. Ini

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 239.

¹²⁰ Effendy, "Dialog Antar Agama," dalam *Majalah Prisma*, h. 17.

¹²¹ Q.S. Al-Baqarah / 2 : 156.

¹²² Q.S. Al-Kahfi / 18 : 29.

¹²³ Q.S. Al-Hajj / 22 : 40.

mengajarkan kita –dalam pergaulan dengan sesama manusia, khususnya sesama kalangan yang percaya kepada Tuhan—tidak melakukan absolutisme, suatu pangkal dari segala permusuhan.¹²⁴

Pluralisme agama di dunia Kristen pada beberapa dekade akhir diprakarsai atau dipromosikan oleh Jhon Hick. Dia mengatakan, pluralisme agama ialah bahwa realitas sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama.¹²⁵ Istilah ini mengandung maksud bahwa agama-agama besar dunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius. Aneka ragam agama merupakan berbagai aliran pengalaman keagamaan yang berbeda di mana masing-masing bermula pada episode yang berbeda dalam sejarah manusia yang kemudian memekarkan kesadaran logis di dalam sebuah ruang kebudayaan. Selain itu juga bahwa tiap-tiap agama menjadi jalan untuk menemukan keselamatan dan pembebasan.

Interpretasi lain tentang pluralisme tersorot kepada dimensi sosial agama dan kehidupan agama. Artinya, segenap penganut agama bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat serta saling menjaga batas-batas dan hak masing-masing. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa manusia adalah berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti.¹²⁶

Tidak saja dalam Islam, paham semua agama sama juga ditolak oleh Gereja Katolik. Pada tahun 2000, Vatikan menerbitkan penjelasan Dominus Jesus. Penjelasan ini, selain menolak paham pluralisme agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus.¹²⁷

Beberapa nuktah pemikiran di atas kelihatannya menegaskan bahwa kemajemukan agama adalah sebuah realitas yang di dalamnya tak boleh dibiarkan ada sikap-sikap dan praktik-praktik diskriminatif, dari satu umat ke umat lain, satu kelompok ke kelompok lain, setiap orang berhak meyakini bahwa agamanya yang benar. Tetapi, pada saat yang sama, dia juga harus menghormati hak orang lain untuk

¹²⁴ Nurcholish Madjid, “Meninggalkan Kemutlakan : Jalan Menuju Perdamaian,” dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama*, h. 259.

¹²⁵ Mircea Eliade (ed), *Encyclopedia of Religion*, (New York : MacMillan Publishing Company, 1987), Vol.12, h. 331.

¹²⁶ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya : Bina Ilmu, 1991), h. 167.

¹²⁷ Baca; Franz Magnis Suseno, *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk* (Jakarta : Kanisius, 2004), h. 138-141.

bersikap sama. Peningkaran terhadap hukum kemajemukan hanya akan menimbulkan perseteruan.

Belakangan ini, pluralisme merupakan salah satu tema yang paling hangat diperdebatkan, terutama di kalangan Muslim. Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT-OKI) di Dakar, Senegal, 13-14 Maret 2008 juga menjadikan pluralisme sebagai topik utama. Organisasi beranggotakan 57 negara Islam menggelar tema tersebut sebagai upaya menghapus tuduhan terhadap Islam yang dalam beberapa tahun ini mendapat stereotip amat buruk akibat aksi-aksi intoleransi dan kekerasan oleh sebagian kaum muslimin atas nama agama. Ini menunjukkan bahwa pluralisme, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, tengah menghadapi problem serius di dunia Islam.

Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, atau hanya mengakui keberadaan agama lain. Pluralisme agama juga bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru. Tapi pluralisme adalah kesetiaan menerima kemajemukan dan terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan untuk menghindari permusuhan dan guna tercapainya kerukunan.

Sebagian umat beragama di Indonesia menentang dengan keras dan lugas, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, sebuah institusi keagamaan yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang agama, mengeluarkan fatwa yang mengharamkan gagasan pluralisme. MUI juga mengharamkan liberalisme pemikiran dan sekularisme. Haram adalah terminologi agama yang menunjukkan bahwa pelakunya berdosa, sementara yang menolaknya memperoleh pahala. Tiga gagasan tersebut (pluralisme, liberalisme, dan sekularisme) juga dipandang sebagai sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI tersebut berbunyi;

Menimbang, bahwa akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat. Bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Di mana, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, maka paham ini bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹²⁸

¹²⁸ Hasil musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berakhir tanggal 29 Juli 2005 telah mengeluarkan 11 fatwa, termasuk fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama. Fatwa No. 7/Munas VII/MUI/2005.

Fatwa MUI itu direspons secara sangat apresiatif oleh sejumlah lembaga sosial keagamaan lain dan kelompok-kelompok Islam radikal-konservatif. Segera sesudahnya keluarnya fatwa tersebut, mimbar-mimbar keagamaan digunakan untuk mensosialisasikannya. Meski fatwa itu sesungguhnya hanya merupakan pendapat, tetapi sangat berdampak pada strotif bahwa individu-individu maupun istitusi-institusi yang mengusung dan memperjuangkan gagasan pluralisme langsung mendapatkan stigma sebagai kelompok sesat dan menyesatkan.

Agaknya tidak ada satu butirpun dari fatwa ini patut dipermasalahkan, kalau memang demikian pemaknaan yang diberikan, bahkan perlu disosialisasikan kepada umat Islam. Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Namun sebagaimana sifatnya, fatwa hanya berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam yang ingin memahami dan memerlukan tuntunan bagi keberagamaannya.

Memang bila pluralisme diartikan dengan relativisme kebenaran agama, seperti juga yang dinyatakan dalam fatwa MUI di atas, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Betapapun memang dalam kehidupan ini perlu ada pegangan dan pengakuan yang dianggap absolut pada dirinya dan semua golongan dalam masyarakat sudah barang tentu memerlukan pegangan. Pengakuan eksistensi ini bersifat timbal balik, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.¹²⁹ Dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan absolut itu. Inilah makna pluralisme yang diartikan sebagai pondasi kehidupan bagi agama-agama.

Agaknya penolakan terhadap pluralisme ini dilatar belakangi oleh beberapa persepsi; *Pertama*, pluralisme dianggap sebagai ancaman, yaitu ancaman terhadap akidah. Pengakuan terhadap pluralisme dianggap akan melemahkan iman. *Kedua*, pluralisme dianggap juga sebagai ancaman terhadap identitas, sebab dalam pluralisme, identitas akan lebih ke dalam monolitas masyarakat. *Ketiga*, ancaman terhadap eksistensi agama akan timbul dengan diakuinya kebenaran semua agama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi sinkritisasi agama-agama yang akan melahirkan agama publik (*public religion*) yang meramu semua ajaran agama. Bahkan lenyapnya agama-agama digantikan oleh etika public sebagaimana telah terjadi di Eropa Barat. *Keempat*, ancaman terhadap eksistensi ideologi Pancasila yang menghargai keragaman dan kebhinnekaan sebagai khazanah bangsa, menjadi ideologi baru yaitu pluralisme.

¹²⁹ Quraish Shihab, "Agama: Antara Absolutitas dan Relativitas Ajaran," dalam Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta : P3M, 1991), h. 45.

Di sisi lain ada yang berpendapat, bahwa pluralisme sudah menjadi bagian dari ideologi nasional yang dirumuskan dengan istilah *bhinneka tunggal ika*, suatu istilah yang berasal dari Empu Tantular, yang artinya kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*). Pluralisme ini juga tercermin dalam Pancasila yang terdiri dari berbagai ideologi-ideologi besar dunia tetapi intinya adalah paham kegotongroyongan, kekeluargaan dan kebersamaan.

Di Indonesia, tanpa pluralism dalam memahami *bhinneka tunggal ika*, akan timbul ancaman terhadap kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika sebagian kelompok agama garis keras mengancam rumah ibadah untuk ditutup, mereka merasa hak azasi mereka telah dicabut dengan paksa, sehingga timbul suara-suara, yang menuntut disediakan suatu wilayah yang khusus dihuni oleh satu komunitas agama tertentu dan terbebas dari kediktatoran kelompok mayoritas. Sementara itu di berbagai tempat, telah timbul konflik yang diidentifikasi sebagai konflik antar penganut agama yang berbeda. Solusi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi adalah dengan memahami semangat pluralisme untuk hidup berdampingan, bersama dalam keragaman, menghindari sikap superior. Demikian pendapat yang mendukung pluralism.

Model pluralisme agama pada umumnya dimaksudkan untuk menjadi solusi yang terbaik bagi problem hubungan umat beragama. Namun, karena terjadi reduksionis yang ada pada dirinya, pada akhirnya berseberangan dengan tujuan yang semula dicanangkan; bukan toleran, tapi malah berubah menjadi intoleran dan bengis terhadap perbedaan keagamaan. Itu karena pluralisme agama dipahami sebagai teori penyamaan semua agama. Tapi jika pluralisme agama dipahami bahwa keragaman suatu keniscayaan, umat beragama secara bersama-sama mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, berama-sama membangun masa depan yang lebih baik, dan masing-masing pemeluk agama tetap komit terhadap agamanya, tidaklah jadi masalah.

Kelihatannya, model yang lebih elegan ditawarkan untuk Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis pluralistik adalah budaya agama yang moderat dan toleran. Nampaknya kita tidak bisa lepas dari horizon agama. Pluralisme yang lepas sama sekali dari budaya agama itu hampir tidak mungkin. Karenanya, nasib Indonesia menjadi Negara demokrasi pluralistik. Barangkali, agar tidak terjadi dilematis yang berkepanjangan tentang pluralisme ini, perlu dibatasi pada domain sosial politik, bukan pada ranah teologis, antara lain :

1. Pluralisme adalah kesetiaan menerima pluralitas, dan tidak menghilangkan identitas.
2. Pluralisme mendorong kebebasan yang bertanggungjawab, dan merupakan pilar demokrasi

3. Pluralisme berarti membangun toleransi antarumat beragama yang saling menghargai.
4. Pluralisme bukan sinkritisme, juga bukan relativisme sebagai ideologi baru.
5. Pluralisme mendorong dialog antarumat beragama yang tulus dan dinamis.
6. Pancasila merupakan wadah konstitusional untuk pluralisme di Indonesia, dengan harapan forum dialog ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, demi kedamaian dan kemajuan masa depan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

B. Sinkritisme Agama dalam Sorotan

Banyak cara yang dilakukan oleh para pakar keagamaan dalam merekonstruksi pemikiran untuk menciptakan harmonisasi dan dialog antarumat beragama. Salah satu cara itu adalah dengan melahirkan model-model yang diharapkan dapat mempersatukan berbagai pandangan dan aliran menjadi satu, seperti Sinkretisme.¹³⁰ Dalam buku *Kamus Ilmiah Populer Internasional* disebutkan bahwa sinkretisme berasal dari kata *syn* dan *kreitosein*, yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan, sehingga yang bertentangan itu berpadu atau selaras.¹³¹ Ada juga yang mengartikan bahwa sinkretisme adalah suatu paham, agama atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan.¹³²

Dari pengertian di atas, dapatlah dipahami bahwa sinkretisme adalah satu paham yang berupaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan di antara berbagai sekte atau paham, baik paham agama maupun aliran filsafat. Sinkretisme berarti suatu paham yang berusaha untuk menggabungkan doktrin-doktrin dari berbagai tradisi dan ajaran yang berlainan, sehingga unsur-unsurnya menjadi satu dan bersatu.

Dengan demikian, sinkretisme¹³³ adalah mencampurbaurkan berbagai aliran dan gejala berbagai agama menjadi satu dan menyatakan bahwa agama pada

¹³⁰ Sinkretisme adalah suatu paham yang menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Tercatat dalam sejarah, Sri Ramakrisna mendirikan misi Ramakrisna dengan mengatakan; kita harus menjadi Hindu dengan orang-orang Hindu, Muslim dengan orang-orang Muslim, Kristen dengan orang-orang Kristen, penganut Budha dengan orang-orang Budha. Semua agama adalah ajaran bagi perwujudan Tuhan dalam diri manusia. Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), h. 42. Baca; Daya, *Agama Dialogis*, h. 67-70.

¹³¹ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), h. 597.

¹³² Penyusun, *Kamus Besar*, h. 845.

¹³³ Salah seorang juru bicara sinkretisme yang besar di Asia ialah S. Radhakrisnan, seorang ahli filsafat termasyhur dan pernah menjadi Presiden India. Ia adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang dalam lagi luas tentang agama Hindu, juga paham tentang humanisme. Ia mencoba menyatukan agama Hindu dengan humanisme. Ia menyatakan bahwa semua agama pada hakikatnya adalah sama saja. Sebagai usaha untuk menyebarkan ajaran ini, ia menganjurkan adanya suatu 'parlemen agama' yaitu perpaduan dari

hakikatnya adalah sama. Model ini akan membawa umat kepada paham relativisme, di mana ajaran agama menjadi relatif. Oleh karena itu, sinkretisme dan relativisme saling berkaitan, sehingga kedua istilah itu tidak dipisahkan.¹³⁴ Upaya penyatuan unsur-unsur dari beberapa agama umumnya terjadi karena adanya paham relativisme. Sinkretisme pernah pula diusulkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Saw. Usul itu adalah, mereka mengajak umat Islam secara bergantian bersama-sama menjalankan ajaran agama dari kedua pihak. Misalnya, selama sepekan orang-orang kafir dan umat Islam bersama-sama menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara dalam agama kafir Quraisy.

Tentu saja, Nabi Muhammad Saw menolak ajakan pencampuran ibadah model sinkretisme, karena hal demikian sama saja dengan mencampurkan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Pada saat itu turunlah Surah Al-Kâfirûn :1-6;

Katakanlah, hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukannya menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. (Q.S. Al-Kâfirûn/109 : 1-6).¹³⁵

Dalam sejarah, didapati sekian banyak agama sinkretik. Fenomena ini tidak terbatas pada masa lalu, sampai sekarang hal itu masih dijumpai. Contohnya, agama Manichaisme pada abad ketiga masehi dengan cermat mempersatukan unsur-unsur tertentu dari ajaran Zoroaster, Buddha, dan Kristen. Bahkan apa yang dikenal sebagai *New Age Religion* (Agama Masa Kini), adalah wujud nyata dari perpaduan antara praktik yoga Hindu, meditasi Buddha, tasawuf Islam, dan mistik Kristen.¹³⁶ Termasuk di Indonesia, sampai sekarang sinkretisme masih hidup, terutama dalam aliran-aliran kepercayaan (dahulu populer dengan nama kebatinan atau kejawen), banyak ajarannya merupakan percampuran dari unsur-unsur berbagai agama.

segala agama. Gagasan ini mendapat sokongan luas, baik di Barat maupun di Timur. Dialah yang dalam lapangan pendidikan di India mempunyai pengaruh besar sekali dengan sinkretisme ini. Baca; A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan agama; Dialog, Dakwah dan Misi," dalam Burhanuddin Daya (red), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta, INIS, 1992), h. 227.

¹³⁴ Shihab, *Islam Inklusif*, h. 41-42.

¹³⁵ Ditemukan beberapa riwayat tentang sebab turunnya surah al-Kâfirûn, antara lain adalah bahwa beberapa tokoh kaum musyrikin di Makkah, seperti Al-Wahid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul Saw. menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. Kami menyembah Tuhanmu hai Muhammad setahun, dan kamu juga menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan. Baca; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 633.

¹³⁶ Shihab, *Islam Inklusif*, h. 43.

Kemudian dalam sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa sinkretisme telah menjadi satu keyakinan pada masa Dinasti Mughal¹³⁷ di bawah pimpinan Sultan Ali Akbar (1556-1605 M) di India yang disebut dengan istilah *Din-i Ilahi*. Akbar berupaya mengeliminir konflik-konflik sosial yang memang demikian subur di India, dengan memadukan ajaran Islam, Kristen, dan Hindu. Pada saat yang sama sebenarnya Akbar telah berhasil mengkonsolidasikan kerajaan dengan berbagai kebijakan toleransi kepada para pemuka agama Islam, Kristen dan Hindu.¹³⁸

Politik yang dijalankan Akbar digambarkan sebagai radikal karena menyentuh dasar-dasarnya, yaitu akar dari pada sistem yang berlaku. Radikalisme ini terdiri dari usaha untuk menggantikan Islam tradisional dengan *Din-i Ilahi*.¹³⁹ *Din-i Ilahi*, yang diumumkan resmi oleh kaisar Akbar (dinasti Mughal India) pada tahun 1581 M / 989 H adalah perpaduan paham, terutama Zoroastrian, Hindu dan Sufi. Agama baru itu tetap dipengaruhi oleh agama lain, dan tidak memiliki suatu teks, tapi merupakan gabungan ajaran penting dari berbagai arus kaum ortodox dan Sufism.¹⁴⁰ Akbar berusaha menciptakan suatu sistem pandangan hidup tambal sulam dengan mengkombinasikan unsur-unsur yang diambil dari tiap-tiap agama. Percobaan ini gagal karena mendapat banyak kesulitan dalam praktiknya, walaupun dalam konsep telah disusun secara.¹⁴¹

Pada saat itu gagasan *Din-i Ilahi* mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, namun kerukunan hidup antarumat beragama jauh lebih baik. Hal ini disebabkan Akbar sangat keras menentang adanya perbedaan kasta, warna kulit, ras dan lain-lain. Sebagai penguasa Islam, Akbar menjadikan dirinya sebagai Bapak bagi semua rakyatnya dan ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai pemimpin umat Islam yang minoritas.¹⁴²

Akbar mengangkat para pegawai kerajaannya dari berbagai lapisan masyarakat India yang berbeda agama. Salah satu motif ia menggagaskan *Din-i Ilahi* adalah bagaimana merukunkan antarumat beragama dengan meramu berbagai kepercayaan yang dianggapnya terbaik dari masing-masing agama masyarakat India ketika itu. Tapi

¹³⁷ Kata Mughal atau Moghul dalam bahasa Parsi adalah panggilan bagi bangsa Mongol dan keturunannya. Imperium Mughal (1525-1858 M) merupakan sebuah kekuasaan Islam terbesar pada anak benua India dengan ibu kotanya Delhi. Lihat; Williem L. Langer, dalam *Encyclopaedia of World History* (Boston : Houghton Mifflin Company, 1956), h. 332.

¹³⁸ Langer, *Encyclopaedia*, h. 334.

¹³⁹ *Din-i Ilahi* adalah kesatuan agama-agama yang dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal pemakaiannya daripada Tauhid Ilahi. Akbar memadukan unsur-unsur sejati dari masing-masing agama, yaitu unsur Islam, Hindu dan Kristen. Konsep ini dapat dikatakan sama dengan sinkretisme.

¹⁴⁰ Bernad Lewis, CH. Pellat and J. Schacht (Ed), *The Encyclopaedia of Islam* (London: Publisher, 1965), Vol. II, h. 296.

¹⁴¹ Mohd. Iqbal, *The Mission of Islam* (New Delhi-India : Vikas Publishing House Ltd, 1977), h. 201.

¹⁴² *Ibid.*, h. 297.

teori ini gagal untuk menggantikan agama yang telah mapan dengan teori agama yang baru, dan dianggap keluar dari ajaran Islam.

Tidak hanya dari kalangan Islam yang menggugat model sinkretisme, sebagian besar umat Kristen juga tidak setuju dan menolak model tersebut. Kristen sesungguhnya menolak setiap macam dialog sinkretisme yang secara tidak langsung menunjukkan menghinakan terhadap Kristus dan Injil.¹⁴³ Walaupun pada mulanya kata sinkretisme diambil alih oleh gereja menjadi ungkapan teologis yang baku, khususnya dalam kesibukan mereka mengejar para penyebar ajaran sesat. Th. Sumartana menyebutkan :

Pergeseran makna terjadi pada abad-abad berikutnya, yaitu ketika sinkretisme diambil alih oleh gereja menjadi ungkapan teologis yang baku, khususnya dalam kesibukan mereka mengejar para penyebar ajaran sesat. Dalam masa formatif untuk membakukan ajaran dan mempersatukan umat sebagai warga imperium, segala bentuk ajaran yang berbeda dari ajaran resmi memperoleh cap ‘*anatema*’ dinyatakan sebagai ajaran bid’ah yang mengancam kesatuan gereja dan Negara. Dalam semangat membakukan dan menyatukan ajaran tersebut, upaya pemurnian menjadi sebuah obsesi utama. Upaya pemurnian tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi segala unsur ajaran filsafat atau agama lain yang dianggap menyesatkan ajaran gereja. Lebih-lebih bila dalam ajaran yang dianggap bid’ah itu memiliki unsur-unsur dari sistem filsafat atau agama lain, upaya pencampuran tersebut dianggap sebagai bahaya utama.¹⁴⁴

Terdapat berbagai gagasan mengenai perlunya menggabungkan unsur-unsur yang baik dari berbagai agama dengan anggapan bahwa semua agama berasal dari Tuhan dan semuanya membawa manusia kepada Tuhan. Sinkretisme terkini adalah Bahaisme, yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 M sebagai agama persatuan oleh Mirza Husein Ali Nuri¹⁴⁵ yang dikenal sebagai Baha Ullah. Sebagian elemen agama baru yang didirikan di Iran ini diambil dari agama Yahudi, Kristen dan Islam.¹⁴⁶

Kepercayaan Baha’i menjunjung tinggi Allah Yang Esa, mengakui kesatuan para nabi, dan menanamkan dasar-dasar keutuhan dan kebersamaan seluruh manusia.

¹⁴³Lihat; David Royal Brougham, *Merencanakan Misi Lewat Gereja-Gereja Asia* (Malang : Gunung Mas, 1974), h.108-109.

¹⁴⁴ Th. Sumartana, “Teologi Pembebasan: Kepalan Tangan Sang Uskup,” dalam *Harian Kompas* (19 April 1996). Baca; Andito (Ed), *Atas Nama Agama, Wacana Dalam Dialog Bebas Konflik* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), h. 88.

¹⁴⁵ Mirza Husein Ali lahir di Persia tahun 1817 dan menjadi pendukung terkemuka atas Bab. Setelah Bab meninggal, Husein Ali dipenjara, dimana ia mendapat pengalaman gaib dan mewahyukan dirinya menjadi ‘dia yang kepadanya Allah akan menyatakan diri’. Ketika pada tahun 1863 ia mengatakan kepada sahabat karibnya bahwa ia Nabi Allah yang baru, ia menjadi terkenal dengan sebutan Baha’ullah (kemuliaan Allah). Lihat; Michael Keene, *World Religions*, terj. F.A. Soeprapto, *Agama-Agama Dunia* (Yogyakarta : Kanisius, 2006), h. 178-179.

¹⁴⁶ Kepercayaan Baha’i muncul dari agama Islam dan termasuk salah satu dari agama paling baru di dunia. Kepercayaan ini memberikan suatu pandangan dunia mengenai perdamaian dan cinta kasih di masyarakat yang diperintahkan oleh dasar-dasar agama di seluruh dunia. Baca; *Ibid.*, h. 178.

Rumah ibadat harus dibangun di setiap benua. Rumah ibadat itu dimaksudkan sebagai pusat doa bagi semua orang dari semua agama, dan tiap rumah ibadat mempunyai sembilan pintu masuk yang melambangkan sembilan agama besar.

Di Indonesia, sinkretisme juga subur. Hal ini dapat dilihat umpamanya dalam 'kejawen'. Gerakan kebatinan, dengan mempergunakan pelbagai macam nama, merupakan penganjur sinkretisme ini. Umpamanya saja dalam laporan seminar yang diadakan oleh Badan Kongres Kebatinan Indonesia di Jakarta pada tahun 1959, terdapat ungkapan sebagai berikut: Segala konsepsi tentang Tuhan adalah aspek-aspek dari Ilahi yang satu, tidak berkesudahan, kekal, dan segala bentuk agama adalah aspek-aspek dari jalan besar yang menuju kebenaran yang satu.¹⁴⁷

Jhon Naisbitt menyebut abad ini dalam abad spiritual, yang ditandai dengan kemunduran agama sebagai jalan utama dan bangkitnya spiritualitas baru. Naisbitt menyebutnya dengan selogan ; *Spirituality yes, organized religion no.*¹⁴⁸ Prediksi Naisbitt ini berdasarkan penelitiannya terhadap kecenderungan kontemporer masyarakat dunia Barat, di mana mereka berusaha kembali menemukan makna hidup yang terdalam. Kelompok-kelompok spiritual banyak bermunculan dan memperoleh pengikut yang cukup signifikan. Jalan spiritual dunia Timur tampaknya menjadi pilihan utama bagi mereka. Masyarakat Barat merencanakan program *back to east*. Maksudnya kembali pada spiritualitas Timur, termasuk di dalamnya Yoga Hindu, Zen Budhisme, Tasawuf Islam, dan kebijaksanaan spiritual Timur lainnya.

Di samping istilah spiritualitas untuk menyebut zaman ini, ada juga yang mengatakan bahwa zaman ini adalah *new age religion*,¹⁴⁹ yaitu sebuah zaman yang ditandai dengan pesatnya perhatian terhadap dunia spiritualitas. Perhatian terhadap dunia spiritualitas ini sekarang bukan hanya kepada spiritualitas Timur saja, tetapi juga sudah menjangkau pada pencarian terhadap spiritualitas Barat. *New age* dewasa ini begitu populer, karena telah menyakinkan banyak orang, bahwa cara ini yang paling tepat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan personal dan sosial.

Bagi penulis, praktik sinkretisme jelas tidak bisa diterima karena akan mengaburkan identitas agama sekaligus umatnya. Sepanjang observasi yang penulis lakukan terhadap berbagai tema dan format dialog di Sumatera Utara, belum ditemukan unsur sinkretis di dalamnya. Dialog yang dilakukan di Sumatera Utara

¹⁴⁷ Daya, *Ilmu Perbandingan Agama*, h. 226.

¹⁴⁸ John Naisbitt dan Aburdene, *The New Direction for 1990's; Megatrend 2000*, (New York : Megatren Ltd, 1990), bab IX.

¹⁴⁹ Begitu besar perhatian atas perkembangan *New Age* ini dan akhirnya perhatian kembali kepada mistik agama-agama, pada akhir decade 1980-an diterbitkan sebuah rencana ensiklopedi besar yang sangat sarat pengetahuan spiritualitas dari zaman ke zaman, mulai zaman arkait, agama-agama, *modern esoteris*, hingga satu jilid berkaitan dengan pertanyaan sekuler atas keabsahan spiritualitas. M. Wahyuni Nafis (ed), *Rekontruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 45-47.

lebih dominan pada stabilitas keamanan dan kerukunan antarumat beragama, belum ada gejala pada perpaduan ajaran agama.

C. Respon Agama Terhadap Modernitas

Pada hakikatnya modernitas adalah bagaimana modern itu diterapkan dalam kehidupan, yaitu merupakan suatu sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman dari hasil kerja rasio dan ilmiah. Mayoritas pemikir di seluruh dunia, menerima suatu anggapan bahwa peradaban modern adalah universal. Mereka percaya bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru, yang telah membuat warisan praindustri menjadi kuno, atau zaman agraria. Padahal, tanpa ada zaman agraria itu, zaman modern sendiri sama sekali mustahil. Oleh sebab itu, pertama-tama zaman Modern harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan logis perkembangan kehidupan manusia. Karena merupakan suatu kelanjutan logis sejarah, maka modernitas adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

Proses pemodernan tersebut juga merambah ke belahan dunia Timur, dimana seluruh agama lahir dan berkembang di sana. Patut diingat bahwa semua agama besar, baik yang Semetik (Yahudi, Kristen dan Islam) maupun yang lainnya lahir dan berkembang di zaman Agraria. Ini barangkali tidak perlu mengherankan, sebab zaman Agraria sendiri, semenjak permulaannya, telah berlangsung selama sekitar lima puluh abad, sementara zaman Modern, dalam bentuknya yang mekar sekarang ini, baru berlangsung tiga abad saja. Di sisi lain, Marshall Hodgson mengatakan bahwa zaman Modern lebih tepat dikatakan sebagai zaman teknik (*Technical Age*), karena munculnya zaman ini karena adanya peran sentral teknikalisme, buah dari Revolusi Industri (teknologis) di Inggris dan Revolusi kemanusiaan (sosial Politik) di Perancis.¹⁵⁰ Masalahnya sekarang adalah apakah agama, khususnya Islam dan Kristen menerima sepenuhnya modernitas, setengah-setengah atau menolak sama sekali, dan bagaimana respons mereka terhadap kemodernan tersebut.

Istilah modern berasal dari bahasa Latin “modo”, yang berarti yang kini (*just now*).¹⁵¹ Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5 M, yang digunakan untuk membedakan keadaan orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang

¹⁵⁰ Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam*, The university of Chicago, Chicago, jld. 3, hlm. 201.

¹⁵¹ Lihat Victoria Neufeldl (ed), *Webster's New World Dictionary of American English*, New York: Prentice Hall, 1991, hlm. 871.

telah lewat,¹⁵² namun istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjuk periode sejarah setelah Abad Pertengahan, yakni dari tahun 1450 M sampai sekarang.

Periode modern sejarah perkembangan peradaban Barat, bukanlah sebuah periode yang muncul begitu saja di ruang hampa, melainkan ada keterkaitan dengan periode-periode sebelumnya.¹⁵³ Periode modern dalam perspektif sejarah, di satu sisi jelas merupakan reaksi dari periode sebelumnya, yakni periode pertengahan, di mana dalam priode ini gereja sedemikian rupa mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia¹⁵⁴ dan di sisi lain merupakan revitalisasi dari peradaban klasik Yunani.¹⁵⁵ Diawali dengan gerakan Renaissance yang berlangsung pada abad 15 dan 16, Humanisme, dan Reformasi, manusia Barat modern ingin melepaskan diri dari dominasi gereja yang sedemikian rupa mengungkung kebebasannya. Dengan kebebasannya itulah manusia Barat modern mampu mengembangkan peradabannya sedemikian cepat, sehingga mencapai kemajuan seperti sekarang ini.¹⁵⁶ Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa yang menjadi *élan vital* dari kemajuan Barat modern adalah pandangan dunianya yang menekankan sentralnya peran akal, kebebasan dan otonomi manusia. Dengan itu, manusia Barat dapat menciptakan dan menentukan dunianya, membuat sejarah dan masa depannya sendiri.

Karena manusia sebagai pusat dan pencipta dunianya, peran Tuhan yang begitu besar dalam peradaban sebelumnya menjadi semakin terbatas, kalau tidak dapat dikatakan hilang. Manusia Barat modern tidak lagi membutuhkan sistem pengetahuan ilahiah seperti wahyu untuk menjelaskan dan mengubah dunianya, tapi sistem pengetahuan yang diciptakannya sendiri, terutama dalam bentuk ilmu pengetahuan positif dan teknologi. Dunia dipandang sebagai dunia itu sendiri. Persoalan dunia adalah persoalan dunia itu sendiri, bukan sebagai sesuatu yang sacral. Karena itu desakralisasi dunia dan sekularisasi merupakan fenomena masyarakat Barat modern.

Dari istilah modern, sebagaimana yang telah disebutkan di atas itulah, lahir istilah-istilah lain, seperti *modernisme*, *modernitas* dan *modernisasi*.¹⁵⁷ Meskipun

¹⁵² Lihat Barry Smart, "Modernitas, Postmodernitas dan Masa Kini" dalam Bryan Turner (ed), *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas* (the Theories of Modernity and Postmodernity), terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Boedlowi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000., hlm. 28-29.

¹⁵³ Lihat Hasan Hanafi, *Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat* (Muqaddimah fi al-'Ilm al-Istighrab), terj. M. Najib Buchori, Paramadina, Jakarta, 2000, hlm. 125-126.

¹⁵⁴ Lihat Henry S. Lucas, *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan* (A Short History of Civilization) terj. Sugihardjo Sumobroto dan Budiawan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm. 163.

¹⁵⁵ Lihat; K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 44.

¹⁵⁶ Dalam bidang sains dan teknologi misalnya, terjadi dua abad terakhir ini, sehingga abad sekarang ini disebut dengan abad sains dan teknologi. Kamajuan sains dan teknologi yang terjadi pada periode modern ini sangat cepat, dibandingkan dengan perkembangan sains dan teknologi yang berkembang secara akumulatif dalam periode-periode sebelumnya yang berlangsung selama kurang lebih dua puluh abad. Lihat; Horal Titus, *Living Issues in Philosophy : an Introductory Textbook*, Fourth Edition, American Book Company, New York, 1964, hlm. 73-74.

¹⁵⁷ Bryan S. Turner, *Teori-Teori Sosiologi....*, hlm. 6.

istilah-istilah itu mempunyai pengertian yang berbeda antara satu sama lain, namun karena berasal dari akar kata yang sama, maka pengertian yang dikandungnya tidak bisa dilepas dari akar kata dimaksud, yakni modern. Itulah sebabnya, istilah-istilah tidak jarang digunakan sebagai sinonim.¹⁵⁸

Istilah “modernisme” misalnya, oleh Ahmed, dengan merujuk pada *Oxford English Dictionary*, didefinisikan sebagai “pandangan atau metode modern, khususnya kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi, dalam masalah agama, agar harmonis dengan pemikiran modern.¹⁵⁹ Modernisme diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai dengan percaya pada sains, perencanaan, sekularisme, dan kemajuan. Keinginan untuk simetri dan tertib, keinginan akan keseimbangan dan otoritas, juga menjadi karakternya. Periode ini ditandai oleh keyakinannya terhadap masa depan, sebuah keyakinan bahwa utopia bisa dicapai, bahwa ada sebuah tata dunia natural yang mungkin.¹⁶⁰ Sementara modernitas, dipahami sebagai dampak dari modernisasi, yang mana dunia sosial berada di bawah dominasi estetisme, sekularisasi, klaim universal tentang rasionalitas instrumental, diferensiasi berbagai lapangan kehidupan dunia, birokratisasi ekonomi, praktik-praktik politik dan militer, serta monoterisasi nilai-nilai yang sedang berkembang.¹⁶¹

Terlepas dari adanya berbagai pengertian yang mungkin berbeda satu sama lain mengenai istilah-istilah tersebut, yang jelas bahwa modernisme atau modernitas menurut Anthony Giddens, sebagaimana dikutip Ahmed, adalah proyek Barat. Fakta bahwa sampai pertengahan abad kedua popul imperialisme Barat menjadi alat bagi proyek modernisme, menekankan hal itu. Perspektif bahwa modernitas atau modernisme adalah proyek Barat inilah yang akan membantu menerangkan respon Agama, dalam hal ini Kristend an Islam terhadapnya.

Untuk memahami respons agama terhadap modernitas, barangkali harus didudukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah ‘respons agama’, agar tidak terlalu bias dalam diskusi ini. Mengapa penulis katakan demikian, karena makna ‘respons agama’ tersebut bisa dipahami secara abigium, di satu sisi agama sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci, dipahami secara literal. Tapi, agama juga bisa dipahami sebagai hasil interpretasi manusia terhadap kitab suci. Jadi, respons agama yang dimaksudkan disini adalah pandangan atau reaksi para tokoh masing-masing agama terhadap kemodernan, kendatipun tidak meninggalkan pernyataan Kitab Suci.

¹⁵⁸ *Ibid.*,

¹⁵⁹ Lihat Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam* (Postmodernism and Islam: Predicament and Promise), terj. M. Sirozi, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 22.

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Turner, *Op.cit.*, hlm. 11.

Modernitas adalah keadaan jiwa, yaitu pengharapan akan kemajuan, kecenderungan untuk tumbuh dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada hakikatnya, pemodernan masyarakat di semua benua, tak memandang warna kulit, ras atau keyakinan. Walaupun ada yang beranggapan bahwa agama pada umumnya merupakan penghambat modernisasi. Mungkin bisa dipisahkan, ajaran agama yang mana, yang tak bisa diubah atau mengikuti perkembangan zaman, apakah yang sacral atau yang profane, atau memang itu hanya sebagai antipati terhadap sesuatu agama.¹⁶² Sebaliknya, mungkin juga disebabkan oleh model modernisasi barat yang ditawarkan tersebut hanya berorientasi pada keduniawian semata, sehingga nilai-nilai spiritual ditinggalkan. Seakan-akan Barat tetap merupakan model yang tak dapat dihindari. Apa yang terwujud di barat, itulah yang dicari Timur Tengah.

Kunci untuk memahami mentalitas mereka ialah penonjolan secara berlebihan pada nilai perubahan, inovasi, kebaruan, dan kemudahan, yang semuanya merupakan kebaikan yang terunggul dan utama. Demikian pula sikap merendahkan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tua (termasuk orang tua), masa lalu dan tradisi. Bersama dengan agama-agama lain yang sudah mapan, peradaban dan kelembagaan agama yang dipersalahkan dan ditolak dengan dalih bahwa suatu aturan yang diajarkan pada wahyu yang diturunkan berpuluh abad yang lalu, tak mungkin dapat berlaku dan relevan bagi kehidupan modern.

Problem modernisasi tidak hanya dihadapi oleh golongan tertentu, atau satu agama saja, namun juga dihadapi oleh agama-agama lain, seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Hal ini diakui oleh dosen agama-agama di Universitas Columbia, Joseph L. Blau. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan lebih dari sepuluh Universitas dan lembaga agama di Amerika, antara lain:

Sesungguhnya seluruh agama besar (yang banyak pengikutnya) telah menghadapi krisis semenjak lahirnya peradaban baru. Seluruh agama tersebut, dengan caranya masing-masing, telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk memecahkan krisis dan untuk menghadapi kehidupan modern beserta sekularisme yang menyertainya. Abad ke-19 dan ke-20 telah menyaksikan babak baru (dengan perubahan besar) di dalam agama-agama tersebut. Secara sederhana, fenomena ini disebabkan, agama-agama tersebut harus memilih di antara dua pilihan; sejalan dengan zaman modern, atau mati.¹⁶³

Dari ungkapan tersebut, menunjukkan betapa agama dihadapkan kepada dilematis dalam menyikapi kemodernan. Sesungguhnya, usaha agama untuk mewujudkan kesesuaian dengan peradaban barat tersebut dan memberikan

¹⁶² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 175.

¹⁶³ Joseph L. Blau, *Modern Varieties of Judaism*, Columbia Press, London, 1966, hlm. 26.

penyelesaian terhadap problem besar yang sedang dihadapi. Itulah gerakan pembaruan yang meluas di kalangan agama-agama besar; Yahudi, Kristen dan Islam. Di dalam pemikiran keagamaan besar, gerakan pembaruan keagamaan dikenal dengan istilah modernisme. Modernisme, bukan sekadar istilah yang terkait pada masa tertentu, akan tetapi merupakan istilah khusus.

Arti modernisme di dalam agama adalah seluruh visi (pandangan) di dalam agama yang didasarkan pada keyakinan bahwa dengan adanya kemajuan ilmiah dan budaya kontemporer (masa kini), maka ajaran-ajaran agama ortodoks harus ditafsirkan menggunakan pemahaman filsafat dan ilmiah populer.¹⁶⁴ Jadi, modernisme merupakan gerakan yang berusaha menundukkan prinsip-prinsip agama di bawah nilai-nilai dan pemahaman peradaban Barat, berikut konsepsi serta visinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Berangkat dari berbagai tanggapan, pendapat dan reaksi para pemikir dan agamawan terhadap modernitas dan kemodernan, maka menarik untuk ditelaah lebih dalam bagaimana respons Kristen dan Islam terhadap modernitas tersebut.

Untuk mengetahui respons Kristen terhadap modernitas, maka mau tidak mau kita harus menelusuri terlebih dahulu informasi atau isyarat-isyarat Kitab Suci tentang Ilmu Pengetahuan dan teknologi, di samping pendapat atau reaksi tokoh agama bersangkutan. Setelah dibaca dan ditelusuri berbagai literature, maka ditemukanlah pernyataan yang mengatakan bahwa Injil hanyalah kesaksian tentang Isa, di dalamnya hanya berupa pertelaan Yesus semenjak ia dalam kandungan, dilahirkan, disalib, dikuburkan dan bangkit kembali di tengah-tengah orang mati. Injil-injil berbicara tentang kasih sayang teladan Yesus, dan merupakan inti ajaran dari agama ini.¹⁶⁵

Menurut Soedarmo, Kitab Suci (dalam hal ini adalah Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian lama dan Perjanjian Baru) tidak dapat dibaca sebagai buku ilmu alam, ilmu sejarah dan lain-lain. Selanjutnya ia mengatakan bahwa memang Kitab Suci mungkin tidak memberi pernyataan secara ilmu pengetahuan. Demikian juga J.Verkuyl, berkata bahwa Alkitab sekali-kali tidak berbicara dan tak mau berbicara sebagai yang berwibawa, misalnya dalam lapangan geologi, biologi, archeologi, sejarah, teknologi dan sebagainya.¹⁶⁶ Dalam kekurangan nilai ilmu bagi kitab Suci itu, J. Verkuyl memberikan contoh, bahwa:

Mulai dari kitab *Kejadian* sampai kepada kitab *Wahyu* semua penulis Alkitab itu tanpa kecuali menganut suatu gambaran tentang susunan kosmos, yang berbeda

¹⁶⁴ Lihat kata Modernism di dalam kamus-kamus dan Ensiklopedi, di antaranya; *Encyclopedia Americana*, V:289; *The New International Dictionary of Christian Church*, hlm. 668.

¹⁶⁵ Rum 1, 13,14 dan lain-lain; Galatia 5 dan Kor. I dan lain-lain. Alkitab menolak penggunaan akal (hikmah) karena hal itu merupakan kebodohan dan kebatilan belaka.

¹⁶⁶ R.Soedarmo, *Ikhtisar Dogmatika*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1965, hlm. 214. Dan J.Verkuyl, *Fragmenta Apologetika*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1966, hlm. 107.

sekali dari gambaran yang kini kita anut dalam abad ke-20 ini tentang susunan dan bangunan kosmos. Mereka semuanya berpendapat, bahwa bumi ini datar dan bahkan alam semesta itu dibangun dalam bentuk tiga tingkatan. Mereka sangka, bahwa planit terdapat di atasnya dengan bintang-bintang yang tempatnya tetap dan tak bergeser dari tempatnya, dan di bawah planit kita itu terdapatlah lengkung dunia bawah. Anggapan tentang susunan kosmos yang demikian kita jumpai dalam kitab Kejadian, Mazmur, dan kitab Ayub, tetapi juga dalam surat-surat Paulus dan sebagainya.¹⁶⁷

Seorang ahli Kristen lain, berkata;”Kitab Injil dan Ilmu Pengetahuan masing-masing harus diinsyafi kedudukannya. Ilmu pengetahuan harus insyaf akan batas-batasnya. Di lain pihak orang Kristen harus sadar akan maksud dan tujuan dari Alkitab. Segera bila Kitab Suci dipergunakan sebagai sumber buat segala macam pengetahuan ilmiah, maka akan timbul perselisihan dengan hasil-hasil ilmu pengetahuan modern.¹⁶⁸

Ternyata sulit dielakkan, sementara orang Barat yang mendiamkan sumber-sumber ilmu dan kemajuan dunia sekarang, dan mungkin sesekali mereka menonjolkan seakan-akan merekalah pembuka kuncinya; dunia mengenal sejarah, bahwa dunia Gereja lama sekali, bahkan sampai abad ke-16 masih memusuhi filsafat dan ilmu pengetahuan.¹⁶⁹ Dengan pandangan menyesal, telah mengakibatkan masyarakat Barat memandang rendah kepada paham keagamaan. Kendatipun demikian, sebagian dari para pemikir Yahudi dan Kristen, keluar meninggalkan Kitab Suci mereka merespon perkembangan zaman modern.

Di awal abad ke-18 M, di Jerman, muncul kecenderungan (sikap keagamaan) baru di kalangan orang-orang Yahudi, yang kemudian memunculkan kelompok baru di dalam agama ini, yang dikenal dengan nama “Liberal Judaism”, dan dinamakan juga “Yahudi Pembaru”.¹⁷⁰ Munculnya kelompok ini, merupakan pengaruh langsung dari gerakan ilmiah yang dibangkitkan oleh seorang pemimpin Yahudi Moses Mende Isshon (1729-1789 M), dan pekikan kebebasan buah dari perang Revolusi Perancis.

Menurut Moses Mende Isshon, Gerakan inilah yang menyebarkan ilmu-ilmu modern di kalangan orang-orang Yahudi, dan mengalihkan mereka dari kehidupan terisolasi, yang telah mereka alami berad-abad lamanya, menuju aliran peradaban

¹⁶⁷ J.Verkuyl, *Ibid.*, hlm. 112-116.

¹⁶⁸ D.C. Mulder, *Iman dan Ilmu Pengetahuan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, Cet.IV, h. 30.

¹⁶⁹ Sejarah mengenai zaman Tengah adalah zaman Islam, yakni dunia Islam memperkenalkan dirinya kepada dunia melalui karya-karya tokoh-tokohnya seperti Ibn Rysd, Ibnu Sina, Ibn Zawabir, Al-Hawarizmi, Al-Battani, Al-Biruni dan lain-lain. Pada waktu ini dunia Kristen masih berada dalam persengketaan Gereja, terutama menekan perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan penganutnya. Sampai abad ke-17 keadaan demikian masih berlaku; Galileo Galilei (1564-1642 M, ahli ilmu bintang dan fisika Italia mendapat hukum inkuisisi, dipaksa Gereja menarik pendirian ilmu pengetahuannya, yang dianggap bertentangan dengan agama.

¹⁷⁰ Blau, *Op. Cit.*, h. 28.

Barat modern.¹⁷¹ Tujuannya adalah untuk memperluas cakrawala dan mengajarkan pengetahuan modern kepada kaum Yahudi, serta membangkitkan dan mendorong mereka untuk memasuki kehidupan yang luas. Artinya, menerima kebiasaan masyarakat modern, dengan tetap memelihara agama nenek moyang Yahudi. Sebab, jika menekankan tradisi dan teks semata, ada kecenderungan bahwa kaum Yahudi hanya peduli terhadap hal-hal yang kecil saja.

Saat itu para rabi menyatakan bahwa Revolusi perancis sebagai ‘hukum kedua dari gunung sinai’, hijrah dari Mesir, paskah modern. Zaman Messias telah tiba dengan datangnya masyarakat baru yang berlandaskan *liberty*, *equality*, dan *fraternity*. Namun pada kenyataannya, tahun-tahun berikutnya banyak kaum Yahudi muda yang merasa ditinggalkan dan dikhianati. Mereka telah mendapatkan pendidikan secular yang layak, serta telah siap ambil bagian dalam masyarakat modern. Tapi kemodernan yang mereka perbuat jauh meninggalkan nilai-nilai keagamaan Yahudi dan membingungkan.

Sejak itu rame-ramelah kaum Yahudi melakukan reformasi yang sangat rasional, pragmatis, dan sangat mendukung privatisasi agama. Para pembaharu sudah siap, dan sangat berkeinginan untuk membuat keputusan radikal dengan masa lampau dan rela menyingkirkan doktrin serta ibadah tradisional. Alih-alih menganggap pengucilan itu sebagai ancaman terhadap eksistensi, para pembaharu malah merasa sangat nyaman di dalam diaspora. Semua mempromosikan Yahudi sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai modernitas. Agama Yahudi rasional, liberal, manusiawi, serta siap menanggalkan partikularisme dan menjadi agama universal.¹⁷² Para pembaharu itu tidak punya waktu buat hal-hal yang berbau irasional, mistis, dan misterius. Jika kepercayaan dan nilai-nilai lama menghalangi kaum Yahudi untuk berpartisipasi secara produktif dalam dunia modern, maka kesemuanya itu harus dimusnahkan.

Abraham Geiger (1810-1874) misalnya, memberlakukan metode penelitian ilmiah modern terhadap sumber-sumber suci Yahudi. Mereka membentuk mazhab “Sains Yahudi”, yang sangat jelas dipengaruhi filsafat Kant dan Hegel. Mereka berpendapat bahwa yahudi bukanlah suatu agama yang diturunkan secara tuntas di masa lampau. Yahudi berkembang secara perlahan-lahan, dan dalam prose situ, agama ini menjadi lebih rasional dan sadar diri. Pengalaman religius, yang dulunya selalu

¹⁷¹ Moses Mendelssohn (1729-1786 M), dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi miskin di sebuah kota kecil di Jerman. Dia telah menimba ilmu-ilmu agama nenek moyangnya. Kemudian dia mendalami bahasa Jerman dan mulai mempelajari filsafat, dalam waktu singkat, dia telah berada di tengah-tengah lingkungan keilmuan. Kehidupannya menjadi lambang ‘jembatan’ yang hendak dia tegakkan antara ajaran ortodoks dan zaman renaissance di Eropa. Baca; Bernard Martin, *History of Judaism*, Basic Books. Missions; Work Among Moslems. Fleming. New York, 1906, h.192-202.

¹⁷² Maryam Jamilah, *Kebudayaan Barat dan Kesejahteraan Manusia*, terj. Integrita Press, Jakarta, 1985, h. 11-12.

diekspresikan dalam bentuk visi, sekarang bisa dikonseptualisaikan sertadipahamai dengan intelegensia kritis.¹⁷³ Dengan kata lain, mitos kini diubah menjadi logos.

Sementara itu, respons kaum Yahudi tradisional, orang yang beriman lama, mulai merasa terhimpit. Mereka menenggelamkan dirinya dengan mempelajari Taurat dan Zabur, serta bersikukuh bahwa modernitas harus dihancurkan. Mereka berpendapat bahwa studi-studi non Yahudi tidak cocok dengan yahudi. Salah satu juru bicara utamanya adalah rabi Moses Sofer (w.1839 M) yang menentang segala perubahan atau akomodasi terhadap modernitas. Menurutnya, Tuhan tidak berubah. Dia melarang anak-anaknya membaca buku-buku pendidikan secular ataupun berpartisipasi dalam masyarakat modern. Intinya, responsnya terhadap modernisasi adalah menyerah. Namun, kaum tradisional yang lain merasa perlu berkreasi dalam mengatasi bahaya pengaruh rasionalisasi secular.

Namun, kaum Yahudi lain berusaha mengambil jalan tengah, salah seorang tokohnya adalah Samuel Raphael (w. 1888 M),¹⁷⁴ ia berpendapat bahwa Yahudi tidak perlu takut untuk berhubungan dengan kebudayaan lain. Kaum Yahudi seharusnya merangkul sebanyak mungkin perkembangan dan kemajuan modern, tentunya dengan tetap menjaga supaya mereka tidak menjadi musuh agama. Di satu sisi, ia menyerukan pentingnya sikap ortodoks. Namun di sisi lain, ia menyalahkan kaum tradisional radikal. Ini karena dengan menolak modernitas, kaum tradisional telah menyebabkan menyebarluasnya arus kaum Yahudi ke Kristen dan gerakan Reformasi. Baginya, kaum Yahudi harus mencari makna tersembunyi dari berbagai perintah Tuhan lewat penelitian dan studi yang cermat. Hukum-hukum yang tidak bisa masuk akal bisa dianggap sebagai pengikat. Dia menyimpulkan pendapatnya dalam ungkapan singkat; “Sesungguhnya agama menurut pandangan mereka benar selama tidak bertentangan dengan perkembangan zaman, sedangkan menurut pandangannya, perkembangan zaman itu benar selama tidak bertentangan dengan agama.

Fenomena ‘kembali kepada ortodoks’ tidak terjadi dalam hal pemikiran dan prinsip saja, namun meliputi berbagai segi, sehingga pemikiran reformasi Yahudi menjadi pemikiran yang minoritas, sedangkan kelompok ortodoks terus menghimpun orang-orang Yahudi yang berada di Amerika.¹⁷⁵ Di Israel, Negara tidak mengakui kelompok yahudi Bebas, dikarenakan adanya permusuhan sejarah antara mereka dengan gerakan Zionis. Tempat-tempat ibadah kelompok Yahudi Bebas berjumlah sedikit, mereka mendirikannya di tengah-tengah tantangan besar dari kelompok

¹⁷³ Julius Guttmann, *Philosophies of Judaism, the History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig*, London dan New York, 1964, h. 308-351.

¹⁷⁴ Martin, *Op.Cit.*, h. 289.

¹⁷⁵ Joseph L. Blau, *Modern Varieties of Judaism*, Columbia Press, London, 1966, h. 396.

ortodoks di wilayah Israel, dan mereka tidak mendapatkan dukungan materi dari negeri.

Dalam waktu yang bersamaan, ketika gerakan pembaruan Yahudi bersinar terang, Kristen Katolik dan Protestan mengalami perkembangan serupa. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keselarasan antara kepercayaan nenek moyang dan pemikiran dunia modern. Sisi pertama dalam kemodernan adalah dorongan kuat untuk memberikan penilaian histories terhadap taurat dan Injil. Ini artinya, bahwa seruan pokok gerakan modernisme adalah mengembalikan penafsiran ajaran Kristen ortodoks berdasarkan ilmu pengetahuan modern. Kaum modernis mengatakan bahwa saat ini, keyakinan agama Kristen sedang berkembang di dalam kerangka filsafat dan pemikiran modern.

Dalam sejarah peradaban Barat, sejak munculnya agama Kristen pada abad I sampai dengan abad XIV disebut sebagai abad pertengahan. Abad pertengahan ini meliputi dua fase, yakni fase Bapak Gereja (Patristik) yang berlangsung dari abad I sampai abad VII dan fase Skolastik yang berlangsung dari abad VIII sampai abad XIV.¹⁷⁶ Munculnya agama Kristen dan pelembagaannya dalam kekaisaran Romawi merupakan peristiwa besar dalam sejarah peradaban barat. Signifikansi agama Kristen terletak dalam kenyataan bahwa agama ini mengajrkan gagasan khusus, atau dogma, yang diterima sebagai kebenaran. Gagasan-gagasan ini memberikan tuntunan perilaku manusia, dan alasan untuk berjuang keras demi keyakinan, serta petunjuk perilaku yang baik dan jahat.

Tidak ada institusi abad pertengahan yang pengaruhnya dalam segala hal aspek kehidupan masyarakat begitu besar selain gereja Kristen. Gereja adalah persekutuan semua umat manusia yang mengakui Kristus, mengikuti sakramen, dan berada di bawah gembala para pendeta, yang secara sah menjadi wakil pemimpin di dunia, yakni Paus. Semua orang yang dibaptis dengan sendirinya menjadi anggota jemaah gereja, dan hampir semua orang dibaptis karena mereka lahir dari orang tua yang telah memeluk agama Kristen.¹⁷⁷

Namun, respons sebagian pemikir Kristen menolak kekuasaan gereja, tetapi tidak mencampakkannya, hanya mengubahnya menjadi lembaga social. Seharusnya, gereja menjadi sumber penafsiran dan undang-undang, dan sebagai lembaga yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah, namun pada kenyataannya sekarang, yang menentukan hal tersebut adalah hukum pribadi. Suatu hal yang mungkin, seorang Katolik menolak penafsiran-penafsiran yang disajikan oleh kekuasaan gereja, lalu orang tersebut membuat penafsiran khusus yang diterima oleh hatinya.

¹⁷⁶ Lihat Hassan Hanafi, *Op.cit.*, h. 174.

¹⁷⁷ Lihat Henry S. Lucas, *Op.cit.*, h. 163.

Sejak zaman Renaisans Eropa hingga kini, perkembangan ilmu yang terjadi bukanlah hanya merupakan produk materialisme Barat yang memberontak terhadap kewenangan gereja, melainkan juga merupakan senjata mereka yang mutlak dan penting. Teori-teori Copernicus (1473-1543)¹⁷⁸ dan Galileo Galilei (1563-1642), yang merupakan contoh menarik dari sekian contoh-contoh lain, semuanya dipergunakan oleh para materialis untuk menentang pandangan teologis gereja tentang kehidupan di muka bumi.¹⁷⁹

Pada saat itu, terjadi pula pembaruan di dalam Protestan bebas. Yang perlu ditegaskan, para pemikir dari tiap-tiap gerakan saling berebut pengaruh. Di Jerman, Inggris, dan Prancis muncul pemikir terkemuka gerakan Protestan bebas, sehingga tampak jelas adanya perbedaan pandangan atau respons di antara tokoh-tokoh modernisme di kalangan agama Kristen. Percy Gardner berkata; “Modernisme dibangun di atas perkembangan ilmu dan system penilaian sejarah. Tujuan modernisme yang sesungguhnya bukanlah menyingkirkan hakikat agama Kristen, akan tetapi menghidupkan dan memperbarui hakikat-hakikat kebenrannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang dan mengembalikan penafsirannya berdasarkan ilmu pengetahuan modern.”¹⁸⁰

Sementara itu respons modernisme Inggris terhadap gereja muncul dari kuatnya keyakinan mereka bahwa gereja tidak memiliki kesucian mutlak, tidak memiliki ajaran yang tetap, tidak memiliki adapt yang beku atau undang-undang yang terbatas. Akan tetapi menurut pandangan mereka, gereja merupakan satu-satunya lembaga yang layak untuk mendirikan kerajaan Al-Masih di bumi. Oleh karena itu, mereka berusaha mendirikan ‘gereja yang kuat dan merdeka di dalam Negara Kristen yang berkembang.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa respons agama Yahudi dan Kristen terhadap modernitas terbagi menjadi beberapa aliran, yaitu Pertama, yang menolak sama sekali modernitas, karena dianggap akan meruak agama. Kedua, ada yang menerimanya, karena hal itu dianggap sebagai perkembangan zaman, dan ajaran agama harus sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ketiga, yang mengambil jalan tengah, dimana pada hakikatnya ajaran agama tidak terjadi perubahan, namun penafsirannya yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Pada dasarnya, asal usul sains modern, atau revolusi ilmiah, berasal dari perdaban Islam. Memang sebuah fakta, umat Islam adalah pionir sains modern. Jikalau mereka tidak berperang di antara sesama mereka, dan jika tentara Kristen tidak mengusirnya dari Spanyol, dan jika orang-orang Mongol tidak menyerang dan

¹⁷⁸ Ia adalah astronom Polandia, yang mengatakan bahwa bumi dan seluruh bintang mengelilingi matahari dan matahari juga melakukan perputaran.

¹⁷⁹ Maryam Jamilah, *Op.cit.*, h. 208.

¹⁸⁰ Joseph L. Blau, *Op.cit.*,h. 398.

merusak bagian-bagian dari negeri-negeri Islam pada abad ke-13, mereka akan mampu menciptakan seorang Descartes, seorang Copernicus, dan telah menemukan bibit-bibit filsafat mekanika. Dimana sains teknologi dan mekanik saat itu menjadi ciri modernitas, yang tidak bertentangan dengan Alquran.

Mengapa demikian, karena Alquran, bukan saja kitab yang *vertical* menghubungkan manusia dan Tuhan, *horizontal* mengatur hubungan masyarakat, tetapi juga bernilai ilmiah dalam tiap-tiap ayat dan kalimat-kalimatnya. Zaman tengah, zaman agama-agama besar belum mampu meningkatkan peradaban manusia ke tingkat peradaban yang ilmiah, zaman rumus-rumus filsafat Yunani dianggap sepi bahkan tak dikenal, Islam datang dengan Alqurannya mengajarkan manusia tentang langit, alam cakrawala dengan bentuk, susunan, dan garis edarnya sendiri-sendiri. Islam bercerita tentang biologi, kimia, ilmu alam, kedokteran, ilmu politik dan lain-lain, kegunaan ilmu itu sendiri serta derajat pemiliknya.¹⁸¹

Tinggi rendahnya tingkat penekanan para ahli mengenai tantangan-tantangan intelektual barat terhadap dunia muslim dapat dilihat dalam banyaknya kajian tentang respon ulama terhadap modernisasi seperti telah disinggung diatas. Di samping itu, perhatian mereka banyak pula ditumpahkan untuk menjelaskan fenomena ulama yang digolongkan modernis, semacam Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha dan sebagainya.¹⁸² Konsentrasi semacam itu mungkin bisa dipahami, atau bahkan agaknya dapat diterima, karena sejarawan pada umumnya tertarik kepada perubahan dalam masyarakat muslim yang dianggap statis. Maka tidak mengherankan, jika mereka harus memfokuskan perhatian kepada ulama modernis yang merupakan perubahan, dan kelihatan tampil sebagai pioner gerakan sosial dan intelektual baru.

Pada pihak lain, terdapat kecenderungan untuk menelantarkan ulama tradisional, yang sepintas kelihatannya hanya sibuk melakukan hal-hal tradisional dengan cara tradisional pula. Tetapi penekanan yang berlebihan pada ulama modernis ini dapat menimbulkan distorsi-distorsi yang serius. Dalam pengamatan yang sederhana, gerakan-gerakan yang dipimpin ulama modernis lebih sering bersifat elitis; mereka jarang sekali mampu menggerakkan banyak umat untuk bertindak. sementara itu, ulama tradisional yang dikritik kaum modernis sebagai tidak responsif terhadap modernisasi dalam banyak kasus menduduki tempat terpenting dalam gerakan-gerakan nasionalis yang berbasiskan massa. Karena itu terlepas dari meluasnya penetrasi kekuatan politik dan nilai-nilai cultural Barat ke dalam dunia Muslim, kaum ulama

¹⁸¹ Antara lain dapat dilihat Alquran surat; Al-Baqarah, 282, al-Isra', 12, Yunus,5; Al-Anbiya' 30, Ali Imran 7, An-Nahl 27; Al-Haj 53, Al-Ankabut 43, dan ayat-ayat akhlak merupakan jiwa dari sebagian besar Alquran.

¹⁸² H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam*, Chicago, 1947; dan baca; M.A. Zaky Badawy, *The Reformers of Egypt*, London, 1978.

tradisional ini pada umumnya mampu mempertahankan pengaruh politik mereka dalam hal yang tak tertandingi oleh rekan-rekan mereka yang modernis.

Situasi khas seperti kerangka di atas sangat jelas dalam studi yang dilakukan oleh Green tentang ulama Tunisia.¹⁸³ Dia menekankan bahwa respon ulama Tunisia terhadap westernisasi yang dilakukan penguasa pribumi pada prinsipnya adalah sama dengan respon ulama Anatolia dan Mesir. Karena tindakan-tindakan sentralisasi dan sekularisasi pemerintah yang menampilkan tantangan serius terhadap nilai-nilai teologis dan status social mereka, maka ulama Tunisia pada umumnya menentang westernisasi. Namun pemerintah reformis Perdana Menteri Khair al-Din (1873-1877) tidak sekuat pemerintah Turki atau Mesir. Karena itu, sebelum ia melancarkan program-program modernisasinya, ia berupaya menciptakan suatu hubungan timbal balik yang lebih suportif dengan lapisan ulama, yang kemudian disebut kelompok modernis. Keterlibatan pihak yang terakhir ini dalam modernisasi tak urung lagi mendorong perpechan lebih lanjut di antara ulama yang terbagi sesuai dengan garis-garis mazhab (Maliki dan Hanbali) dan stautus ekonomi-sosial. Keadaan ini menambah komplikasi-komplikasi dalam proses modernisasi Tunisia.

Dalam perkembangan selanjutnya, peran utama yang dimainkan ulama modernis dalam modernisasi diambil alih Perancis yang berupaya mendorong modernisasi Islam lebih jauh dan mengayomi suatu kelas intelektual baru yang lebih *westernized*. Namun, taktik-taktik ini tidak mampu menjamin keberhasilan modernisasi mereka. Kebanyak ulama tetap konservatif dan mereka ternyata masih memiliki pengaruh jauh lebih besar ketimbang ulama modernis. Akibatnya, dalam banyak hal, ulama tradisional berhasil mempertahankan lembaga-lembaga dan nilai-nilai tradisional dari setiap upaya yang ingin mengubahnya.

Untuk menyimpulkan pembahasan kita tentang respons Islam, nota benenya adalah ulama terhadap modernisasi, dapat digambarkan beberapa pola tipikal yang tercermin dalam kajian-kajian terdahulu, yang juga diungkapkan oleh Crecelius dalam sebuah studinya tentang ulama Mesir.¹⁸⁴ Respons paling umum di antara ulama adalah oposisi. Ini dengan mudah dapat dipahami. Aspek-aspek tertentu modernisasi, apalagi eksplisit westernisasi, jelas merupakan *bid'ah* yang mengancam bukan hanya posisi ulama itu sendiri, tetapi, jauh lebih penting lagi syari'at dan institusi-institusi Islam lainnya. Sebagai penjaga syari'ah, adalah wajar jika sebagian besar ulama sering menentang modernisasi.

Oposisi ulama terhadap modernisasi dapat mengambil berbagai bentuk, sejak dari penolakan secara terbuka atau bahkan pemberontakan sampai kepada bentuk-

¹⁸³ Baca; A.H. Green, *The Tunisian 'Ulama*; dan John J. Donohue-John L. Esposito, *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Rajawali Press, Jakarta, 1989, h. 17-18.

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. xxxi-xxxiv.

bentuk oposisi yang lebih subtil. Sikap-sikap oposisi ini dipandang sesuai dengan kekuatan fisik; atau, jika tidak mampu, jihad dengan kata-kata, atau sebagai cara terakhir, jihad bisu, penentangan dalam batin. Menghadapi rejim modernizing yang kuat, tidak heran bahwa banyak ulama mengambil bentuk jihad terakhir, yang sering dimanifestasikan dalam bentuk ‘uzlah dari masalah-masalah politik, dan sebaliknya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan social keagamaan. Respons subtil semacam ini juga dapat mengambil bentuk obstructionism, dengan cara sebagian ulama secara lahiriah kelihatan menerima modernisasi, sementara dalam cara-cara yang tak begitu kentara berusaha menghalanginya.

Dalam mengagaskan *ijtihad*, tampaknya tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan pembaharu Islam. Akan tetapi dalam meminjam peradaban Barat, ditemukan perbedaan visi di kalangan Muslim. *Pertama*; sikap paling liberal, yang berkeyakinan bahwa untuk kemajuannya, umat Islam harus meminjam peradaban Barat secara keseluruhan. *Kedua*; visi tradisional, yang berkeyakinan bahwa untuk meraih kemajuan, umat Islam tidak perlu meminjam peradaban Barat, akan tetapi mereka harus membangun sendiri peradabannya berdasarkan ortodoksi Islam sendiri, sebab kitab suci Alquran telah mencakup petunjuk yang dibutuhkannya untuk membangun peradaban. *Ketiga*; visi *sintetik*, yang berkeyakinan bahwa dalam Alquran tidak terdapat petunjuk yang rinci mengenai bagaimana cara membangun peradaban, hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan universal saja.¹⁸⁵

Kekecewaan dan penolakan terhadap Barat sebagai peradaban yang patut ditiru inilah yang merupakan faktor penting, meskipun bukan satu-satunya, yang menyebabkan munculnya gerakan kebangkitan Islam. Istilah kebangkitan mempunyai pengertian-pengertian yang jelas. *Pertama*, mengandung pengertian sebagai pandangan dari dalam, dimana banyak orang Islam sendiri melihat pengaruh Islam yang tumbuh di antara pemeluknya. Istilah itu melahirkan kesan bahwa Islam sekarang menjadi penting kembali, mendapatkan kembali *prestise* dan harga dirinya. *Kedua*, menunjuk pada suatu fenomena yang telah terjadi sebelumnya. *Ketiga*, mengandung pengertian sebagai tantangan, bahkan ancaman terhadap mereka yang memegang pandangan dunia lain.

Dewasa ini ini kebangkitan Islam sudah menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pengamat. Dalam pandangan Ahmed, kebangkitan Islam yang berlangsung sejak tahun 1970-an hingga kini adalah fenomena postmodernisme di Dunia Islam. Sementara menurut Huntington, kebangkitan Islam dipandang sebagai ancaman terbesar bagi peradaban barat setelah berakhirnya era Perang Dingin.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis; Penegakkan Nilai-Nilai Ajaran Alquran dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, h. 271.

¹⁸⁶ Lihat; Samuel Huntington; Benturan antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia, dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor5, Vol.IV, tahun 1993, h. 11-25.

Meskipun demikian, juga jelas bahwa tidak semua ulama menentang modernisasi. Karena berbagai alasan, sebagian mereka malah mendukungnya. Apakah mereka sadar atau tidak terhadap kecenderungan sekularisasi dalam modernisasi, ulama modernis menjadi pendukung-pendukung setianya. Mereka mengasosiasikan diri dengan penguasa dan memberikan legitimasi teologis kepada modernisasi yang dilakukan. Juga terdapat sebagian ulama, apakah berkaitan dengan pemerintah atau tidak, yang *committed* untuk memperbaharui (*tajdid*) aspek-aspek tertentu ajaran dan institusi Islam guna meresponi modernisasi yang melanda dunia Muslim.

Baik modernisme Islam maupun revitalisme Islam, keduanya merupakan respon yang diberikan umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Keduanya mempunyai klaim optimisme, bahwa respon yang diberikannya adalah yang akan dapat membawa umat Islam menuju pada kemajuan. Dalam perjalanan sejarah modernisme dinilai gagal. Kelihatannya, umat Islam sadar bahwa peradaban adalah merupakan proses belajar, dan menyadari pula bahwa sekarang peradaban Islam tidak berada dalam ruang hampa, nampaknya yang diperlukan adalah dialog peradaban. Namun, sebagian umat beragama bertahan dengan teks-teks Kitab Suci yang literal, sehingga sulit menerima perubahan. Tapi, bagi umat beragama yang Kitab Sucinya memberi peluang terhadap penggunaan akal, maka kemodernan menjadi sebuah keniscayaan.

Pemikiran dan peradaban Barat modern jelas bersumber dari nilai-nilai yang dimunculkan oleh gerakan renaissance dan gerakan reformasi yang telah berhasil mematahkan kekuasaan gereja yang sedemikian mendominasi selama berabad-abad pertengahan. Renaissance berorientasi kembali kepada peradaban klasik yang telah hilang pada abad pertengahan, sementara reformasi berorientasi kembali kepada kitab suci yang telah diselewengkan oleh gereja, namun kedua gerakan tersebut secara simultan telah mampu mematahkan dominasi gereja, yang terbukti selama abad pertengahan tidak banyak melahirkan kemajuan pemikiran dan peradaban, justru sebaliknya, umat Kristen berada dalam era kegelapan, selama mempertahankan dominasi gereja.

D. Stigma Mayoritas dan Minoritas

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman dan kemajemukan budaya dan agama yang dianut, mereka hidup saling berdampingan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga kehidupan bangsa di Sumatera Utara, penduduknya saling berdampingan dan keanekaragaman. Dalam bangsa yang besar dan kemajemukan itu, terdapat pula penganut umat beragama ada yang minoritas dan mayoritas. Pengertian umat beragama minoritas yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: “Golongan kecil (lawan dari mayoritas);

keadaan tidak besar atau tidak banyak, (penduduk paling kecil); hal belum dewasa; kelompok kecil atau sangat sedikit”¹⁸⁷.

Pengertian minoritas dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, adalah: “Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat dan karena itu, didiskriminasikan oleh golongan itu”.¹⁸⁸ Versi lain dalam “*Kamus English-Indonesian Dictionary*”, bahwa istilah minoritas berasal dari kata “*minority*”, yang berarti “golongan kecil” ataupun “laporan dari golongan kecil”.¹⁸⁹ Dengan demikian, dapat dipahami dari beberapa pengertian minoritas yang telah dikemukakan di atas adalah kelompok, penduduk, dan masyarakat, atau golongan sosial yang lebih kecil ataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak dan besar. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan kelompok minoritas adalah penganut umat beragama, baik Muslim dan non Muslim atau penganut ajaran agama Islam maupun penganut ajaran agama Kristen yang paling sedikit jumlah penduduknya dilihat menurut administrasi dan ajaran agama di Sumatera Utara.

Sedangkan pengertian mayoritas adalah “Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri-ciri khas tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain, yang tidak memperhatikan ciri-ciri itu; *usul itu disetujui oleh anggota koperasi, mutlak* pol jumlah suara terbanyak pemilih yang menyakinkan, dan yang dapat dikumpulkan di pemungutan suara untuk menentukan kemenangan”.¹⁹⁰ Dengan demikian, mayoritas¹⁹¹ mengandung arti kebalikan dari kata minoritas yaitu golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan golongan lain di satu masyarakat. Pengertian mayoritas dalam penelitian ini adalah penganut umat beragama, baik Muslim dan non Muslim yang paling banyak dan besar jumlah penduduknya dilihat menurut administrasi dan penganutnya.

Batasan mayoritas dan minoritas adalah terminologi sosiologis untuk merujuk kepada kuantitas individu yang berhimpun dalam suatu kesatuan ensitas. Sebagai sebuah konsep, atau paradigma. Istilah ini sering digunakan untuk membangun kerangka analitis relasi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Di samping

¹⁸⁷Pengertian minoritas di atas dapat merujuk pada Widodo, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Penerbit Absolut, 2002), hlm. 434.

¹⁸⁸Lebih rinci lihat, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.657.

¹⁸⁹Lihat, John M. Echols, “English-Indonesian Dictionary”, (terj.) oleh Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 381.

¹⁹⁰Lihat, Departemen Pendidikan, *Kamus*, hlm. 639.

¹⁹¹Istilah mayoritas dari kata Inggris “*majority*”, mengandung arti 1. Mayoritas, *leader*, pemimpin golongan mayoritas di Senat. 2. dewasa. *To attain o's m*, menjadi dewasa. 3. Kelebihan (*of votus*). 4. Sebagian besar. Lihat M. Echols, “*English*”, hlm. 370.

itu, pengertian minoritas dan mayoritas sesungguhnya sudah mengandung makna (*meaning*) politik, di mana yang satu merujuk kepada kumpulan-kumpulan atau pertemuan-pertemuan, dan rapat-rapat yang berjumlah banyak, dan lazimnya *supreme* dalam banyak hal. Sedangkan yang satu lagi merujuk kepada kumpulan atau pertemuan-pertemuan individu yang lebih sedikit, yang secara kualitas tidak mungkin lebih *supreme* dari yang mayoritas.

Kumpulan banyak individu dan kumpulan sedikit individu merupakan fakta sosiologis sebuah komunitas. Karena itu, sejatinya bila siapapun yang berhimpun dalam suatu kelompok manapun tetap memiliki hak, kewajiban, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala hal, dan persoalan. Dari adanya persamaan hak dan kewajiban di atas, maka batasan minoritas dan mayoritas menjadi lebih jelas. Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut soal jumlah atau kuantitas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal. Satu kelompok dikatakan sebagai minoritas, apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara yang signifikan jauh lebih kecil (sedikit) daripada kelompok lain dalam komunitas.

Dari sudut pandang ilmu sosial, pengetahuan minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota kelompoknya. Suatu kelompok akan dapat dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, perlindungan, dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri bila dibandingkan dengan anggota-anggota kelompok dominan atau mayoritas. Dengan demikian, bisa saja suatu kelompok secara kuantitas atau jumlah dari anggotanya merupakan mayoritas (dominan), akan tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil, dan lebih lemah daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit (minoritas).

Oleh karena itu, batasan minoritas tidak selamanya terkait erat dengan persoalan jumlah anggotanya, melainkan terkait juga dengan kekuasaan, kontrol dan pengaruh dalam komunitas. Sedangkan kelompok atau masyarakat mayoritas dimaknai sebagai sekumpulan besar manusia dengan karakteristik (kepentingan) relatif sama yang mendiami suatu wilayah atau pun daerah. Faktanya, masyarakat yang mendiami suatu wilayah tidak pernah memiliki karakter/kepentingan. Masyarakat perkotaan dikenal sebagai masyarakat yang heterogen atau pun beragam. Karena beragam kepentingannya inilah sering menyebabkan konflik dan pertentangan. Jadi, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku, agama, dan bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.

Isu munculnya kelompok minoritas dan mayoritas barangkali disebabkan karena persoalan politis saja di antara pemeluk ajaran agama masing-masing untuk maksud dan tujuan tertentu. Namun hal itupun bila dilihat dalam kaca mata sejarah politik Islam bahwa munculnya isu mayoritas dan minoritas tidak ada sama sekali. Karena dalam

literatur Islam istilah komunitas non-Muslim dalam pemerintahan Islam adalah “*Ahl al-Dzimmah*” (komunitas yang dilindungi) yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pemilihan istilah “dilindungi” memberikan konsekwensi kewajiban bagi pemerintahan Islam untuk melindungi (bahkan melayani-penerjemah) warga non Muslim dan dengan demikian kata “*dzimmi*” (dilindungi) memberikan kepastian terjaminnya keamanan serta keselamatan mereka, dan hal ini tidak bisa diartikan sebagai “ketidakberdayaan” atau pun “inferioritas”.
2. Istilah “dilindungi” berkaitan sangat erat dengan kehidupan kelompok non Muslim dalam pemerintahan Islam dimana negara bertindak sebagai pelindung serta memegang mandat yang patuh, dan tidak boleh berhianat atas kewajiban serta tanggung jawab.
3. Istilah “*Dzimmi*” yang tidak dapat dipersamakan dengan kata “minoritas”, jadi, bukan menempatkan komunitas non-Muslim dalam komunitas Muslim pada suatu posisi antagonis (saling berhadap-hadapan). Dengan demikian, relevansi di antara mereka tidak didasarkan kepada kebencian (sintemen) atau permusuhan, tetapi justru dapat menjalin hubungan damai, persaudaraan, cinta dan kasih sayang.

Sebaliknya, isu komunitas Muslim berada di negeri-negeri non Muslim seharusnya juga tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok minoritas. Istilah yang digunakan bagi kaum Muslimin di seluruh dunia adalah “*ummah*” yang merupakan konsep *multidimensional* yang tidak boleh dibatasi oleh ruang, waktu, ikatan dan ras. Istilah “*ummah*” tersebut paling tidak memiliki empat unsur utama yaitu:

1. Istilah “*ummah*” meliputi kaum Muslimin yang hidup di setiap zaman dan babakan sejarah, sejak datangnya Islam hingga akhir zaman (akhirat kelak).
2. Istilah “*ummah*” mencakup kaum Muslimin di seluruh dunia tanpa memandang batas geografis atau batasan wilayah.
3. Istilah “*ummah*” meliputi segala ras, warna kulit, atau bentuk tubuh.
4. Istilah “*ummah*” memperkokoh ikatan kerjasama di antara berbagai kelompok dan anggota masyarakat yang meliputi segala bidang kehidupan manusia, baik bersifat fisik, spiritualitas¹⁹², keuangan, dan sosial budaya.

Berdasarkan empat unsur utama di atas, bahwa istilah “*ummah*” yang dipahami kaum Muslimin terdiri dari orang-orang Non-Muslim di daerah-daerah atau di negeri-

¹⁹²Istilah “spiritualitas” dalam konteks wacana masa kini memiliki banyak arti bagi banyak orang, dan tak syak lagi, ia adalah sebuah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks dengan beragam makna yang berbeda. Menurut Seyyed Hossein Nasr dari cara dia memahaminya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa “Siapa saja yang memandang Tuhan atau Ruh Suci sebagai norma yang penting dan menentukan atau prinsip hidupnya bisa disebut “spiritual”. Lebih jelas baca, Seyyed Hossein Nasr, “Islamic Spirituality Foundations”, (terj.) Rahmani Astuti, *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 13.

negeri Islam, dan juga kelompok minoritas atau pun individu yang hidup di negeri-negeri non Muslim. Mereka semuanya membentuk “*ummah*” yang mengikat di antara mereka dalam suatu prinsip kesetaraan yang padu. Isu-isu seperti itu, tentu saja tidak harus menyimpangkan kita pada suatu pemahaman bahwa ajaran Islam tidak mengenal aspek-aspek kemanusiaan ke dalam berbagai bentuk pengertian minoritas dan mayoritas, karena Islam justru memperkenalkan paradigma atau konsepnya yang khas, sebagaimana telah diketahui bahwa Ke-Esa-an Tuhan merupakan satu-satunya landasan bangunan Islam yang bisa mengantarkan kepada lima landasan. *Pertama*; Kesatuan ajaran-ajaran-Nya. Oleh karena itu, Islam menolak dengan tegas sektarianisme agama yang didasarkan atas pengelompokan minoritas dan mayoritas, dengan demikian isu-isu tentang timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas dalam Islam tidak ada. *Kedua*; Kesatuan manusia, karenanya menolak rasionalisme minoritas dan mayoritas. *Ketiga*; Kesatuan sumber otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan, sehingga menolak kelompok politik minoritas dan mayoritas.

Meskipun demikian, latar belakang munculnya isu-isu minoritas dan mayoritas itu tetap ada anggapan dalam pemikiran kaum Muslim dan non Muslim, hal ini dapat dibuktikan dan hampir sepertiga dari satu milyar umat Islam di dunia tinggal dan berdomisili di negeri-negeri non Muslim. Dengan demikian, wajar bagi kaum Muslim memperkenalkan sebuah konsep logis tentang minoritas dan mayoritas sehingga kelompok-kelompok agama, sosial, dan politik minoritas dan mayoritas, baik Muslim maupun non Muslim dapat dilindungi dengan nilai-nilai keadilan, perdamaian, keharmonisan dan kerukunan. Sebenarnya Islam tidak mengenal isu-isu dan rasialisme minoritas dan mayoritas, karena kaum Muslimin tidak mengharapkan dilindungi dengan berdasarkan ketidakadilan. Islam mendukung praktik-praktik kehidupan nasional yang berdasarkan pada pengelompokan minoritas dan mayoritas. Atas dasar itu, kaum Muslimin tidak menginginkan perlindungan yang disertai dengan prasangka, karena mereka pun tidak menghendaki melakukan hal-hal yang sama.

Karena itu, kaum Muslimin tidak menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok yang menduduki posisi dominan, meskipun mereka misalnya kelompok yang mayoritas, maka mereka tidak menempatkan diri sebagai yang memiliki otoritas dengan hak-hak khusus untuk mengatur kelompok minoritas. Bahkan dalam keadaan demikian, kaum Muslimin harus tetap berkiprah sebagai pelindung bagi kelompok minoritas. Sebaliknya juga, bila kaum Muslim merupakan minoritas dalam sebuah negeri, wilayah dan daerah mereka pun mengharapkan kaum non Muslim sebagai pihak dominan atau mayoritas harus melindungi mereka dengan perlakuan yang sama.

E. Nalar Kerukunan di Puncak Etika Global

Di era global saat ini, manusia haus dan dahaga terhadap perdamaian dunia. Mereka sudah cukup lama membosani hubungan persengketaan dalam beragama. Padahal tidak ada suatu tatanan dunia yang sukses jika tidak dilengkapi dengan etika global. Etika global yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak lain adalah kemanusiaan universal, dalam istilah Islam disebut dengan *rahmatan lil alamin*. Artinya tidak ada perdamaian antarnegara tanpa adanya kerukunan antaragama, sudah barang tentu kerukunan yang bernapaskan nilai-nilai misi profetik. Sebab, harkat dan martabat manusia kontemporer sejatinya bukan diukur dan dinilai dari keberhasilan rampas merampas kebebasan dan saling berebut dominasi satu sama lain, melainkan terletak pada dan ditentukan oleh kemampuan umat beragama, bersama-sama secara jujur membina hubungan harmonis lintas keyakinan, membangun budaya damai dalam keragaman.

Sepanjang sejarah umat manusia, agama memiliki dua kutub menyangkut perdamaian dan kebrutalan. Di satu sisi, agama menjadi kontributor utama perang, pertumpahan darah, kebencian dan intoleransi. Tapi, di sisi lain, ia juga mengembangkan hukum dan gagasan yang telah menyediakan peradaban dengan komitmen kultural pada nilai-nilai kedamaian yang agung, meliputi empati, keterbukaan, dan kecintaan, pemihakan pada kaum tertindas, dan keadilan sosial. Paradigma humanis itu muncul apabila manusia menyadari bahwa dunia ini adalah rumah besar seluruh umat beragama untuk dijaga keseimbangannya dan memanfaatkan isinya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan masa depan bersama.

Moderasi dimaksudkan disini adalah yang sifatnya pertengahan atau *wasathiyah*, atau tidak terlalu ke sini dan tidak terlalu kesana. Berarti juga umat yang terbuka, toleran, menyongsong yang lain menjadi budaya *qabulul akhar* atau bisa juga disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*). Agama moderat bukanlah tanpa konsep dan landasan. Justru istilah itu muncul dengan dasar teologis Qur'ani yang sangat kuat. *Wasathiyah* merupakan bagian dari ajaran Islam yang universal, boleh dikatakan inti ajaran Islam. *Wasathiyah* memiliki padanan dengan istilah Arab *ummatan wasathan* atau *al-din al-wasath* (QS. Al-Baqarah:143).

Moderat bisa juga diartikan terbuka dengan siapapun dan siap bekerjasama dalam membangun kemaslahatan umat, dengan prinsip-prinsip : Toleransi, Pembebasan dari penindasan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan (*ta'adudiyah*) yang merupakan kehendak Tuhan, dan dibangun perdamaian di dalamnya.

Kita ambil contoh dalam tradisi Islam klasik, masa Rasulullah Saw. dimana beliau sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala agama dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan tentram di Madinah, Ia mengadakan perjanjian persahabatan serta perdamaian dengan kaum Yahudi. Perjanjian persahabatan dan perdamaian itu

kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu di tetapkan serta diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang. Salah satunya adalah kemerdekaan untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal itu merupakan salah satu perjanjian politik yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Saw.

Dari rekaman sejarah tersebut nampaknya tidak pernah terjadi ketegangan dan konflik yang berbau agama antara kaum muslim dengan kaum non muslim, bahkan Rasulullah saw. benar-benar melindungi mereka. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya: "Dari Abdullah Ibn Amr, dari Rasulullah saw. berkata : *Barangsiapa membunuh seseorang yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin (kafir dzimmi) maka tidak akan dapat mencium bau surga, dan bau surga dapat ditemukan dari jarak tempuh perjalanan 40 (empat puluh) tahun* (H.R. Bukhari)

Peran moderasi pemerintah sebagai penguasa dan pemuka agama sangat signifikan dan penting diberdayakan. Sinergisitas antara mereka senantiasa dipelihara dan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Tanpa sinergisitas tersebut, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dipandang tidak lengkap dan bahkan dapat menjadi gagal. Karenanya penghormatan terhadap pemuka agama sebagai *premus interparus* perlu dibudayakan, sebab nasehat dan petuah mereka senantiasa didengar dan dituruti. Oleh karena itu pembinaan kaderisasi ketokohan dan keulamaan di tengah masyarakat plural menjadi bagian terpenting dari proses pembangunan manusia seutuhnya.

Pada dasarnya semua agama mempunyai misi solidarity, apalagi Islam. Islam adalah suatu agama besar dan terkemuka di dunia, baik dipandang dari segi jumlah penduduknya dan terutama sekali dari segi pengaruh yang dimiliki ajaran-ajarannya terhadap tingkah laku, sikap dan pemikiran orang-orang yang percaya kepadanya. Ia bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup berbagai segi dan aspek kehidupan manusia dan hubungan antara sesamanya. Islam muncul dan dapat dipertahankan karena membawa keselamatan umat sejagat dan menciptakan solidaritas tinggi terhadap komunitas lain. Di dalam Islam banyak dijumpai ajaran kasih sayang, toleransi, dan *solidarity* yang telah dibangun oleh peradaban profetik. Artinya, agama itu hadir menyelamatkan dan meninggikan martabat manusia. Jika terjadi diskriminatif, pembantaian, pemusnahan komunitas, genosid entitas atas nama agama, sesungguhnya orang tersebut tidak beragama.

Fungsi agama adalah kaidah-kaidah pembebasan manusia dari kekerasan dan menuju jalan Tuhan. Agama Islam sebagai agama universal membawa keselamatan dan kedamaian manusia lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat di bawah bendera tauhid yang penuh dengan kasih sayang (*marhamah*). Jika ada yang mengatakan

bahwa terorisme, anarkisme, separatisme, dan sekarang gerakan ISIS yang massif itu adalah ajaran Islam, tentu sangat keliru. Sebab Islam menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminatif. Oleh kerennanya, jangan anda gegabah memberikan *labeling* negatif pada suatu agama atau melakukan kriminalisasi simbol-simbol suci agama, jika anda tidak ingin dikatakan sebagai *konflik maker*.

Memang aneh, agama yang seharusnya membawa kedamaian, keselamatan dan membawa misi suci kemanusiaan, justru umatnya kok jadi bringas, menakutkan dan membawa bencana bagi manusia. Mengapa itu terjadi ?. Dalam komunitas Islam misalnya, hal itu terjadi karena etika yang dipakai bukanlah etika global, semangat Al-Qur'an yang universal dan *rahmatan lil 'almin* itu, tapi etika golongan, kelompok dan fanatisme mazhab tanpa alasan. Setiap golongan merasa bangga dengan dirinya. Disamping adanya konspirasi politisasi agama dan Islamophobia. Untuk menghindari hal semacam itu, kita buang etika golongan, dinasti atau etika ras, kita ganti dengan etika global. Etika Al-Qur'an sebenarnya; *Innamal mukminuna ikhwatun*. Artinya, orang beriman itu bersaudara, family dan satu keluarga yang saling membesarkan. Tidak hanya itu, Islam juga menghargai dan menghormati komunitas lain, asal tidak mengganggu dan mengancam eksistensinya. (QS. Yunus 99, Al-Mumtahanah: 8-9, al-Hujarat :13).

Di dunia global saat ini justru diperlihatkan keganasan dan kerakusan manusia terhadap sesama "*homo homini lupus*", menjadi pemandangan yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Satu kelompok membunuh kelompok yang lain secara separatis tanpa pri kemanusiaan. Jika kita berpikir agak lebih jauh lagi, penyebabnya karena manusia itu belum dewasa dalam beragama. Beragama belum sampai pada posisi *intellectual mutuality*. Menarik kalau dihubungkan dengan Islam, sepanjang sejarah orang Islam dikenal baik oleh kalangan Islam maupun non-Islam, toleransi sosialnya terhadap umat non-Islam begitu tinggi. Benar apa yang dikatakan Bertrand Russel, filosof Inggris terkenal, bahwa; penyebab pada seratus tahun pertama abad VII M. Islam berkembang dengan cepat adalah toleransi sosial "*solidarity*" nya terhadap umat yang beragama lain begitu tinggi yang tidak ada taranya dalam sejarah. Dalam seratus tahun saja kekuasaan Islam telah terbentang dari Spanyol sampai sungai Hindus.

Orang beriman diharuskan menghargai dan menghormati semua nabi utusan Allah, diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain baik dalam tindakan, maupun perkataan, dan saling melindungi, menjaga keselamatan rumah ibadah setiap umat beragama, tidak menzaliminya, memelihara kehormatan semua umat beragama, hak hidupnya, memperbaiki masa depannya. Sejarah Peradaban agama-agama mencatat bahwa prasangka buruk dan tindakan diskriminatif terhadap suatu komunitas umat beragama, tak terpisahkan dari upaya umat lain untuk mengkompanyekan stigma yang

merendahkan, dituduh intoleransi, lalu menguasai sumber ekonomi, dan bila perlu menggenosida dan mengusirnya dari tanah kelahirannya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.

Jika dicermati catatan historis dari Dr. Jerald F. Dirks dalam karyanya "*The Abrahamic Faiths*". Secara Historisitas membuktikan bahwa pada awal abad ke-11 M Paus Urbanus II secara resmi mendeklarasikan perang Suci melawan umat Islam di Timur Tengah, dan mengecap seluruh muslim sebagai ras terkutuk, sehingga menyulut fanatisme dan kebencian terhadap Muslim. Sepanjang abad ke-12 dan 13 terus digaungkan kebencian terhadap muslim dengan lahirnya sebuah karya dari penyair Normandia yang kemungkinan ditulis oleh Turolde "*La Chanson de Roland*" mempersonifikasikan muslim sebagai penjahat dan penyembah berhala. Yang kemudian menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kalangan jiwa-jiwa terkutuk yang menyebabkan stigma agama. Sesungguhnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, andai saja mereka memahami dan mengamalkan etika global.

Heterogenitas menjadi rahmat, apabila keragaman itu tersusun, tertata dengan baik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan masyarakat. Tapi bisa jadi bencana, bila kita saling memaksakan kehendak dan mendeskreditkan, menghina dan membicarakan perbedaan, sehingga berubah menjadi permusuhan. Banyak perang yang mengatasnamakan agama, sehingga agama lebih menimbulkan keonaran daripada ketenteraman. Selain menawarkan janji-janji, agama juga bagaikan kaca mata orang beriman untuk memandang dan menafsirkan dunia sekitarnya serta mengonstruksi realitas dunia. Sekalipun secara fisik tidak kelihatan, keyakinan dan paham agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang ataupun masyarakat. Untuk itulah sedianya pemerintah menegakkan regulasi yang berkeadilan dan para pemuka agama menampilkan ajaran agama yang moderat dan diperlukan upaya serius mengimplementasikan etika global untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Sejatinya pemerintah dan pemuka agama maupun umat beragama berada pada puncak etika global dalam memandang keragaman, yang merupakan sebuah keniscayaan dan tidak bisa dinafikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan berbagai macam keyakinan, mazhab dan agama. Itu semua pada hakikatnya merupakan tafsiran manusia terhadap pesan suci dan sesuatu yang dianggap sebagai realitas Mutlak. Oleh karenanya, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, ia senantiasa mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Kita tidak ingin mengatasnamakan ajaran agama, kemudian mengorbankan kerukunan beragama, dan pada saat yang sama, kita tidak ingin menciptakan kerukunan dengan mengorbankan agama. Yang kita inginkan adalah terciptanya kerukunan berdasarkan misi kemanusiaan universal. *Wa Allahu a'lam bi as-shawab.*

BAB VI

MERAUAT KERAGAMAN MENGAWAL NKRI

F. Nalar Profetik dan *Ahlul Kitab*.

Ada beberapa istilah yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis untuk menunjukkan nama suatu agama selain Islam, yaitu *ahl al-kitâb* (baca: ahlul kitâb).¹⁹³ Yakni konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain yang memiliki kitab suci. Dalam Alquran ditemukan kata *ahl al-kitâb* sebanyak tiga puluh satu tempat tersebar di beberapa surah dengan berbagai derivasi dan penunjukannya. Itu sekaligus membuktikan keunggulan konsep Alquran dimana kita semakin perlu untuk memahaminya secara komprehensif dan dalam kaitan sistematikanya yang lengkap. Demikian juga halnya di dalam Hadis, cukup banyak ditemukan term *ahl al- kitâb*, dengan berbagai variasi aplikasinya. Dengan demikian, konsep tentang *ahl al-kitâb* menurut Alquran dan Sunnah itu juga dapat dijabarkan dalam konteks zaman mutakhir guna memberi respons yang tepat dan berprinsipil kepada tantangan sosial yang timbul. Masalahnya sekarang adalah siapa ahlul kitâb itu dan bagaimana konsep Hadis tentang ahlul kitâb tersebut ?

¹⁹³ Beberapa versi membaca *ahl al-kitâb*; ada yang membaca dengan ahlul kitâb. Lihat, Tim Penulis IAIN Syahid, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, 1992, hlm. 72. dan ada pula yang membacanya dengan *ahli kitab*. Lihat ; Jejen Musfah, *Indeks Al-Quran Praktis*, IKAPI, Jakarta, 2007, hlm. 10. Dalam makalah ini Penulis menggunakan kata; ahlul kitâb.

Dalam makalah ini akan dibahas konsep ahlul kitâb dalam Hadis, khususnya Hadis *Sahih Muslim* dan *Sahih Bukhari*, walaupun tidak menafikan hadis-hadis lain, di samping ayat Alquran yang berkenaan dengan pokok pembahasan dan beberapa pendapat ulama yang berkompeten untuk dijadikan landasan analisis dalam tulisan ini.

Sebutan ahlul kitâb dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada kaum Muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut Kitab Suci, yaitu Alquran. Ahlul kitâb tidak tergolong kaum Muslim, karena mereka tidak mengakui, atau bahkan menentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan ajaran yang beliau sampaikan. Kendatipun mereka menentang, namun ahlul kitâb tidak dipaksa memeluk Islam, dan malah mendapat penghormatan dan perlindungan dari pemerintah Islam. Lalu, siapa saja yang tergolong ahlul kitâb itu ?

Ketika membaca Hadiâs yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, penyebutan ahlul kitâb konotasinya tertuju kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab *Sahih Muslim*, seperti pada bab tentang pemberian salam kepada ahlul kitâb yaitu, berbunyi : Dari Anas r.a., katanya:”Para sahabat Nabi Saw. bertanya kepada beliau, Jika ahlul kitâb memberi salam kepada kami, bagaimana kami menjawabnya ?” Jawab beliau, “Ucapkan: *Wa ‘alaikum*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari matan hadis di atas dapat dipahami bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ucapan salam yang dilontarkan ahlul kitâb kepada mereka, lalu dengan ucapan apa untuk membalasnya, maka Rasulullah menjawab jawablah dengan ucapan *wa ‘alaikum*. Satu hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapa ahlul kitâb yang dimaksud dalam hadis tersebut, karena tidak dinyatakan secara tegas, apakah ahlul kitâb itu Yahudi dan Nasrani saja. Tetapi ada hadiâs lain yang melarang mendahului orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Sabda saw : Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah Saw bersabda; “Janganlah kamu mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam.” (HR. Muslim)

Kedua hadis di atas adalah hadis yang terdapat dalam kitab *Sahih Muslim* dan *Sahih Bukhari* pada bab yang sama yaitu bab tentang pemberian salam kepada non-Muslim. Hadis pertama menyebut ahlul kitâb dan pada hadis yang kedua disebut dengan tegas Yahudi dan Nasrani. Karena kedua ungkapan ini masih dalam satu pokok bahasan, maka penulis memahami hal itu menjadi satu rangkaian, artinya ahlul kitâb yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani.

Walaupun pokok bahasan dalam makalah ini adalah tentang ahlul kitâb, barangkali tidak salah jika dinukilkan juga konsekuensi implikasi berkenaan dengan masalah mengucapkan salam terhadap interaksi antarumat beragama. Yang mana jika diperhatikan hadis Nabi melalui Anas ibn Malik yang mengatakan bahwa Nabi

berkata: “Apabila ahlul kitâb mengucapkan salam, maka jawablah; *wa ‘alaikum*. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa orang-orang Muslim wajib menjawab salam yang diucapkan oleh ahlul kitâb. Meskipun dalam hadis ini yang disebut adalah ahlul kitâb, tentu saja salam yang wajib dijawab oleh orang-orang Muslim bukan hanya salam ahlul kitâb tetapi juga salam orang-orang non-Muslim lain.

Hadis lain yang dijadikan dalil untuk larangan mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim adalah hadis yang menceritakan bahwa sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad saw. sambil mengucapkan “*Assamu ‘alaikum* (kehinaan/kematian bagimu). Melihat peristiwa itu, Aisyah, istri Nabi, mengucapkan “*wa’alaikumussam walla’nah*” (Dan bagimu kematian dan laknat) kepada para tamu Yahudi yang tidak sopan itu. Nabi menegur Aisyah, perlahan-lahan hai Aisyah. Sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam semua urusan. Maka Aisyah bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan ? Rasulullah menjawab, “Aku telah mengucapkan *wa ‘alaikum* (Bagimu kehinaan/kematian). Lihat lampiran hadis nomor 4027.

Memahami matan hadis tersebut, ternyata Nabi menegur Aisyah agar tidak bertindak kasar dan tidak melaknat para tamu yang tidak sopan itu karena Allah mencintai keramahan dan kelembutan. Kekerasan dan ketidaksopanan tamu tidak boleh menghilangkan keramahan dan kelembutan penerima tamu. Artinya Islam harus menampilkan wajah yang ramah dan lembut, sejalan dengan firman Allah, berbunyi :

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. 25:63).

Sementara itu ada ulama yang berpendapat bahwa hukum mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim adalah haram, terlarang. Larangan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. berkata: “*Jangan kamu memulai (mengucapkan) salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, desaklah dia ke pinggir.*”¹⁹⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim melalui Abu Hurairah. Hadis ini tidak hanya melarang memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyuruh orang-orang Muslim untuk bersikap kasar terhadap mereka, yaitu dengan mendesak siapa pun di antara mereka ke pinggir jalan. Hadis ini menampilkan Islam dengan wajah sangar dan kasar, bertentangan dengan Alquran di atas. (QS.25:63).

¹⁹⁴ *Sahih Muslim: Kitab al-Salam, Bab al-Nahy ‘an Ibtida’ Ahlul Kitâb*, No. 4030.

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah sering dipersoalkan kerana beberapa alasan. Pertama, ia terlalu sering meriwayatkan apa yang sebenarnya tidak pasti diucapkan oleh Rasulullah saw. Kebiasaan ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakhati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kedua, diduga keras bahwa ia adalah orang yang pelupa dan ia mengakui sifat pelupa ini. Tetapi berusaha menutupi kelemahan itu dengan kisah ajaib bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menyuruhnya membenatngkan jubahnya bilau beliau berbicara dan memungutnya kembali setelah beliau selesai berbicara. Ia mengaku bahwa dengan cara aneh ia tidak lagi melupakan sesuatu pun. Ketiga, terlalu banyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam waktu yang singkat. Ia meriwayatkan 5300 hadis hanya dalam waktu tiga tahun. Aisyah yang jauh lebih lama hidup mendampingi Nabi meriwayatkan tidak sampai separuh jumlah itu. Keempat. Ia adalah orang pemalas yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selain mengikuti Rasulullah ke mana pun beliau pergi. Ia pernah menolak pekerjaan yang ditawarkan oleh Umar bin al-Khattab.¹⁹⁵

Selanjutnya dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, ketika membahas bab mengenai iman, penyebutan ahlul kitâb itu berkonotasi selain Yahudi, karena dilihat dari makna matannya sedikit berbeda, yaitu ketika menyebut Yahudi dan ahlul kitâb. Ungkapan ini bisa dipahami bahwa Yahudi itu berbeda dengan ahlul kitâb, karena ada kata (*dan*) *و* dalam kalimat tersebut. Artinya, Yahudi yang disebutkan dalam Hadis ini jelas ditujukan kepada kaum Yahudi saat itu, jadi penyebutan ahlul kitâb ditujukan kepada siapa ?. Boleh jadi ditujukan kepada bukan Yahudi, yaitu Nasrani, Majusi, Sabi’in¹⁹⁶ dan sebagainya. Hadis itu, berbunyi :

Dari Barra’ r.a. bahwasanya Nabi Saw. Ketika pertama sampai di Madinah beliau singgah di nenek-nenek beliau dari kalangan Anshar. Beliau shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Beliau gemar kiblatnya itu menghadap ke Baitullah (Ka’bah), dan shalat ‘Ashar, dan suatu kaum shalat bersama beliau. Lalu keluarlah seorang laki-laki

¹⁹⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *al- Isâbah fi Tamyiz as-Sahâbah*, Maktabah al-Dirasah al-Islamiyah Dar al-Nahdah, Kairo, tt, vol.7, hlm. 432 yang dikutip Tim Paramadina, *Fiqh Lintas Agama*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 70-71.

¹⁹⁶ Penelitian-penelitian belakangan memperlihatkan adanya sedikit peninggalan suatu masyarakat agama yang berjumlah sekitar 2000 orang di bagian hilir Irak, dekat Basrah. Dalam bahasa Arab mereka disebut *Subbi* (jamak *Subba*). Juga mereka disebut orang-orang **Sabia** dan **Nasorea**, atau **Mandaea**. Mereka mendakwahkan diri golongan Gnostik atau Yang mengenal Kehidupan Agung. Pakaian mereka serba putih. Kitab suci mereka **Ginza** dalam logat bahasa Aram. Mereka mempunyai teori tentang gelap dan terang seperti dalam ajaran Zoroaster. Orang-orang *Sabi* di Harran, yang dalam tahun 830 M.menarik perhatian Khalifah Makmun ar-Rasyid karena mereka berambut panjang dengan pakaian yang khas, barangkali mereka memakai nama itu seperti yang ada di dalam Alquran supaya mereka berhak menuntut kedudukan sebagai Ahli Kitab. Baca; Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran, Text Translation and Commentary*, Kutub Khana Ishayat ul-Islam, Delhi, India, 1983, hlm. 33.

yang shalat bersama beliau dan melewati penghuni masjid dan mereka sedang ruku' lalu dia berkata: Saya bersaksi dengan nama Allah, sungguh saya telah shalat bersama Rasulullah saw. ke arah Baitullah sebagaimana kaum itu. Dulunya orang-orang **Yahudi dan Ahli Kitab** senang kepada mereka (kaum muslimin) karena beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Ketika beliau mengalihkan wajah ke arah Baitullah maka mereka (orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab) mengingkari hal itu. (HR. Bukhari)¹⁹⁷

Dari Hadis di atas timbul pertanyaan, apakah ada ahlul kitâb di luar Yahudi ?. karena kalimat hadis tersebut menunjukkan dua kelompok umat yaitu Yahudi dan ahlul kitâb, artinya Yahudi satu kelompok dan ahlul kitâb kelompok lain. Bisa juga dipahami bahwa Yahudi bukan ahlul kitâb, karena ada kata **و** (dan) diantara Yahudi dan ahlul kitâb, hal itu menunjukkan adanya perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Berarti dilihat dari aspek matan hadis tersebut mengandung makna bahwa Yahudi bukan ahlul kitâb, dan malah yang di luar Yahudi disebut ahlul kitâb. Sementara Alquran tidak menyebutkan secara eksplisit tentang siapa ahlul kitâb, Yahudi atau Nasrani. Namun, Alquran menyebutkan beberapa kelompok agama, yaitu kaum Majusi dan Sabi'in, satu kelompok dengan Yahudi dan Nasrani, yang dalam konteksnya memberi kesan seperti tergolong ke dalam ahlul kitâb, dan tidak termasuk muysyrikin. Sebagaimana firman Allah (QS.22:17), berbunyi :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS.22:17)

Digabung dengan ketentuan dalam praktik Nabi saw bahwa beliau memungut jizyah dari kaum Majusi di hajar dan Bahrain, kemudian praktik 'Umar bin al-Khattab memungut jizyah dari kaum Majusi Persia serta 'Usman bin Affan memungut jizyah dari kaum Barbar di Afrika Utara, maka banyak ulama yang menyimpulkan adanya golongan ahlul kitâb di luar Yahudi dan Nasrani. Sebab jizyah dibenarkan dipungut hanya dari kaum ahlul kitâb (yang hidup damai dalam negeri Islam), dan tidak dipungut dari golongan yang tidak termasuk ahlul kitâb seperti kaum musyrik.

Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, ada sebuah hadîs dari Ibn Syihab, ia berkata :”Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah saw. memungut jizyah dari kaum Majusi Bahrain, dan bahwa 'Umar bin al-Khattab memungut dari kaum Majusi Persia, dan bahwa 'Usman bin Affan memungut dari kaum Barbar. Dalam Hadîs lainnya, 'Umar bin al-Khattab membicarakan kaum Majusi, kemudian ia berkata :”Saya tidak tahu,

¹⁹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz.I, Maktabah An-Nashriyah, ttp, hlm. 82.

bagaimana aku harus berbuat terhadap mereka ? Maka Abdurrahman bin ‘Auf menyahut; “Aku bersaksi sungguh telah ku dengar Rasulullah saw. bersabda, “*Perlakukanlah mereka sama dengan perlakuan terhadap ahl al-kitâb.*”¹⁹⁸

Rasyid Rida menerangkan bahwa dengan menyebutkan pengertian ahlul kitâb sebenarnya tidak boleh dibatasi hanya kepada kaum Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga meliputi kaum Sabi’in, Majusi, kaum Hindu, Budha dan Konfusius.¹⁹⁹ Ia mengambil pemahaman dari ungkapan Alquran yang menyebut para penganut agama-agama terdahulu, kaum Sabi’in dan Majusi, dan tidak menyebut kaum Hindu, Budha dan pengikut Konfusius karena kaum Sabi’in dan Majusi dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mula-mula Alquran, karena kaum Sabi’in²⁰⁰ dan Majusi itu berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain, dan mereka (orang-orang Arab) belum melakukan perjalanan ke India, Jepang, dan Cina sehingga tidak mengetahui golongan yang lain. Tujuan ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal oleh bangsa Arab, sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing dengan menyebut golongan yang tidak dikenal oleh orang yang menjadi sasaran pembicaraan itu di masa turunnya Alquran, berupa penganut agama-agama yang lain, padahal mereka mempunyai shuhuf, seperti shuhuf Ibrahim..

Penulis tidak sependapat dengan Rasyid Ridha yang terlalu jauh menafsirkan ayat Alquran tentang ahlul kitâb, padahal Alquran dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan siapa ahlul kitâb. Oleh karena itu, penulis cenderung memahami pengertian ahlul kitâb yang terdapat dalam Hadis yang telah diuraikan terdahulu, yaitu penganut Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Ini berdasarkan penggunaan istilah Yahudi dan Nasrani pada bab Hadis yang sama yaitu bab tentang ahlul kitâb. Kemudian didukung oleh Alquran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani (QS. 6:156).

Untuk menjawab pertanyaan tentang siapa ahlul kitâb yang dimaksud dalam Hadiî, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, agaknya tidak dapat dimaknai secara kesendirian *term* tersebut, akan tetapi perlu *dimunasabahkan* dengan

¹⁹⁸ سنوایهم سنة اهل الكتاب يقول: Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, bab Zakat, Hadis ke-42. Sebagian ulama menilai Hadis tersebut berstatus *mursal* yakni sahabat Nabi yang mendengar/menerima dari beliau tidak disebut dalam rentetan transmisi riwayatnya, dan jika demikian itu halnya maka hadis tersebut dinilai oleh sementara pakar sebagai tidak dapat dijadikan argumentasi keagamaan. Baca ; Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung, hlm. 35.

¹⁹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid VI, ttp, hlm. 193.

²⁰⁰ Sebuah kelompok etnis di Harran di sebelah utara Mesopotamia (sekarang dinamakan Altinbasak, wilayah bagi dari Turki sebelah selatan yang berdekatan dengan urfa, yang banyak atau sedikitnya merupakan paganisme Hellenistik yang berakar pada agama-agama di babylonia yang pernah mengklaim diri sebagai Sabi'an sebagai cara untuk menghindarkan tuduhan terhadap keyakinan mereka sebagai keyakinan non-Islam. Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, Universitas Columbia New York, 1988, hlm. 345. Baca; Rasyid Ridha, *Op.cit.*, hlm. 193.

ayat-ayat Alquran yang berkenaan tema kajian agar didapatkan data yang akurat. Di samping berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Term ahlul kitâb dalam Alquran secara keseluruhan disebut sebanyak 31 kali. Term ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani.²⁰¹ Secara keseluruhan term-term ini muncul pada ayat-ayat yang masuk kategori *Madaniyah*, dan hanya satu ayat yang *Makiyyah*, yakni:

“Dan janganlah kamu berdebat dengan *ahlul kitâb*, melainkan cara paling baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: ‘Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri’,” (QS. al-Ankabût: 46).

Pada umumnya, ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini merujuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani.²⁰² Di antara term ahlul kitâb yang ditujukan pada orang-orang Nasrani terdapat pada ayat yang mengungkapkan keteguhan sebagian ahlul kitâb terhadap ajaran agamanya, dan di antara mereka ada yang menentang Nabi saw. Ini artinya, ahlul kitâb mempunyai sikap yang berbeda; ada yang keras dan ada pula yang lunak. Secara umum, penolakan mereka kepada Nabi digambarkan bahwa mereka tidak akan merasa senang sebelum Nabi mengikuti agama mereka. (QS.2:120). Ini adalah sesuatu yang cukup logis, karena Nabi membawa agama lain daripadanya dan bukan keturunan bani Israel, yang bagi mereka merupakan tantangan kepada agama yang sudah mapan, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Sementara mereka itu masing-masing mengaku agamanya tidak saja yang paling benar atau satu-satunya yang benar, tapi juga merupakan agama terakhir dari Tuhan.

Walaupun begitu, Alquran juga menyebutkan bahwa dari kalangan kaum ahlul kitâb itu ada kelompok-kelompok yang sikapnya terhadap nabi dan kaum Muslim adalah baik-baik saja, bahkan ada yang secara diam-diam mengakui kebenaran yang datang dari Nabi saw., yaitu:

“Dan sesungguhnya di antara ahlul kitâb ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, berendah hati kepada Allah dan tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya,” (QS. Âli Imrân: 199)

²⁰¹ Muhammad Fu'âd Abd al-Bâqî , *Mu'jam, al-Mufahras li Alfazd al-Qur'an*, Nur Asia, Indonesia, tth, hlm. 875-876.

²⁰² Muhammad Husain al-Tabâthabâ'î, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*,: Mu'assasah al-î li al-Mathbû'at, Beirut, 1983 M, juz XVI, hlm. 137

Ayat ini adalah salah satu di antara sekian tanggapan positif Alquran terhadap orang-orang Naşrani. Turunnya ayat ini dilatarbelakangi oleh kematian Raja al-Najasyî dari Ethiopia yang sebelumnya telah menyatakan diri menerima ajaran yang dibawa oleh Muhammad saw.²⁰³ Di samping tanggapan-tanggapan yang bersifat simpatik terhadap kaum Nasrani, banyak pula ungkapan ahlul kitâb yang bernada kecaman dan bahkan ancaman terhadap orang-orang Nasrani. Di antaranya terungkap pada ayat Alquran yang bernada kritik terhadap kepercayaan kaum Nasrani yang mensucikan Yesus (nabi Isa as.) secara berlebihan, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan, sebagaimana tertuang dalam ajaran Trinitas (QS. an-Nisâ': 171; al-Mâ'idah: 77).

Dalam umat Islam, masalah ini merupakan kerumitan dan sampai sekarang menjadi diskursus serupa di semua kelompok agama. Namun adanya teks suci maupun Hadis yang dapat dibaca dan secara lahiriah menunjukkan makna tersebut, sangatlah penting untuk mempertimbangkannya dengan serius. Ada yang mengatakan bahwa seluruh umat yang menerima ajaran kitab Suci dari Allah yang dibawa oleh para Nabi adalah ahlul kitâb, baik Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lain. Artinya, siapaun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitâb, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada *shuhuf* Ibrahim atau Zabur (yang diberikan kepada Nabi Daud as) saja, maka iapun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlul kitâb.²⁰⁴

Pendapat yang lain menyatakan bahwa orang yang menganut selain dari agama yang lurus dan syariat Islam, yang mengaku mempunyai syariat dan hukum, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang memang mempunyai kitab suci seperti Taurat dan Injil.; mereka ini disebut Alquran dengan nama ahlul kitâb. Kelompok kedua adalah mereka yang mempunyai kitab yang serupa dengan kitab suci seperti kaum Majusi dan Manu. Shuhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim telah diangkat kembali karena ulah umat Majusi sendiri. Dengan kelompok kedua ini, umat Islam diperbolehkan melakukan perjanjian damai; mereka disetarakan dengan penganut agama Yahudi dan Naşrani karena mereka sama dengan ahlul kitâb. Tetapi, tidak halal untuk mengawini perempuan dari kalangan mereka dan memakan sembelihan mereka, karena kitab suci yang mereka pakai telah diangkat.

²⁰³ Diceritakan, bahwa ketika Nabi mendengar kematian Raja al-Najasyî, beliau kemudian mengajak para sahabat untuk mensalati dan memintakan ampun kepada Allah, lihat Abu Husain Ali ibn Ahmad al-Wâhidî, *Asbâb an-Nuzûl al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1991, hlm. 93-94

²⁰⁴ Lebih jauh Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpandangan bahwa jika ada suatu kelompok hanya mempercayai kitab Zabur dari Nabi Dawud, maka tergolong Ahli Kitab. Lihat Abu al-'Ainain Badran, *Alâqah Baina al-Muslimîn wa Ghair al-Muslimîn*, Mu'assasah Shahab al-Jamiah, Iskandariyah, 1984, hlm. 34. Bandingkan dengan Muhammad Galib, *Ahlul Kitab Makna dan Cakupannya*, Paramadina, Jakarta, 1998, hlm. 29-31.

Dengan demikian, term ahlul kitâb berlaku untuk umat Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapa pun,²⁰⁵ Memang secara rasio, kalau tidak boleh mengawini perempuan-perempuan *ahl al-kitâb* (Yahudi dan Nasrani), mengapa dikatakan Alquran (QS.5:5) boleh menikahi wanita ahlul kitâb ?. Kalaupun ada yang mengharamkannya, menurut penulis bukanlah dilarang, akan tetapi lebih memandang kemashlahatannya, artinya jika mungkin dihindari itu lebih baik.

Di samping dua pendapat di atas, ada juga mengatakan bahwa ahlul kitâb hanya berlaku untuk komunitas Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'îl, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Naşrani. Alasannya antara lain adalah bahwa Nabi Musa dan isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain, (juga karena adanya redaksi *min qablikum* [sebelum kamu] pada ayat yang membolehkan perkawinan itu.²⁰⁶ Namun, Ibn Kaşir dalam tafsirnya menginformasikan bahwa Abu Sawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (w.860) yang merupakan salah seorang pengikut Imam as-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal, keduanya berpendapat bahwa sembelihan orang-orang Majusi dapat dimakan dan wanita-wanita mereka pun dapat dikawini.²⁰⁷

Terjadinya diskursus dan perbedaan pendapat tersebut, karena Alquran tidak menyebutkan dengan tegas bahwa golongan-golongan agama selain yahudi dan nasrani adalah ahlul kitâb. Padahal golongan Majusi dan Sabi'in memiliki kitab suci atau yang serupa itu, sama halnya dengan golongan Budha, Hindu dan Kongfuzhu. Akibatnya banyak kalangan ulama Islam yang langsung memasukkan mereka ini ke dalam golongan kaum musyrik, padahal Alquran dan Hadis jelas membedakan antara kaum musyrik dengan kaum majusi dan Sabi'in.

Menurut Rasyid Rida, Alquran hanya menyebutkan kaum Majusi dan Şabi'in karena kedua golongan itu sudah dikenal orang Arab zaman itu, di Irak dan di Bahrain. Sedangkan kaum Budhis, Hindu dan Khonghucu tidak dikenal, karena orang Arab itu, kecuali sedikit sekali, belum pernah ke India dan Cina. Namun menurutnya lebih lanjut, maksud Alquran telah tercapai dengan menyebutkan golongan-golongan yang dikenal masyarakat Arab zaman itu, dan tidak perlu membuat keterangan tentang hal-

²⁰⁵ Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Thabârî dan al-Syahrastâni, Ibn Jarir al-Thabârî, *Tafsir al-Thabârî*, Musthafa Babi al-Halabi: Kairo, 1954, juz IV, hlm. 102. bandingkan dengan as-Syahrastâni, *al-Milâl wa an-Nihâl*, Dar al-Fikr: Beirut, t.th, hlm. 209.

²⁰⁶ Pendapat ini diwakili Imam Syafi'i, sebagaimana diungkapkan oleh M.Qurash Shihab, ulama Syafi'iyah membagi komunitas Yahudi dan Nasrani menjadi dua, Isra'ili dan non Isra'ili. Quraisih Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan: Bandung, 1996, hlm. 36

²⁰⁷ Lihat; *Tafsir Ibn Kaşir*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, yaitu ketika menafsirkan Alquran surat al-Maidah ayat 5.

hal yang belum mereka kenal. Karena itu, Rasyid Rida memasukkan penganut agama selain *samawi* sebagai ahlul kitâb termasuk Hindu, Budha, Shinto dan lain-lain.²⁰⁸

Oleh karena itu, menurut Rasyid Rida, penilaian sebagai ‘musyrik’ tidak dapat dikenakan kepada siapa saja yang menolak Nabi Muhammad saw. juga tidak kepada siapa saja selain kaum Yahudai dan Naşrani yang mereka ini dalam Alquran dengan tegas disebut sebagai ahlul kitâb. Bagi Rasyid Rida, mengikuti pendapat kaum salaf dan sesuai dengan sasaran pembicaraan Alquran pada waktu diturunkan, pengertian kaum ‘musyrik’ ialah para penyembah berhala kalangan Arab jahiliyah, karena mereka memang sama sekali tidak mempunyai kitab suci atau yang serupa itu. Kemudian dianalogikan dengan orang-orang arab musyrik itu, maka setia golongan manusia yang jelas tidak mempunyai kitab suci dapat disebut sebagai ‘musyrik’. Demikian pula dengan pengertian ahlul kitâb, dalam Alquran memang terutama dimaksudkan khususnya kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi dianalogikan dengan mereka itu, maka setiap golongan yang mempunyai kitab suci adalah ahlul kitâb. Sekalipun asal usul kitab suci itu tidak lagi diketahui, tapi kalau mengandung ajaran moral dan syariat yang sebanding dengan Islam, maka mereka adalah ahlul kitâb.²⁰⁹

Dari uraian di atas menjadi amat jelas kebenaran klaim para ulama dan pemimpin Islam bahwa agama Islam adalah agama yang sangat toleran dan menghargai agama-agama lain. Ini pun diakui oleh banyak kalangan sarjana modern, termasuk mereka yang ateis seperti Bertrand Russel. Filosof Inggris ini mengatakan, bahwa karena prinsip tauhid atau monoteisme yang jelas, maka Islam adalah agama yang tidak memaksakan dirinya kepada para pemeluk agama-agama lain dari kalangan para penganut Kitab Suci atau ahlul kitâb. Berkat sikapnya yang toleran dan terbuka itu, maka kata Russel, kaum Muslim masa lalu, sekalipun jumlah mereka kecil sekali, sanggup memerintah dan menguasai dengan mudah bangsa-bangsa lain dalam jumlah yang amat jauh lebih besar, yang meliputi daerah yang amat luas dengan peradaban duniawi yang lebih tinggi daripada orang-orang Arab.²¹⁰

²⁰⁸ Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa seluruh penganut agama memiliki Kitab Suci dan dibawa oleh seorang utusan Tuhan yang menyampaikan risalah-Nya (QS. al-Fathir 35:24), hanya saja Alquran tidak menyebutnya secara keseluruhan, karena di lingkungan Nabi pada saat itu mungkin tidak populer. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Ma'rifah, Bairutt.th, juz IV, hlm. 188-190. Lihat pula Abdul Hamid Hakim, *Al-Mu'in al-Mubin*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977) juz IV, hlm. 54; Bandingkan dengan Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1977, hlm. 412

²⁰⁹ Rasyid Rida, *Op.cit.*, hlm. 191.

²¹⁰ *It was the duty of the faithful to conquer as much of the as possible for Islam, but there was to be no persecution of Christians, Jews, or Zoroaster-the "people of the Book" (ahl al-kitâb), as the Koran calls them,i.e., those who followed the teaching of a Scrioture....It was only in virtue of their lack of fanaticism that a handful of warriors were able to goven, without much difficulty, vast populations of higher civilaziton and alien religion.* Lihat; Bertrand Russel, *A History of Western Philosophy*, Simon and Schuster, New York, 1959, hlm. 420-421.

Dengan beberapa argumentasi di atas, di manakah kemudian perbedaan antara agama Islam dengan agama dan ideologi selainnya. Jawabannya mungkin mencakup banyak hal. *Pertama*, yaitu perbedaan konteks ruang dan waktu. Ajaran yang ditawarkan akibat ruang dan waktu ini akan berbeda sakupannya. *Kedua*, bagaimana doktrin agama itu dipahami dan dikembangkan oleh komunitas yang berbeda. Misalnya agama Yahudi, diterima dan dikembangkan oleh masyarakat Israel yang lama hidup dalam penindasan penjajahan Fir'aun. Nah, ini juga mempunyai watak yang berbeda sehingga watak yang menonjol dari Musa bagaikan jenderal perang yang melulu menakanakan disiplin, kerja keras, serba perintah dan larangan.

Ketika orang Yahudi capek dengan hukum-hukum yang legalistik sehingga perlu sebuah penyiraman rohani batin, maka datanglah gerakan pembaruan agama yang menawarkan kasih Tuhan. Itulah yang kemudian menjadi ajaran Kristen. Karena itu, dalam Yahudi, kesan Tuhan yang dihadirkan sangat *maskulin* (perintah Ayah), sedang dalam Kristen Tuhan bersifat sangat *feminim* (kasih-Ibu). Berbeda dari keduanya, Islam tumbuh meneruskan warisan Yahudai yang sangat *maskulin* dan Kristen yang sangat *feminim*. Dan dengan demikian cakupan ajarannya berbeda dan watak yang dihadapi Muhammad saw. juga berbeda. Ini sangat bisa dimaklumi mengingat ada perbedaan yang bersifat historis.

Maka tantangannya bagi kita di Indonesia sekarang ini ialah bagaimana menanamkan kembali kesadaran normatif di kalangan kaum muslim sendiri, serta bagaimana menyadarkan umat-umat beragama lain tentang adanya ajaran kitab Suci dan Sunnah Nabi seperti di atas. Setiap ketentuan normatif tentu mengacu kepada apa yang seharusnya. Kenyataan dalam masyarakat selalu menuntut apa yang mungkin, dan jarang sekali dapat dilaksanakan apa yang seharusnya. Tetapi jika dengan alasan itu ketentuan normatif ditinggalkan begitu saja, maka seluruh pengakuan menganut ajaran atau agama menjadi batal. Karena itu, tidak ada jalan lain dari ketentuan normatif harus diusahakan pelaksanakannya secara sungguh-sungguh dan konsekuen.

Jadi, klaim bahwa agama Islam lebih baik atau sempurna sebenarnya karena Islam diuntungkan oleh beberapa sebab. *Pertama*, karena Islam sendiri mengklaim sebagai agama penerus dan pengawet bagi agama sebelumnya. *Kedua*, karena Islam turun sebagai agama yang terakhir. Islam sebagai agama yang turun terakhir inilah yang membuat Islam bisa memuat ajaran yang lama, sedangkan agama sebelumnya tidak bisa memuat ajaran baru. Ini sangat logis dan tidak bisa disangkal karena fakta sejarah. *Ketiga*, karena Islam disamping mengklaim sebagai agama terakhir juga mengatakan sebagai agama pertama. Karena itu, dalam ajaran Islam, semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Nabi Adam beragama Islam, demikian juga Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lainnya. Dengan demikian kata Islam secara generik ini adalah dalam pengertian sebagai ajaran yang dibawa oleh para Nabi. Dari situlah kemudian kita

dapat menemukan dua hal perbedaan, yaitu Islam normatif-sosiologis yang menyejarah dan Islam substantif-kualitatif yang ajaran-ajarannya bersifat universal, dan menghargai eksistensi agama-agama sekaligus penganutnya yaitu ahlul kitâb dan keyakinan lainnya.

Hemat penulis, di era sekarang ini, khususnya dalam konteks ke Indonesiaan, pendapat yang mengatakan bahwa ahlul kitâb itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani, siapa dan dimanapun keberdaannya yang menjaga kehormatannya. Kemudian memperlakukan yang lainnya seperti ahlul kitâb, tampaknya pendapat ini lebih tepat, karena seluruh agama baik yang digolongkan sebagai agama samâwî maupun ‘ardî cukup populer dan berinteraksi secara langsung dengan umat Islam di seluruh dunia. Hampir semua agama di dunia mewartakan kebenaran dari Tuhan, dengan beragam Kitab Suci masing-masing, yang diyakini sebagai wahyu Tuhan dan mengajarkan kebenaran. Oleh karenanya, seluruh umat beragama secara substantif terwadahi dalam term ahlul kitâb.

Dalam memahami kata ahlul kitâb yang terdapat dalam Alquran dan hadis, di kalangan ulama Islam, baik ulama klasik maupun kontemporer terjadi perbedaan. Dari uraian di atas, setidaknya ada empat pendapat berkenaan dengan term ahlul kitâb yang tertuang baik dalam Alquran maupun Hadis. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh umat yang menerima ajaran kitab Suci dari Allah yang dibawa oleh para nabi adalah ahlul kitâb, baik Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lain. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa term ahlul kitâb berlaku untuk umat Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapa pun. Ketiga, ahlul kitâb hanya berlaku untuk komunitas Yahudi dan Nasrani keturunan Israel, dan tidak berlaku bagi selainnya, meskipun beragama Yahudi dan Nasrani. Keempat, pendapat ulama kontemporer yang memasukkan penganut agama selain *samawi* sebagai ahlul kitâb termasuk Hindu, Budha, Khonghucu dan lain-lain.

G. Nalar Kerukunan Nabi Saw dengan Non Muslim.

Para ahli sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin yang sukses dan terkemuka di dunia, karena ia mampu merubah peradaban manusia, tidak saja aspek keagamaan, tapi juga sosial budaya dan sistem pemerintahan. Ia merubah paganisme menjadi tauhidisme, dari amoral menjadi bermoral, dari biadab menjadi beradab. Hal ini tidak saja diakui oleh kalangan sejarawan muslim, namun juga diakui oleh para sejarawan non muslim, salah satunya adalah Michael H. Hart, dalam bukunya: *The 100, a Ranking of The Most Influential Persons in History*. Dalam buku tersebut ia mengatakan Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup

dunia. Sampai disini, timbul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad berhasil ?, dan apa rahasianya ?.

Dari berbagai referensi yang terbaca, maka dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada lima rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad. *Pertama, sejak kecil sudah ditempa untuk siap menderita.* Di mana masih dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, baru saja mendapat kasih sayang seorang ibu, tak berapa lama juga meninggal dunia, sehingga ia dibesarkan dalam kondisi yatim piatu. Sejak itu ia berusaha untuk hidup layaknya manusia yang lain, sehingga ia ikut berdagang di bawah bimbingan pamannya Abu Thalib, dan ia berhasil menjadi pemuda yang mandiri. Kesulitan demi kesulitan ia tempuh dengan penuh keyakinan dan kesabaran, caci maki dan hinaan ia terima dengan keikhlasan, membuat dirinya memiliki mental yang konsisten dan istiqomah, serta siap menghadapi berbagai ujian. Jika hal ini kita teladani, maka seseorang yang telah melalui proses yang matang dan berliku, lalu sampai ke puncak, maka orang tersebut tidak cepat angkuh dan sombong. Namun sebaliknya, orang yang serba instan sampai ke puncak, maka kemungkinan besar orang ini akan sombong dan takabbur, serta tidak mampu merasakan penderitaan orang lain. Oleh karena itu, mari kita lalui kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan kesabaran, tahap demi tahap untuk sampai ke puncak prestasi gemilang, sebagaimana puasa telah melatih kita untuk sabar menahan lapar, dahaga dan yang membatalkannya sehingga sampai pada puncak kegembiraan yaitu waktu berbuka puasa.

Kedua, beliau berdakwa dengan akhlak, tidak saja dengan akhlakul karimah, tapi juga dengan akhlakul 'azimah, yaitu dengan perilaku mulia dan keyakinan yang penuh dengan nilai-nilai tauhid, bahwa Allah Swt senantiasa melihat setiap tindak tanduknya. Dengan akhlak dan keteladan itulah membuat Islam cepat berkembang ke berbagai komunitas yang ada di alam semesta. Salah satu contoh, ada seorang yahudi yang hendak membunuhnya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berada di dalam masjid hendak menunaikan solat, dan Umar bin Khattab masih di teras masjid. Melihat gelagat Yahudi yang membawa pedang dan berlari menuju Nabi Saw, maka Umar menangkapnya dan mengikatnya di tiang masjid. Setelah Nabi Saw selesai solat bersama Umar, lalu Umar memberitahu kepada Nabi saw bahwa ada seorang Yahudi hendak membunuhnya, dan orang itu saya ikat di tiang masjid. Nabi Saw bersama Umar menghampiri yahudi tersebut dan menanyakan hajatnya, yahudi tersebut mengatakan bahwa ia mau membunuh Nabi Saw. Mendengar hal itu, Nabi tidak marah dan malah memerintahkan Umar untuk memberi makan yahudi tersebut lebih dahulu dan tidak menghukumnya. Setelah itu Nabi Saw memberi pilihan kepada yahudi tersebut agar pergi, lalu yahudi itu berpaling seakan-akan mau pergi, tapi ia kembali menghadap Nabi Saw dan menyatakan keislamannya. Begitu indahnyalah akhlak yang ditampilkan Nabi Saw, sehingga banyak orang terpesona dan tertarik untuk menjadi

muslim. Oleh karenanya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang dan kitab suci, seakan-akan Islam dikembangkan dengan kekerasan. Justru sebaliknya, Islam dikembangkan dengan keteladanan akhlak mulia dan kedamaian.

Rahasia *ketiga* adalah, *satunya kata dengan perbuatan*, alias jujur. Sikap *siddiq* yang ditampilkan beliau menambah keberhasilan kepemimpinan Nabi Saw dalam merubah perilaku umat. Hemat saya, sekarang ini sikap jujur menjadi barang langka, baik di level pemimpin maupun di tengah masyarakat umumnya. Nota benanya, masyarakat Indonesia sekarang lebih banyak bersikap hipokrit, alias munafiq yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai hasil penelitian Mukhtar Lubis tentang tipikal masyarakat Indonesia, dimana sikap munafiq menempati ranking pertama. Rahasia yang *keempat*, adalah *punya sandaran vertikal yang kuat*. Walaupun Nabi Saw adalah orang yang maksum tanpa dosa dan dijamin Allah Swt masuk surga, namun ia tetap beribadah semaksimalnya. Jika ia mengatakan bersedakahlah, maka ia lebih dahulu melakukannya. Jika ia mengatakan perbanyak solat tahajjud, maka ia lebih lama melakukan solat mala mini sampai bengkak kakinya, bercurahan air mata bermunajat kepada Allah Swt. Alangkah indahnya Ramadhan yang kita isi dengan berbagai ibadah dalam rangka memperkuat hubungan *hablum minannas* dan *hablum min Allah*. Jika sikap ini bertahan setelah ramadhan atau sebelas bulan ke dapan, maka insya Allah kita akan menjadi muttaqin dan negeri ini akan senantiasa mendapat curahan rahmat dari langit dan keberkahan hidup dari bumi. (QS. Al-A'raf: 6/96).

Rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Saw yang *kelima*, adalah *punya sahabat yang solid, tangguh dan setia*. Artinya membangun *teamwork* yang dilandasi oleh keimanan dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan berbagai perubahan. Kebersamaan ini sangat diperlukan dalam membangun sebuah peradaban, sebab jika ada diantara tim tersebut yang mengkhianati kesepakatan dan tidak setia, maka hal itu akan menjadi ancaman dan kehancuran. Di sinilah signifikannya samangat *ukhuwah Islamiyah*, persatuan dan persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai tauhid. Kita boleh berbeda dalam berbagai hal, tapi tidak boleh berbeda dalam kesatuan tauhid, sehingga potensi umat ini bagaikan satu bangunan yang saling menopang dan menguatkan, bukan saling mengecilkan apatah lagi saling memfitnah.

Rujukan tradisional pertama mengenai kehidupan Muhammad, *Sirah Rasulallah* (Riwayat hidup Rasulallah) karya Ibn Ishaq (th. 767/150) misalnya, menuturkan contoh penting terkait perjumpaan Muhammad dan kaum muslim generasi pertama dengan orang Kristen.²¹¹

²¹¹ Lihat A. Von Denffer, *Christians in the Qur'an and the Sunna*, Leicester: The Islamic Foundatin, 1979, h. 10-19.

Pada periode sebelum Muhammad terpenggil menjadi seorang Nabi. Menurut Ibn Ishaq pada usia 12 tahun Muhammad ikut dalam kafilah dagang bersama pamannya Abu Thalib ke Suriah, dan disana ia bertemu dengan seorang rahib bernama Bahira. Dikisahkan bahwa ketika kafilah itu melewati tempat bertapa Bahira, rahib tersebut melihat awan yang menaungi Muhammad. Ketika kafilah itu berhenti, cabang-cabang pepohonan merunduk sehingga Muhammad tetap berada di bawah naungannya. Karena takjub, Bahira mengundang rombongan kafilah itu untuk makan bersamanya. Dia lalu memperhatikan Muhammad dengan seksama dan melihat “tanda kenabian” –berupa tanda fisik– di antara bahu dan pundaknya. Kemudian Bahira meminta para anggota kafilah itu untuk menjaga Muhammad serta melindunginya dari segala marabahaya.²¹²

Ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi. Setelah pertemuan dengan Malaikat Jibril atau Gabriel dan perintah untuk menyebarkan pasannya yang kemudian menjadi lima ayat pertama surah ke-96 (Q.S. al-‘Alaq: 1 – 5), Muhammad terus memikirkan pengalamannya yang traumatis itu, bahkan ia kemudian nyaris menganggap dirinya telah menjadi gila. Kegundahan sirna ketika Waraqah (seorang alim Kristen yang telah mengkaji berbagai kitab suci, serta orang yang menjadi Kristen karena gemar menelisik kitab-kitab suci dan belajar dari para pengikut Taurat dan Injil) menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Muhammad akan menjadi nabi orang Arab. Setelah itu, Muhammad pun merasa tenang. Waraqah adalah sepupu Siti Khadijah.²¹³

Pada suatu saat, sekelompok Muslim yang atas perintah sang Nabi berhijrah dari Makkah ke Abissinia pada sekitar 615.²¹⁴ Abissinia adalah kerajaan Kristen Monofisit. Ketika keadaan di Makkah menjadi semakin genting, Abissinia menjadi pilihan utama sebagai tempat perlindungan pertama bagi kaum Muslim awal. Pada masa itu, raja Abissinia bergelar Najasi. Ketika penguasa Makkah yakni suku Quraisy, mengirim utusan ke kerajaan itu untuk diminta agar kaum Muslim dipulangkan ke Makkah, Ibn Ishaq mencatat sebuah percakapan yang sangat menarik antara Najasi, yang didampingi oleh para Imam Kristen dengan kitab suci di tangan mereka dan para pemimpin pengungsi Muslim. Ketika Najasi bertanya tentang agama mereka, pemimpin pengungsi Muslim Ja’far Ibn Abu Thalib menjawab :

Wahai Raja, dulu kami adalah kaum tak beradab, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan hal-hal yang terlarang, merusak hubungan kekeluargaan, mengasari tamu dan menindas yang lemah. Seperti itulah keadaan kami hingga Allah mengutus seorang Rasul yang garis keturunan kebenaran,

²¹² Lihat A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, Oxford University Press, 1955, h. 79-81.

²¹³ *Ibid.*, h. 83 dan 107.

²¹⁴ *Ibid.*, h. 146-150

kejujuran dan kebaikan hatinya kami kenal. Dia mengajak kami untuk mengakui keesaan Allah, menyembah-Nya dan meninggalkan berhala, sesembahan kami dan orangtua kami. Dia memerintahkan kami untuk berkata benar, menepati janji, memelihara hubungan kekeluargaan dan kasih sayang, serta menahan diri dari kejahatan dan pertumpahan darah. Dia melarang kami berdusta, memakan harta anak yatim dan memfitnah perempuan terhormat. Dia memerintahkan kami untuk menyembah Tuhan dan tidak menyekutukan-Nya, untuk mendirikan shalat, bersedekah dan berpuasa. Kami mengakui kebenarannya dan percaya kepadanya; kami mengikuti ajaran yang dibawanya dari Tuhan; kami hanya menyembah Tuhan dan tidak menyekutukan-Nya. Kami menjauhi segala larangannya sekaligus menghalalkan apa yang diharamkan-Nya.

Namun kemudian bangsa kami menyerang dan menganiaya kami dengan kejam serta membujuk kami agar kembali menyembah berhala dan melakukan berbagai perbuatan jahat yang dulu pernah kami lakukan. Karena lebih berkuasa, mereka menganiaya dan mengancam jiwa kami serta berusaha menanggalkan keyakinan kami. Kini kami datang ke negerimu setelah mempertimbangkan negeri-negeri yang lain. Di sini, di bawah perlindunganmu, kami merasa tenang. Wahai Raja, kami berharap agar engkau tidak menzalimi kami selama kami di bawah perlindunganmu.

Ketika Najasi menanyakan apakah mereka mendapatkan wahyu dari Allah, Ja'far membacakan satu ayat dari surah ke-19 (Maryam), yang menjelaskan mu'jizat dan kelahiran Yesus. Mendengar ayat itu, Raja Najasi mencururkan air mata hingga membasahi jenggotnya, para imam pun menangis tersedu-sedu hingga membasahi gulungan kitab suci mereka. Lalu, Najasi pun berkata : "Demi Allah, wahyu ini dan ajaran Yesus berasal dari sumber yang sama". Kemudian sang Raja berjanji bahwa ia tidak akan menyerahkan mereka kepada penguasa Makkah. Orang Makkah kembali membujuk Najasi agar mencabut perlindungannya, seraya menyatakan bahwa dalam Islam Yesus hanyalah makhluk biasa (sama sekali bukan Tuhan). Namun Ja'far sekali lagi menjawab dengan mengutip ayat Alqur'an yang menyatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah, Rasul, roh dan firman-Nya, yang dia tiupkan ke rahim perawan Maryam atau Maria (Q. S. an-Nisa' [4] : 171). Mendengar penjelasan itu, Najasi mengambil sebatang tongkat dan menyatakan bahwa perbedaan antara keyakinan dirinya dan keyakinan kaum Muslim tentang Yesus tidaklah lebih panjang dari tongkat tersebut.²¹⁵

Kemudian dialog terjadi ketika Nabi Saw telah menjadi tokoh penting di Madinah. Sekitar tahun 628 M, Muhammad menerima utusan kaum Kristen dari kota Najran yang merupakan basis penting penyebaran Kristen (Monofisit) di Arab Selatan.

²¹⁵ *Ibid.*, h. 150-153.

Utusan itu dipimpin oleh tiga orang ‘*Aqib* atau seorang pemimpin rakyat, *Sayyid* atau administrator dan seorang imam. Disebutkan bahwa nama pemimpin delegasi itu adalah ‘Abdul Masih (hamba Kristus) sementara imam yang mendampingi dirinya adalah orang yang sangat terpelajar dan punya pemahaman yang sangat dalam tentang agamanya. Ia pun dihormati oleh penguasa Bizantium karena pengetahuan dan kesolehannya itu.

Pada dasarnya, delegasi itu adalah delegasi politik, yang datang untuk merundingkan perjanjian dengan Muhammad. Delegasi itu datang ketika Muhammad sedang shalat ‘Ashar, bertepatan dengan tibanya waktu sembahyang mereka sendiri, sehingga mereka pun diizinkan untuk berdoa di dalam Masjid. Usai kedua umat itu menjalankan ibadah masing-masing, perundingan pun dimulai. Muhammad meminta kaum Kristen untuk tunduk. Mereka menjawab bahwa mereka sudah melakukannya. Kata “tunduk” ini agak ambigu karena kita tidak mendapat penjelasan apakah yang dimaksud adalah kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad. Orang Kristen mengaku bahwa setidaknya mereka telah tunduk sebelum Muhammad. Tetapi Muhammad, bersikeras menyatakan bahwa karena mereka meyakini bahwa Tuhan punya anak, menyembah salib, dan memakan daging babi, berarti mereka belum tunduk. Perundingan berlanjut dengan perdebatan seputar Kristologi, yang berkisar pada pembahasan ayat Alqur’an mengenai Yesus. Rombongan Kristiani permisi untuk pulang dan menyepakati akta perdamaian, mereka diperkenankan untuk mengamalkan keyakinannya.²¹⁶

Dialog Nabi Saw dengan non Muslim yang terakhir terjadi menjelang akhir hayatnya. Dimana Nabi Muhammad mengirim surat kepada para penguasa negara-negara tetangga di sekitar Jazirah Arab yang berisi seruan agar mereka bersedia menerima Islam. Surat itu tidak hanya dikirimkan kepada raja-raja Kristen seperti Kaisar Bizantium, Heraklius, dan Najasi dari Abissinia, tetapi riwayat itu juga menuturkan bahwa Muhammad mengirim seorang utusan ke Kisra Sasania.²¹⁷

Sampai disini dapat dipahami bagaimana Nabi Saw menyikapi dan memperlakukan kaum Kristen pada masa hidupnya serta berbagai pernyataan Alqur’an tentang kaum Kristen dalam bingkai sosial yang melatari perkembangan pola hubungan di antara keduanya. Pernyataan-pernyataan tentang kaum Kristen tersebut terkait erat dengan konteks perkembangan hubungan Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi maupun Kristen. Kini, perlu dicermati hubungan praktis yang terjalin antara umat Islam dan kaum Kristen di dunia, khususnya di Indonesia dalam membangun budaya damai dan kebersamaan dalam keragaman.

²¹⁶ *Ibid.*, h. 270-277.

²¹⁷ *Ibid.*, h. 652-659.

Ketika Nabi Muhammad di Madinah, sebuah dokumen yang sangat penting dalam sejarah awal Islam, kemudian yang disebut Piagam Madinah, disusun untuk mengatur hubungan antara umat Islam dengan berbagai komunitas yang ada di sana. Dokumen yang terdiri dari lima puluh pasal dan masih ada hingga kini itu kemungkinan berasal dari periode setelah tahun 657 M, meskipun isinya mencerminkan keadaan-keadaan yang terjadi pada 622 M. Di satu sisi dokumen tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin serta berbagai komunitas yang bersekutu dengan mereka dan berperang bersama mereka adalah “satu umat” (pasal 1); dan menegaskan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin memiliki hak yang sama dengan mereka untuk ditolong dan dilindungi (pasal 6). Di sisi lain, perbedaan keyakinan diakui dan dihormati : “.... Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka” (pasal 25); dan “setiap Muslim dan Yahudi bertanggungjawab atas agamanya masing-masing. Mereka harus saling membantu melawan siapapun yang memerangi pihak-pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Mereka harus saling menasihati, bermusyawarah dan bergaul secara terhormat, serta tidak boleh berkhianat.....” (pasal 37). Ini artinya, ada seruan untuk bertoleransi dan keterbukaan terhadap keragaman sosial dan perbedaan keyakinan, juga menegaskan bahwa masing-masing kelompok agama yang ada di Kota Madinah mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dalam hubungan di antara mereka.

Dari uraian di atas, dapatlah direnungkan sekaligus berhajat untuk menteladani rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Saw dalam melakukan perubahan dan membangun peradaban yang religious, serta sikapnya berdialog dengan non Muslim. Mudah-mudahan sebagai *khaira umat* kita dapat mengambil pelajaran dari rahasia keberhasilan Nabi Saw dan menteladani perilaku, perbuatan dan perjuangannya, sehingga negeri ini mampu bangkit dari berbagai keterpurukan, dan kemerosotan akhlak demi kemajuan masa depan bersama

H. Pancasila Pemersatu Multireligions.

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (ras *mongoloid* dan ras *melanesoid*), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam, yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu. Pada masa pergerakan nasional, sejak lahirnya kesadaran berbangsa, kebangsaan dipahami tidak sebagai himpunan suku-suku atau kelompok etnis, melainkan sebagai suatu “transendensi atas suku-suku”. Perbedaan ciri-ciri lahiriah, adat istiadat, berbahasa lokal, bahkan agama/kepercayaan yang telah mengakar, justru

menjadi faktor pendorong bersama untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru dengan tatanan sosial baru.

Pertanyaannya adalah mengapa para pendahulu kita mampu melahirkan ide besar untuk kemajuan bersama dalam perbedaan, memadukan berbagai potensi sebagai kekuatan bangsa, membangun cita-cita luhur dan mewujudkan tatanan sosial baru sebagai sebuah Negara Bangsa (*nation state*). Barangkali, salah satu faktor pendukungnya adalah karena mereka berpikir dan bertindak universal, satu dalam perbedaan demi harkat dan martabat bangsa. Disinilah diperlukan wawasan kebangsaan dan wawasan keberagamaan yang moderat dalam bingkai Pancasila.

Masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar dan sekaligus jalan untuk menempuh tujuan bersama. Pancasila mempersatukan bangsa, menjamin keterbukaan serta member harga diri. Bersamaan dengan itu Pancasila setiap kali perlu dijadikan dasar kerja yang kritis dan korektif untuk meluruskan kesalahan-kesalahan besama. Kesadaran social keagamaan harus menjadikan pancasila sebagai tolok ukur yang kritis dalam pengambilan segala kebijakan. Pancasila sebagai dasar ideology Negara akan bias dipertahankan dengan teguh apabila ada interaksi yang kritis dan berkesinambungan antara agama-agama dan Pancasila. Dalam hubungan kreatif semacam ini besar kemungkinan kehidupan agama-agama di Indonesia bias menyumbangkan model bagi hubungan dan pelaksanaan fungsi agama di tengah-tengah pergaulan masyarakat seantero dunia.

Sebagai kekuatan transformatif agama-agama tidak bias mengucilkan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, sebagai kekuatan transformatif, agama harus mampu menjadi pengikat solidaritas dan penumbuh kesadaran tentang kesesamaan dan kemitraan yang mempersatukan segenap warga masyarakat untuk membangun dirinya. Sebagai keuuatan transformatif, maka kepekaan dan keprihatinan agama terhadap penderitaan manusia merupakan sebuah prasyarat. Keprihatinan religius semacam ini merupakan akar bagi kekuatan agama sebagai agen perubahan.

Agama secara keseluruhan menampung seluruh pengalaman dialog yang berkesinambungan antara manusia dengan keabadian. Keabadian dalam dimensi historisnya selalu berhubungan dengan pertanyaan mengenai nasib dan perbaikan nasib yang dinantikan dan diupayakan oleh semua orang. Agama dalam hubungan ini tetap merupakan ruang pembebasan di mana segala harapan dan persoalan yang mereka hadapi bias dipikirkan secara mendalam dalam suasana dialogis. Adakah upaya yang lebih baik untuk membangun masa depan, kecuali dengan jalan kerjaama, saling menghargai dan saling menjalin hubungan yang solider namun kritis. Adakah cara yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kecuali dengan cara dialog, tanpa pemaksaan dan kekerasan. Adakah cara yang lebih baik untuk membangun

masyarakat kecuali dengan menghargai harkat dan martabat manusia dan juga menghargai hak hidup setiap insan ?.

Salah satu tawaran agar kita bisa bersama dan bekerjasama dalam membangun masa depan bersama yang lebih baik adalah cara beragama moderat. Cara beragama moderat secara internal melahirkan cara beragama yang bijak, tidak kaku, dan memandang kewajiban beragama sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan membahagiakan. Sementara secara eksternal melahirkan cara beragama yang terbuka, lapang, akomodatif, dan selalu mengutamakan titik temu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan maju, sehingga keberagaman menjadi rahmat bagi kehidupan yang plural.

Cara beragama yang moderat ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya perintah setiap agama untuk memuliakan manusia (*walaqad karramna bani adam*). *Kedua*, kesadaran akan adanya kesatuan ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. *Ketiga*, adanya kesadaran akan kenyataan bahwa warga bangsa di dunia kebanyakan membangun kehidupan dan kebangsaan dengan realitas yang *plural* dan *multikultural*.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta kerukunan. Kerukunan umat beragama baru dapat diwujudkan apabila; *pertama*, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu Pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. *Kedua*, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. *Ketiga*, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan,²¹⁸ dan pola ibadah. Di antara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan dan kebangsaan. *Keempat*, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

²¹⁸ Lihat, Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, Paramadina, Jakarta, 2003, h. 100.

Jika kita buka lembaran sejarah Indonesia, maka akan ditemukan bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau *unifikasi*. Keanekaragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.

Dengan cerdas dan bijak, serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khazanah kearifan lokal masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan Negara (*nation system building*), serta di dalam membentuk jati diri bangsa (*nation character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku, etnis, ras dan agama. Semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar berisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama yang sangat rentan terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut sehingga akan melemahkan kekuatan Negara.

Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan tiga nilai yang terkandung dalam sesanti tersebut, yakni :

1. *Nilai toleransi*, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
2. *Nilai keadilan*, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
3. *Nilai Gotong Royong/Kerjasama*, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia

dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Iklim reformasi Indonesia terasa membahana. Isu dan wacana penguatan kelembagaan negara dalam kerangka perwujudan Indonesia yang demokratis terus menguat. Format konstitusionalisme Indonesia tengah ditata dan meniscayakan peran aktif seluruh komponen bangsa. Memang terkadang kecemasan dan keprihatinan berbangsa mencuat akibat dari beragam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan teriakan minusnya peran negara dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi dan unsur terpenting dalam praksis demokrasi konstitusional.²¹⁹

Salah satu ajakan menarik memperkuat soliditas keindonesian kita adalah membumikan empat pilar kehidupan berbangsa yang, hemat penulis, mesti dipandang sebagai “proyek sivilisasi Indonesia.”²²⁰ Empat pilar - Pancasila, UUDNRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika – merupakan khazanah sekaligus modalitas bangsa Indonesia.

Kini, soliditas kebangsaan kita sedang menghadapi ujian berat. Selain disparitas ekonomi yang semakin timpang dan berimplikasi pada akses pelayanan publik dan keadilan, pragmatisme berwajah sektarian juga semakin menggejala kuat bahkan menjurus pada gerakan separatisme merupakan persoalan penting yang mesti dihadapi. Oleh karena itu, desakan untuk menggulirkan empat pilar adalah bentuk usaha sadar penguatan kembali nafas kehidupan berbangsa dalam merawat keindonesian yang majemuk, modern dan berperadaban.

Disadari bahwa konstruk nasional melalui empat pilar tersebut akan mampu menjembatani diskrepansi kepentingan dan sekaligus mengagregasi dan mengokohkan nasionalitas keindonesian kita. Signifikansi “proyek nasional” ini pun menemukan momentumnya ketika usaha berbenah diri bagi Indonesia semakin hari semakin dirasakan dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.²²¹

Begitupun, hal mendasar yang tidak boleh luput adalah melekatkan optimalisasi jangkauan “proyek nasional” tersebut ke dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia. Semantika dan dialektika demokrasi tidak boleh melumpuhkan supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari opsi demokrasi konstitusional Indonesia.²²² Konstitusionalitas HAM dengan piranti keterbukaan, partisipasi dan kemerdekaan pers

²¹⁹Lihat Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 serta Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²²⁰Lihat lebih lanjut www.mpr.go.id

²²¹Lihat Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²²²Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUDNRI Tahun 1945.

merupakan bukti kemajuan empiris yang meniscayakan kita merekonstruksi arah dan masa depan Indonesia yang mampu mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Tulisan ini berupaya mendekatkan konstitusionalitas HAM dan demokratisasi Indonesia dan selanjutnya mengaitkannya dengan modalitas kebangsaan dalam mengokohkan ketahanan nasional Indonesia.

Empat pilar kehidupan berbangsa merupakan simbolisasi dari pemaknaan adanya dasar bagi “rumah” demokrasi Indonesia. Keempat pilar itu mencerminkan nilai, asas dan norma dasar yang mesti dijadikan pedoman dalam mengukir dan menghiasi “rumah” demokrasi Indonesia. Kerangka pikir ini merupakan nalar ideologis kebangsaan Indonesia yang mesti menjelma dalam aktivitas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipandang sebagai basis kekuatan ketahanan nasional Indonesia. Dengan empat pilar itu, kondisi daya tahan bangsa dalam menanggulangi dan mengatasi beragam permasalahan bangsa dan negara serta menjamin kelangsungan hidup dan menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi kekuatan yang mutlak. Ketahanan nasional – sebagai kondisi, metode dan doktrin – tentu saja mengalami dinamika akibat dari fluktuasi kemampuan memanfaatkan potensi dan kekuatan nasional dalam kerangka merealisasikan tujuan nasional. Oleh karena itu, empat pilar kehidupan berbangsa tidak bisa disegregasi karena sebagai “rumah” bagi demokrasi Indonesia, keutuhan, kekuatan dan ketahanannya sangat ditopang dari sejauhmana maksimalisasi kepentingan dan tujuan nasional²²³ bisa mengalahkan kepentingan dan tujuan pribadi serta kelompok/golongan. Di sinilah arti penting komitmen dan keteladanan.

Dengan demikian, ketahanan nasional tidaklah statis. Ketahanan nasional bukan pula semata-mata kemampuan mewujudkan rasa aman dalam bentuk stabilitas yang semu, melainkan sebuah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun yang berasal dari luar. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam konteks demokrasi konstitusional mesti menjadi masukan yang signifikan dalam merumuskan konsep dan mekanisme ketahanan nasional. Kesalahan memaknai ketahanan nasional sebagai sesuatu yang elitis dan

²²³Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

direduksi sebagai primasi kebijakan pertahanan dalam pencapaian stabilitas jelas bertentangan dengan empat pilar kehidupan berbangsa..

Empat pilar kehidupan berbangsa sangat mengedepankan realitas kemajemukan, partisipasi, demokrasi, kesejahteraan serta penegakan hukum dan HAM. Empat pilar itu merupakan potret dan identitas keindonesiaan kita sekaligus wujud kesadaran terhadap karakteristik keindonesian kita. Dengan itulah, hemat saya, secara efektif empat pilar kehidupan berbangsa mampu dimanifestasikan sebagai “amunisi” bagi ketahanan nasional Indonesia.

I. Konflik Agraria Perlu Moderasi

Konflik adalah percekocokan, pertikaian dan pertentangan di dalam antara satu tokoh dengan tokoh lain, atau pertentangan dua tokoh, konflik yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku.²²⁴ Dari pengertian ini maka hal-hal yang mencakup konflik termasuk konflik dalam peperangan, perkelahian fisik, perbedaan pendapat, atau perbedaan antara keinginan dengan apa yang dilakukan.

Dengan demikian konflik yang digunakan dalam istilah tulisan ini adalah pertentangan antara individu dan kelompok atau dua hal yang karenanya ada perbedaan baik dalam bentuk ide, kata-kata ataupun fisik, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Dimana hal itu dilakukan oleh umat beragama, baik intern umat beragama, ekstern umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.

Secara teoritis yang menjadi akar terjadi konflik di tengah masyarakat dan bangsa adalah disebabkan oleh tiga hal, yaitu *Security, Identity, dan Resources*. Rasa aman, identitas, dan sumber penghasilan. Hal ini kalau tidak terpenuhi atau terancam sangat berpotensi menciptakan konflik sosial yang berakibat sangat fatal. Konflik tersebut dapat terjadi dalam berbagai skalanya, antara lain; konflik berskala massal, konflik non-massal, dan ketegangan antarumat beragama, seperti beberapa kasus ketegangan dalam pendirian rumah ibadah dan penyebaran agama kepada kelompok lain yang sudah beragama, penistaan suatu agama, dan “perebutan sumber-sumber ekonomi dan penguasaan atas tanah”.²²⁵

Dipahami dari pendekatan psikologis, bahwa konflik itu muncul sebagai refleksi dari kondisi psikis dalam rangka interaksi sosialnya. Adanya konflik

²²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. II, 1989, h. 455.

²²⁵ Dari sekian banyak konflik antarumat beragama yang terjadi di Sumatera Utara, yang terkini dan belum diselesaikan diantaranya adalah peristiwa penyerangan terhadap warga muslim kampung Melayu Silambo-Amplas Kab. Deli Serdang oleh warga non Muslim yang merugikan warga Muslim.

ini menunjukkan bahwa energi psikis individu adalah sesuatu hal yang dinamis. Karena konflik itu senantiasa berubah bentuk dan mengalami perkembangan, baik secara personal maupun komunal. Secara garis besarnya, paling tidak terdapat lima penyebab atau sumber-sumber terjadinya konflik, yaitu:

1. Prasangka; merupakan hasil proses interaksi antar individu dan kelompok berbentuk sikap, persepsi, cara berpikir dan merasa terhadap orang lain atau kelompok tertentu.
2. Etnosentris; suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok etnis yang lain, bahkan merasa yang terbaik.
3. Diskriminasi; berawal dari prasangka yang etnis dan etnosentris yang fanatis yang kemudian akan membawa penetapan-penetapan stereotipe kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik.
4. Kesenjangan ekonomi; disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan pada seorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompoknya terpuruk dan miskin.
5. Perbedaan ideologi; terutama agama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik. Sementara ideologi atau agama orang lain adalah salah.²²⁶

Banyak tanah Negara dan tanah eks HGU serta tanah rakyat atau petani yang dikuasai mafia tanah. Salah satu contohnya, tanah Negara di sekitar masjid al-Khairiyah dan masjid Raudhatul Islam jalan Yos Sudarso Gg. Peringatan Kelurahan Silalas Medan Barat. Dimana tanah tersebut jelas-jelas milik PTPN II dan belum pernah dilepas kepada pihak ketiga. Di areal tanah Negara itu, telah berdiri rumah elite. Tidak hanya menguasai asset Negara, mafia tanah juga merubuhkan masjid.²²⁷ Masih banyak lagi kasus serupa yang memancing kemarahan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini.

Akibat lanjutan dari konflik agraria adalah meluasnya konflik ke berbagai kepentingan dan hajat hidup manusia, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumber daya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain, yang kemudian mengarah kepada konflik SARA. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan

²²⁶ Baca; Pusat Kerukunan Umat Beragama Departemen Agama RI, *Manajemen Konflik Umat Beragama*, Jakarta, 2004, hlm. 51-54.

²²⁷ Bandingkan; Koran Harian, *Waspada*, tanggal 26 September 201, halaman. A4.

miskin di perkotaan. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota. Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Pada gilirannya merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah ini dapat menggerus rasa ke-Indonesiaan (*innasionalis*).

Tensi konflik intra dan antarumat beragama tidak jarang berubah menjadi kekerasan, yang selalu muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, tidak jarang membuat kalangan figur publik dan masyarakat menganggap tengah terjadi peningkatan intoleransi di lingkungan intra dan antarumat beragama, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa, hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²⁸

Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk konflik lain, seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik etnis antar “penduduk asli” dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Studi dari Institut Titian Perdamaian (2012) menunjukkan bahwa di balik “konflik-konflik etnik” dan “agama” yang besar-besar dalam periode semasa dan setelah transisi demokrasi, sebagian besar dilatarbelakangi oleh perebutan atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah hidup. Hal itu logis, karena manusia diciptakan dari tanah, hidup dan berkembang biak di atas tanah, dan mati akan dikubur dalam tanah, maka ia akan berjuang sampai titik darah yang terakhir memperjuangkan bagian dari dirinya, yaitu hak atas tanah yang dititipkan Tuhan kepada manusia. Ada pepatah mengatakan “*Ketimbang hidup bercermin bangkai, biarlah mati bergalang tanah*”.

Kepemilikan dan penguasaan tanah adalah mutlak milik Allah swt. Sebab, bumi dan seisinya ini adalah ciptaan Allah. Hasan Hanafi banyak mengacu kepada ayat-ayat Alquran tentang kekuasaan Allah yang ada di bumi dan langit. Sedangkan secara historis-teologis kepemilikan bagi manusia hanyalah bersifat majazi, manusia hanya berhak memanfaatkan dan menggunakan tanah, itupun dengan syarat harus dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Pernyataan keimanan seorang muslim misalnya, harus dibarengi dengan melakukan perbuatan baik. Dalam kasus tanah, ketika seseorang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam, maka konsekuensinya adalah manusia harus memperlakukan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk tanah. Untuk itu, modus-modus produksi yang berhubungan dengan kepentingan umum tidak dapat dimiliki secara pribadi, kecuali tempat tinggal yang merupakan sektor inheren untuk kelanjutan hidup manusia. Sedangkan untuk

²²⁸Azyumardi Azra, *Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama: Peningkatan Peran Kompetensi Aparat Negara dan Pemimpin Agama*, Makalah, h. 2-3.

kepentingan umum, seperti pertanian, industri, pertambangan, dan segala yang berasal dari bumi, baik dari perut maupun permukaannya, yang merupakan bahan-bahan mentah tidak dapat dimiliki secara pribadi.²²⁹

Dari konsep teologi tanah di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang gamblang bahwasanya kepemilikan majazi yang diberikan oleh Allah kepada manusia atas tanah adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu, implikasi teologisnya dalam ranah aplikatif adalah terwujudnya keadilan sosial dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Dengan dasar keadilan sosial inilah sebenarnya yang menjadi nafas teologi tanah. Keadilan dan pemerataan dalam akses terhadap tanah akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan mengurangi kemiskinan serta keterbelakangan. Artinya, selama teologi klasik masih enggan untuk menyuarakan kemiskinan dan keterbelakangan, maka dunia Islam tidak akan bisa maju. Dengan pemerataan terhadap kepemilikan tanah dan jaminan kepastian atas akses terhadap tanah akan membuat banyak masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari tanah akan mengalami kemajuan perekonomian. Secara otomatis hal ini akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kepemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi selama ini telah keluar dari terma teologisnya. Bagaimana tidak, manusia yang seharusnya hanya boleh memanfaatkan dan menggunakan-itupun dengan syarat digunakan sebaik-baiknya—malah menjadikan tanah sebagai tempat untuk memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya dan membuat orang lain sengsara. Jika spirit konsep teologi ini mampu diadaptasi oleh pemerintah maupun masyarakat, maka peristiwa-peristiwa seperti hilangnya tanah adat karena HPH (Hak Penguasaan Hutan), pemiskinan kawasan hutan, dan rusaknya ekosistem akibat penambangan akan dapat berkurang.

Konflik-konflik agraria struktural saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas. Cara-cara konvensional sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita saat ini memerlukan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor kelembagaan pemerintahan, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi. Lebih dari itu, konflik agraria struktural ini perlu diatasi dengan menyelesaikan akar masalahnya, yakni ketimpangan agraria yang ditandai oleh dominasi penguasaan perusahaan-perusahaan raksasa dalam penguasaan tanah dan pengelolaan SDA. Indonesia tidak punya instrumen hukum dan kebijakan yang membatasi luasan maksimum penguasaan tanah dan pengelolaan SDA oleh *holding company* dari perusahaan-perusahaan kapitalis yang bersifat predatoris.

²²⁹ Baca; Hasan Hanafi, *Religious Dialogue and Revolution*, Anglo Egyptian Bookshop, Kairo, 1991.

Bila akar masalah ini mau diatasi, maka komitmen kita para pegiat reformasi agraria perlu diperbarui, dan UUPA NO. 5 tahun 1960 perlu diamandemen.

Jika kita mengacu pada UUPA yang dengan tegas berbunyi: *Pasal 6 “Setiap Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial”*. *Pasal 7 “Untuk Tidak Merugikan Kepentingan Umum Maka Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang Melampaui Batas Tidak Diperkenankan”*. *Pasal 13 ayat (1) “Pemerintah Berusaha Agar Supaya Usaha – usaha Dalam Lapangan Agraria Diatur Sedemikian Rupa, Sehingga Meningkatkan Produksi dan Kemakmuran Rakyat Sebagai yang Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (3) Serta Menjamin Bagi Setiap Warga – Negara Indonesia Derajat Hidup yang Sesuai Dengan Martabat Manusia, Baik Bagi Diri Sendiri maupun Keluarganya”*. *Ayat (2) “Pemerintah Mencegah Adanya Usaha – usaha Dilapangan Agraria Dari Organisasi – organisasi dan Perseorangan yang Bersifat Monopoli Swasta”*. Jika saja UUPA dijalankan secara konsekuen tanpa membedakan kelas sosial yang kaya dan miskin maka konflik agraria bisa diminimalisir.

Supaya rukun-damai di atas tanah, semestinya UU Pokok Agraria tersebut dapat mensejahterakan rakyat dan membawa keadilan bagi mereka. Namun realitanya, tidak sedikit kalangan yang menilai UUPA terkesan gagal dan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Mengapa demikian ?. Karena besarnya andil mafia tanah. Akibatnya, tidak sedikit rakyat sebagai pemilik tanah tersingkirkan. Dalam situasi ini, tidak jarang rakyat menilai Negara ikut berperan bersama pengusaha memanfaatkan kelemahan hukum.²³⁰ Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan hukum dan sangat berpeluang terjadi konflik komunal yang tak terbendung lagi, karena rakyat sudah muak dengan bualan mafia dan jenuh dengan sikap pembiaran dan ambigunya pemerintah.

Disamping itu, maraknya perampasan tanah yang dilakukan perkebunan swasta maupun asing tidak menutup kemungkinan merupakan permainan yang dilakukan para elit partai serta melibatkan oknum-oknum aparat keamanan dan pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perlawanan rakyat, baik itu secara kelompok – kelompok kecil maupun berupa aliansi dengan melibatkan puluhan organisasi rakyat serta ribuan orang yang menjadi pesertanya. Masih banyak dan teramat banyak permasalahan tanah di Sumatera Utara ini yang tidak pernah diselesaikan dengan baik “*win-win solution*”. Persoalan tersebut bisa menjadi bom waktu yang tinggal menunggu kapan tiba waktunya akan meledak, dan akan bermuara pada kerusuan masal yang akan menimbulkan banyak korban, baik itu korban jiwa dan harta. Padahal dalam Pancasila yang menjadi ideologi bangsa, sila ke-2 berbunyi : “*Kemanusiaan yang adil dan beradap*” dan sila ke- 5

²³⁰ Baca; Muhammad Amin, *UUPA dan Hak Rakyat, dalam Koran Harian Waspada, tanggal 24 September 2014 halaman B7 dan 25 September 2014, halaman A5.*

berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kedua sila itu sepertinya tidak berlaku kepada para petani yang melakukan aksi menginap dan mogok makan serta jahit mulut di depan kantor DPRD SU beberapa waktu yang lalu.

Suatu realita kasat mata, yang sangat memprihatinkan kita sekarang adalah tentang hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan sumber daya alamnya yang telah dikuasai penguasa dan pengusaha, termasuk pengusaha asing. Maka...”bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dapat lagi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi untuk kemakmuran penguasa dan pengusaha. Padahal dalam UUD-1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berbagai ungkapan kata dan kalimat, seperti tanah air, tanah tumpah darah, tanah leluhur, tanah kelahiran, pusat tanah, tanah keramat sampai kepada tanah yang dijanjikan (*the promised land*), punya arti yang menunjukkan betapa krusialnya hubungan manusia dengan tanah. Perang ‘abadi’ antara Israel dan Palestina pada hakekatnya adalah perang memperebutkan ‘*the promised land Nabi Daud*’. Memang tanah nampaknya tidak mungkin absen dari kehidupan manusia, sebab disitulah ia hidup, berkembang biak, dan mati. Sebab itu pula kalau kita membicarakan empat pilar kehidupan bernegara sebagai upaya memperkokoh ketahanan nasional yang melingkupi UUD-45, Pancasila, NKRI dan Kebinnekaan bangsa kita, maka hubungan fungsional keempat pilar itu dengan tanah dalam arti yang luas, sangat relevan dan signifikan. Karena itu, dapat dipahami apabila baik buruk hubungan antara manusia dengan tanah, dalam kehidupan rakyat Indonesia dewasa ini dan yang akan datang, dapat dilihat sebagai barometer terhadap hubungan fungsional keempat pilar itu dengan kehidupan berbangsa dan bernegera.

Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang sangat dalam dan mulia untuk kekejahteraan dan kemakmuran anak bangsa yang hidup di negeri ini. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* memberi makna bahwa seluruh kekayaan itu adalah karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan sifatnya kodrat dan karena itu bersifat abadi. Sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yaitu bahwa hubungan manusia dengan tanah mempunyai sifat kolektif maupun privat sebagai dwitunggal. Bumi, air dan ruang angkasa merupakan kekayaan nasional, pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmuran rakyat.²³¹

²³¹ Baca; Usman Pelly, *Ketika Penguasa Merangkap Pengusaha*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama MPR-RI dengan UNIMED, tanggal 25 Pebruari 2012.

Sila Persatuan Indonesia, hanya warga Negara Indonesia dapat berhubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, karena itu hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik tanah. Orang asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia hanya diberikan sertifikat hak pakai. Dan sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, bermakna bahwa tiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, dan adanya pemerataan yang berkeadilan.

Pada akhir 2010 ada 106 konflik, akhir 2012 lalu awal September 2013, menjadi 163 konflik. Dari 163 kasus, 97 konflik atau 60 persen, karena ada perusakan dan perambahan perkebunan. Lalu, 36 kasus atau 22 persen di sektor kehutanan, dimana angka perambahan, penebangan dan perusakan hutan cukup parah. Sedangkan catatan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), sejak 2005 hingga 16 Januari 2012, terjadi 2.794 sengketa lahan.

Beberapa konflik umat beragama, baik antarumat beragama maupun umat beragama dengan pemerintah yang terjadi di Sumatera Utara yang disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi atau sengketa tanah, antara lain :

1. Bentrokan antar warga suku Nias di Dusun Adian Nagoti dengan warga Desa Tolang, Kecamatan Sayurmatangi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terjadi pada Senin 23 Desember 2013. Sedikitnya 10 rumah dan satu tempat ibadah milik warga suku Nias dibakar. Warga Desa Tolang Jae diduga berang lantaran warga suku Nias melakukan penggarapan tanah dan pembangunan rumah di atas kawasan hutan register 6 Angkola. Mereka pun kecewa, hingga akhirnya, warga Desa Tolang melakukan penyerangan ke pemukiman suku Nias.
2. Konflik terjadi di tambak atau pesisir seperti di Belawan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tanjung Balai. Ada 21 kasus atau 13 persen konflik terjadi di sektor infrastruktur. Akibat konflik ini, 24 petani atau warga sekitar tewas. Konflik itu, melibatkan lebih 69.975 keluarga, luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar.
3. Korban tewas yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan, dari Kelompok Tani Sei Mencirim Medan, dan Kelompok Tani Padang Halaban Labuhan Batu. Lalu, Kelompok Tani Padang Lawas, melawan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Padang Lawas karena merusak hutan dan menghancurkan lahan hijau demi proyek mereka.
4. Konflik di sektor kehutanan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) atas tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembabatan hutan

oleh PT Gorda Duma Sari (GDS) di Kabupaten Samosir, perusakan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

5. Konflik di sektor pertambangan yang menyebabkan korban jiwa, antara lain oleh PT Sorik Mas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, dan Tambang Emas Martabe, milik PT Agincourt Resources. “Jika dilakukan pendataan komprehensif dan obyektif, dipastikan konflik lahan dan perambahan hutan berikut korban jauh lebih besar.”
6. Konflik antara perusahaan pertambangan emas PT G-Resource Martabe dengan warga Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan. Konflik itu memicu pembakaran mobil dan pipa limbah milik perusahaan tambang itu. Kejadian bermula ketika ratusan warga asal Desa Hutaraja, Muara Hutaraja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir, Raniate, dan Bandar Tarutung, Kecamatan Muara Batang Toru, datang ke lokasi dengan mengendarai sejumlah kendaraan bak terbuka. Mereka berusaha menghentikan proses penanaman pipa pembuangan limbah yang sedang berlangsung. Aliran pipa itu rencananya akan berakhir di tepian sungai. Tindakan warga dipicu kekecewaan karena perusahaan tetap membuang limbah ke sungai. Pembuangan limbah itu dinilai akan menghancurkan kehidupan warga yang bersumber di sungai itu.
7. Konflik agraria yang berlanjut pada konflik antarumat beragama adalah peristiwa penyerangan terhadap warga muslim kampung Melayu Silambo-Amplas Kab. Deli Serdang oleh warga non Muslim yang merugikan warga Muslim. Pada mulanya perebutan sumber ekonomi dan lahan pertanian di lahan HGU. Sampai hari ini konflik tersebut masih mengancam kerukunan dan disharmoni di tengah masyarakat.
8. Tanah Negara di sekitar masjid al-Khairiyah dan masjid Raudhatul Islam jalan Yos Sudarso Gg. Peringatan Kelurahan Silalas Medan Barat. Dimana tanah tersebut jelas-jelas milik PTPN II dan belum pernah dilepas kepada pihak ketiga. Di areal tanah Negara itu, telah berdiri rumah elite. Tidak hanya menguasai asset Negara, mafia tanah juga merubuhkan masjid.
9. Tapak tanah Masjid Nurul Hidayah Jalan Williem Iskandar-Pancing dekat MMTTC dari HGU PTP II yang dikuasai oleh pengembang, dan sampai sekarang masih sengketa dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi api dalam sekam, yang satu saat akan menjadi bom waktu yang tak terbayangkan akibatnya.
10. Pada bulan Juli 2016 yang lalu, terjadi konflik di Desa Lingga Tanah Karo antara masyarakat dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Tidak hanya itu alat berat juga dibakar massa. Konflik itu terjadi dipicu penolakan massa terhadap rencana relokasi mandiri korban erupsi gunung

sinabung. Masalah tanah, masyarakat menolak dan mengharapkan agar relokasi dilaksanakan di tempat lain, tapi rupanya ketahuan bahwa ada pengembang yang bermain di balik relokasi tersebut.

11. Bentrokan warga Karang Sari Rejo Kecamatan Polonia-Medan dengan oknum TNI AU pada tanggal 15 Agustus 2016. Bentrokan ini dipicu aksi unjung rasa warga buntut dari saling klaim kepemilikan tanah di kawasan itu. Puluhan prajurit melakukan sweeping ke seluruh rumah di kelurahan itu, sehingga ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan bahkan rumah ibadah pun tak luput disweeping. Akibat bentrokan, dua wartawan dan delapan warga cedera, termasuk pemukulan terhadap jamaah dan perusakan kotak infaq masjid yang ada di kawasan tersebut.
12. Dan mungkin masih banyak lagi yang sifatnya laten, dan tetap menyimpan bara api yang satu saat akan meledak lebih dahsyat. Dimana pemerintah, apakah ada unsur kesengajaan atau mereka telah disuap oleh asing dan aseng, sehingga lupa pada penderitaan rakyatnya.

J. Deradikalisasi dan Nalar Kerukunan Kerukunan.

Konflik atau kekerasan atas nama agama merupakan kejahatan terburuk yang pernah dan akan tetap mewarnai peradaban manusia. Perbuatan demikian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang paradoks, karena disatu pihak sesungguhnya agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi kenyataannya dijumpai kelompok atau individu dengan mengatas namakan agama malah berbuat kerusakan, konflik, melakukan berbagai kekerasan, sehingga agama yang diyakini anti kekerasan tersebut seringkali dituding dan harus bertanggungjawab terhadap kekerasan dan kerusakan yang dilakukan penganutnya. Mengapa agama yang mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesentosaan, kasih sayang dan nilai-nilai luhur lainnya itu di antara penganutnya ada yang tampil dengan wajah yang keras, garang dan menakutkan, ekstrimis, bahkan sebagai teroris. Agama dikaitkan dengan bom bunuh diri, pembantaian, penghancuran, dan lain yang menunjukkan penampilan agama yang menakutkan.

Memang, kondisi objektif dan permasalahan umat beragama saat ini tidaklah sederhana dan realitasnya teramat kompleks. Persoalan umat beragama kini tidak cukup hanya dilihat dari aspek sosial keagamaan semata, namun juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain yang menyangkut ekonomi, budaya, politik, moralitas, teologis dan bahkan persoalan yang menyangkut dunia global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi adalah sebagai salah satu ciri globalisasi yang menyebabkan dunia terasa semakin sempit, transparan dan tanpa batas sehingga hampir tidak ada satu wilayah yang luput dari jangkauan

globalisasi,²³² termasuk Indonesia dan wilayah-wilayah pedesaannya. Karena itu, dampak negatif globalisasi perlu kita waspadai karena dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa.

Radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu *radical* dan *isme*. Radikal berarti besar-besaran dan menyeluruh, keras, kokoh, akar, pangkal dan tajam dalam berfikir.²³³ Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis.²³⁴ Ada yang menyebutkan gerakan radikal itu dengan istilah *mutatharrifin* (ekstrimis), *Harakah Islamiyah* (Gerakan Islam), atau juga *muta'ashshibin* (kelompok fanatik), dan *Ushuliyah Islamiyah* (fundamentalis Islam), yaitu aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* (kaku) dan *literalis* (harfiah).²³⁵ Istilah itu menimbulkan satu citra tertentu, misalnya ekstremisme, fanatisme atau bahkan terorisme dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum radikal sering dikelompokkan sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan jika perlu.

Dalam perspektif historis, radikalisme agama di tanah air adalah warisan dari ketidakmampuan sebagian kelompok umat beragama menegosiasikan dogma dan doktrin keagamaannya dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan sebagai entitas yang menjamin pluralisme. Antagonisme politik dan ideologis antara agama dan negara ini, dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elite politik terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan agama di alam Indonesia merdeka. Selain itu, akibat dari pemahaman keagamaan yang simbolistik, nilai-nilai universal demokrasi, seperti: kebebasan, kesetaraan, pluralisme, dan hak asasi manusia belum dipahami sebagai bagian *inherent* dari pesan-pesan profetis agama. Sebagaimana hal ini ditunjukkan secara tegas dari upaya mereka menuntut formalisasi syariah dalam hukum dan perundang-undangan negara.

Kecenderungan menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* dan *literalis* itu ternyata tidak hanya ditemukan dalam dunia Kristen Protestan, tetapi juga ditemukan pada penganut agama-agama lain. Itulah sebabnya para orientalis kemudian menyebut kecenderungan serupa itu dikalangan masyarakat Muslim sebagai fundamentalisme

²³² Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, Bandung, 1997, h. 207-209.

²³³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005, h. 543.

²³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 719

²³⁵ Harir Dekmejian, *Islam and Revolution: Fundamentalism in The Arab World*, Syracuse University Press, Syracuse, 1985, h. 4.

Islam,²³⁶ klaim ini jelas sangat skematis dan merepotkan.²³⁷ Penamaan serupa juga diberikan kepada penganut agama lain semisal fundamentalisme Yahudi, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Sikh, dan lain-lain. Sesungguhnya banyak faktor dan penyebab yang memungkinkan suburnya gerakan radikalisme agama, antara lain :

1. Pemahaman keagamaan yang eksklusif, skripturalis, dan miskinnya kesadaran sejarah dalam penafsiran teks-teks kitab suci, telah mewariskan sikap-sikap yang fanatik, dogmatik, dan intoleran dalam menyikapi perkembangan global.
2. Ketidakpuasan terhadap kebijakan politik negara-bangsa modern yang dominatif dan manipulatif, berikut krisis yang diakibatkannya, telah menjadi tempat persemaian paling strategis bagi gerakan ini.
3. Kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dinilai sekuler, dimana agama tidak diberi tempat di dalam negara. Agama adalah urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, sedang negara urusan publik. Ajaran demokrasi yang menempatkan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*) dianggap telah mensubordinasi Tuhan. Oleh karena itu, gerakan radikalisme agama biasanya mengambil bentuk pada perjuangan mendirikan negara agama, negara teokrasi atau teo-demokrasi.
4. Kekecewaan terhadap kebobrokan sistem sosial yang disebabkan oleh ketidakberdayaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara religius. Radikalisme jenis ini bisa diekspresikan dalam bentuk perusakan terhadap tempat-tempat maksiat, pelacuran, perjudian dan sebagainya.
5. Keadilan politik. Radikalisme agama juga bisa muncul sebagai ekspresi perlawanan terhadap sistem politik yang menindas dan tidak adil.

Sesungguhnya konflik dan kekerasan atas nama agama diterapkan oleh penganut di semua agama, baik agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Yahudi dan sebagainya. Dalam sejarahnya, penggunaan kekerasan ternyata menjadi cara yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Szolgosz, grup N17 di Yunani, bahkan di Spanyol

²³⁶ James S. Piscatory, *Islam in the Political Process*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983, h. 160-180.

²³⁷ Disebut skematis, karena istilah yang muncul dari dunia Kristen itu tidak cocok digunakan untuk dunia Islam. Jadi khusus kasus Kristen. Hal ini bisa dilihat dari definisi fundamentalis itu sendiri yang diberikan *Encyclopedia of the Social Science* (1968), sebagai sebuah nama tentang gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat yang berkembang dalam dasa warsa sesudah perang dunia I. Gerakan ini teretus terutama di lingkungan gereja-gereja Baptis, Disciple, dan Pressbyterian dan beroleh dukungan dari sebagian kalangan pendeta. Disebut merepotkan, sebab Islam memiliki ajaran yang sangat fundamentalis yaitu rukun Islam dan rukun Iman, sehingga secara harfiah orang yang berpegang teguh pada ajaran fundamental tersebut dapat disebut fundamentalis dan radikal. Itulah sebabnya, banyak sarjana (Muslim dan non Muslim) berkeyakinan bahwa istilah itu hanya cocok digunakan untuk kalangan Kristen Protestan.

terdapat slogan yang berbunyi; terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan.²³⁸ Dengan perkataan lain, tindakan kekerasan atau konflik merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun, termasuk tentunya dari penganut agama apapun.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta kerukunan. Terciptanya kerukunan umat beragama mensyaratkan *pertama*, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. *Kedua*, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. *Ketiga*, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan, dan pola ibadah. Diantara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan. *Keempat*, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

Selain terdapat perbedaan yang kadangkala sulit dipertemukan, terutama dari segi teologi (ajaran ketuhanan), namun antarumat beragama sesungguhnya terdapat banyak kesamaan yang bisa dijadikan modal dasar untuk menjalin kebersamaan guna membangun persaudaraan dalam suatu masyarakat yang majemuk. Baik kesamaan dari sudut historis, sosiologis, antropologis, politis, maupun budaya. Karena kemajemukan adalah suatu kemestian yang tidak mungkin dihindari, apalagi ditolak, maka selayaknya umat beragama mencari titik temu dengan dasar kesamaan-kesamaan itu. Ini penting, karena untuk menghadapi masa depan yang berat akibat globalisasi, mau tidak mau orang harus menempuh hidup dalam suasana kemajemukan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, hidup dalam kemajemukan harus dijalani dengan pandangan optimistik.

Pada dasarnya terdapat tiga kategori sikap umat beragama terhadap ajaran agamanya. *Pertama*, adalah orang yang tidak terlalu mementingkan rasa keterikatan

²³⁸ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, terj. Satrio Wahono, dkk, Mizan, Bandung, 2001, h. 94-112.

terhadap ajaran agamanya karena dalam pandangannya ajaran agama itu adalah hasil rekayasa insani dan atas dasar itu layak saja dipandang sejajar dengan teori-teori keilmuan yang dapat dipandang benar dan juga dapat dipandang salah. Akibatnya dengan pola pandangan yang pertama ini akan mengalami suasana kejiwaan yang disebut dengan relativitas iman. Dengan pengertian lain semua iman itu relatif kebenarannya, tidak ada kebenaran mutlak yang menjadi pegangan peribadinya.

Kedua, adalah orang yang mengabsolutkan kebenaran ajaran agamanya dan tidak rela melihat orang lain menikmati kebenaran sesuai dengan prinsip anutannya. Pandangan seperti ini di satu sisi memiliki aspek positif karena begitu kukuhnya keyakinan terhadap kebenaran ajaran agamanya, namun di sisi lain pandangan seperti ini juga bukan kurang bahayanya manakala dihadapkan pada interaksi sosial. Sesuai dengan keragaman anutan yang ada dalam masyarakat, maka pandangan ini yang mengukur keimanan orang lain sesuai dengan dasar-dasar keimanan yang dipahaminya. Hal ini dalam ruang lingkup yang luas dalam hubungan antar etnis, agama atau bangsa, akan dapat menimbulkan riak-riak konflik sosial.

Ketiga, umat beragama yang memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap kebenaran ajaran agamanya dan juga dapat memahami mengapa umat yang lain dapat dengan khusus menikmati kebenaran ajaran agamanya.

Yang dimaksud dengan teologi perdamaian adalah rasa kesadaran secara bersama dari semua penganut agama untuk merumuskan konsep kepedulian sosial guna meningkatkan harkat dan martabat dari umat manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing. Merumuskan konsep teologi perdamaian ini dalam perkembangan kehidupan sosial, khususnya bangsa kita yang berada pada era reformasi dan transparan, dipandang semakin penting. Masalahnya sebenarnya tidak terletak pada ajaran agamanya, karena dapat disimpulkan bahwa ajaran agama-agama itu berada pada posisi pasif. Antara ajaran agama yang satu dengan yang lain tidaklah pernah menyinggung ajaran agama yang lain kecuali untuk intern penganut agama yang bersangkutan.

Konflik yang ditimbulkan oleh kedangkalan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama akan sangat berbahaya, manakala konflik yang berdimensi keagamaan ini dibungkus oleh kemauan lain dan mengatasnamakan agama, yang tidak mempunyai kaitan dengan agama itu. Misalnya, dorongan ambisi pribadi, kepentingan politis, melakukan teror terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, perumusan tentang konsep teologi perdamaian ini tanpaknya tidak cukup lagi hanya ada dalam tingkat kelompok elit agama, akan tetapi perlu dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih mengakar di tengah masyarakat dan khusus lagi pada tokoh muda. Para tokoh muda dari berbagai keragaman teologi ini perlu berbicara secara bersama guna menatap masa depan mereka yang lebih baik.

Pada tingkat pemikir muda, hal ini dipandang penting mengingat para tokoh muda inilah yang akan menjadi pemimpin institusi-institusi keagamaan ini pada abad mendatang. Berbicaranya secara bersama para tokoh muda ini dalam merumuskan konsep teologi perdamaian, bukan untuk membentuk mereka ke dalam kategori pertama dan kedua, karena kategori pertama adalah ciri orang yang tidak memperdulikan dan tidak memiliki rasa fanatisme yang posistif terhadap ajaran agamanya. Demikian juga bukan untuk menuju kepada kategori kedua, Karena hal itu hanya akan membawa umat beragama pada sikap kekerasan dalam memandang adanya perbedaan pandangan teologi.

Membangun kesadaran dan kepekaan terhadap kemajemukan serta keragaman. Dalam konteks ini, ketentuan perundangan yang dimiliki bangsa ini harus bertolak dan mempertimbangkan kemajemukan itu. Karena itu pula klaim-klaim bahwa suatu wilayah hanya boleh dihuni oleh suatu kelompok agama tertentu menjadi tidak relevan, apalagi jika dikaitkan dengan konsep wawasan nusantara. Di samping itu, agama-agama harus terus menerus diaktualisasikan. Agama-agama diupayakan dapat berfungsi memandu umatnya menjalankan kehidupan yang menghargai pluralitas, sambil menghindarkan penggunaan nilai-nilai agama dari tujuan politik yang sempit dan temporer yang bertentangan secara diametral dengan keluhuran nilai-nilai agama. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, kerukunan dan persaudaraan di antara umat beragama, etnik, suku dan golongan adalah suatu yang perlu diwujudkan. Dengan cara itu kemajemukan Indonesia akan menjadi potensi kuat dan kita semua terhindar dari bahaya disintegrasi.

Tugas kita ke depan tentu sangat berat, maka diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua elemen bangsa, baik ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk mengikis tindakan terorisme sampai ke akar-akarnya. Paling tidak langkah itu dapat dimulai dengan cara meluruskan paham-paham keagamaan yang menyimpang oleh ulama, menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dan politik oleh pemerintah. Serta menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai, toleran, aman, merdeka, religius, bertaqwa dan memiliki semangat kecintaan tanah air yang kuat. Dialog diperlukan untuk mengantarkan umat beragama saling memahami dan mengerti pola anutan masing-masing dan atas dasar itu maka lahir sikap saling menghargai keyakinan orang lain. Dalam suasana seperti inilah diharapkan umat beragama terhindar dari kekerasan atas nama agama.

Upaya lain untuk mengantisipasi gerakan radikalisme yaitu dengan mengembangkan kesadaran pluralitas secara tulus berdasarkan penghayatan bahwapluralitas ini merupakan takdir Tuhan, sehingga membangun kerukunan di tengah masyarakat yang pluralitas tersebut merupakan pesan Tuhan. Untuk itu pemberdayaan tokoh agama dan budaya perlu terus menerus menggunakan karismanya

sebagai perakat kebhinekaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peminjaman budaya asing yang terus menerus terjadi di tengah kehidupan masyarakat kontemporer di Indonesia tidak sampai mengalahkan budaya dan keberagamannya sendiri.

Kemudian mengkompanyekan agama yang terbuka, yang mengandung ajaran nilai dasar dan memulai pandangannya bukan dengan perbedaan agama, tetapi dengan kesamaan dan kesatuan umat manusia. Sebaliknya, umat beragama jangan menampilkan agamanya sebagai *religion fermee*, agama yang tertutup, agama yang tidak menjunjung tinggi peraturan, keterampilan, kohesi sosial yang tidak terbuka untuk perubahan kontekstual dan kebutuhan modern. Sebab agama yang tertutup hanya mengenal adanya istilah *fanaticism*, dan *propaganda* yang memandang bahwa orang-orang yang berada di luar agama harus dimusnahkan. Sikap suatu kelompok yang ingin memusnahkan kelompok lain yang melibatkan sentiment keagamaan sebagai landasan teologis, sebetulnya adalah sikap yang merusak martabat kesucian agama yang dipeluknya sendiri. Untuk itu perlu melanjutkan dan menggelorakan dialog antar-agama yang inklusif dan konstruktif, tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran aksi-aksi pemberdayaan umat beragama yang lebih kreatif, inovatif dan produktif ke arah kesejahteraan dan kemajuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun dalam soal kerukunan dan dialog antar umat beragama di Indonesia, sudah mengalami berbagai kemajuan. Kemajuan tersebut antara lain; *pertama*, usaha untuk menciptakan kerukunan sudah menambah kosa kata dalam bahasa Indonesia. “Istilah kerukunan, toleransi, dialog, dan sebagainya tidak lagi dianggap kata asing atau kata-kata yang mengasingkan penggunanya. *Kedua*, jika selama ini kata kerukunan dimasyarakatkan oleh pemerintah secara formal, kini masyarakat warga – yang terkadang disebut sebagai masyarakat sipil – sudah pula mewujudkan usaha kerukunan itu sendiri. “Hal itu dilakukan sebagai sebuah lanjutan atas anjuran pemerintah atau sebagai tanggapan atas kebutuhan nyata yang sedang mereka hadapi, terutama di daerah-daerah yang terjadi konflik kekerasan,

Ketiga, tampilnya pemuka-pemuka agama sebagai pemuka atau pemimpin umat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku warganya. Dalam hal ini, kita boleh berbangga karena mereka turut serta dalam memulai dan memasyarakatkan dialog antar umat beragama untuk mewujudkan kerukunan.

Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan Negara. Dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu

negara. Kerukunan umat beragama di Sumatera Utara pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, namun beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun antar-umat beragama, secara laten hingga kini masih sering muncul. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang. Karena itu upaya memelihara kerukunan harus dilakukan secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti.

Tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan. Misi agama atau dakwah yang kini harus digalakkan adalah misi dengan tujuan meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. Hal itu kemudian perlu dijadikan sebagai titik temu agenda bersama lintas agama.

K. Nalar Kerukunan Perspektif Sufi

Sejak abad pertengahan sampai sekarang, studi tentang agama terasa semakin berkembang. Sejak saat ini pula tumbuh kesadaran baru bahwa agama selain merupakan keyakinan dan pedoman hidup untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadi objek studi dan penelitian oleh para ilmuwan dan agamawan. Kajian agama-agama tidak hanya melalui pengamatan fenomena dengan menggunakan metode empiris yang dirumuskan dalam bentuk evaluatif dan diskriptif. Tetapi juga melakukan penelitian esoterik, eksoterik dan inklusif dengan pendekatan perennial untuk mencari titik temu yang hakiki.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan baru, para ahli dalam berbagai disiplin ilmu menaruh perhatian untuk mengadakan studi terhadap agama, karena mereka mengetahui bahwa agama mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan mereka menyadari bahwa tanpa mengetahui kedudukan dan peran agama dalam suatu masyarakat, maka tidak mungkin memperoleh gambaran lengkap mengenai masyarakat tersebut.

Sejarah mencatat kontak Islam dengan agama-agama lain, bahwa kelompok Islam yang paling toleran, paling simpati, paling terbuka, dan paling ramah terhadap agama-agama lain adalah para sufi. Oleh karena itu, dalam pembicaraan tentang perjumpaan Islam dengan agama-agama lain, sufisme adalah wakil Islam yang paling berhak dan paling pantas untuk diungkapkan. Tulisan ini diharapkan mengungkapkan pandangan sufi Suhrawardi tentang titik temu agama (*esoteris*) dan sikapnya terhadap agama-agama lain.

Nama lengkapnya adalah shihab ad-Din Yahya bin Habasy bin Amarak Abu Futuh Suhrawardi. Ia juga dikenal dengan sebutan Syeik al-Isyraq, terutama di kalangan para muridnya. Ia juga populer dengan sebutan Suhrawardi al-Maqtul. Agaknya penamaan ini sengaja disandangkan kepadanya, karena akhir hayatnya dibunuh. Ia dilahirkan pada abad ke-6 H di pedesaan Janizan, bagian utara Iran. Tidak ada yang tahu pasti tanggal kelahirannya. Penulis biografinya yang paling terkenal adalah Syahraruzi. Ia memperkirakan kelahiran Suhrawardi sekitar tahun 545-550 H atau 1166-1171 M.²³⁹

Suhrawardi belajar di bawah bimbingan Majd ad-Din Jili yang mengajarnya filsafat dan teologi di Maragha. Gurunya berikutnya adalah Fakh ad-Din al-Mardini (W. 594/1198), yang mengajarnya filsafat di Isfahan atau Mardin sekaligus sebagai gurunya terpenting dan banyak mempengaruhi jalan pikirannya.²⁴⁰

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, ia mulai mengembara menjelajahi pelosok-pelosok negeri Persia untuk berguru kepada berbagai syekh sufi (tidak diketahui siapa guru itu). Dalam pengembaraannya ini ia banyak menghabiskan waktunya untuk bertafakkur dan berdo'a ditempat ia beruzlah. Pada priode ini, ia juga melakukan perjalanan ke daerah anatolia dan Syiria. Namun sesampainya di syiria, sambutan yang semula simpatik dari sang sulthan Malik az-Zhahir (1186-1216) anak Salahuddin al-Ayyubi kepada Suhrawardi berubah menjadi bumerang yang menyebabkan kematiannya. Rasa tidak senang di kalangan ulama ketika itu terhadap pemikiran-pemikiran Suhrawardi yang di anggap mereka sangat berbahaya bagi umat Islam, dijelaskan sebagai isu sentral agar Salahuddin al-Ayyubi mengeksekusinya. Dan ternyata permohonan para ulama itu dikabulkan oleh Salahuddin al-Ayyubi dengan terlebih dahulu mengancam Malik az-Zhahir, untuk turun dari tahta kerajaan apabila ia tidak mengikuti pendapat para ulama ketika itu. Sehingga akhirnya Suhrawardi pun dipenjarakan pada tahun 587 H/1191 M, dan meninggal pada usia 38 tahun.

Boleh dikatakan bahwa pembicaraan tentang filsafat Islam kurang lengkap bila tidak menyatakan filsafat Iluminatif di dalamnya. Kurangnya pembahasan atau mungkin pengenalan kita terhadap filsafat Iluminatif selama ini dimungkinkan karena filsafat Iluminatif (*Hikmah al-Isyraqiyah*) tersebut tidak pernah diterjemahkan orang ke dalam bahasa latin.²⁴¹ Oleh karena itu pula filsafat iluminatif tidak pernah dikenal di dunia Barat. Tidak seperti karya-karya filsafat: Ibnu Sina, Farabi, Al-Ghazali dan lain-lain. (Baca; pra-Suhrawardi), yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa latin.

²³⁹ Syahraruzi, *Nuzhat al-Arwah wa Raudhat al-Arfah fi Tarikh al-Hukama wa al-Falasifah*, ed, S. Khursid Ahmad, Kairo, Nahda, 1976, h. 119-143

²⁴⁰ T. Izutsu, 'Ishraqiyah', *Encyclopedia of Religion*, disunting Mircea Eliade, 16 Volume, Macmillan, New York, 1987, h. 298.

²⁴¹ Sayyid Husain Naser, Filsafat Hikmah Suhrawardi, dalam Jurnal: *Ulumul Qur'an*, Edisi, 3/VII/97, h. 53.

Biasanya karya-karya filsafat muslim yang ditulis oleh orang-orang barat (seperti: Munk, Deboer berakhir pada Ibnu Rusyd). Kenyataan ini dimungkinkan karena filsafat iluminatif dianggap tidak berpengaruh pada skolastik latin. Oleh karena itu pula nama Suhrawardi tidak mungkin sejajar dengan nama Ibnu Sina, Farabi, al-Ghazali dan lain-lain. Padahal abad ke 7 hijrah atau abad ke 13 M bukan akhir pemikiran spekulatif dalam Islam, bahkan sejalan dengan melemahnya filsafat peripatetik Aristotelianisme pada abad ke 6 H atau abad ke 12 m di timur. Muncul aliran pemikiran sangat penting yaitu aliran Isyraqiyah (baca; filsafat iluminatif) yang digagas oleh Shihab Ad-Din Suhrawardi.²⁴² Filsafat iluminatif ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dunia Islam, khususnya di kalangan Syiah, tetapi kecil saja di dunia Barat. Perbedaan ini dimungkinkan karena pengaruh filsafat iluminatif ini tidak begitu membekas di Barat pada saat itu, yaitu pada masa kejayaan skolastis latin seperti yang disebut di atas.

Di samping itu banyak tuduhan yang dilontarkan kepada sufisme, bahwa beberapa sufi, seperti al-Hallaj, Ibnu al-'Arabi dan al-Suhrawardi, mengajarkan doktrin kesatuan agama-agama. Yang dimaksud dengan kesatuan agama-agama, menurut tuduhan ini, adalah semua agama pada hakikatnya adalah satu dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Perbedaan antara agama terletak hanya pada namanya, bentuknya dan cara ibadahnya, bukan pada tujuannya. Perbedaan itu tidak menghalangi para penganut masing-masing agama untuk sampai kepada tujuan yang sama (*esoteris*). Agama para penyembah berhala dan agama para penyembah api sama dengan agama para penyembah Tuhan. 'Abd al-Rahman al-Wakil menuduh bahwa para sufi beriman kepada kesatuan agama-agama, baik yang berasal dari angan-angan, khayal dan nafsu maupun yang berasal dari apa yang diwahyukan Allah kepada rasul-rasulNya. Bagi para sufi, iman dan tauhid sama dengan kufur dan syirik dalam Islam dengan petunjuk serta kesuciannya sama dengan agama majusi dengan kesesatan dan kekotorannya.²⁴³ Agama para sufi dengan pasti meniadakan azab. Karena Tuhan mereka, menurut agama ini adalah setiap orang musyrik dan setiap orang bertauhid, musthail bagi Tuhan mengazab dirinya sendiri.

Pembicaraan tentang persoalan ini berkenaan dengan pandangan dan sikap para sufi sebagai suatu kelompok Islam tentang agama-agama lain. Apakah Tuhan yang disembah orang-orang muslim, menurut sufisme adalah juga Tuhan yang disembah para penganut agama-agama lain ?. Apakah agama-agama lain musuh yang dijauhi, dilawan, atau kalau bisa dilenyapkan ?. Atau apakah agama-agama lain teman yang harus didekati ?. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis akan

²⁴² Disamping aliran Isyraqiyah, pada saat itu ajaran sufi Muhyi ad-Din Ibn 'Arabi juga berkembang di dunia timur menggantikan filsafat Aristotelianisme. Lihat, Husein Nasser, *Ibid*, h. 52.

²⁴³ Abd al-Rahman al-Wakil, *Hadzihi Hiya al-Sufiyah, Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Kairo, 1955, h. 93

memaparkan fakta-fakta historis yang menunjukkan pandangan dan sikap salah seorang sufi yang terkenal yaitu Suhrawardi terhadap agama-agama lain.

Atas dasar itu pula, penulis berupaya untuk mempresentasikan tentang fiasaf iluminatif untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang benar filsafat iluminatif tersebut bertolak belakang dengan filsafat *peripatetik* (khususnya dalam mengetahui 'kebenaran' suatu pengetahuan) atau filsafat iluminatif tersebut semata-mata menonjolkan unsur *asketisme* (sufistik) dalam menemukan 'kebenaran' universal, terutama tentang semangat penyemarak dialog esoteris agama. Hal ini dipandang perlu karena merupakan prinsip-prinsip filsafat iluminatif yang penting.

Dalam bahasa Arab, Isyraq berarti percahayaan atau illuminasi ; dan masyriq berarti Timur. Secara etimologis keduanya diturunkan dari kata syaraq yang berarti terbitnya matahari. Lagi pula kata sifat illuminasi '*musyriqiyyah*' dan '*masyaqiyyah*' (ketimuran) ; dalam bahasa Arab ditulis persis sama. Identifikasi simbolik timur cahaya yang sering digunakan pengertian itu oleh para ahli Isyraq menimbulkan kesulitan untuk memahaminya. Apakah ketimuran atau iluminatif. Sejak semula, dalam kitab *mantiq al-masyriyyin* yang sebahagian telah banyak hilang Ibnu Sina telah menerangkan adanya kearifan timur (baca: Hikmah al-Isyraqiyyah) yang lebih unggul ketimbang filsafat peripatik.²⁴⁴ Oleh karenanya kata '*masyriqiyyun*' juga dapat dibaca '*musyriqiyyun*' yang berarti iluminatif atau ketimuran (orientalisme).

Kesatuan maknawi antara cahaya dan timur dalam peristilahan filsafat Isyraqi berkaitan dengan simbolisme matahari yang terbit di timur dan yang menerangi segala sesuatu sehingga cahaya diidentifisir dengan *gnosis* dan *iluminaion*. Begitu pula Barat tempat terbenamnya matahari, disana kegelapan berkuasa, ia adalah tanah kebendaan, kebodohan pemikiran diskursif yang terjat dalam liku-liku logikanya sendiri. Sebaliknya Timur adalah alam cahaya dan wujud, negeri pengetahuan dan iluminasi yang mengatasi keterbatasan pemikiran *diskursif* dan *rosionalis*. Timur adalah negeri ilmu yang membebaskan manusia dari dirinya sendiri serta dari dunia, yaitu ilmu yang terpadu dengan kesucian.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Corbn,²⁴⁵ bahwa *Isyraqiyyah* adalah suatu pengetahuan yang bersifat ketimuran karena pengetahuan itu sendiri pengetahuan Timur Suhrawardi. Inilah sebabnya mengapa Suhrawardi mengaitkan kearifan Isyraqi dengan para filosof Yunani, seperti Asclepius, Phytgoras dan plato yang kebijakannya didasarkan atas pemurnian batin dan intuisi intelektual, bukannya atas dasar logika diskursif.

Kearifan Isyraqi menurut Nasser baik secara metafisik maupun secara histori mempunyai makna bentuk pemikiran *pra diskursif purba* yang bersifat intuitif (dzuqi),

²⁴⁴ Ibn Sina, *Mantiq al-Masyriqiyah*, Kairo, 1338 H/1919 M, h. 2-4.

²⁴⁵ *Ibid.*,

bukannya diskursif (bahtsi) yang mencari cahaya melalui sikap zuhud (asketisme) dan pembersihan rohani. Di tangan Suhrawardi kebijakan tersebut mengambil bentuk sebuah mazhab filsafat baru yang mengintegrasikan filsafat-filsafat Platonis dan Aristotelian dengan Angelologi Zoroasterian serta ide-ide Hermetik. Dan kemudian meletakkan semua itu kedalam rangka sufisme.⁸

Berkaitan dengan pendapat kedua penulis diatas, Ziai mengatakan, Corbin dan Nasser telah memberikan penekanan pada signifikansi Suhrawardi sebagai seorang pembangkit pemikiran Iran kuno. Menurutnya, kedua penulis ini berulang-ulang menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai kualitas mistis pemikiran Suhrawardi yang mendasar, namun tanpa upaya kajian sistematis terhadap dasar-dasar filsafat iluminasi. Karakteristik umum semacam itu lanjut Ziai meskipun berguna, tetapi tidak memberikan suatu pandangan komperhensif tentang filsafat iluminatif.⁹

Untuk menilai secara rinci peran Suhrawardi dalam kembangan pemikiran filsafat pasca Ibnu Sina, seseorang harus menggambarkan karakter pemikirannya. Peran Suhrawardi sebagai pensitesis 'kebijaksanaan' (*wisdom*) Yunani dan Iran dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan keagamaan dan meti tidak dapat dibatasi, sebelum melihat penangannya terhadap problem logika, fisika, matematika, dan metafisika. Untuk mengatakan bahwa Suhrawardi adalah seorang mistikus yang ditakdirkan untuk mengagungkan dan menghidupkan filsafat dan kebijaksanaan (hikmah) Iran kuno, dan untuk menggambarkannya sebagai seorang yang '*perenialis*', bijak, dan agung, tidak haris membatasi hakikat pemikirannya yang sebenarnya meskipun ia bukan seorang mistikus, tealog, filosof yang sistematis atau ideolog sejumlah bentuk nasionalisme Iran abad pertengahan.

Oleh karena untuk mengatakan sesuatu yang penting tentang pemikiran Suhrawardi, pertama-tama harus diteliti (dibatasi) hakikat dasar-dasar logika dan episteologi filsafat iluminasi yang jelas. Hanya dengan dasar analisis sistematis semacam itu dapat ditunjukkan apakah Suhrawardi seorang mistikus sistematisnya, adalah pembelaan, penjeasan, atau sistematisasi atas pengalaman-pengalaman mistis sebagai sebuah metode untuk menyingkap realitas.

Sukar mengidentifikasi sistem yang dipakai Suhrawardi walau dengan paradigma epistemologis apapun (seperti empirisme, rasionalisme dsb).¹⁰ Menurut Suhrawardi seseorang dapat tiba dengan kepastian melalui pengetahuan yang diperoleh dengan iluminasi. Namun ia tidak menolak kemungkinan mendapatkan pengetahuan

⁸ Husain Nasser, *Op.cit.*, h. 56

⁹ T. Izutsu, *Op.cit.*, h. 298

¹⁰ Mahdi Aminrazavi, *Suhrawardi's Rationalistic approach to Problem of Knowledge*, Pakistan; Islamic Research, Internasional Islamic University, 1990, h. 178-179

melalui model-model kognisi lainnya. Epistemologi filosofis Suhrawardi tersusun dari tiga elemen, yaitu: Defenisi, Pemahaman persepsi dan ide-ide bawaan.

Suhrawardi sulit menerima defenisi sebagai cara mencapai pengetahuan karena tidak hanya esensi sesuatu yang ingin diketahui yang harus didefenisikan, sebagaimana diperlihatkan kaum peripatetik Aristotelianisme, tetapi semua aksiden-aksiden dan atribut-atribut sesuatu juga harus didefenisikan. Defenisi tentang atribut-atribut ini diperlukan karena merupakan bagian penting dari esensi sesuatu dan proses pendefenisian ini secara praktis tidak mungkin dilakukan. Menurut Suhrawardi problem ini muncul karena: Semua defenisi akan mengarah pada konsep-konsep apriori yang tidak perlu didefenisikan ; kalau ini bukan masalahnya akan terjadi pengantian tanpa akhir dalam pendefenisian.

Dia menambahkan, jika hal di atas mungkin, maka ada elemen-elemen yang berada di luar defenisi, seperti suara, bau dan lain-lain. Dia menambahkan: "suara tidak bisa didefenisikan dengan benda lain dan umumnya sensasi sederhana tidak bisa didefenisikan."¹¹

Secara sederhana, Suhrawardi ingin menekankan bahwa defenisi perlu diambil untuk sesuatu yang penting dan nilainya dalam mencapai kebenaran tidak perlu dibesar-besarkan: "jelaslah bahwa batasan-batasan dan defenisi-defenisi sebagaimana yang dikemukakan oleh para peripatetik tidak akan pernah tercapai."

Berbeda dengan defenisi yang mendapat dukungan sangat lemah dalam epistemologi filosofis Suhrawardi, pemahaman persepsi (*innate ideas*) terlihat lebih signifikan. Hal ini karena kebanyakan benda yang tidak bisa didefenisikan dapat diketahui melalui pemahaman-pemahaman. Dengan alasan ini ia berkata: "Jadi mengetahui dan menadari suatu kegiatan menjadi tugas pemahaman."¹²

Pemahaman menurut Suhrawardi akan mapu membedakan antara entitas yang sederhana dan yang kompleks. Entitas yang kompleks didefenisikan dari segientitas tunggal dan bukan sebaliknya. Namun demikian, pemahaman kita tidak bisa terhindar dari problem yang sama, seperti yang dihadapi defenisi. Dihadapi pada sesuatu, yang kompleks bisa diketahui dari yang sederhana, tetapi bagaimana mengetahui cara yang sederhana ? disinilah dibutuhkan prinsip aksiomatik di mana segala sesuatu bisa didefenisikan. Jika tidak, kita kembali menghadapi problem mengetahui sesuatu melalui sesuatu lainnya dalam proses tanpa akhir ad infinitum sebagaimana ditegaskan oleh Suhrawardi: Tidak ada sesuatu yang lebih nyata dari apa yang bisa dipahami, selama semua pengetahuan kita datang dari pemahaman, maka semua yang dipahami bersifat bawaan dan tidak bisa didefenisikan.

¹¹ Husain Nassr, *Three Muslim Sages Caravan Books*, Delmar, New York, 1976, h. 105-108

¹² *Ibid.*, h. 61

Pada akhirnya pemahaman persepsi (*innate ideas*) menghadapi problem yang sama dengan defenisi. Namun demikian, Suhrawardi sama sekali tidak menolak kognisi jenis ini dan memandangnya perlu karena memungkinkan kita mengetahui sesuatu yang tidak dapat didefenisikan.¹³

Ada ide-ide bawaan yang dia pandang perlu sebagai alat untuk menghubungkan dua elemen lain dari segi epistemologi filsafatnya. Ide-ide bawaan memberikan kaitan penting antara pandangan Suhrawardi tentang ilmu pengetahuan dengan defenisi dan pemahaman persepsi yang memungkinkan dia menyajikan teori ilmu pengetahuan yang koheren dan konsisten. Apakah sifat dan struktur ide-ide ini kantian atau platonian masih belum jelas dalam karya-karya filsafatnya, dan hal ini tidak akan pernah jelas sebelum kita tela'ah karya-karya teosofisnya.

Ide-ide bawaan ini harus bersifat aksiomatik. Tetapi menurut Suhrawardi hanya cahaya yang memiliki sifat ini. Karena itu dapatlah disimpulkan bahwa ide-ide bawaan yang menjadi kunci menuju validitas epistemologi filosofis Suhrawardi adalah cahaya. Dengan pengertian ini cahaya merupakan tali penghubung antara karya teosofisnya dan karya filosofisnya.

Dengan demikian, maka konsep Suhrawardi tentang epistemologi filosofis didasari oleh pandangan bahwa sementara dalam beberapa domain diperlukan berbagai kognisi dan epistemologi. Namun akhirnya kepastian datang melalui iluminasi, yaitu pengetahuan tanpa perantara. Dalam pendahuluan *al-Isyraq* dia menyimpulkan teorinya 'presential know ledge' ia mengatakan:

*Ketika kita mengobservasi dunia untuk mendapatkan kepastian kejadian-kejadian didalamnya, kita lalu melandasi seluruh sains tertentu pada basis kepastian ini (matematika-astronomi). Dengan analogi, kita amati benda-benda tertentu dalam domain spritual lalu menggunakannya sebagai fondasi bagi benda-benda lainnya. Dia yang memiliki jalan dan metode selain ini tidak akan mendapatkan manfaat dari hal ini dan segera akan jatuh dalam keraguan.*¹⁴

Maka dengan jelas Suhrawardi telah menggambarkan bahwa filsafat pada umumnya dan epistemologi khususnya harus memiliki sebuah landasan 'Isyraqi' bila akan digunakan sebagai kognisi. Karena itu cahaya menjadi substansi ilmu pengetahuan dan pengetahuan sebagai substansi cahaya: Bila sesuatu tidak membutuhkan defenisi dan ekplanasi, sesuatu itu harus memiliki sifat yang jelas, dan tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari cahaya. Jadi tidak ada benda lain yang tidak membutuhkan defenisi selain cahaya.

¹³ Mahdi Aminrazawi, *Op.cit.*, h. 181.

¹⁴ Suhrawardi, *al-Talwihat; al-Thabi'ah*, Opera II, h. 22

Selain telah menampilkan sebuah teori ilmu pengetahuan yang rasional dan penting, Suhrawardi juga telah mengedepankan sebuah epistemologi filosofis yang menjadi basis awal bagi konsepsi tentang Isyraqi dan karya-karya esoterik lainnya. Inilah cara memahami analisis rasionalnya tentang teori ilmu pengetahuan.

Suhrawardi menggunakan hukum intuisi (*ahkam hads, hukum al-hads*) sebagai bentuk penyimpulan yang valid. Intuisi yang digunakan Suhrawardi disini mirip dengan sifat cepat mengerti (*quick wit*) Aristoteles. Tetapi Suhrawardi menggabungkan bentuk penyimpulan yang khas ini kedalam epistemologi filsafat iluminasi. Dengan menggunakan istilah teknis peripatetik yang dimodifikasi, ia menyamakan intuisi pertama dengan aktivitas intelek biasa dan kedua dengan aktivitas intelek suci. (*aql al-quds*).¹⁵ Tetapi ia menganggap tindakan intuisi terpenting adalah kemampuan subjek memahami banyak hal yang nampak dalam waktu singkat, tanpa guru. Dalam kasus seperti itu, intuisi bergerak menangkap istilah pengetahuan (*al-hadd al-awsath*) silogisme yang menyerupai penangkapan langsung (tanpa ekstensi temporal) definisi esensial, yaitu esensi sesuatu.

Proses ganda visi iluminasi (*musyahadah isyraq*) berlaku pada semua tingkat realitas. Berawal pada tingkat manusia dalam persepsi indra luar, seperti penglihatan. Mata atau subjek yang melihat, mampu melihat objek ketika objek itu sendiri disinari (mustanir) oleh matahari dilangit. Pada tingkat kosmik, setiap cahaya abstrak melihat cahaya-cahaya yang derajatnya berada di atasnya. Sedang cahaya-cahaya yang lebih tinggi secara terus-menerus saat visi, menyinari yang berada dibawahnya. Sumber cahaya (nur al-Anwar) menyinari segala sesuatu, dan Matahari Surgawi, Huraskhah Agung memungkinkan cahaya berlangsung akibatnya, pengetahuan diperoleh melalui sepasang aktivitas: visi iluminasi, dan daya pendorong yang mendasari prinsip ini adalah kesadaran sendiri. Karena itu setiap wujud mengetahui kesempurnaan masing-masing suatu tindakan mengetahui diri yang meliputi kerinduan untuk 'melihat' wujud yang kesempurnaannya berada di atasnya dan tindakan ini (baca: melihat) menggerakkan proses iluminasi.

Melalui proses iluminasi cahaya disebarkan dari asal usulnya yang tertinggi ke unsur-unsur terendah. Dalam artian, iluminasi disebarkan dari cahaya segala cahaya ketingkat manusia melalui prinsip-prinsip perantara tertentu, yaitu cahaya-cahaya pengendali (*al-anwar al-qahirah*) dan cahaya-cahaya pengatur (*al-anwar al-mudabbirah*). Di antara cahaya-cahaya pengatur terdapat cahaya-cahaya penting yang secara langsung mempengaruhi jiwa manusia, yaitu cahaya-cahaya *isfahbad*.¹⁶ Secara umum semua cahaya yang lebih tinggi mengendalikan dan menerangi cahaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya mampu melihat yang lebih tinggi.

¹⁵ *Ibid.*, h. 155

¹⁶ *Ibid.*, h. 201 dan 213-215

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penglihatan terjadi sebagai akibat pertemuan antara mata yang sehat dan objek yang bersinar. Kapanpun cahaya ada, mata akan melihat. Penglihatan dan iluminasi cahaya baik pada objek maupun pada subjek terjadi dalam masa tanpa durasi: pada saat subjek dan objek hadir berhadap-hadapan. Visi juga bekerja dalam cara yang sama, tetapi intrumennya tidak lagi mata, melainkan tindakan-tindakan kreatif imajinasi subjek yang disinari. Dan cahaya yang menyinari objek yang dilihat bukanlah cahaya jasmani. Ia adalah cahaya abstrak kosmologi iluminasi. Visi terjadi jika tidak ada halangan antara objek dan subjek. Karena itu, segala sesuatu bergantung pada cahaya, yang dijelaskan dalam teori iluminasi mengenai emenisi cahaya.

Suhrawardi menyebut pancaran pertama cahaya, cahaya-cahaya malaikat tertinggi atau cahaya terdekat (*al-nur al-aqrab: Cahaya I*). Ia berkontemplasi tentang cahaya segala cahaya dan karena tidak ada penghalang di antara keduanya, maka ia menerima iluminasi secara langsung dari-Nya. Melalui iluminasi ini, muncul cahaya baru (*cahaya abstrak ke II*) dimana ia menerima dua iluminasi. Pertama secara langsung dari cahaya Agung dan yang kedua cahaya pertama. Proses pancaran berlanjut dalam cara yang sama. *Cahaya abstrak ke III* menerima empat kali iluminasi, yaitu dua kali dari cahaya di atasnya (yaitu: cahaya abstrak ke II yang menerima dua iluminasi) ditambah satu cahaya dari cahaya segala cahaya dan satu cahaya lagi dari cahaya pertama. Kemudian proses pancaran berlanjut dengan cara yang sama, dan munculah cahaya abstrak ke IV menerima iluminasi delapan kali, yaitu: cahaya abstrak ke II yang menerima dua iluminasi (cahaya) di tambah cahaya abstrak ke III, yang menerima empat cahaya dan di tambah cahaya segala cahaya dan cahaya pertama. Kemudian proses pancaran berlanjut dengan cara yang sama, dan munculah cahaya abstrak ke V menerima enambelas kali iluminasi, jumlah cahaya-cahaya (dilambangkan dengan cahaya abstrak) meningkat sesuai dengan urutan $2n-1$, dengan cahaya terdekat (cahaya pertama) sebagai anggota pertama urutan ini.¹⁷

Para ilmuwan di dunia Timur melakukan penelitian agama bukan untuk objek studi dan diteliti semata, tetapi dipelajari untuk diterima sebagai keyakinan dan diamalkan sebagai pedoman hidup. Pemikiran terhadap agama dilakukan oleh orang Timur dalam rangka memperkokoh keyakinan dan keimanan yang dianut. Para ilmuwan tersebut antara lain;

Thaha Husein (1889-1973); yang mengatakan bahwa antara Islam dan Kristen terdapat substansi yang sama, sebab pada esensinya Islam bukanlah alternatif bagi Kristen melainkan pelengkapannya.²⁴⁶ Abul Kalam Azad (1888-1958); yang terkenal

¹⁷ *Ibid*, h. 126-127

²⁴⁶ Thaha Husein, *Mustaqbal al-Saqofat Fi Mesihir*, dalam Al-Majmu'at al-Kalimat li Mu'allafat al-Lubnany, Beirut, 1973, h. 33.

dengan istilah *al-Din Wahid wa al-Syari'at Mukhtalifat, no difference in Din, difference only in Shara'*, agama tetap satu dan syariat berbeda-beda.²⁴⁷ Fazlur Rahman (1919-1988); yang menyebutkan bahwa tema pokok Al-qur'an ada lima, yaitu Tuhan, manusia, alam semesta, wahyu dan eskatologis. Dimana kelima tema pokok ini ada dalam setiap agama, terutama agama wahyu.²⁴⁸

Demikian juga Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986); yang cukup banyak berperan dalam dialog tiga agama besar, Yahudi, Kristen dan Islam yang pada dasarnya adalah satu rumpun yaitu Ibrahimik Religions.²⁴⁹ Sayyed Husein Nasr (L.1933); yang mengatakan bahwa esensi spritualitas Islam, seperti yang terungkap dalam Al-qur'an adalah realitas prinsip tauhid (keesaan) yakni mengenal Allah Yang Satu. Akan tetapi, Allah Yang Satu itu menciptakan umat manusia dalam berbagai kecenderungan yang majemuk sehingga pengenalan akan Allah itu menubuh dalam berbagai ekspresi.²⁵⁰ Frithjof Schuon (lahir :1907); ahli perbandingan agama kontemporer dan salah satu pimpinan aliran filsafat perennial (metafisika tradisional keagamaan yang memperlihatkan Ilahi dalam segala sesuatu, atau yang disebut dengan istilah esoteris.²⁵¹ Dan Ahmed Hosen Deedat (1918-2006); ahli perbandingan agama kontemporer yang berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan dialog antaragama kepada pusatnya, yaitu dialog esoteris antaragama. Artinya mempertemukan semua agama pada ajaran dasar agama sebagai misi kenabian yang terungkap dalam kitab suci.

Untuk mengembalikan agama-agama ke pusatnya, perlu diajukan pendekatan alternatif yang bersifat universal dan konprehensif. Pendekatan tersebut berangkat dari pandangan bahwa agama sebagai realitas universal yang transenden dan telah dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental metafisis sebagai realitas tertinggi yang melampaui semua ketentuan dan batasan sebagai sesuatu yang absolut dan tak terbatas.

Pendekatan alternatif tersebut di atas adalah pendekatan tradisional. Kata tradisional ini bukan dalam arti adat atau kebiasaan, melainkan sebagai realitas asal yang transenden, yang telah ada sejak azali dan akan selalu ada selamanya dan manifestasinya dalam sejarah berupa agama dan juga filsafat, sains, seni dan lain-lain. Paham tersebut adalah filsafat perennial.

²⁴⁷ Abul Kalam Azad, *The Turjuman al-Qur'an*, Vol.I, terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh Syed Abd al-Lathief, Hydrabad, 1981, h. 153-160.

²⁴⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1983.

²⁴⁹ Ismail Raji al-Faruqi, "Islam and Christianity: Problems and Perspectives," in *The World in the Third World*, ed. James P. Cotter (Washington, DC: Corpus Books, 1968), pp. 159-81. and "Islam and Other Faiths," and *Historical Atlas of the Religions of the World* (New York: MacMillan, 1975)

²⁵⁰ Sayyed Husein Nasr, *Knowledge and the Sacred*, terj. Suharsono, *Intelegensi dan Spiritualitas Agama-Agama*, Inisiasi Press, Jakarta, 2004.

²⁵¹ Frithjof Schuon, *The Transendent Unity of Religions*, terj. Saafroeddi Bahar, *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.

Dengan menggunakan pandangan kaum tradisonal (perennialis), dalam menghadapi pluralitas agama tidak terhenti pada bentuk, tetapi dilanjutkan sampai pada esensi atau tidak terhenti pada fenomena, tetapi diteruskan sampai pada nomena, karena semua yang ada terdiri dari lahir dan batin, bentuk dan rupa. Keberadaan agama-agama yang majemuk ini ada satu realitas absolut yang menjadi pengikat bersama pada tingkat transenden dari semua agama.

Artinya, dengan pendekatan filsafat perennialisme, agama-agama yang dipeluk oleh manusia tidak mungkin menyebabkan timbulnya konflik sosial. Sebab seperti dijelaskan Huston Smith (1918-1995), agama pada tingkat esoterik atau *common vision* mempunyai kesatuan dan kesamaan gagasan dasar. Diamana semua agama terikat oleh persamaan suatu realitas Absolut, Universal dan Azali pada tingkat transenden.²⁵² Dengan pendekatan filsafat perennial, Islam memandang bahwa doktrin tentang ke-Esaan Tuhan tidak hanya menjadi milik Islam sebagai agama, melainkan lebih merupakan inti dari setiap agama. Dengan kata lain, agama-agama pada dasarnya lebih menegaskan doktrin ke-Esaan Tuhan tersebut walau dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, Islam menyeru seluruh umat beragama agar berpegang pada titik persamaan tersebut, yakni keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat menjadi landasan teologis yang kokoh dalam membangun kerukunan umat beragama. Orang muslim dapat berdampingan dengan orang non-muslim atau sebaliknya dengan tetap memperhatikan dan menghormati rambu-rambu agamanya masing-masing. Kesamaan pandang tersebut dapat memperkokoh hubungan antara kelompok umat beragama yang ada di tengah masyarakat bangsa.

Dalam kaitan ini kita memperhatikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Agar mengajak para ahli kitab untuk menuju ke titik persamaan, yaitu menyembah Tuhan Yang Esa dan tidak mempersekutukan-Nya, seperti tersebut dalam surat Ali Imran ayat 64;

Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".²⁵³

Ayat tersebut di atas mengesankan adanya pengikat persamaan suatu realitas absolut, universal dan azali pada tingkat transenden dari semua agama. Sejalan dengan filsafat perennial, Islam memandang bahwa doktrin tentang *al-tauhid* tidak hanya menjadi pesan milik Islam sebagai agama, melainkan lebih merupakan inti dari nilai

²⁵² Huston Smith, *The Religions of Man*, Sidney, New York, 1958, h. 18

²⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 1995, h. 86.

agama wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabi merupakan penegasan mengenai doktrin tauhid yang menjadi inti semua agama, meskipun menggunakan bahasa dan istilah yang berbeda-beda.

Dalam Islam, ajaran untuk hidup bersama para penganut agama lain dalam suatu komunitas mendapatkan landasan teologis berupa seruan untuk mengajak seluruh umat bergama untuk sama-sama berpegang pada pokok pangkal kebenaran universal yang tunggal yaitu keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid. Keyakinan ini menjai titik temu *common platform* bagi semua agama. Al-qur'an meletakkan kreteria keselamatan bagi pemeluk agama apapun dengan tiga butir kewajiban, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Kenabian, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Mereka yang melaksanakan tiga macam kewajiban tersebut tidak perlu takut dan khawatir karena akan mendapat pahala dari Allah. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 62;

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²⁵⁴

Dengan demikian kerukunan hidup umat beragama dan kesatuan mereka mendapatkan landasan teologis yang kokoh, baik secara ritual maupun secara sosial. Dengan uraian ini menjadi jelas bahwa Islam sebagai agama tidak mempunyai keberatan dan hambatan dalam menghadapi pluralitas agama, karena pluralisme itu sendiri juga telah menjadi *sunnatullah* yang harus diterima sebagai kenyataan yang tidak perlu dihindari.

Salah satu contoh wacana dialog agama yang sangat bagus antara sufisme dan tradisi-tradisi dan agama-agama lain adalah dialog yang dilakukan Syihabuddin Suhrawardi (w. 1191 M), pendiri mashab illuminasi atau Isyraq. Filsafat Illuminasi Suhrawardi adalah hasil dialog spiritual atau intelektual yang dilakukannya secara sungguh-sungguh dengan tradisi-tradisi dan agama-agama lain dalam kapasitasnya sebagai seorang sufi yang filosof atau sebagai seorang filosof yang sufi. Suhrawardi mengambil unsur-unsur dari berbagai sumber untuk membangun filsafat illuminasinya. Sumber-sumber itu diakuinya berasal dari satu sumber, yaitu Hermes Agathodemon (yang dalam Islam tokoh ini dianggap sebagai Nabi Idris). Hermetisme disebarkan oleh kaum Sabean, “para pengikut Nabi Idris”, yang memperkenalkan ke dunia Islam tulisan-tulisan yang dianggap berasal dari Hermes.

²⁵⁴ *Ibid.*, h. 19.

Dalam mengkonstruksi filsafat illuminatifnya seperti halnya kaum peripatetik Suhrawardi juga menggunakan logika. Namun yang merupakan pandangan khas iluminasionis tentang posisi logika adalah bahwa logika dianggap subordinat kemampuan potensial jiwa sendiri untuk diberi inspirasi oleh ruh Ilahi, yang terjadi dalam suatu 'konfirmasi' dalam wujud individu, yang betul-betul membimbing manusia melawan putusan-putusan dan penyimpangan-penyimpangan palsu. Kebijakan ini pada umumnya diperoleh melalui iluminasi (Isyraq), dan sebagian dibimbing dengan memperkenalkan logika. Karena dalam pandangan ini, intuisi, ilham, dan wahyu adalah alat-alat yang diketahui sebelum investasi logis dan sebagai dasar bagi elaborasi pengetahuan selanjutnya, dan lebih jauh berperan sebagai langkah pertama dalam membangun ilmu yang benar.

Di dunia Islam pengetahuan esoterik Hermetik sampai kepada Suhrawardi. Kebijakan Iluminasi (hikmah al-Isyraq) sebagai aktualisasi otentik "filsafat perenial" umat manusia mempunyai sumber awalnya pada wahyu-wahyu Ilahi yang diterima Nabi Idris, yaitu Hermes, yang dengan demikian menjadi 'nenek moyang' filsafat. Kebijakan Hermetik ini kemudian tersebar kepada generasi-generasi berikutnya melalui dua jalur; Yunani-Mesir dan Iran kuno. Cabang pertama Hermetisme, setelah berkembang di Mesir Kuno, tersebar di Yunani, yang melahirkan para bijak gnostik seperti Empedokles, Plato, dan Plotinus. Tradisi ini kemudian dipertahankan dalam Islam oleh para sufi awal termasuk Dzunnun al-Misri (w. 859 M) dan Abu Sah al-Tustari (w. 896 M). Cabang kedua Hermetisme, yang diwakili di Iran Kuno oleh para raja pendeta mistik Kayumarth, Faridun, dan Kay Kusraw, berkembang kedalam sufisme Abu Yazid al-Bistami dan al-Hallaj.¹⁸

Suhrawardi memandang dirinya sebagai titik temu historis antara dua tradisi ini, yang menyatukan dan memadukan ke dalam suatu keseluruhan organik eksistensial seluruh unsur penting dari kebijakan Hermetik yang dihasilkan dalam rangkaian panjang perkembangannya. Kepada keseluruhan ide-ide gnostik yang terpadu itu, Suhrawardi memberikan suatu reformulasi filosofis yang khas, yang tekstruktur dari sudut simbolisme Zoroastrian tentang cahaya yang gelap. Istilah Zoroastrianisme di sini dipahami dalam pengertian ajaran "esoterik" spiritual Zoroaster yang dapat dibedakan dengan ajaran "esoterik"-Nya.¹⁹

Suhrawardi memandang dirinya sebagai penyatu kembali apa yang disebutnya al-hikmah al-laduniyah (kebijaksanaan Ilahi) dan al-hikmah al-'atiqah (kebijaksanaan kuno). Ia yakin bahwa kebijaksanaan ini adalah perenial (abadi) dan universal, filsafat perennis dan universalis, yang terdapat dalam berbagai bentuk di antara orang-orang

¹⁸ AJ. Arberry, *Sufisme; An Account of the Mystics of Islam*, Unwin Paperbacks, London, 1979, h. 26-27

¹⁹ T. Izutsu, *Op.cit.*, h. 298

Hindu, Persia, Babilonia, Mesir Kuno dan orang-orang Yunani sampai masa Aristoteles.²⁰

Kadang-kadang para sarjana modern menuduh Suhrawardi mempunyai sentimen anti Islam dan berusaha menghidupkan kembali Zoroastrianisme melawan Islam.²¹ Pembela Sayyid Husain Nasr terhadap Suhrawardi perlu disimak. Pemikir sufi ini berkata:

Adalah benar, seperti banyak diilustrasikan, bahwa Suhrawardi menggunakan simbol Zoroastrian, sebagaimana orang-orang lain seperti Jabr Ibn Hayyan menggunakan simbol Hermetik, untuk menggunakan doktrin-doktrinnya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa doktrinnya adalah anti Islam. Itu adalah universalitas Islam yang memperkenalkannya untuk mengintegrasikan banyak unsur yang berbeda dan memungkinkan esoterisme Islam untuk memakai bahasa bentuk-bentuk terdahulu kebijaksanaan tradisional.²²

Agama-agama lain bagi Suhrawardi bukanlah musuh yang harus di jauhi atau dilawan, tetapi adalah teman yang harus didekati untuk diajak dialog. Agama-agama lain itu tidak merusak dan menyimpangkan Islam. Tetapi sebaliknya agama-agama lain itu dapat memperkaya pemahaman tentang Islam. Di sinilah terletak universalitas Islam karena Islam sangat luas dan mencakup agama-agama lain dalam pengertian ajaran-ajaran esoteriknya. Kebijakan perenial dalam agama-agama lain adalah juga kebijaksanaan perenial dalam Islam. Karena itu Islam dapat melakukan dialog yang sejati dengan agama-agama lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Artinya, Islam mesti mengakui kebenaran yang dimiliki oleh agama lain, namun ia tidak lebur dalam kebenaran yang ada pada agama lain itu dengan merelatifkan agamanya sendiri.

Sepanjang yang dapat penulis amati, filsafat illuminatif Suhrawardi sesuai dengan prinsip kesatuan agama atau esoteris antaragama yang tertera di dalam Al-qur'an, yaitu: Prinsip *pertama*, Al-Qur'an mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada seluruh umat manusia. Firman Allah:

Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. An-Nahl: 36)

²⁰ Lihat, Sayyid Husain Nasr, *Three Muslim Sages*, h. 61

²¹ Baca; T. Burckhardt, *Nature sait Surmonter nature, Etudes Traditionnelles*, Januari-Pebruari 1950, h. 10-14

²² Sayyid Husain Nasr, *Op.cit.*, h. 79

Prinsip *kedua*, Alquran mengajarkan pandangan tentang kesatuan *nubuwwat* (kenabian) dan umat yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah: “Sesungguhnya (agama Tauhid) Ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku. (Q.S. Al-ANbiya’: 92)

Prinsip *ketiga*, Alquran menegaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan langsung agama-agama sebelumnya, khususnya yang secara genealogis paling dekat ialah agama-agama Semitik-Abrahamik. Firman Allah:

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. Asy-Syura: 13)

Prinsip *keempat*, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahl al-Kitab). Firman Allah:

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri". (Q.S. Al-Ankabut: 46)

Prinsip *kelima*, dari prinsip di atas semua membawa akibat yang sangat logis yaitu tidak boleh ada paksaan dalam agama. Firman Allah:

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Q.S. Yunus: 99)

Dari lima prinsip di atas jelaslah bahwa secara esoteris semua agama itu sama tidak bertentangan dengan Al-qur'an, sedangkan perbedaan dalam bidang eksoteris dan manhaj, seyogianya tidak harus membawa pada pertentangan dan perselisihan.

Dari pembahasan tentang filsafat illuminatif tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Suhrawardi bukan sebuah konstruksi teologi ataupun teosofi juga bukan *sagesse orientale* (hikmah dari timur). Tetapi filsafat iluminatif merupakan filsafat mistis yang sistematis yang mengabaikan dogmatis dengan diposisi

dinamis. Meskipun mengandung sophia (kebijaksanaan) dalam pengertiannya yang kaku, ia pada dasarnya adalah sebuah konstruksi filsafat yang bertujuan menyelidiki sesuatu, termasuk jawaban-jawaban atas sesuatu itu, yang diungkapkan secara radiks dan sistematis.

Bagi Suhrawardi, perjumpaan dan dialog antara Islam dengan agama-agama lain bukan sekedar untuk memahami agama-agama lain dan menciptakan kerukunan, tetapi lebih jauh untuk memperkaya, menyuburkan, dan memperdalam pengalaman keagamaan dan spiritulnya. Ia sangat terbuka dan siap menyerap tradisi-tradisi agama-agama lain, tanpa mengingkari iman yang ia pegang teguh, tanpa kehilangan identitas asli, tanpa jatuh ke dalam sinkretisme, dan tanpa bermaksud menyinggung perasaan penganut agama-agama lain. Di sini penulis ingin mengatakan, bahwa belum pernah seorang sufi pun, sepengetahuan penulis, berpindah kepada agama lain, tetapi sebaliknya, karena keramahan dan daya tarik sufisme, tidak sedikit orang lain berpindah kepada pemeluk Islam.

Suhrawardi memang mengambil berbagai unsur dari tradisi-tradisi dan agama-agama lain untuk membangun filsafat Illuminasinya. Ini berarti bahwa ia dipengaruhi tradisi-tradisi dan agama-agama di luar Islam. Tetapi perlu dicatat bahwa Suhrawardi tidak hanya "pihak yang menerima" pengaruh dari luar Islam, tetapi juga kemudian menjadi "pihak yang memberi" pengaruh kepada tradisi-tradisi dan agama-agama diluar Islam. Dengan demikian terbukti bahwa perjumpaan Islam (sufisme filosofis Suhrawardi) dengan agama-agama lain, merupakan dialog agama-agamayang menjadikan Islam versi sufisme tidak hanya sebagai pihak yang memahami agama-agama lain, tetapi juga sebagai pihak yang dipahami agama-agama lain, tidak hanya sebagai pihak yang dipengaruhi agama-agama lain, tetapi juga sebagai pihak mempengaruhi agama-agama lain, tidak hanya sebagai pihak yang bersifat ramah terhadap agama-agama lain, tetapi juga sebagai pihak yang menerima keramahan agama-agama lain.

L. Nalar Kerukunan dan Ekonomi Agama-Agama

Dalam sejarah peradaban Islam mencatat bahwa Rasulullah saw. dalam berinteraksi membangun kesejahteraan umat lintas iman, pernah mengambil pembantu dari orang yahudi sebagaimana diriwayatkan dalam Hadits Imam Bukhari berikut ini :

"Dari Anas r.a. berkata : Ada seorang yahudi menjadi pembantu Rasulullah saw. kemudian sakit , lalu Rasulullah saw. menjenguknya, dan duduk di samping kepalanya, kemudian Rasulullah berkata : masuklah Islam kamu !, kemudian ia memandangi wajah ayahnya yang duduk disampingnya. Kemudian ayahnya

berkata : ikuti Abu al-Qasim (Rasulullah saw), maka ia masuk Islam . kemudian Rasulullah pergi sambil berkata : Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka .(H.R. Bukhari)

Rasulullah Saw. juga pernah bekerjasama dengan orang yahudi dalam menggarap kebun, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut ini : *“Dari Nafi’ dari Abdullah r.a. berkata : Rasulullah saw. memberikan tanah Khaibar kepada Orang yahudi untuk digarap dan ditanami, dan bagi mereka separuh dari hasilnya”*(H.R. Bukhari). Dan *“Dari Aisyah r.a. berkata : bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Dari beberapa riwayat di atas menunjukkan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk bekerjasama dengan umat yang lain dalam rangka membangun kesejahteraan. Sikap ini dapat dijadikan inspirasi masyarakat di Indonesia yang mayoritas Islam yang konstelasi masyarakatnya sangat plural dan heterogen, baik dari aspek agama, ras, etnis, dan strata ekonomi. Mungkin sudah saatnya Indonesia menawarkan multi-budaya, toleran, inklusif, ekonomi agama-agama membangun kesejahteraan umat. Indonesia termasuk Negara yang aman dan nyaman bagi tumbuhnya agama-agama di dunia, hampir tidak ditemukan konflik massal antarumat beragama. Walaupun ada konflik, hal itu lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik, sedangkan faktor ajaran agama tergolong rendah.

Kalaupun ada konflik di tengah masyarakat kesannya antarumat beragama, akan tetapi hal itu lebih disebabkan oleh nilai *property* dan hak kepemilikan sesuatu tempat atau interaksi perekonomian lainnya. Pada dasarnya, etiap umat beragama di dunia pasti berbeda, tetapi juga terdapat titik temu secara teologis antarumat beragama. Sesungguhnya tidak ada yang namanya absolutisme agama, itu berarti antarumat beragama tidak bisa menyalahkan ajaran agama orang lain yang dapat dilakukan hanya menghargai agama orang lain. Pengertian antaragama dan keberagamaan harus dipahami secara proporsional. Agama, terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat ilahiyah.

Inklusivitas Islam di Indonesia akan dapat meningkatkan mobilitas ekonomi umat dan menjadikannya sebagai agama yang banyak diminati oleh masyarakat dunia, karena misi kedamaian dan keselamatan yang dibawa oleh Nabi Saw. Hal ini menjadi faktor utama menjadikan Islam sebagai kekuatan baru di Indonesia. Dapatlah direnungkan sekaligus berhasrat untuk menteladani rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Saw dalam melakukan perubahan dan membangun peradaban yang religious, serta sikapnya berdialog dengan non Muslim yang produktif. Mudah-mudahan sebagai

khaira umat kita dapat mengambil pelajaran dari rahasia keberhasilan Nabi Saw dan menteladani perilaku, perbuatan dan perjuangannya, sehingga negeri ini mampu bangkit dari berbagai keterpurukan, dan kemerosotan akhlak demi kemajuan masa depan bersama.

Realitas ekonomi agama-agama, penulis temukan di India sewaktu melakukan riset disana selama lima belas hari, dengan mewancarai sejumlah tokoh baik Muslim maupun Hindu. Prof. Dr. Mohammad Ishaque dosen Islamic Studies Jamia Millia Islamia New Delhi, mengatakan bahwa Pemerintah India tidak ikut campur dalam urusan pengamalan agama dan keyakinan. Pemerintah India tidak memiliki Departemen Agama, dan tidak memiliki regulasi pendirian rumah ibadah. India memberikan kebebasan kepada umat beragama mendirikan rumah ibadah, tapi tidak boleh mendirikannya di atas tanah pemerintah. Namun, bagi rumah ibadah yang tergolong besar dan produktif ditarik pajak dari rumah ibadah tersebut, hal ini yang membedakannya dengan Indonesia. Masalah pengamalan ajaran agama diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing penganut agama. Pernah terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah India, dimana komunitas Muslim dan Kristen negara bagian Madhya Pradesh mengecam pemberlakuan undang-undang terkait konversi agama yang baru. Yang menjadi masalah bagi kedua komunitas agama ini, setiap individu yang berniat konversi agama harus mendapat persetujuan dari negara setidaknya satu bulan sebelum berpindah agama.

Dalam konferensi tersebut, penulis juga memaparkan tentang kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dr. Gautam Kumar Jha mengatakan bahwa di India masyarakatnya saling memuji, orang muslim memuji Hindu dan sebaliknya masyarakat Hindu memuji Islam. Artinya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Di India ini ada satu lembaga yang disebut “*Ram Khrisna*”. Lembaga ini melakukan misi kemanusiaan yaitu mengadakan pengobatan gratis bagi siapa saja dan semua umat beragama, tidak hanya bagi umat Hindu. Lanjut Dr. Gautam, bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan sama sekali, justru Islam mengajarkan kedamaian dan keselamatan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi setelah itu terjadi konflik internal yang didasarkan pada kepentingan politik, maka sekarang diperlukan Pan Islamisme.

Contoh lain, di India ini ada satu kerjasama lintas agama yang produktif, yaitu ekonomi agama-agama. Misalnya, umat Hindu memerlukan banyak patung, tapi yang membuatnya adalah umat Islam, sehingga terjadi mobilitas ekonomi yang dapat meningkatkan tarap hidup umat beragama demi kemajuan bersama. Sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Karnataka. Di sebuah desa di India itu, umat Hindu ramai-ramai membangun Mushala di wilayahnya. Semangat rakyat Purtageri, yang berada 500 kilometer dari Bangalore, larut dalam kerukunan antarumat beragama

untuk membangun secara bersama-sama reruntuhan Mushala. Mushala yang telah berumur 50 tahun dan berlokasi di permukiman Hindu itu, memang sudah saatnya direnovasi. Diantara 150 keluarga yang beragama Hindu, sebanyak 20 umat Islam tetap giat melaksanakan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing. Saat itulah umat Hindu setempat memperlihatkan kerukunan antarumat beragamanya.

Inklusivitas Islam di India tersebut akan dapat meningkatkan mobilitas ekonomi umat dan menjadikannya sebagai agama yang banyak diminati oleh masyarakat India, karena misi kedamaian dan keselamatan yang dibawanya. Hal ini menjadi faktor utama menjadikan Islam sebagai kekuatan baru di India.

M. Relasi Agama dan Politik

Tahun 2018 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia, boleh dikatakan bahwa jargon menjadi pemimpin seakan dambaan setiap orang. Puluhan Partai Politik dideklarasikan. Ratusan janji terucap. Beragam trik politik dipertontonkan. Semuanya mengklaim; sayalah yang paling layak menjadi orang nomor satu. Demikianlah kenyataannya. Setiap kita menyaksikannya di berbagai media masa, baik cetak maupun elektronik. Tanpa terasa, hampir setiap kita hanyut dalam obrolan politik. Semuanya memberikan komentar dan pendapat, kritik dan pujian, serta prediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Sejumlah pakar politik merinci secara detail seluk beluk dunia politik, dan memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah air. Nampaknya saat ini, benar-benar dunia politik mendominasi pentas kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Sulit ditolak bahwa politik memegang komando jalannya bangsa ini di tengah arus percaturan berbagai fenomena dan kebobrokan anak bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama rendahnya akhlak pemimpin yang dipertontonkan di hadapan rakyatnya.

Mengapa hal tersebut di atas menjadi fenomena perpolitikan bangsa ini, apakah agama yang mereka anut tidak lagi mempengaruhi jalannya pikiran politik, atau agama dipolitisasi untuk kepentingan sesaat, sehingga nilai-nilai agama dipinggirkan. Bagaimana bisa agama dan politik bersatu. sebab seringkali orang mengartikan yang namanya agama itu hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Agama berperan mengoreksi politik yang menyimpang dari tujuan mulianya menyejahterakan rakyat dan politik mesti pula membangkitkan kesadaran agama untuk tidak terbuai dalam permainan politik lalu melupakan fungsi kritis agama dan sikap membisu agama terhadap aktivitas politik.

Hemat penulis, tema di atas menjadi menarik untuk ditelaah dan dibahas secara serius, karena sebentar lagi masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Mereka yang terpilih akan mengatur pemerintahan lima tahun mendatang.

Agama merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Bahkan suatu hal jika tanpa membawa-bawa agama terkesan biasa saja, namun setelah membawa agama maka akan menarik berbagai orang untuk memperdebatkannya. Demikian juga dalam bidang politik. Betapa Politik yang melibatkan agama sangat ramai dalam pro kontranya dibandingkan politik yang tidak melibatkan agama.

Agama adalah kepercayaan kepada yang hidup abadi, dimana diakui bahwa dengan pikiran dan kemauan Tuhan, alam ini diatur dan kelakuan manusia diperkuat. Menurut Zakiyah Darajat; “Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari pada manusia”. Dengan demikian agama adalah: “kesatuan sistem kepercayaan dan praktik yang menyatu dalam sebuah komunitas moral tunggal, semua melekat pada-Nya”. Misalnya, Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh fenomena kehidupan. Islam adalah akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, budaya dan undang-undang, ilmu dan hukum, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemerintahan dan umat, Negara dan tanah air.

Semestinya agama menarik garis pisah yang jelas dari politik agar tidak terkooptasi dan disubordinasi. Karena ketika dikooptasi politik negara, agama hanya akan menjadi alat di tangan kekuasaan negara untuk mendapatkan legitimasi. Agamapun akan membisu ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran merajalela. Namun di sisi lain agama sebagai sebuah institusi dalam masyarakat harus pula mengoreksi politik agar hakikat sejati politik tetap terpelihara. Garis itu bengkok, saling tindih, atau apapun hasilnya, amat tergantung pada kecermatan kita untuk selalu mencari format baru dan tepat dalam membangun hubungan agama dan politik.

Sedangkan *politik* atau *politikos*, yang berarti *dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara*. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan demikian, Politik adalah [proses](#) pembentukan dan pembagian [kekuasaan](#) dalam [masyarakat](#) yang antara lain berwujud proses [pembuatan keputusan](#), khususnya dalam [negara](#) dan pemerintahan. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara [konstitusional](#) maupun [nonkonstitusional](#). Berarti politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah pemimpin dan kepemimpinan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam al-Mawardi “sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa

setiap orang dari umat Islam wajib mengangkat pemimpin untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Saw dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia”.²⁵⁵

Dalam komunitas Islam misalnya, masih saja terdapat berbagai bentuk dan corak pemikiran yang berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwa memasuki dunia politik adalah aib yang harus segera disingkirkan. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan dan banyak di antara mereka yang melenceng jauh dari tujuan. Karena mereka mengira bahwa politik adalah perbuatan setan yang sama sekali tidak layak bagi umat Islam. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pemilu mereka memberikan suaranya kepada penguasa yang jahat, akhlaknya rendah dengan tujuan untuk mendapatkan *pulus* (uang atau duit), demokrasi digadaikan, amanah diperjual belikan dan nepotisme.²⁵⁶ Menurut kelompok ini, perbuatan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama, mengundang bala dan bencana seperti yang dialami Indonesia saat ini.

Akhir-akhir ini, Negara Islam di seluruh belahan dunia, sedang mengalami nestapa. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Islam, termasuk Indonesia, banyak menghadapi tantangan politis, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Ricard Nixon misalnya menyatakan, “*berinteraksi dengan dunia Islam ibarat berada dalam jurang sempit yang dipenuhi dengan ular-ular beracun*”. Tidak ketinggalan Francis Fukuyama dalam bukunya ‘*The End of History*’ mengatakan “*orang-orang fundamentalis Islam lebih dari sekedar kaum Fasisme Eropa*”. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan senada, yang sengaja dilontarkan untuk merusak citra Islam di mata dunia. Ditambah lagi dengan realitas bahwa sebagian besar para pemimpin Islam menunjukkan perilaku amoral dan akhlaknya rendah, sehingga kekuatan dan kehebatan Islam itu tertutup oleh buruknya akhlak pemimpin. Di samping itu, umat Islam masih menghadapi tantangan-tantangan lain yang tidak kalah beratnya seperti tantangan demokrasi, pluralism, liberalism, terorisme, anarkhisme dan sebagainya, yang menjadi ancaman serius terhadap eksistensi umat dan budaya keislaman.

Penulis mendukung apa yang dikatakan oleh Hajriyanto Thohari, bahwa ke depan perlu diadakan perubahan sistem pemilu, baik legislatif maupun pilpres untuk menghasilkan DPR dan pemerintahan yang efektif. Sekarang ini, politik biaya tinggi, dimana hanya caleg dengan kemampuan dana yang besar yang mempunyai peluang menang. Sementara semangat UUD 1945 pasal 22 ayat 3, lebih menekankan pada kepartaian dan bukannya pada personal caleg. Apalagi UU pemilu itu menyebutkan peserta pemilu itu parpol dan bukannya caleg. Tetapi de facto sekarang ini peserta

²⁵⁵Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus –Sulthaaniyyah wal Wilaayatud Diiniyyah*, hlm. 3.

²⁵⁶ Disebutkan oleh al-Hakim (IV/92), “*Barang siapa diberi tugas (mengurusi) kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang sebagai pejabat karena nepotisme, maka baginya laknat Allah. Allah tidak akan menerima perbuatan dan tidak pula keadilan darinya sehingga menyebabkan Dia memasukkannya ke dalam neraka jahannam*”. Hadis ini berasal dari Abu Bakar. Al-Hakim berkata; sanad-sanad hadis ini shahih.

pemilu adalah para caleg. Meski menurut konstitusi peserta pemilu itu partai, tapi substansinya di lapangan malah mendistorsi aturan itu sendiri, dengan terjadinya konflik kepentingan antara caleg di internal partai sendiri. Itu juga tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia, tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa, musyawarah dan mufakat dan sebagainya, karena kompetisi politik yang sangat liberal. Akibatnya, dalam setiap pemilu sarat dengan transaksional politik uang.²⁵⁷ Memang realitasnya dalam proses politik pemilu 2018 ini, setiap partai dan caleg akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi, sehingga memberikan potensi yang tinggi pula untuk terjadinya korupsi. Oleh karenanya, ke depan sistem politik itu harus diperbaiki, dan tak bisa Negara ini dibangun dengan sistem politik yang transaksional. Hal itu tidak boleh dibiarkan, apalagi terbukti tidak menghasilkan DPR dan pemerintah yang baik dan efektif. Sebab, Negara ini akan baik, kalau anggota DPR dan penyelenggara pemerintahan ini adalah negarawan dan memiliki wawasan kebangsaan, bukan politikus.

Pada kelompok lain mengatakan, untuk menuju sasaran Islam pada kehidupan yang seutuhnya diperlukan strategi politik meraih kekuasaan yang berbasis ketauhidan dan keimanan. Umat Islam adalah umat yang dulunya bersatu, lalu menjadi terpecah-pecah karena penjajahan. Kemudian setiap kelompok diberi nama. Pergerakan Islam muncul karena menentang dan berjihad melawan musuh-musuh Islam dalam rangka untuk mengembalikan kesatuan umat. Dengan berlalunya zaman, sebagian umat Islam lupa kepada tujuan mereka yang utama ini. Mereka mulai mengajak (berdakwah) atas nama-nama yang telah diberikan oleh para penjajah itu, sehingga merekapun menjadi partai-partai yang bermacam-macam, yang dicekoki dengan fanatisme partai yang kotor. Oleh karena itu syarat utama pemimpin yang dimaksud adalah orang yang beriman,²⁵⁸ sebagaimana Firman Allah SWT:

²⁵⁷ Harianto Thohari (Wakil Ketua MPR RI), *Sistem Politik Harus Diperbaiki*, Harian Waspadana, 25 Pebruari 2014, hlm. A5.

²⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Berdasarkan buku berjudul "*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*" yang diterbitkan oleh Erlangga, dimuat salinan fatwa tersebut. Yakni, pada halaman 867 dengan bab Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Isinya adalah: 1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama. 3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunya kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib**. 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram**.

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).

Maka dari itu, seorang muslim yang sadar tidak pantas untuk selalu mengasingkan diri dan mencela perpolitikan, tidak pantas hanya beribadah saja tanpa memperdulikan aspek mu'amalahnya (interaksi), tidak pantas menjadikan akhlak jauh dari kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan sosial. Justru perpolitikan diberikan nuansa akhlak atau dengan kata lain 'politik bermartabat' yang berbasis nilai-nilai agama. Bukan mempolitisasikan agama, dan mengagamakan politik. Bagaimana menjadi politik itu sebagai ibadah, karena ibadah memiliki keterkaitan dengan kehidupan, kehidupan dengan politik, dan belum pernah ada pemisahan antara jiwa ibadah dengan jiwa politik. Sebab, kata-kata *ibadah* (yang didahului dengan kata-kata "Allah Akbar") mengandung aspek-aspek politik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan realitas kehidupan. Umat Islam sekarang harus menjadi kepribadian baru, yaitu bukan terpisah dari kehidupan masyarakat, tetapi kepribadian yang memiliki pandangan mendasar dan harga diri unggul dan peradaban yang tinggi. Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Musthafa Muhammad Thahhan; "kata-kata politik di sini bukan berarti kelalaian terhadap intelektual, ruhiyah dan ibadah. Akan tetapi seluruhnya adalah satu dalam keseimbangan yang membentuk kepribadian muslim yang *haraki* dan *rabbani*".²⁵⁹

Sejarah membuktikan, eksistensi bangsa Indonesia turut mengakar dan ditopang oleh nilai-nilai pluralitas agama dan kemajemukan budaya yang telah terpatri dalam dari generasi ke generasi. Pluralitas agama merupakan salah satu basis berdirinya bangsa ini, jadi ia bukanlah fenomena yang baru muncul. Dalam hal ini prinsip sekularisasi yang radikal adalah pengabaian dan alineasi diri dari basis sejarah yang mengeroposi fondasi dan meruntuhkan seluruh eksistensi bangsa. Karena itu agama dan berbagai persoalannya tetap urgen dalam agenda politik bangsa kita. Drama politik hanya memainkan lakon-lakon persaingan dan perjuangan kepentingan kelompok atau partai dan perebutan kursi kekuasaan. Karena itu drama politik di tengah masyarakat pun muncul dalam diskusi-diskusi mengambang dan tidak berbobot, hanya tahu saling menuduh dan mencari jalan untuk menjatuhkan lawan. Hal ini menyebabkan masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok kepentingan yang

²⁵⁹ Musthafa Muhammad Thahhan, *Tahaddiyat Siyasiyah Tuwajihu al-Harkah al-Islamiyah*, Al-Markaz al-Alami li al-Kitab, Terj. Pustaka Zamzami, 2003, hlm. 15-25.

saling bersaing dan menyulut konflik berbahaya. Semestinya hal itu tidak terjadi di negeri yang beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi kebhinnekaan.

Jika kita buka lembaran sejarah agama-agama, maka akan ditemukan bahwa masalah sosial politik merupakan akibat logis saja dari setiap usaha menjalankan suatu ajaran atau wawasan secara kelembagaan. Kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, pernah menyaksikan tampilnya dengan megah Negara-negara agama, seperti Sriwijaya yang Budha dan Majapahit yang Hindu. Sebelum abad ke-18, agama Kristen di Eropa juga menyatu padu dengan kekuasaan politik, tercermin dalam sebutan “Kemaharajaan Romawi Suci”, *Holy Roman Empire* misalnya. Agama Yahudi juga mewujudkan nyata dalam politik atau kenegaraan, sehingga para pemimpin mereka yang disebut “*Messiah*” adalah sekaligus pemimpin agama dan politik. Demikian juga yang pernah terjadi pada masa Nabi Saw, sewaktu beliau di Madinah, agenda politik kerasulan telah diletakkan dan beliau bertindak sebagai Utusan Allah, Kepala Negara, komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Saw di kota hijrah itu adalah refleksi dari ide yang terkandung di dalam kota berperadaban berbasis ajaran Islam.

Ada tiga kemungkinan skenario politik keagamaan.: *Pertama*, agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat yang berwadahkan keorganisasian dalam masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi keagamaan tersebut. Prinsip utamanya adalah “Agama adalah Agama”. Dalam kenyataan, sukar menemukan pada abad global ini suatu institusi agama yang tidak tercemar sama sekali dengan pergumulan duniawi di luar dari agama. *Kedua*, Agama dan Negara terikat satu sama lain (Integralistik) dalam pengertian agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara seperti institusi politik, ekonomi, hukum dan lainnya. *Ketiga*, Agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis tanpa guncangan. Setiap kali ada gejolak sekecil apapun, langsung diredam oleh negara (pemerintah) sehingga keseimbangan tercapai kembali.

Dalam agama Kristen, khususnya keristenan di Indonesia. Sebagai suatu proses yang tidak pernah berhenti, eksperimintasi berteologia politik mereka telah dicatat sejarah pada masa penjajahan. Bahkan dapat dikatakan unik, sebab upaya itu tidak

berangkat dari laboratorium intelektual, tetapi justru dari kalangan publicans, seperti Pattimura yang melakukan gerakan politik dengan mengangkat senjata di Maluku dan Manullang dan kawan-kawan di tanah Batak yang melakukan bentuk-bentuk penyadaran dan pengorganisasian yang mengusung tema-tema kemandirian dan kerja keras. Pada masa-masa pembebasan diri dari penjajahan, orang-orang kristen juga telah melakukan bentuk-bentuk teologia yang operasional dengan mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagian merubah diri menjadi partai politik. Kita dapat mencatat perkumpulan sosail Mardi Pratojo yang kemudian menjadi Partai Perserikatan Kaum Kristen (PKC) atau Christelijke Ambonche Volksbond (CAV), dll. Hal yang sama juga terjadi pada saat Indonesia merdeka. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) hadir sebagai bagian dari upaya dan proses berteologia politik secara operasional. Muatan atau tema-tema yang diusung dan dikomunikasikan kepada orang-orang kristen adalah dari dan demi kepentingan 'orang kristen'. Sesuatu yang seringkali dikatakan orang sebagai lebih berpolitik 'teknis' ketimbang berpolitik 'etis'. Disadari atau tidak, telah terjadi pembiaran yang berkepanjangan dalam tataran konseptual teologia politik kristen di Indonesia. Dasar berpijak dalam tabung 'independensi' gererja, dalam realitasnya seringkali diterjemahkan sebagai netralitas dan sterilisasi politik dalam semua ruang gereja.

Orang kristen harus menghormati kewibawaan pemerintahan dunia selama kebijakan itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tetapi kebijakan itu tidak boleh mengambil alih kewibawaan atau wewenang Allah. Bagaimana seharusnya orang kristen sebagai warga negara menaati lembaga-lembaga resmi negara yang mengatur kehidupan masyarakat dalam usahanya menegakkan kebenaran dan keadilan kesejahteraan masyarakat ditulis di Roma 13:13. Sikap orang kristen terhadap politik ada 3 bersifat antagonistic, rejektif, dan menyesuaikan. Respon yang benar itulah yang lebih penting dan menentukan sikap terhadap berbagai gejolak politik yang terjadi. Allah menghendaki orang kristen taat kepada pemerintah, sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Allah. Tentunya pemerintah harus mempertanggung jawabkannya kepada pemberi kekuasaan yaitu Allah sendiri. Jika orang kristen tidak taat kepada pemerintah dan berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab maka citra kekristenan akan rusak. Orang Kristen harus mengakui lembaga pemerintahan yang diadakan oleh karena kehendak Allah.

Demikian juga halnya dalam agama Buddha, memiliki pandangan sendiri terhadap politik, dalam pendekatan mereka politik adalah kemoralan dan tanggung jawab penggunaan kekuatan masyarakat. Sang Buddha mengkotbahkan Tanpa Kekerasan dan Kedamaian sebagai pesan universal. Beliau tidak menyetujui kekerasan

atau penghancuran kehidupan dan mengumumkan bahwa tidak ada satu hal yang dapat disebut sebagai suatu perang 'adil'. Beliau mengajarkan, "Yang menang melahirkan kebencian, yang kalah hidup dalam kesedihan. Barang siapa yang melepaskan keduanya baik kemenangan dan kekalahan akan berbahagia dan damai". Sang Buddha tidak hanya mengajarkan Tanpa Kekerasan dan Kedamaian, Beliau mungkin guru agama pertama dan satu-satunya yang pergi ke medan perang secara pribadi untuk mencegah pecahnya suatu perang. Beliau menguraikan ketegangan antara suku Sakya dan suku Koliya yang siap berperang atas air Sungai Rohini. Beliau juga meminta Raja Ajatasattu supaya jangan menyerang Kerajaan Vajji. Sang Buddha mendiskusikan penting dan perlunya suatu pemerintahan yang baik. Beliau memperlihatkan bagaimana suatu negara dapat menjadi korup, merosot nilainya dan tidak bahagia ketika kepala pemerintahan menjadi korup dan tidak adil. Beliau berbicara menentang korupsi dan bagaimana suatu pemerintahan harus bertindak berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Suatu kali Sang Buddha berkata, "Ketika penguasa suatu negara adil dan baik para menteri menjadi adil dan baik; ketika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi adil dan baik; ketika para pejabat tinggi adil dan baik, rakyat jelata menjadi baik; ketika rakyat jelata menjadi baik, orang-orang menjadi adil dan baik". (Anguttara Nikaya).

Agama Buddha dapat atau harus tidak terlibat dalam proses politik, yang merupakan suatu realitas sosial. Bagaimanapun kehidupan anggota masyarakat dibentuk oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan, aturan-aturan ekonomi, lembaga-lembaga, yang dipengaruhi oleh penataan politik dari masyarakat tersebut. Namun, jika seorang umat Buddha berharap untuk terlibat dalam politik, dia harus tidak menyalahgunakan agama untuk memperoleh kekuatan politik. Juga tidak dianjurkan bagi mereka yang telah melepaskan kehidupan duniawi untuk menjalani suatu kehidupan agama yang murni untuk secara aktif terlibat dalam politik.

Dalam masyarakat Hindu saat ini, banyaknya orang-orang yang beragama Hindu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini merupakan salah satu wujud dari keterbukaan kasta yang dulunya menjadi doktrin yang sangat mengikat bagi strata kehidupan umat Hindu. Dalam keikutsertaannya dalam politik, orang-orang Hindu cenderung tidak mencampuradukan antara agama dan politik. Akan tetapi dalam keikutsertaannya dalam politik, orang-orang Hindu tersebut tetap berpedoman pada agama yang mereka anut. Seperti prinsip *Ahimsa*; cinta tanpa kekerasan (*Not Violence*), *Satyagraha*; Berpegang teguh pada Kebenaran, yg dijalankan dgn penuh pengorbanan sebagai hukum kehidupan, dan *Swadesi*; gerakan yg menganjurkan agar menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri (*nasionalisme*)

Memahami realitas sejarah di atas, Nurcholish Madjid mengemukakan keunikan Islam di antara agama-agama. Dalam telaah perbandingan yang lebih luas dengan

agama-agama lain, sesungguhnya keunikan Islam bukanlah adanya terkaitan erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang sangat erat dengan politik, jika tidak boleh dikatakan menyentuh atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain berada dalam pandangan-pandangannya tentang politik yang menurut ukuran kemanusiaan sangat maju, sebagaimana yang diakui oleh Robert N. Bellah, seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, bahwa praktek politik Islam itu berlandaskan pada :

1. Kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan atau prestasi.
2. Pemimpin ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka, dan sesuai keadaan.
3. Semua warga masyarakat dan Negara, yang disebut *ummat*, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berdasarkan pandangan persamaan manusia di depan Allah dan Hukum-Nya.
4. Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui ada pada golongan agama-agama lain, sebagaimana tercantum dalam Piagam *Madinah*.²⁶⁰

Penekanan perhatian pada soal agama sebagai lembaga, merupakan konfigurasi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Karena itu apa yang kita harapkan menjadi cukup jelas. Agama memang mesti terbuka terhadap persoalan-persoalan politik, tetapi sistem politik yang bernafaskan ajaran agama harus membuktikan dirinya bahwa sistem itu sungguh-sungguh dibekali oleh pengertian agama yang benar, integral dan seimbang. Sistem politik kita saat ini tidak hanya menghadapi paradigma pluralitas agama dan berbagai persoalan yang timbul darinya. Tetapi ada paradigma-paradigma lain yang sedang ditawarkan dan menuntut sikap yang bijak dalam menghadapinya agar tidak terjerumus dalam bahaya-bahayanya yang mengancam kehidupan bangsa.

Barangkali sudah saatnya sistem politik kita diarahkan kembali kepada kemungkinan menjalin sebuah model relasi dengan agama. Agama, selain sebagai sistem kepercayaan dan sistem interaksi sosial, juga merupakan sistem kaidah bertingkah laku. Ajaran-ajaran moral dalam agama sekurang-kurangnya dapat memberikan orientasi bagi para pemeluknya yang sekaligus warga negara dalam menghadapi berbagai gelombang paradigma. Di samping itu prinsip-prinsip dasar moral agama dapat dimanifestasikan oleh sebuah kebijakan politik sebagai pedoman umum bagi semua warga negara. Dalam model ini relasi antara agama dan politik jauh lebih mendalam dan bernilai daripada sekedar relasi yang bersifat institusional yang dapat menyulut konflik dan perpecahan. Pada dasarnya ini pula yang merupakan

²⁶⁰ Baca; Nurcholish Madjid, *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani*, dalam buku; T. Jacob (pengt), *Membangkor Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 79-85.

model relasi yang dapat saling menguatkan untuk ditauladani oleh mereka yang merasa sebagai pemimpin bangsa saat ini, agar bangsa ini menjadi maju, kuat, aman, adil dan bermartabat.

Pada bagian akhir tulisan ini, kita ajak kesadaran nurani yang paling dalam dari para pemimpin dan penguasa negeri ini untuk mencontoh 'politik kerasulan' yang telah terbukti membawa keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak saja diakui oleh kalangan sejarawan muslim, namun juga diakui oleh para sejarawan non muslim, salah satunya adalah Michael H. Hart mengatakan Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa sebagai pemimpin dunia.

Paling tidak ada lima rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad. **Pertama**, sejak kecil sudah ditempa untuk siap menderita. **Kedua**, beliau memimpin dengan keteladanan dan akhlak, tidak saja dengan akhlakul karimah, tapi juga dengan akhlakul 'azimah, yaitu dengan perilaku mulia dan keyakinan yang penuh dengan nilai-nilai agama. **Ketiga** adalah, *satunya kata dengan perbuatan*, alias jujur. Sikap *siddiq* yang ditampilkan beliau berhasil merubah perilaku umat. **Keempat**, adalah *punya sandaran vertikal yang kuat*. Walaupun Nabi Saw adalah orang yang maksum tanpa dosa dan dijamin Allah Swt masuk surga, namun ia tetap beribadah semaksimalnya. **Kelima**, adalah *punya sahabat yang solid, tangguh dan setia*. Artinya membangun *teamwork* yang dilandasi oleh keimanan dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan berbagai perubahan.²⁶¹

Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar seperti dua orang bersaudara yang dilahirkan dari satu perut yang sama Oleh karena itu wajib bagi seorang penguasa untuk menyempurnakan agamanya dan menjauhkan hawa nafsu, bid'ah, kemungkar, keragu-raguan dan setiap hal yang mengurangi kesempurnaan syariat". "sesungguhnya tabi'at rakyat merupakan tabi'at dari para penguasa". Orang-orang awam melakukan perbuatan yang merusak karena mengikuti perbuatan para pembesar, mereka meneladani dan mencontoh tabiat para pembesar, seperti yang terjadi pada sejarah al-Wahid bin Abdul Malik dari keturunan bani Umayyah memiliki kegemaran terhadap bangunan dan pertanian, maka dengan serta merta rakyat dan bangsanya turut meneladani, tetapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik kegemarannya makan, jalan-jalan dan memperturutkan syahwat maka seluruh rakyatnya meneladani dan mengikutinya.²⁶²

²⁶¹Baca; Michael H. Hart, dalam bukunya: *The 100, a Ranking of The Most Influential Persons in History*. Terj. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1989, hlm. 27-34.

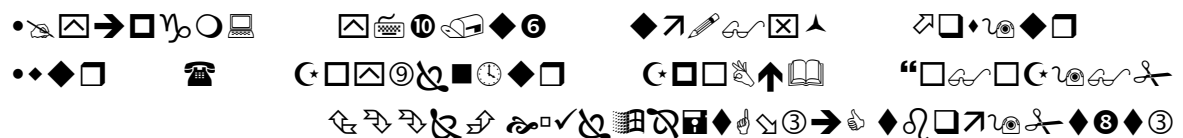
²⁶² Dalam Islam sudah ada aturan-aturan yang berkaitan tentang pemimpin yang baik diantaranya : 1. Beriman dan Beramal Shaleh, 2. Niat yang Lurus, 3. Tidak Meminta Jabatan, 4. Berpegang pada Hukum

Jadi benang merah pembentukan masyarakat bangsa dan Negara berkehendak membentuk tatanan kehidupan yang memiliki etika moral yang berlandaskan agama adalah harus diawali dengan penataan kepemimpinan yang bersifat komprehensif, tidak saja presidenya akan tetapi seluruh komponen kepemimpinan; wakil rakyat, penegak hukum, pemegang kekuasaan di bidang perekonomian, pendidikan dan seluruh unsur birokrasi pelayanan rakyat harus ditata kembali.

Pemimpin negara, wakil rakyat dan seluruh pemegang kekuasaan dari gubernur sampai ke tingkat pemerintahan dan tokoh masyarakat, etika dan moralnya harus merujuk kepada agama. Tidak ada lagi pemimpin yang dzalim kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Umar : " Sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, diwahyukan kepadanya empat perkataan; Allah berfirman , Wahai Adam, Ilmumu dan Ilmu keturunanmu terdapat dalam empat perkataan, yaitu satu perkataan untuk-Ku, satu perkataan untukmu, satu perkataan antara Aku dan engkau, serta satu perkataan antara engkau dan manusia; Perkataan untuku adalah sembahlah Aku dan jangan menyekutukan Aku, Perkataan untukmu adalah Aku akan menyelamatkanmu dengan ilmumu, Perkataan antara engkau dan Aku adalah engkau berdoa dan Aku yang akan mengabulkan, perkataan antara engkau dan manusia adalah berbuat adil dalam urusan mereka, dan berbuat adil lah diantara mereka".

Pada bagian akhir tulisan ini, yang ingin penulis katakan adalah Apabila pergerakan Islam mampu memanfaatkan kesempatan pesta demokrasi ini dengan baik, terkordinir dengan rapi, dan mampu bermain cantik, menjadikan Islam sebagai satu kekuatan masyarakat yang hakiki, maka pemilu yang sedang dan akan berjalan menjadi milik umat Islam. Pada gilirannya Islam bisa menjalankan undang-undang, sistem dan tugas sebagai wakil rakyat (legeslasi) dengan cara-cara yang terhormat. Kita juga harus yakin bahwa masa sekarang sudah melebihi batas ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada orang yang memahami zamannya dan menjalankan politiknya dengan lurus, demokrasi dan aplikasinya.

Perbedaan pasti akan terjadi, karena hal itu merupakan sunnatullah sekaligus rahmat bagi kekuatan kekhalifahan manusia di muka bumi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah tabiat manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman :



Allah, 5. Memutuskan Perkara Dengan Adil, 6. Menasehati rakyat, 7. Tidak menerimas hadiah, 8. Tegass, dan 9. Lemah Lembut.

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (QS. Hud: 118).

Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan 'politik kerasulan' dan menteladani perilaku, perbuatan dan perjuangannya, sehingga kebenaran universal Islam itu dapat dikordinir dengan baik untuk mengalahkan segudang kebathilan, dan yakinlah kebathilan itu akan lenyap. Negeri inipun akan mampu bangkit dari berbagai keterpurukan, kemerosotan akhlak, dan keterbelakangan. Dari karakteristik di atas, mungkin bisa menjawab siapa calon pemimpin berkualitas dan berintegritas yang layak kita pilih, apakah ada [calon pemimpin](#) yang memenuhi kriteria tersebut? kalau ada silahkan dukung dan pilih, dan kalau tidak ada bagaimana? apa mau dikata carilah yang mendekati kriteria itu.

Sesungguhnya suatu negara agar tetap eksis sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya, apabila akhlaknya mulia maka bangsa itu akan jaya, dan sebaliknya jika akhlak bangsanya tercela maka akan mendatangkan bencana. Akhlak atau moral lebih utama daripada ilmu, artinya dengan akhlak seseorang akan dihormati, dan belum tentu orang yang berilmu tapi tak berakhlak dihormati, sebab orang berilmu tanpa akhlak cenderung menggunakan ilmunya pada jalan yang salah dan merugikan orang lain.

Sejak reformasi sampai saat ini semakin terlihat berbagai kejahatan tersistemik dan kekerasan menjadi fenomenal yang tidak asing lagi dan telah menyita perhatian publik karena wujudnya sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial yang akut dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada kondisi sosial, suasana perpolitikan, sistem ekonomi, metode pendidikan, pengamalan agama, sudah terjadi berbagai penyimpangan dan kehilangan arah (*disorientasi*) menuju kehancuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Anicetus B.Sinaga (Ketua Keuskupan Agung Medan) bahwa terdapat empat malapetaka bangsa yang utama yaitu narkoba, korupsi, pornografi, dan anarkisme atau kekerasan. Tidak hanya pada masyarakat awam, tapi sangat memperhatikan pelakunya adalah pada sebagian kelompok elit dan para pemangku moral di negeri ini. Pemangku moral yang dimaksudkan adalah *premus interparus* (tokoh kunci di masyarakat), baik sebagai penguasa, pimpinan ormas keagamaan, penegak hukum, maupun tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Disamping hilangnya kepercayaan masyarakat (*distrust*) terhadap penyelenggara negara. Saat ini dipertontonkan di hadapan publik kebobrokan, keserakahan, dan kejahatan sistemik para pemangku moral. Dimana dalam kompetisi tidak siap untuk kalah sehingga terjadi *dualisme*, antara lembaga satu dengan yang

lainnya saling mencaci maki, menghina, memojokkan, bahkan saling menjatuhkan, elit bertikai masyarakat tersulut dan bentrok, tawuran warga anarki. Penyalahgunaan narkoba mengancam masa depan bangsa, Sumatera Utara merupakan juara kedua di Indonesia pengguna narkoba dengan 3 % dari penduduknya. Ditambah lagi semakin mengguritanya koruptor, kejahatan merajalela, maraknya aksi begal dan sebagainya.

Sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, dimana citra umat yang melorot akibat jarak antara ajaran dan pengamalan, lenyapnya atau berkurangnya control sosial disebabkan proses urbanisasi, industrialisasi dan mekanisasi. Tokoh panutan di masyarakat seperti pemuka agama, budayawan, kalangan professional tidak lagi mampu melakukan kontrol sosial akibat dari pengaruh kehidupan pragmatisme yang lebih mengutamakan materi dari pertimbangan moral, disamping juga keterlambatan mereka mengikuti serta beradaptasi dengan perubahan sosial itu. Sehingga peran tokoh agama semakin tidak efektif akibat materialisme, pragmatisme dan politisasi agama yang menerjang mereka. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan idealisme beragama dan moralitas para tokoh agama, mengupaya pemberdayaan agamawan sebagai pemandu umat menuju kemajuan dan Indonesia bermartabat .

Saat ini sudah terjadi degradasi persaudaraan yang akut, hampir di semua level komunitas umat, akibat perbedaan kepentingan dan pragmatisme agamawan. Semakin menghebatnya rivalitas dan kompetisi dalam memperebutkan status sosial yang tinggi, kekayaan serta jabatan, tanpa memperhitungkan moralitas, dan bertindak kasar yang tidak lagi mengindahkan norma kesopanan. Mengatasnamakan rakyat, tapi penghianat. Mengatasnamakan Tuhan, tapi tak takut azab Tuhan. Katanya membela kepentingan rakyat, kenyataannya memperkaya diri dan rakus kekuasaan. Sehingga menurunnya peran Pemangku moral dalam sektor-sektor strategis akibat privatisasi kehidupan umat beragama. Bermoralakah mereka ?

Untuk itu sudah mendesak membuat kebijakan yang berpihak pada reaktualisasi nilai-nilai pancasila dan religiusitas sebagai rujukan moral bangsa, dan arah pembangunan nasional, agar masyarakat hidup nyaman, rukun, sejahtera dan bermartabat, antara lain:

Pertama, Perlu peningkatan terhadap pemahaman persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathoniyah*) dan perluasan koridor ukhuwah tersebut sebagai *networking* umat, disamping melakukan revitalisasi agama dalam sektor-sektor strategis melalui peran lembaga-lembaga keagamaan. Sekaligus adanya ketegasan dalam penegakkan hukum yang berkeadilan kepada siapa pun di negeri Pancasila ini.

Kedua, Memperkuat peran Pemangku moral dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dalam mensosialisasikan nilai-nilai humanis agama. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara

yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis). Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*) dan moralitas dalam hubungan antar-manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketiga, untuk penguatan karakter dan penegakkan moral bangsa, perlu kesadaran bersama dan sinergisitas pemerintah dengan pilar kerukunan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda) untuk merevitalisasi nilai-nilai moral penegak hukum dan karakter bangsa. Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak *berketuhanan* yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan. (2) watak *kebangsaan* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia. (3) watak *kebersamaan* yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multikultural dan akomodatif terhadap kebenaran. (4) watak *keadaban* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab. (5) watak *kejuangan* yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan patriotisme.

Keempat, Penguatan karakter dan moral bangsa adalah menjadi sebuah keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui “*gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa*”, yang disertai dengan sikap keteladanan para pemangku moral dan pemimpin bangs. Gerakan itu perlu juga diarahkan ke dalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “Moral birokrasi”, “Moral politik”, “Moral bisnis”, “Moral penegakan hukum”, dan sebagainya. Semoga negeri ini selamat dari kehancuran.

N. Arah Baru Nalar Kerukunan Merawat NKRI.

Sebagai Negara yang baik sesungguhnya perlu peneguhan terhadap kesejarahan dan kepeloporan para pendiri bangsa (*foundhing Fathers*), bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia dan oleh karena itu harus dipertahankan keutuhannya. Artinya, Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis dan kristalisasi nilai-nilai agama yang telah mengakar di Indonesia secara lamiah. Indonesia adalah rumah bersama bagi semua elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten dari zaman berzaman.

Memasuki abad Millenium ketiga, para pemikir dan cendikiawan agama mencoba melakukan reorintasi, reformasi, rekonstruksi dan semacamnya terhadap misi

profetis agama guna menempatkan signifikansi agama dalam dialektika peradaban umat manusia. Karena itu harus difahami bahwa inti dari pandangan *sui generis* itu adalah keinsafan terhadap sesuatu yang supernatural, sesuatu yang gaib. Untuk menunjukkan yang gaib, tidak dapat dipastikan secara rasional. Tidak mungkin menjelaskan kepada seseorang tentang kegaiban itu, kalau mereka itu tidak tahu. Analisis tentang *numenus*, hanyalah suatu keterangan tentang suatu pengalaman yang menimbulkan perasaan-perasaan yang dari suatu pihak yang lain mempesonakan. Inilah satu kesadaran yang sama sekali tidak bersifat duniawi, bukan inderawi, bukan dari pengalaman panca indera, melainkan dari dasar batin manusia, sumber sejati dari segala pengalaman beragama. Sumber perasaan itu harus dibedakan dengan segala kemampuan jiwa yang lain, dibedakan dari kemampuan untuk berpikir, dari kemampuan untuk berbuat baik.

Cobalah kita renungkan apa sesungguhnya arti dari kenyataan sederhana ini, ketika ahli teknologi dan informasi menyebut dunia ini semakin “kecil” ternyata ahli antropologi menyebut dunia ini semakin “besar”. Kalau yang pertama menggunakan kata word (*singular*), maka yang kedua boleh jadi (meskipun hanya pengandaian) menggunakan kata worlds? (*plural*). Yang pertama melihat dunia semakin kecil sebab dengan kecanggihan teknologi transportasi dan informasi dunia ini semakin mengglobal dalam segala aspek. Namun, bagi ahli antropologi, di tengah dunia yang semakin global itu sesungguhnya persoalan anak manusia semakin kompleks, rumit, dan beragam.

Dalam suasana yang demikian itu, kira-kira apa yang sedang dipikirkan oleh ahli agama dalam kaitannya dengan masa depan manusia di dunia ini? Penulis membayangkan bahwa ahli agama saat ini bisa diibaratkan bagai seorang yang sedang duduk di kamar belajar, yang kebetulan disediakan televisi guna mengetahui berita-berita penting dunia. Dichelah kegiatan membaca ia menyaksikan spektrum di televisi yang menayangkan kehidupan keagamaan didunia, dua puluh tahun terakhir. Kitab suci agama-agama mengajarkan adanya titik temu antar agama-agama, tetapi ia menyaksikan dilayar televisi bagaimana dunia kembali dilanda konflik yang menggunakan kekerasan yang dibelakangnya tersangkut agama tadi merumuskan apa yang harus dilakukan umat beragama untuk menghadapi masa depannya di bumi ini.

Konflik yang melanda umat beragama dua puluh tahun terakhir dapat dirumuskan sebagai berikut:

Di Timur Tengah terjadi konflik yang melibatkan orang-orang Islam dan bukan Islam. Dibeberapa bagian dunia lainnya meluas pula konflik keagamaan baik intern agama maupun antara agama. Konflik intern agama Kristen terjadi antara kaum Protestan dan kaum Khatolik di Irlandia Utara. Konflik intern agama Islam berlangsung antara Iran dan Irak, Kuwait, selain itu di Timur Tengah khususnya kawasan pantai timur laut tengah berkecamuk berbagai konflik dengan warna agama:

antara Yahudi melawan Muslim dan Kristen, antara Kristen melawan Islam : antara Kristen lawan Kristen dan antara Islam lawan Islam – Sunni, Syi’ah, dan Druz di Libanon.

Di Asia Selatan konflik dengan warna keagamaan terjadi antara Hindia melawan Islam. Hindu lawan Khatolik, Hindu lawan Sikh terutama di Punjab, Hindu lawan Budha di Ghurka, India sebelah Timur, dan konflik antara Tamil lawan Sinhala di Srilangka. Wilayah Asia Tenggara juga dilanda oleh konflik agama. Di Myanmar dan Muangthai konflik antara Islam dan Budha, di Filipina antara Khatolik lawan Islam. Terakhir pembantaian dan pengungsian umat Islam di Bosnia. Semua itu, meskipun agama bukanlah satu-satunya faktor konflik, tetapi agama sangat berperan didalamnya.²⁶³

Apakah agama-agama yang ada hari ini atau sebagiannya telah saling menghancurkan, mengharapkan dapat berperan di masa depan sebagai suatu pengulangan kekonyolan sejarah perang ratusan tahun antara penganut agama di masa yang lewat, atau yang akan berperan itu adalah agama yang sama sekali baru semisal spiritualismenya Naisbitt Aburdene atau Thomas Jafferson. Tetapi saya berkeyakinan bahwa agama yang berperan di masa depan itu adalah agama yang hari ini atau sebagiannya: agama yang dapat mengembangkan “Teologi inklusif” agama yang dianut oleh mereka yang mempunyai kesanggupan menggali titik temu agama-agama yang diajarkan kitab suci, bukan terhenti pada aspek luar berupa konsumsi emosi keagamaan apalagi mengklaim hal itu sebagai misi agama secara dangkal.

Dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, di kalangan penganut agama selalu terjadi dua bentuk sikap; pertama, saling menghargai dan menghormati itu berjalan secara tidak sadar’. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. Misalnya karena sama-sama mendiami dunia yang satu manusia tidak pantas jika saling membunuh, saling menindas, saling mengusir atau karena sama-sama satu bangsa dan negara spantasnyalah umat beragama saling rukun demi cita-cita bersama. Kedua, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain itu muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama – agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.

Bentuk sikap pertama diatas seringkali dibina secara dialog dan mengusahakan saling tenggang rasa serta “menabukan” masalah “sara”. Akan tetapi perlu disadari bahwa sikap seperti ini seringkali lebih dangkal dan rapuh, mudah terpancing jika terusik emosi keagamaannya, bahkan seringkali mengorbankan cita-cita bersama

²⁶³ Bandingkan Nurcholish Madjid, *Meninggalkan Kemutlakan Jalan Menuju Perdamaian*, dalam Prisme No. 9 Tahun 1986, hlm. 41-42.

hanya karena ketersinggungan emosi keagamaan. Pada sisi lain sikap semacam ini lebih memungkinkan untuk tidak jujur dalam kesepakatan keragaman. Misalnya umat yang lebih kuat dalam bidang politik dan ekonomi melakukan penindasan terhadap yang lebih lemah meskipun dengan kedok kemanusiaan, perdamaian dunia dan macam-macam.

Sedangkan bentuk sikap kedua yang dilatarbelakangi oleh kesadaran akan adanya titik temu yang mendaar di antara agama-agama dikembangkan dengan penggalan titik temu tersebut dengan mempelajari secara mendalam, agama sendiri tidak mengenal agama lain secara objektif. Sikap seperti ini biasanya tidak munafik, selalu jujur dan tidak mengorbankan kerukunan hanya karena riak-riak kecil yang mengganggu hubungan antar agama. Agaknya sikap kedua ini lebih prospektif bagi masa depan umat manusia di dunia ini. Jika demikian halnya pernyataan yang muncul kemudian adalah apakah seorang penganut agama dapat mempelajari agama lain dengan penuh penghargaan dan simpatik?

Memang, untuk mencari titik temu agama-gama itu, dituntut dari kita kesediaan untuk mempelajari berbagai agama, bukan hanya aspek ritual dan ibadah, apalagi hanya pengamatan terhadap agama lain lewat kenyataan sejarahnya, tetapi dituntut lebih dalam sampai ke aspek mendasar semisal ketuhanan dan nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama. Sekali lagi, harus berdasarkan kitab suci, bukan tingkah laku penyimpangan para penganutnya. Sebab pada tingkat pemahaman yang demikian itulah dengan meminjam istilah Frithjof Schuon aspek esoterisme agama-agama²⁶⁴ dapat di jumpai titik temu agama-agama, paling tidak dikalangan agama samawi, dan ditingkat itu pulalah terletak masa depan bersama anak manusia.

Pengalaman keagamaan seorang Huston Smith barangkali bermanfaat untuk diketengahkan disini. Saat ia mengikuti khutbah seorang pendeta yang bertemakan “Kristen sebagai fenomena dunia” di sebuah gereja pada hari yang disebut hari Minggu persatuan umat kristen sedunia. Pada kesempatan yang sakral itu sang pendeta menjelaskan bahwa Kristen saat itu telah menjadi fenomena dunia; dari gubuk-gubuk yang terbuat dari tanah liat di Afrika sampai rumah-rumah salju yang terbuat dari bongkahan es di Labrador, “Umat Kristen pada hari ini demikian pendeta, “berlutut untuk menerima santapan Ekaristi Kudus. Memang uraian itu sangat mengesankan namun sembari mendengarkannya pikiran Smith menerawang menembus tembok gereja tempat mereka beribadah mengglobal di seluruh anak manusia dipermukaan bumi. Dan menuliskan penerawangan pikirannya sebagai berikut :

Sembari mendengar khutbah tersebut, saya teringat akan orang lain yang menyembah Tuhan dengan cara lain pula, yang jumlahnya jauh lebih besar, saya

²⁶⁴ Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religius*, Harper & Row, Publisher, New York, 1975.

teringat akan orang Yahudi dalam sinagogaya di Yerusalem, yang duduk bersila di lantai tanpa sepatu, berselimut jubah bersembahyang, saya juga teringat akan (ratusan juta) orang muslim yang menyelesaikan puasanya di Mekkah: kemudian dirumahnya yang kecil di tepi sungai gangga di kaki gunung Himalaya. Swami Ramagrishana menyepi sepanjang hari; dan rahib-rahib zee di Kyoto sudah bangun sejak jam tiga pagi dan sampai jam sebelas malam akan duduk bersila tanpa gerak merenungkan dengan sungguh-sungguh hakikat sang Budha, saya teringat akan terletak pada inti dirinya sendiri.

Betapa anehnya persahabatan ini, demikian Smith, anak manusia di berbagai tempat dalam detik yang sama dengan berbagai cara menyebutkan nama Tuhan. Bagaimanakah bunyi suara itu bagi-Nya? Bagaikan angin ribut, atau secara misterius semua suara itu berpadu menjadi suatu harmoni? Apakah suara satu kelompok merupakan melodi utama, atau semua bagian yang menjadi suatu paduan suara yang merdu?.²⁶⁵

Di antara kita tidak ada yang bisa memberi jawaban yang pasti terhadap pertanyaan hati nurani Smith diatas, dan tulisan ini tidak berpretensi membenarkan penerawangan pikiran Smith itu, apalagi mengacaukan keyakinan umat beragama terhadap agamanya masing-masing. Tetapi yang ingin dikemukakan adalah bahwa ada satu hal yang perlu dipikirkan umat beragama saat ini jika mereka sama-sama ingin hidup berdampingan di masa depan, yaitu mencari aspek perbedaan untuk diperdalam masing-masing tanpa mengevaluasi keagamaan orang lain dalam aspek perbedaan itu.

Jika saja umat beragama memiliki kesungguhan untuk mempelajari kitab sucinya, insya Allah segera mereka akan menemukan bahwa kitab-kitab suci mengajarkan adanya titik temu agama-agama. Banyak kutipan – kutipan yang dapat dikemukakan untuk membuktikan proposisi ini. Memang, boleh jadi pendekatan itu lebih bersifat normatif, tapi tampaknya dari sinilah kita harus mulai membangun tatanan dunia baru (*The New World Order*) dalam kehidupan beragama yang lebih harmonis.

Al-Qur'an misalnya menggagaskan pencarian titik temu itu dalam beberapa prinsip. *Pertama*, Al-Qur'an menggagaskan keuniversalan ajaran Tuhan. Artinya ajaran agama-agama itu (khususnya agama samawi) semua bersumber dari Tuhan yang satu sebagaimana Firmannya :

Dia telah menyari'atkan bagi kamu tentang apa yang lebih diwariskan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah

²⁶⁵ Huston Smith, "The Religion of Man", terj. *Agama-Agama Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 1-2.

kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah mengenainya (Q.S. Al-Syura:13).

Prinsip *kedua* yang ditekankan Al-Qur'an menyangkut titik temu agama-agama itu adalah kesatuan nubuwwah (kenabian) para nabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara, bahkan Dr. Musthafa Al-Siba'iy menyebutkan bahwa tidak ada kelebihan utamaan di antara rasul-rasul itu dari segi risalah.²⁶⁶ Selain persaudaraan nabi-nabi, Al-Qur'an juga menegaskan persaudaraan orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya:

Katakanlah (hai orang-orang yang mukmin), kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ismail, Ishaq, dan Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya (Q.S.2/Al-Baqarah).

Berdasarkan dua prinsip diatas Al-qur'an juga mengaggaskan prinsip *ketiga* yaitu bahwa aqidah tidak dapat dipaksakan bahkan harus mengandung kerelaan dan kepuasan. Petunjuk Tuhan untuk ini amat lah jelas di antaranya: Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. (Q.S.10/Yunus:99)

Mengomentari ayat ini Abdullah Yusuf Ali, seorang musafir modern mengatakan bahwa orang yang tak beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tak beriman, dan terutama sekali ia harus dapat menahan diri dari godaan melaksanakan kekerasan, misalnya memaksa iman kepada orang lain dengan paksaan fisik atau dengan paksaan orang lain semisal tekanan sosial (politik dan ekonomi). Membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukanlah iman, mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah tuhan yang memberi hidayah-Nya.²⁶⁷

Begitulah Al-Qur'an mengaggaskan hidup berdampingan antara manusia yang menganut berbagai agama, gagasan yang didasarkan pada kenyataan adanya titik temu di antara agama-agama itu. Nabi Muhammad Saw dalam pelataran sejarah mempraktekkan gagasan itu secara tulus dan jujur. Tulus dan jujur adalah dua kata

²⁶⁶ Mustafa al-Siba'iy, *Min Rawa'I Handharatina*, Dar al Irsyad, Beirut, ttp.

²⁶⁷ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, Amana Corporation, New York, 1989, hlm. 505. Komentari 1480.

kunci bagi kelangsungan kebersamaan itu. Sebab jika tidak ada kejujuran, kelompok yang kebetulan kuat akan menindas kelompok yang lemah, meskipun dengan dalih perdamaian, stabilitas dan lain-lain. Sebaliknya jika tidak ada ketulusan boleh jadi yang minoritas akan mengkhianati titik temu itu dengan dalih keadaan mereka yang sedang tertinda atau dalih-dalih lain kedua-duanya telah terbukti dalam sejarah anak manusia dipermukaan bumi. Pengkhianatan kesepakatan itu telah menyebabkan piagam madinah tidak dapat berjalan secara aktif pada masa-masa selanjutnya, dan bukan tidak mustahil karena kurang kejujurnya kelompok yang kuat untuk mentaati titik temu itulah yang menyebabkan kelompok agama yang dibantai dan diusir di Bosnia saat sekarang ini.

Akan tetapi satu yang perlu diingat, bahwa dalam menggagaskan titik temu itu Al-Qur'an tidak sendirian, sebab nash-nash suci agama-agama lain juga menggagaskannya. Banyak kutipan yang dapat dikemukakan untuk itu. Dalam kristiani mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia (mat.22:37); Rum:10; Kor: 4-7 dan 13). Salah satu ayat yang sangat mengesankan pentingnya penghargaan terhadap titik temu adalah termuat dalam Matius 5:43-45.

Kamu telah mendengar firman : kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar (Matius. 5:43-45).

Dalam kisah Rasul-rasul di jelaskan pula: Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga (Kis. 17:28). Hal ini dapat dipahami bahwa segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya satu juga, karena Allah menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.

Nash-nash di atas memperhatikan bagaimana kitab suci mengisyaratkan pentingnya kerelaan berbuat baik dan berpikir jernih terhadap orang lain dengan mengambil contoh yang sangat ekstrim yakni "musuh". Sehingga segera kita dapat menangkap bahwa jangan takut terhadap orang yang beragama lain, terhadap musuh pun kita disuruh berbuat baik.

Konferensi parlemen agama-agama sedunia yang diselenggarakan tahun 1993 itu menampakkan perbedaan yang cukup menonjol dari konferensi-konferensi sebelumnya. Sebab konferensi yang disebut terakhir bertujuan bukan lagi mencari kesatuan dan kesamaan berbagai agama untuk melawan cara hidup yang tidak beragama, melainkan mencari suatu landasan bersama yang di atasnya semua budaya dunia saling bertemu dalam suasana saling menghormati, serta dapat hidup dalam keanekaagaman agama secara global tanpa kehilangan identitas mereka masing-masing.

Begitulah, tokoh-tokoh agama sedunia pada saat itu telah mencoba mencari kebersamaan semua agama dalam usaha menciptakan hidup yang berkah, bagaikan sebuah aliran sungai yang memberi kesuburan pada tanah yang gersang, yang didalamnya bukan hanya orang beragama, bahkan yang tidak beragama pun dapat menikmati kesejahteraan. Tentu hal ini merupakan sebuah latihan untuk menatap era globalisasi dari multi budaya di masa mendatang.

Dengan demikian, kesan yang dapat ditangkap dari konferensi ini adalah adanya suatu masa depan yang cerah bagi kerjasama umat beragama dalam suasana yang lebih damai dan tenteram, tanpa terjadi yang dinamakan kompromi akidah. Dunia tampaknya memang tidak dapat mengharapkan agama yang satu bagi semuanya, namun disadari bahwa dunia sangat membutuhkan satu etika. Sehingga hasil akhir dari konferensi itu dirumuskan dalam suatu deklarasi yang disebut Global Ethics (Etika Global) yang dapat memayungi segenap umat manusia dalam kelangsungan hidupnya.

Metode berpikir seperti dirumuskan dalam deklarasi ini tentu bukan berarti mengabaikan peran agama, bahkan sebaliknya merupakan gagasan untuk memerankan agama dalam membangun tata masyarakat dunia baru, seperti yang pernah dilukiskan Peter I. Berger, bahwa setiap masyarakat manusia berada dalam suasana usaha itu.²⁶⁸ Dikatakan demikian, karena etika global itu nilainya diambil dari nilai-nilai universal yang diajarkan agama-agama.

Itulah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang di atasnya ditegakkan kebudayaan Islam. Seluruh kaum muslimin diwajibkan mempercayai keseluruhan nabi dan rasul. Orang beriman diharuskan menghargai dan menghormati semua nabi utusan Allah, diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain baik dalam tindakan, perkataan, maupun dalam hati, bertetangga, saling melindungi, dan lain-lain. Agama Islam mewajibkan kepada pemerintah (Islam) untuk menjaga keselamatan tempat – tempat ibadah setiap umat beragama. Pemerintah tidak diperkenankan menzalimi mereka dalam bidang hukum, dan diharuskan memperlakukan sama antara mereka dengan rakyatnya yang muslim mengenai hati dan kewajiban bermasyarakat. Pemerintah diwajibkan pula memelihara kehormatan semua umat beragama, memelihara hak hidupnya, memperbaiki masa depannya, sebagaimana pemerintah Islam itu memelihara, memperbaiki kehormatan, hak hidup dan masa depan umat manusia agar memiliki harkat dan bermartabat di sisi manusia dan Tuhan.

²⁶⁸ Every human society is an enterprise of world building. Religion occupies a distinctive in this enterprise. Lihat Peter I. Berger, *The social reality of Religion*, Penguin Books, 1973, hlm. 13.

GLOSSARIUM

Absolut; berasal dari bahasa Inggris, absolute yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang mutlak, seperti kebenaran, keadilan dan sebagainya, dan berarti pula sesuatu yang sesungguhnya dan sebetulnya.

Adat; secara harfiah berarti kebiasaan atau cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.

Agama; mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan-ikatan tersebut berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan tidak dapat ditangkap dengan pancaindra, ikatan-ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

Agama berarti pula ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Ahlul Kitab; Sebutan untuk keturunan yang menerima dan sekaligus berpegang kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-Kitab sebelum Al-Quran ialah wahyu Allah yang terkumpul kedalam Taurat, Zabur dan Injil.

Akidah; berasal dari bahasa Arab, *aqada* yang secara harfiah berarti menghubungkan dua ujung dari sesuatu secara kokoh. Dalam teologi akidah diartikan pokok-pokok keimanan yang didasarkan kepada dalil-dalil *qat'i*. Orang yang melepaskan diri dari ikatan tersebut dapat menjadi murtad atau keluar dari Islam. Akidah itu seperti percaya kepada adanya Allah, malaikat, hari kiamat, kehidupan di akhirat dan sebagainya.

Almasih; yang dijanjikan; dalam bahasa Ibrani bermakna yang diurapi, dan dalam bahasa Yunani disebut Christos yaitu Mesiah. Mesiah adalah gelar kehormatan bagi Yesus yang dinyatakan sebagai juru selamat. Dalam Islam, kata-kata almasih tidak semata untuk Isa, ternyata dalam Hadis Nabi Saw kata tersebut digunakan juga kepada “dajjal” (*almasihud dajjal*).

Alquran; secara harfiah berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan dalam arti yang umum digunakan adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, yang terhimpun dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan meyakinkan, disusun mulai dari surat alFatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.

Angket; adalah salah satu bentuk instrumen atau alat untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dalam suatu kegiatan penelitian. Angket tersebut dapat berupa poin-poin pertanyaan yang dirumuskan dari persoalan pokok dalam penelitian, dalam bentuknya yang sedemikian rupa, namun sederhana dan komunikatif, sehingga mudah digunakan.

Ayat; berasal dari bahasa Arab, *ayat* yang berarti tanda, ciri atau alamat. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menyatakan bagian-bagian kalimat yang terdapat pada suatu surat yang terdapat dalam Alquran.

Budaya; suatu istilah yang mengandung arti segala daya, cipta, rasa dan karsa yang dihasilkan oleh manusia. Bentuk budaya tersebut dapat berupa bangunan lengkap dengan arsitekturnya yang indah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, sastra dan lain sebagainya.

Definisi; berasal dari bahasa Inggris *definition* yang berarti ketentuan, ketajaman. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk memberikan batasan pengertian dari sesuatu. Misalnya, definisi agama, *ad-din* dan sebagainya.

- Demokratis;** berasal dari bahasa Inggris, *democratic* yang berarti sejajar dengan sesamanya dalam sikap, perlakuan dan pengambilan keputusan. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dari suatu kegiatan pemerintahan.
- Deskriptif;** berasal dari bahasa Inggris, *description* yang berarti gambaran atau lukisan mengenai sesuatu. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai cara atau metode dalam penulisan ilmiah atau penelitian yang mana data-data atau informasi dalam penulisan ilmiah dan penelitian dimaksud digambarkan apa adanya.
- Dialog;** dalam bahasa Arab disebut *mujâdalah* atau *munâzarah*, yaitu perdebatan atau bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris, *dialogue* yang berarti percakapan dwicakap. Istilah dialog berarti percakapan antara dua tokoh atau lebih, bersoal jawab secara langsung adalah sebuah percakapan timbal balik, saling mengemukakan dan mendengarkan pendapat. Dialog adalah upaya diagnosa dan sekaligus terapi dari kejahatan sosial. Dialog antaragama merupakan ekstensi dari dialog intra agama.
- Din;** berasal dari bahasa Arab, *al-dîn* yang secara harfiah berarti tunduk, patuh, hutang, balasan dan penyerahan. Kata ini selanjutnya digunakan untuk arti agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia yang wajib diikuti dan dipatuhinya.
- Dinamika;** berasal dari bahasa Inggris, *dynamic* yang berarti bersemangat, penuh daya dorong dan kemauan yang keras untuk mencapai sesuatu.
- Dogmatis;** berasal dari bahasa Inggris, *dogmatic* yang berarti seseorang yang fanatik, berpegang teguh dan kukuh terhadap suatu ajaran.
- Doktrin** berasal dari bahasa Inggris, *doctrine* yang berarti ajaran atau norma yang diambil dari wahyu yang diturunkan Tuhan, atau pemikiran mendalam dan filosofis yang diyakini mengandung kebenaran.
- Eksklusif;** berasal dari bahasa Inggris *exclusive* yang berarti sendirian dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, tidak ada sangkut pautnya dan berdiri sendiri, hanya untuk kepentingan diri sendiri.
- Eksoterik;** secara harfiah berarti pengetahuan yang boleh diketahui atau dimengerti oleh siapapun. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menggambarkan metode atau tata cara peribadatan yang dilakukan oleh masing-masing umat beragama.
- Esoterik;** secara harfiah berarti bersifat khusus, rahasia dan terbatas. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai pandangan bahwa agama sebagai realitas universal yang transenden dan telah dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental metafisis sebagai realitas tertinggi yang melampaui semua ketentuan dan batasan sebagai sesuatu yang absolut dan tak terbatas

Etnik atau etnis; yaitu bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya.

Etika; ilmu tentang hal yang baik dan buruk, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Globalisasi; berasal dari bahasa Inggris, *global* yang berarti sedunia, sejagat. Globalisasi berarti pula keseduniaan atau kesejagatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup antara bangsa-bangsa di dunia yang berlainan, namun sudah bersatu atau dipersatukan dengan bantuan teknologi komunikasi dan sebagainya.

Hadis; berasal dari bahasa Arab, *hadasa* yang berarti baru, atau perakapan. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk mengacu kepada suatu perkataan, perbuatan atau ketetapan yang berasal dari Rasulullah Saw.

Humanis; orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas- asas prikemanusiaan, manusia sebagai objek terpenting.

Kafir; adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan manusia yang tidak mau tunduk dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai yang wajib dipatuhi.

Multikulturalisme; adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki kultur dan struktur yang berbeda. Perbedaan ini bukan merupakan ancaman atas keberadaannya baik sebagai individu maupun kelompok. Dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas kehidupan di dalamnya, sehingga menjadi ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan individual maupun secara kebudayaan.

Moral; berasal dari bahasa Inggris, *moral* yang berarti akhlak. Dalam bahasa Arab akhlak adalah suatu perbuatan yang muncul dari kesadaran jiwa yang dalam yang dilakukan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Perbuatan tersebut telah mendarah daging, menyatu dalam pola pikirnya, dilakukan dengan mudah, sebanarnya, tanpa rekayasa dan dengan niat yang ikhlas.

Observasi secara harfiah berarti mengamati, memantau atau memperhatikan secara seksama. Istilah yang berasal dari bahasa Inggris ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi.

Pluralisme agama; (*Religious Pluralism*) ialah paham kemajemukan atau paham bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju inti dari

realitas agama. Semuanya dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan, namun tetap pada keyakinan bahwa agamanya yang benar.

Profetik; istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat kenabian, yaitu seorang pilihan Tuhan yang diberi wahyu dan membimbing ummat ke jalan yang benar. *Profetis* sebagai inti ajaran universal kenabian yaitu misi kemanusiaan.

Religi berasal dari bahasa Inggris *religare* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk nama dari suatu agama yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

Samawi; berasal dari bahasa Arab, *samâwi* yang berarti tinggi atau langit. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk mengacu kepada suatu yang diturunkan oleh Allah swt. Agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Misalnya, disebut agama samawi.

Sinkretisme; berasal dari kata *syn* dan *kreiosein*, yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan, sehingga yang bertentangan itu berpadu atau selaras. Ada juga yang mengartikan bahwa sinkretisme adalah suatu paham, agama atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan.

Toleransi; dalam bahasa Arab disebut *at-tasâmuh*, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada, sebagai manifestasi dari sikap yang memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Membiarkan warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Zainal Arifin, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1984.
- Abduh, Muhammad, *Al-Islam wa al Nashraniyyat ma'a al ilm wa al-Madiyyah*, Mesir, tt.
- Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran, Text Translation and Commantary*, Kutub Khana Ishayat ul-Islam, Delhi, India, 1983.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama, Normativitas atau Historitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 1995.
- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmad, S. Akbar, and Hastings Donnau, *Islam, Globalization and Postmodernity*, Routledge, London and New York, 1994.
- Ahmad, Saiyad Fareed dan Solahuddin Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama, dan Jawaban Islam Terhadapnya*, terj, Mizan, Bandung, 2008.
- Al-A'zami, M.M, *The Historiy of The Qur'anic Text From Revelation to Compilation*, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Al-Bakri, Solah Abdul Qadir, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, terj, Litera Antar Nusa, Bogor, 1989.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'âd Abd, *Mu'jam, al-Mufahras li Alfazd al-Qur'an*, Nur Asia, Indonesia, tth.
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Ali, A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Sunan kalijaga Press, Yogyakarta, 1988.
- Ali, Abdullah Yusuf, "Tha Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary," terj. Ali Audah, *Qur'an dan Terjemah dan Tafsirnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- Ali, Syed Ameer, *Api Islam, Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam Dengan Riwayat Hidup Nabi Muhamad,Saw*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafssir Al-Maraghiy*, terj. K. Umar Sitanggal, dkk. CV. Toha Putra, Semarang, 1988

- Amstrong, Karen, *Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis*, terj. Risalah Gusti, Surabaya, 2001.
- Amstrong, Karen, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, Ballantina Books, New York, 1993.
- Amstrong, Karen, *Holy War, The Crusades and Their Impact on Today's World*, A Division of Radom House, Inc, New York, 2001.
- Amstrong, Karen, *The Battle for God, A History of Fundamentalism*, Ballantina Books, New York, 2001.
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2005.
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, Published, Amerika, 1994.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, "Lababun Nuquuli Fii Asbabin Nuzuuli," terj. M. Abduh Mujieb, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Qur'an*, Daarul Ihya, Indonesia, 1986.
- Azra Khanam, *Muslim Backward Classes; A Sociological Perspective*, SAGE Publishing, India, 2013.
- Bahreisy, Salim, "Mukhtasyar Tafsir Ibnu Katsier, *Tafsir Singkat Ibnu Katsier*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993
- Bellah, N, Robert, *Beyond Belief, Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Paramadina, Jakarta, 2000.
- Bhaidawy, Zakiyuddin, *Dialog Global dan Masa Depan Agama*, MU Press, Surakarta, 2001.
- Borrmans, P. Maurice, *Pedoman Dialog Kristen-Muslim*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003.
- Bucaille, Maurice, "La Bible La Coran La Science," terj. H.M. Rasjidi, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, Universitas Columbia New York, 1988.
- Daya, Burhanuddin, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama*, LKiS, Yogyakarta, 2004
- Dean, Thomas, (ed), *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, University New York Press, Albany, 1995.
- Deedat, Ahmeed, *The Choise Dialog Islam-Kristen*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1999.
- Esposito, L, John, dkk, *World Religions Today*, Oxford University Press, New York, 2002.
- Gulpaigani, Ali Rabbani, *Menggugat Pluralisme Agama, Catatan kritis atas Pemikiran John Hick dan Abdul Karim Sourush*, Al-Huda, Jakarta, 2004.

- Hakim, A. Bashori (Ed), *Aliran, Faham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1975
- Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quran Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harahap, Syahrin, *Sejarah Agama-Agama, Ajaran dan Perkembangan*, Pustaka Widayarsana, Medan, 1994.
- Harir Dekmejian, *Islam and Revolution: Fundamentalism in The Arab World*, Syracus University Press, Syracus, 1985.
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam, Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Hidayat, Komaruddin, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Hidayat, Komaruddin, *Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi, Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 2003.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wat Ta'addudiyah: Al-Ikhtilaf wat Tanawwu fi Ithaaril Wihdah*, Darur Rasyad, Kairo-Mesir, Cet. I, 1418 H/1997.
- James S. Piscatory, *Islam in the Political Process*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
- Kahmad, Dadang, *Metode penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Khalil, Moenawar, *Definisi dan Sendi Agama*, Bulan Bintang, 1970.
- Khwaja Abdul Muntaqim, *Hindu-Muslim Unity and Love for India*, Kalpaz Publications, Delhi, 2014.
- Kimball, Charles, *When Religion Becomes Evil*, Harper Sanfrancisco, New York, 2002.
- Legenhausen, Muhammad, *Islam and Religious Pluralism*, Islamic Studies Departement, Alhoda Publisher and Printers, London, 1999.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1990
- Litle, David, dkk, *Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Lubis, M. Ridwan, *Membangun Kehidupan Umat Beragama, Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna*, Citapustaka Media, Bandung, 2003.

- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, *Agama Sebagai Sistem Kultur, Penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz dan Ilmu Sosial Interpretif*, IAIN Press, Medan, 2000.
- M. Abdullah Syarqaw, "Ar-Rodduh Jamil, Li Ilahiyat Isa bi Shorihil Injil," terj. Hasan Abrori, *Yesus Dalam Pandangan Al Ghazali*, Pustaka Da'i, Surabaya, 1994.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.
- Madjid, Nurcholish, *Islam; Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995.
- Naisbitt, John dan Aburdene, *The New Direction for 1990's; Megatrend 2000*, Megatrend Ltd, 1990.
- Nashir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Nasr, Sayyed Husein, *Intelegensi dan Spiritualitas Agama-Agama*, terj, Inisiasi Press, Jakarta, 2004
- Nielsen, S, Jorgan, *The Christian-Muslim Frontier; Chaos, Clash or Dialogue*, Victoria House-Bhoomsbury Square, London, 1998.
- Noovani, A.G. *The Muslims of India; A Documentary Record*, Oxford University Press, New Delhi, 2006.
- Nottingham, Elizabeth K, *Religion and Society*, Ramdon House, Inc, New York, 1954.
- Olef Schumann, *Pemikiran Keagamaan Dalam Tantangan*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Pals, L. Daniel, *Seven Theories of Religion*, Oxford University Press, New York, 1996.
- Parrinder, Geoffrey, *World Religions, From Ancient History to Present*, Fact on File, Publication, New York, 1984.
- Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, Adam Publisher, New Delhi-India, 2010.A.
- Pelikan, Jaroslav, (Ed), *The World Treasury of Modern Religious Thought*, Little, Brown and Company, London, 1990.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988
- Rahman, Fazlur, "Major Themes of the Qur'an", terj. Anas Mahyuddin, *Tema Pokok Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1983
- Raji al-Faruqi, Ismail, *Triologue of The Abrahamic Faith*, Amana Publications Beltsville, Maryland USA, 1995.
- Ridha, Muhammad Rasyid, "Al-Wahyul Muhammadly," terj. Josef C.D., *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1987.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, Bandung, 1997.

- Shihab, M. Quraish, *Membumi Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung 1992.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2006.
- Smith, Huston, *The Religions of Man*, Harper and Row, Publishers, New York, 1989.
- Suma, Muhammad Amin, *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- Sumartana, Th, dkk, *Dialog; Kritik dan Identitas Agama*, Dian Interfidei, Yogyakarta, ttp.
- Tanja, I, Victor, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial; Diskursus Teologi Tentang Isu-Isu Kontemporer*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1998.
- Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religions*, Columbia University Press, New York, 1966.
- Watt, W. Montgomery, *Islam dan Kristen Dewasa Ini, Suatu Sumbangan Pemikiran Untuk Dialog*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1991.
- Yewangoe, A.A, *Agama dan Kerukunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002.
- Yusuf Alqarzawi and A.Azhar Nadwi, *Islam Muslims and Non Muslim*, Adam Publisher, New Delhi-India, 2010.
- Zaman, Ali Noer (Ed), *Agama Untuk Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.



Untuk Cover Belakang :

Manusia sebagai makhluk beragama saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seakan "*homo homini lupus*" (manusia srigala bagi manusia lain). Belakangan ini secara transparan dipertontankan di hadapan kita, disana sini terjadi anarkisme, pembakaran rumah ibadah, mengusir dan membunuh orang yang sedang beribadah, kekerasan terhadap pemuka agama, teroris dan peledakan bom yang menewaskan banyak orang, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, rasisme, penembakan imam dan pemuka agama, pelarangan berhijab, pelarangan berpuasa dan lain sebagainya, sehingga manusia beragama haus dan dahaga terhadap

perdamaian dunia. Mereka sudah cukup lama membosani hubungan persengketaan dalam beragama.

Satu sisi, agama bisa merupakan jeritan dari manusia yang tertindas. Pada sisi lain, agama bisa juga menjadi sahabat setia dari mereka yang kesakitan, kesepian dan yang kehilangan harga diri. Agama juga tampil dalam semangat profetis yang tegar berbicara tentang perlunya pembaharuan masyarakat serta mengingatkan para penguasa untuk mengedepankan prike-manusiaan universal. Agama secara keseluruhan menampung seluruh pengalaman dialog yang berkesinambungan antara manusia dengan keabadian. Agama dalam hubungan ini tetap merupakan ruang pembebasan di mana segala harapan dan persoalan yang mereka hadapi bisa dipikirkan secara mendalam dengan menampilkan *Nalar Kerukunan*. Adakah cara yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kecuali dengan Nalar yang cerbih, lugas dan cerdas, tanpa pemaksaan dan kekerasan ?. Adakah cara yang lebih baik untuk membangun masyarakat kecuali dengan menghargai harkat dan martabat manusia dan juga menghargai hak hidup serta integritas dari keyakinan-keyakinan religius mereka ?. Inilah poin terpenting dalam buku ini, dan sayang jika anda lewatkan !